Membangun Tradisi Multikulturalisme di Provinsi Gorontalo

dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Roni Lukum

Membangun Tradisi Multikulturalisme di Provinsi Gorontalo

dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional

ideas PUBLISHING

IP.002.01.2021

Membangun Tradisi Multikulturalisme
di Provinsi Gorontalo
dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional

Roni Lukum

Pertama kali diterbitkan Januari 2021
Oleh Ideas Publishing
Alamat: Jalan Prof. Dr. Ir. Joesoef Dalie No. 110
Kota Gorontalo
Pos-el: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota IKAPI No. 001/GORONTALO/14

ISBN:

Penyunting : Prof. Dr. Rauf Hatu, M.Si.
Penata letak : Siti Khumaira Dengo
Desain sampul : Ilham Djafar
Ilustrasi : Freepik

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Daftar Isi v
Prakata ix

Bab I Pendahuluan 1
Permasalahan 1

Bab II Membangun Tradisi Multikulturalisme dalam Suatu Negara Kebangsaan (*Nation State*) 17

Bab III Interaksi Sosial sebagai *Toold* dalam Membangun Negara Multikulturalisme 39
A. Pengertian Interaksi Sosial 41
B. Proses Terjadinya Interaksi Sosial 44
C. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Keselarasan Sosial (Interaksi Sosial) 45
D. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 50
E. Upaya Membangun Keharmonisan melalui Konsep Kerukunan Antaretnis 52

Bab IV Lahir dan Tumbuhnya Konsepsi Etnisitas 63
A. Pengertian Etnisitas 65
B. Perkembangan dan Pembangunan Kelompok Etnis 70
C. Penyebaran Budaya Kelompok Etnis 73
D. Pandangan Mengenai Kelompok Etnis 74
E. Pengertian Etnis Lokal 77

Bab V Konsepsi Ketahanan Nasional sebagai Strategi dalam Membangun Negara Multikulturalisme di Indonesia 81
A. Konsepsi Ketahanan Nasional 81
B. Landasan Fundamental Ketahanan Nasional 83
C. Asas-Asas Ketahanan Nasional 86
D. Rumusan Tannas menurut GBHN (1978, 1983, 1988) 89

Bab VI Membangun Masyarakat Multikulturalisme dan Indikator Keberhasilan *Nation State* di Indonesia 105
A. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial 106
B. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Interaksi 108
C. Upaya Membangun Kerukunan Antaretnis 112
D. Indeks Ketahanan Nasional 117

Bab VII Fenomena *Nation State* di Provinsi Gorontalo Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Antaretnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali 123

A. Sejarah Desa Tri Rukun 125
B. Letak Geografis Desa Tri Rukun 126
C. Keadaan Demografis Desa Tri Rukun 127
D. Hubungan Interaksi antara Masyarakat Etnis Bali dan Etnis Gorontalo 131
E. Faktor-Faktor Penghambat Membangun Keharmonisan antara Etnis Lokal Gorontalo dan Etnis Bali dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme di Desa Tri Rukun dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah 146
F. Upaya Pemerintah Desa Membangun Keharmonisan Antaretnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme di Desa Tri Rukun dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah 154

Bab VIII Implikasi Membangun Keharmonisan Antaretnis Lokal Gorontalo Dengan Etnis Bali dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme terhadap Ketahanan Wilayah 161

A. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Ideologi 162
B. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Hukum 168
C. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Ekonomi 183
D. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Sosial Budaya 209
E. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Pertahanan Wilayah 235
F. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Keamanan Wilayah 263

Bab IX Realitas Negara *Nation State* melalui Model Negara Multikulturalisme antara Etnis Lokal Gorontalo dan Etnis Tionghoa di Provinsi Gorontalo 323

A. Kerja Sama 324
B. Kompetisi 327
C. Akulturasi 333
D. Pertentangan 345

Bab X Analisis *Nation State* melalui Model Multikulturalisme dalam Merajuk Keharmonisan Hubungan antara Etnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali dan Etnis Tionghoa di Provinsi Gorontalo 361

A. Kondisi Hubungan Antaretnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali 361

B. Interaksi Sosial antara Etnis Tionghoa dan Etnis Lokal di Daerah Kota Gorontalo 374

Bab XI Rekomondasi Hasil Riset dalam Membangun *Nation State* dengan Model Negara Multikultralisme di Daerah Provinsi Gorontalo 383

Daftar Pustaka 393

Biografi Penulis 495

PRAKATA

Penulisan buku ini dilakukan demi memenuhi kewajiban dosen dalam melakukan kajian ilmiah sehubungan dengan kualifikasi keilmuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, melalui kualifikasi keilmuan penulis menyampaikan peta jalan atau *roodmap* riwayat penulisan karya ilmiah yang pernah dilakukan dalam menganalisis kondisi daerah dalam kaitannya melihat indeks ketahanan wilayah di daerah Provinsi Gorontalo.

Penulisan buku ini diilhami dari beberapa penelitian yang kami lakukan secara tim dengan berfokus pada kajian multikulturalisme di daerah Provinsi Gorontalo. Buku pertama yang kami hasilkan adalah buku tentang membangun multikulturalisme di daerah kabupaten Pohuwato di Desa Banuroja Kecamatan Randangan pada tahun 2015. Selanjutnya, saya pribadi melakukan penelitian masih dalam kajian multikulturalisme tentang interaksi sosial antaretnis Arab dengan etnis lokal Gorontalo di Kota Gorontalo pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 kembali menulis hasil riset tentang membangun hubungan harmonis antaretnis Lokal Gorontalo dengan etnis Cina di Kota Gorontalo, dan terakhir menulis buku tentang Radikalisme di kalangan generasi mudah di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019.

Berdasarkan *roodmap* di atas, penulis melakukan riset tentang membangun hubungan harmonis antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali demi mewujudkan negara multikulturalisme di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dan Implikasinya terhadap ketahanan Wilayah. Hasil riset tersebut dikembangkan menjadi buku referensi dengan judul ***Membangun Tradisi Multikulturalisme di Provinsi Gorontalo dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional.***

Tujuan penulisan buku ini ditujukan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Pusat bagaimana membangun keharmonisan bagi daerah-daerah yang terdiri dari multietnis, multiras, multiagama dapat hidup rukun dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil riset Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dapat mewujudkan harapan membangun daerah dengan model multikulturalisme di dalam mewujudkan keharmonisan

antaretnis, dan buktinya hingga saat ini daerah Provinsi Gorontalo kehidupan warga masyarakatnya yang berbeda tradisi, berbeda agama, berbeda ras, berbeda pilihan politik dapat hidup berdampingan tenteram dan damai hingga saat ini. Substansi yang ada dalam buku ini lebih banyak mendeskripsikan tentang kehidupan warga masyarakat Gorontalo yang sangat toleran dalam menjalankan negara multikulturalisme.

Semoga prestasi membangun multikulturalisme di daerah Provinsi Gorontalo dapat dipertahankan di dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis

BAB I
PENDAHULUAN

Permasalahan

Cita-cita membangun negara multikulturalisme menjadi harapan semua negara termasuk Pemerintah Indonesia. Bila dilihat dari perjalanan Republik Indonesia dalam membangun *Nation State* dengan model negara multikulturalisme memang sudah dimulai di awal berdirinya republik ini sebagai suatu negara, yang kita ketahui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 secara *de fakto* dan secara *dejure* Republik ini ada pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengapa demikian karena sehari sesudah pernyataan kemerdekaan oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia mensyahkan UUD 1945 negara Republik Indonesia resmi sebagai satu negara telah memasukan pasal-pasal dalam konstitusi beberapa prinsip-prinsip negara dengan model negara multikulturalisme. Ini berarti bila dikaji dari sempurnanya pendirian negara harus memiliki syarat formil dan syarat materil.

Syarat formilnya pembentukan negara terdiri atas:

1. harus ada wilayah;
2. harus ada pemerintah yang berdaulat;
3. harus ada rakyat;
4. adanya pengakuan dari negara lain dan paling utama pengakuan dari PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Namun, pembetukan negara tidak hanya syarat formalnya, tetapi harus didukung oleh syarat materilnya. Syarat materilnya resmi berdirinya satu negara, bila negara itu telah merumuskan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam negara. Bila ini tidak dirumuskan lebih awal pada saat pendirian negara, negara Indonesia bukan menjadi negara dalam bentuk republik, tetapi negara dalam bentuk monarki. Mengapa karena syarat mutlak berdirinya negara dalam bentuk republik secara materil harus memiliki sumber hukum tertinggi sebagai dasar kebijakan dari manajemen negara, dan sebagai kontrol bagi masyarakat atau warganya dalam menuntut haknya pada negara. Dengan demikian republik ini ada secara resmi pada saat *The Pounding Fathers* merumuskan konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan memasukan prinsip-prinsip model negara multikulturalisme di dalam pasal-pasal konstitusi (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis.

Bila ada pertanyaan apakah negara kita benar-benar sebagai negara bangsa atau *nation state* dengan model negara multikulturalisme, dapat dilihat dari komitmen *The Founding Fathers* dalam membuat sistem bernegara. Sistem negara yang sesuai dengan bangunan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme adalah bila negara tersebut melaksanakan nilai-nilai negara dengan model multikulturalisme. Model multikulturalisme dapat diana-logikan sebagai model negara yang menjujung sistem demokrasi. Di mana negara dengan sistem demokrasi adalah salah satu pencirinya adalah negara yang melaksanakan model negara multikulturalisme.

Mengapa demikian, karena model negara multikulturalisme sangat mengedepankan nilai-nilai akseptansi dan *out putnya* adalah toleransi antarsesama warga negaranya.

Dengan demikian, bila kita menghendaki negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme, maka dapat dilihat dari dasar negara dan konstitusi yang digunakan oleh suatu negara. Artinya, bila dasar negara sebagai falsafah negara tidak memuat penghargaan kepada keyakinan dan kepercayaan warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut bukan negara multikulturalisme. Pada dasarnya negara multikulturalisme menganut prinsip *egalitarian* artinya setiap warga negara dan penyelenggara negara harus memberikan penghormatan yang tinggi kepada semua bentuk perbedaan, baik itu ras, etnis, agama dan kepercayaan, dan kebudayaan dari berbagai penduduk yang menjadi warga negara dari satu negara.

Prinsip *egalitarian* sebagai modal dalam mengelola negara dengan warga negaranya. Bila dalam suatu negara hanya lebih memprioritaskan salah satu etnis mayoritas, akan menjadi permasalahan dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme.

Permasalahan yang muncul di negara kita adalah fenomena konflik yang dilatar belakangi hanya karena perbedaan ras, etnis, Agama dan kepercayaan serta perbedaan kebudayaan. Misalnya, yang terjadi di Jawa Timur kepada mahasiswa etnis Papua yang merendahkan martabat etnis Papua mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dapat digunakan dalam konteks interaksi sosial. Demikian halnya sebagian dari etnis Papua tidak mengakui sebagai warga negara Indonesia, yang seharusnya menghargai dan menghormati bendera negaranya. Apa yang terjadi pada oknum mayararakat Jawa Timur terhadap etnis mahasiswa Papua, merupakan salah satu kesalahan kita dalam melakukan interaksi sosial.

Seharusnya tragedi itu tidak harus terjadi, bila warga masyarakat menghargai perbedaan sebagai prinsip dasar melaksanakan negara multikulturalisme.

Dengan melihat fenomena konflik antaretnis, antarras, antaragama di atas menunjukkan ada sesuatu yang salah di negeri yang kita cintai ini. Akan tetapi, kesalahan tersebut tidak tunggal dilakukan oleh salah satu komponen bangsa ini. Kesalahan ini sangat komprehensif ada karena kesalahan warga negara yang gagal paham menerapkan negara multi-kulturalisme dan ada juga unsur kesengajaan dari kelompok, baik itu oknum pemerintah atau kelompok partai politik atau golongan tertentu yang sengaja membenturkan sesama warga negaranya. Padahal sistem bernegara kita sangat mengakomodasi negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme. Akan tetapi, pada saat melaksanakan konsep dengan model ini lagi-lagi kita melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun dengan tidak disengaja. Pernyataan disengaja bila konflik antaretnis, antaragama dan kepercayaan, dan ras ada yang menungganginya hanya karena mewujudkan ambisi politik kekuasaannya. Ambisi kekuasaan politik dapat diartikan mereka yang sengaja membenturkan warga negaranya dengan isu-isu berbau SARA dan akhirnya mayarakatnya terpancing dengan isu tersebut dan akhirnya terjadi konflik. Sementara itu, yang tidak disengaja terjadi karena oknum pemerintah atau oknum anggota partai politik dan masyarakat yang belum memahami dan mengamalkan model negara multikulturalisme tersebut.

Untuk meminimalisasi provokasi terhadap stabilitas di negara kita, sudah saatnya kita komitmen dalam menjalankan negara multikulturlalisme. Memang juga bila kita kaji bangsa Indonesia merupakan Negara multikultural di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai keturunan yang terdiri dari berbagai etnik yang hidup di Negara Republik Indonesia.

Kondisi ini merupakan rahmat bagi pemerintah Republik Indonesia apabila dari kehidupan keanekaragaman tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menyadari akan bahaya ancaman dari kondisi tersebut sehingga sudah saatnya pemerintah mengupayakan kehidupan antaretnik dengan hidup rukun di antara sesama etnik tersebut. Dengan memilih model negara multikulturalisme di dalam merajuk keharmonisan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Bila dilihat kondisi Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang besar dikarenakan tirdiri dari ribuan pulau, yaitu 17.504 baik dari yang besar sampai yang terkecil, bukan hanya itu Indonesia dikenal juga dengan negara yang memiliki bermacam-macam budaya, agama, suku, etnis, ras, serta bahasa yang kurang lebih terdapat 726 bahasa. Hal tersebut menjadikan Indonesia di mata dunia sebagai suatu negara yang beraneka ragam, pluralis dan multi cultural, hal ini tentunya sebagai suatu potensi yang besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi suatu negara yang maju baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan, maupun sosial budaya.

Kondisi ini merupakan rahmat bagi pemerintah Republik Indonesia apabila dari kehidupan keanekaragaman tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Selain dengan bentuk keragaman tersebut mampu menjadikan Indonesia negara yang kaya akan keanekaragamannya, di sisi lain juga memberikan berbagai macam dampak terhadap Negara Indonesia sendiri, kemajemukan budaya, kemajemukan etnisitas yang ada di Indonesia jika tidak dikelolah dengan baik akan menjadi penyebab timbulnya konflik. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menyadari akan bahaya ancaman dari kondisi tersebut sehingga sudah saatnya pemerintah mengupayakan kehidupan antaretnis tersebut dengan pola

hidup rukun di antara sesama etnik tersebut melalui model negara multikulturalisme.

Di Indonesia, kurang lebih terdapat terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan UUD 1945 telah dikatakan pada pasal 18 UUD 1945 pemerintah Republik Indonesia menghargai kehidupan keanekaragaman dengan fakta bahwa negara memberikan daerah berkembang berdasarkan kearifan lokalnya, seperti Daerah Istimewa Yokyakarta, Daerah Istimewa Jakarta (DKI Jakarta) dan Daerah Istimewa Aceh melaksanakan sistem desentralisasi dengan memerhatikan keanekaragaman daerahnya sehingga dengan ketentuan pasal tersebut memberikan harapan agar setiap warga Negara Republik Indonesia diberi kesempatan untuk saling menghargai satu sama lain. Dalam arti negara menaruh harapan setiap warga negara untuk tidak mengabaikan warga negara lain hanya karena perbedaan etnis, agama dan ras. Demikian juga dengan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap warga negara yang berbeda status sosialnya. Karena negara dibentuk demi tujuan kesejahteraan bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun dengan dasar negara kita Pancasila mengamanatkan negara untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kemajemukan etnis yang ada di Indonesia yang telah diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal ini ditunjukan melalui makna sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila ke empat dan sila ke lima Pancasila dan diatur melalui landasan instrumental sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UUD 1945 pada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disyahkan sebagai warga negara itulah yang menjadi warga negara Republik Indonesia.

Dengan ketentuan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 di atas sebagai aturan tertinggi di negara kita, inilah yang harus dijadikan pijakan pemerintah dalam menjaga hubungan antaretnis di Indonesia. Bila kita konsisten dengan ideologi negara Pancasila, serta konsisten terhadap konstitusi harapan kita bersama bahwa negara Republik Indonesia tetap ada artinya tidak akan mengalami apa yang disebut dengan *failed state* tidak akan terjadi. Bila pemerintah dan warga masyarakat Indonesia menjujung tinggi Dasar Negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi di negara kita (Lukum, 2016: 1).

Definisi etnis menurut Fredrick Barth etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat istiadat dan tradisi.

Dari berbagai penyebaran etnisitas yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia sehingga setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki etnis lokal daerah dan berbagai macam etnis pendatang. Hal ini tentunya menyebabkan masyarakat lokal atau etnis lokal bisa mengalami gesekan dengan etnis pendatang bila tidak menyadari akan pentingnya hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai macam etnis yang masing-masing yang memiliki berbagai macam perbedaan. Jika perbedaan yang dimiliki oleh setiap etnis yang berada di setiap daerah tidak mampu disikapi dengan bijaksana oleh

setiap masyarakat yang beretnis lokal mapun pendatang tentunya hal tersebut akan menjadi salah satu pemicu konflik yang ada di Indonesia dan akan menyebabkan runtuhnya pertahanan nasional suatu negara.

Banyak negara-negara yang tidak mampu memertahankan kedaulatan negaranya, hanya karena perbedaan pandangan warga negaranya, khususnya hanya dipicu oleh kondisi warga negaranya yang berbeda etnis, berbeda agama dan berbeda ras. Pada akhirnya etnis yang merasa diperlakukan oleh negara tidak adil mendirikan negara baru. Kasus seperti ini terjadi di negara Yugoslavia dan negara adikuasa Unisoviet. Negara Yugoslavia yang tadinya merupakan satu negara kini menjadi beberapa negara merdeka (Yugoslavia, Serbia, dan Bosnia). Demikian halnya dengan negara Unisoviet yang kini tinggal menjadi negara Rusia yang tadinya negara tersebut terdiri dari beberapa negara bagian. Bila kita melihat dari apa yang terjadi di negara-negara Eropa dan Negara Eropa Timur di atas, semua persoalan itu hanya terjadi hanya karena berbeda kepentingan dan pada akhirnya negara-negara tersebut terpecah menjadi beberapa negara merdeka (Lukum, 2016: 1).

Jika dipandang melalui ketahanan nasional dari dimensi pertahanan suatu negara, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk terjadinya konflik internal. Hal ini disebabkan karena Indonesia sebuah negara yang dikenal dengan multikultural dan multietnisnya, multiagama, multiras. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk memertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara lain. Menurut Harjomataram pertahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan yang datang dari dalam atau di

luar, langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Apa yang dikhawatirkan itu bukan hayalan belaka, tetapi pemerintah Republik Indonesia telah memiliki pengalaman seperti itu. Dan sampai saat ini masih ada. Misalnya pemerintah Republik Indonesia telah dikacaukan oleh pemberontakan DII/TII, pemberontakan Permesta, pemborontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemborontakan RMS di Maluku itu pada zaman era Orde Lama. Di zaman era Orde Baru pemerintah Republik Indonesia menghadapi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sampai saat ini masih berjalan. Keinginan Papua ingin keluar dari RI saat ini bukan lagi hanya harapan segelintir organisasi Papua Merdeka, namun sudah menjadi harapan sebagian besar masyarakat Papua yang ingin keluar dari pemerintah Republik Indonesia, demikian halnya keinginan Provinsi Riau yang ingin mendirikan negara merdeka berpisah dengan negara Kesatuan Republik Indonesia (Lukum, 2016: 2).

Oleh karena itu, kondisi multietnis yang ada di Indonesia diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi suatu bangsa yang memiliki peradaban baru. Hal ini akan terwujud apabila antara suku etnis yang ada di Indonesia hidup rukun dan saling bergotong royong untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Namun, untuk membangun kerukunan antara etnisitas yang ada di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, tentunya hal ini melibatkan berbagai macam pihak baik masyarakat biasa maupun pemerintah.

Bila melihat kondisi di daerah Provinsi Gorontalo di mana penduduknya yang terdiri dari berbagai macam etnis, beberapa di antaranya ialah etnis lokal Gorontalo dan etnis Bali. Etnis lokal Gorontalo adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki persamaan baik persamaan budaya, agama, adat, dan bahasa

Gorontalo masyarakat lokal Gorontalo yang penduduknya mayoritas beragama islam. Sedangkan suku bangsa (etnis) Bali merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan budaya, sedangkan kesadaran itu diperkuat oleh adanya kesamaan bahasa. Walaupun ada kesadaran yang demikian, namun kebudayaan Bali mewujudkan banyak variasi dan perbedaan setempat, seperti perbedaan keyakinan agama. Masyarakat Bali di Desa Tri Rukun mayoritas beragama Hindu yang telah lama terintegrasikan ke dalam kebudayaan Bali, dirasakan pula sebagai unsur yang memperkuat adanya kesadaran akan kesatuan itu. Oleh karena itu, kebudayaan etnis Bali tidak akan pernah terlepas dari dinamika sejarah Bali, yang memberikan warna pada setiap periode suatu peristiwa.

Kondisi ini dapat kita lihat di daerah Kabupaten Boalemo di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari masyarakatnya yang beragam terdiri dari tiga etnis dan tiga agama yang berbeda seperti etnis Bali. Gorontalo, dan etnis Minahasa. Dengan mayoritas penduduk dari etnis Bali, yaitu 885 orang, kemudian Gorontao dengan jumlah penduduk 85 orang, dan terakhir Minahasa dengan jumlah 43 orang. Ketiga etnis etnis tersebut merupakan penduduk transmigrasi yang sekarang berada di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari. Akan tetapi, setelah disurvei ternyata kehidupan warganya sangat damai berbeda di daerah lain yang mengalami konflik antaretnis.

Biasanya warga masyarakat yang tinggal bersama berbeda etnis mengalami kegagalan interaksi sosial, tetapi di desa Tri Rukun justru warga masyarakatnya dapat hidup dengan damai dan tanpa konflik sebagaimana di daerah lain yang gagal melaksanakan prinsip negara multikulturalisme.

Demikian juga dengan kondisi etnis Tionghoa di kota Gorontalo yang dapat kita lihat melalui hasil observasi di bawah ini. Apa yang terjadi di atas hanya merupakan masalah

pemerintah dengan daerah atau etnik yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah. Namun, permasalahan di era Orde baru yang dirasa oleh warga keturunan Tionghoa tidak adil adalah diskriminatifnya Negara terhadap etnis Tionghoa. Di mana negara saat itu masih menganggap etnis Tionghoa sebagai warga Negara yang harus dicurigai keberadaannya di Republik ini. Di mana hak-hak politik, sosial, agama dan ekonomi warga keturunan Cina dibedakan oleh pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, harapan kita saat ini, kita ingin menghapus lagi adanya diskriminasi antaretnik/ras di Indonesia agar supaya masyarakat Indonesia merasa satu dalam pemerintahan dan merasa satu dalam bernegara, merasa satu dalam berbangsa.

Permasalahan di atas terjadi karena pemerintah RI dan masyarakat dalam bertindak, tidak lagi menjadikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagai landasan kebijakan. Semua bergerak atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan kepentingan kelompok.

Bila melihat kondisi daerah Gorontalo. Masyarakat Gorontalo pun bukan masyarakat yang homogen, melain-kan masyarakat yang heterogen, di mana masyarakatnya terdiri atas berbagai etnik, agama dan keturunan. Namun sampai saat ini konflik antaretnik dan konflik antaragama, konflik antarwarga keturunan belum begitu menjadi permasalahan yang dianggap serius, tetapi potensi-potensi konflik itu ada pada masyarakat Gorontalo.

Bila konflik dipahami hanya sebagai perang fisik antaragama, suku, keturunan memang hal ini tidak pernah terjadi. Hal ini bukan karena terjadi dengan sendirinya, namun ada upaya pemerintah dan masyarakat untuk membina hubungan antaretnik di daerah Gorontalo sehingga konflik tersebut tidak terjadi. Tetapi kondisi itu tidak membuat kita terlena untuk tidak mewaspadai konflik antaretnik di daerah

Gorontalo, tetapi harus mengantisipasinya agar tidak terjadi konflik antaretnik di daerah Gorontalo.

Namun, kalau memahami konflik secara *psyhis* ini sangat besar potensinya di daerah Gorontalo. Mengapa karena dilihat dari aspek ekonomi penduduk lokal jauh tertinggal dari etnik pendatang seperti etnik Tionghoa yang saat ini menguasai perekonomian di daerah Gorontalo melalui usaha wiraswasta seperti kepemilikan tempat usaha-usaha besar seperti toko, bengkel besar dsb. Kepemilikan lahan-lahan pertanian yang dijual oleh masyarakat lokal kepada warga Negara etnis keturunan Cina.

Kondisi yang terjadi daerah kota Gorontalo sebagaimana fenomena di atas, memang sampai saat ini daerah Kota Gorontalo tidak terjadi konflik bila konflik dipahami hanya konflik fisik. Namun, kalau dilihat dari perbedaan status sosial masyarakat Gorontalo yang saat ini jauh ketinggalannya dengan etnis Tionghoa, akan menjadi potensi konflik fisik bagi masyarakat lokal, kalau pemerintah daerah tidak menyadarkan masyarakat lokal akan manfaat usaha yang diperoleh dari mereka masyarakat pendatang. Artinya, dengan kehadiran masyarakat pendatang pemerintah daerah harus menjelaskan pada masyarakat lokal, bahwa usaha yang dibangun oleh etnis keturunan *Cina* di daerah ini sangat besar manfaatnya untuk pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Gorontalo. Di mana melalui hasil usaha etnis *Cina* di daerah ini akan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Gorontalo, melalui pajak yang diberikan kepada daerah sebagai kewajiban bagi setiap warga Negara yang ada di daerah ini, khususnya etnis *Cina*. Pajak tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi daerah Provinsi Gorontalo.

Berangkat dari fenomena sosial di atas terhadap masyarakat pendatang seperti etnik Tionghoa sebagai pemain ekonomi terbesar di daerah Gorontalo, mestinya menjadi bahan

pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang jangan dijadikan ancaman bagi masyarakat lokal, tetapi dijadikan sebagai patner di dalam berbisnis di daerah. Artinya, masyarakat lokal harus belajar lebih banyak dari masyarakat pendatang (Etnis Tionghoa dan etnik Arab, etnik Makasar) dalam menjadikan bisnis sebagai pendapatan hidup bagi setiap warga masyarakat di Daerah Gorontalo.

Di bidang sosial masyarakat etnis Tionghoa di Gorontalo masih bersifat tertutup dengan penduduk lokal, ini dibuktikan masih ada sebagian masyarakat etnis Tionghoa masih memertahankan tradisinya, di mana masyarakat etnis Tionghoa apabila memilih pasangan hidupnya harus dari kalangan etnis keturunannya. Sikap seperti inilah yang menjadi permasalahan bagi masyarakat lokal. Kalau sikap seperti ini dipertahankan terus, akan menimbulkan sifat antipati bagi masyarakat etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo.

Apabila kondisi di atas dibiarkan oleh pemerintah daerah saya yakin hubungan antaretnik di daerah Kota Gorontalo seperti bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak dan menjadi konflik antaretnik. Kita semua masyarakat Gorontalo tidak menghendaki adanya perpecahan antaretnis di Gorontalo. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Gorontalo harus menjaga hubungan harmonis antaretnis di daerah ini. Untuk memahami dan mengoreksi kembali apa yang terjadi di republik ini tentang interaksi sosial antaretnis penulis berinisiatif menyusun buku ini.

Penulisan buku ini terilhami untuk melihat sejauh mana Pemerintah daerah dan warga masyarakat dari berbagai etnis yang menjadi penduduk di daerah Provinsi Gorontalo melakukan interaksi sosial dengan bentuk negara *Nation State* model negara multikulturalisme dilaksanakan di daerah ini.

Ternyata berdasarkan hasil riset yang kami lakukan secara kolaborasi dengan mahasiswa menunjukkan mayarakat yang berbeda etnis tinggal menetap bertahun-tahun di kedua daerah ini sangat rukun, sekalipun ada gesekan tetapi masih menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Jawaban dari semua ini terjadi tidak hanya tercipta dengan sendirinya. Kondisi ini terjadi karena kesadaran masyarakat melaksanakan prinsip-prinsip model negara multikulturalisme, di antaranya adalah sikap saling menghargai keyakinan dan kepercayaan etnis lain. Demikian halnya dengan etnis lokal yang sangat kuat prinsip kearifan lokalnya "adat bersendikan syaraa dan syaraa bersendikan kitabullah". Prinsip inilah sebagai perekat etnis lokal melakukan interaksi sosial dengan etnis Bali dan etnis Cina. Etnis Bali yang memiliki keyakinan dan kepercayaan sebagai agama mayoritas beragama Hindu dan penduduk etnis lokal yang mayoritas beragama Islam.

Demikian halnya etnis Cina di Kota Gorontalo mendapatkan tempat yang sangat berharga di daerah ini, sekalipun bila dilihat dari tingkat ekonomi dan kesejahteraan etnis Cina menguasai bidang ekonomi, tetapi penduduk lokal tidak mengusik kehadiran mereka di Kota Gorontalo. Kesadaran ini hadir pada masyarakat etnis lokal, karena etnis lokal menyadari bahwa etnis Cina berkewarganegaraan Indonesia sangat berkontribusi terhadap pembangunan di daerah, di mana berdasarkan hasil survei etnis Cina sebagai warga negara yang taat akan kesadaran membayar pajak. Dengan pembayaran pajak dari pengusaha dan pedagang etnis Cina di daerah kota Gorontalo pembangunan menjadi sangat maju baik pembangunan ekonominya dan pembangunan infrastrukturnya.

Melihat kondisi ini etnis lokal Gorontalo dengan etnis Cina dan etnis Bali bergandengan tangan dalam membangun daerah kota Gorontalo dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Sebagai realitas etnis Cina melakukan interaksi dengan baik

dengan etnis lokal berdasarkan hasil survei kepada etnis lokal etnis Cina demikian juga dengan etnis Bali sangat membantu bila dilaksanakan kegiatan "Tombilatohe" atau malam pasang lampu sebagai tradisi dari etnis lokal.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dari hasil riset menunjukkan daerah Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme sehingga fakta-fakta ini dapat memperkuat daerah Provinsi Gorontalo sebagai *Pilot Projek* dari bentuk negara multikulturalisme di Indonesia.

Terakhir saya selaku ketua tim dalam penelitian ini mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, mulai dari pengambilan data di lapangan sampai pada penyusunan finalisasi buku ini. Semoga apa yang dikaji dalam buku ini bermanfaat dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme di Indonesia.

Kepada para informan penelitian yang telah dengan ikhlas kami wawancarai sejak penelitian ini dilakukan di dua daerah yang berbeda dalam kurun waktu berbeda di dalam mewujudkan penulisan buku ini, saya selaku ketua tim peneliti, mengucapkan terimah kasih atas partisipasinya, semoga keterangan yang anda berikan melalui tulisan buku ini akan bermanfaat bagi para pembaca dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme di Indonesia.

Memang penulis menyadari buku ini belum memenuhi harapan yang maksimal sebagaimana keinginan pembaca. Namun, buku ini dapat membantu kita untuk mengelola daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan kehidupan yang multietnis, multikultural, multibudaya dan multiras (multi-bangsa) dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme di Negara Republik Indonesia. Untuk

memenuhi harapan demi kesempurnaan buku ini saya penulis akan melakukan riset kembali terhadap fenomena interaksi sosial antaretnis di Provinsi Gorontalo dengan melengkapi dengan landasan teori yang lebih akurat.

BAB II

MEMBANGUN TRADISI MULTIKULTURALISME DALAM SUATU NEGARA KEBANGSAAN (*NATION STATE*)

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hetorogen di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai keturunan yang terdiri dari berbagai etnik, berbagai budaya, berbagai ras, berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai organisasi kemasyarakatan, berbagai partai politik yang hidup di Negara Republik Indonesia untuk dapat menyatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini merupakan rahmat bagi pemerintah Republik Indonesia apabila dari kehidupan keanekaragaman tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menyadari akan bahaya ancaman dari kondisi tersebut sehingga sudah saatnya pemerintah meng-upayakan kehidupan antaretnik, antaragama, antarbangsa, antarras, antarorganisasi kemasyarakatan, antarorganisasi partai politik dsb., dapat hidup rukun di antara sesama warga negara Indonesia melalui model negara multikulturalisme sebagaimana cita-cita *The Founding Fathers tentang Nation State*.

Bila dilihat kondisi Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang besar dikarenakan tirdiri dari ribuan pulau yaitu 17.504 baik dari yang besar sampai yang terkecil, bukan hanya itu Indonesia dikenal juga dengan negara yang memiliki

bermacam-macam budaya, agama, suku, etnis, ras, serta bahasa yang kurang lebih terdapat 726 bahasa. Hal tersebut menjadikan Indonesia dimata dunia sebagai suatu negara yang beranekaragam, pluralis dan multikultural, hal ini tentunya sebagai suatu potensi yang besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi suatu negara yang maju baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan, maupun sosial budaya.

Kondisi ini merupakan rahmat bagi pemerintah Republik Indonesia apabila dari kehidupan keanekaragaman tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Selain dengan bentuk keragaman tersebut mampu menjadikan Indonesia negara yang kaya akan keanekaragamannya, di sisi lain juga memberikan berbagai macam dampak terhadap Negara Indonesia sendiri, kemajemukan budaya, etnisitas yang ada di Indonesia jika tidak diolah dengan baik akan menjadi penyebab timbulnya konflik. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menyadari akan bahaya ancaman dari kondisi tersebut sehingga sudah saatnya pemerintah mengupayakan kehidupan antaretnis tersebut dengan pola hidup rukun di antara sesama etnik tersebut.

Di Indonesia kurang lebih terdapat terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan UUD NRI1945 telah dikatakan pada pasal 18 UUD 1945 pemerintah Republik Indonesia menghargai kehidupan keanekaragaman dengan fakta bahwa negara memberikan daerah berkembang berdasarkan kearifan lokalnya seperti Daerah Istimewa Yokyakarta, daerah Istimewa Jakarta (DKI Jakarta) dan daerah istimewa Aceh melaksanakan sistem desentralisasi dengan memerhatikan keaneka ragaman daerahnya sehingga dengan ketentuan pasal tersebut memberikan harapan agar setiap warga Negara Republik Indonesia diberi kesempatan untuk saling

menghargai satu sama lain. Dalam arti negara menaruh harapan setiap warga negara untuk tidak mengabaikan warga negara lain hanya karena perbedaan etnis, agama dan ras. Demikian juga dengan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak diskriminatif dengan warga negara yang berbeda status sosialnya. Karena negara dibentuk demi tujuan kesejahteraan bersama sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Begitupun dasar negara kita Pancasila mengamanatkan negara untuk tidak berlaku diskriminatif antaretnis yang ada di Indonesia yang telah diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal ini ditunjukan melalui makna sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila ke empat dan sila ke lima Pancasila dan diatur melalui landasan instrumental sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UUD NRI1945 pada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disyahkan sebagai warga negara itulah yang menjadi warga negara Republik Indonesia.

Dengan ketentuan dasar negara dan Undang-Undang Dasar NRI1945 di atas sebagai aturan tertinggi di negara kita, inilah yang harus dijadikan pijakan kebijakan pemerintah dalam menjaga hubungan antaretnis di Indonesia. Apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa negara Republik Indonesia tetap ada artinya tidak mengalami apa yang disebut dengan *failed state* tidak akan terjadi apabila pemerintah dan warga masyarakat Indonesia menjujung tinggi Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai aturan tertinggi di negara kita (Lukum, 2016: 1).

Definisi etnis menurut Fredrick Barth etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Sedangkan menurut Ensiklopedia

Indonesia etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat istiadat dan tradisi.

Berangkat dari pengertian etnisitas di atas, maka bila melihat sebaran etnis yang ada di Indonesia di berbagai daerah jumlahnya sangat banyak sehingga setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki etnis lokal daerah dan ditambah dengan etnis pendatang. Hal ini tentunya menyebabkan masyarakat lokal atau etnis lokal dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai macam etnis yang masing-masing memiliki berbagai macam perbedaan dan ada juga yang gagal berinteraksi dengan etnis pendatang karena benturan perbedaan yang ada pada etnis pendatang memunculkan sentimen negatif. Jika perbedaan yang dimiliki oleh setiap etnis yang berada di setiap daerah tidak mampu disikapi dengan bijaksana oleh setiap masyarakat khususnya etnis lokal maupun pendatang, tentunya hal tersebut akan menjadi salah satu pemicu konflik yang ada di Indonesia dan akan menyebabkan runtuhnya ketahanan nasional suatu negara.

Banyak negara-negara yang tidak mampu memer-tahankan kedaulatan hanya karena perbedaan pandangan, khususnya hanya dipicu oleh kondisi demografi warga negaranya yang berbeda etnis, agama dan Ras. Mengakibatkan etnis minoritas diperlakukan dengan tindakan diskriminatif oleh negara. Tindakan diskriminatif inilah yang memicu gerakan separatis di suatu negara. Pada akhirnya, etnis yang merasa diperlakukan oleh negara tidak adil tersebut akan termotivasi mendirikan negara baru. Kasus seperti ini terjadi di negara Yugoslavia dan negara adikuasa Unisoviet. Negara Yugoslavia yang tadinya merupakan satu negara kini menjadi

beberapa negara merdeka (negara Yugoslavia, negara Serbia dan negara Bosnia). Demikian halnya dengan negara Unisoviet yang kini tinggal menjadi negara Rusia yang tadinya negara tersebut terdiri dari beberapa negara bagian. Bila kita melihat dari apa yang terjadi di negara-negara Eropa dan Negara Eropa Timur di atas, semua persoalan itu hanya terjadi hanya karena berbeda kepentingan dan pada akhirnya negara-negara tersebut terpecah menjadi beberapa negara merdeka (Lukum, 2016: 1).

Jika dipandang melalui dimensi pertahanan dan keamanan negara, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk terjadinya konflik internal. Hal ini disebabkan karena kondisi Indonesia sebagai negara hetorogen yang terdiri dari multikultural, multietnisnya dan multibangsa, multiagama sehingga bila ditinjau dari dimensi Pertahanan nasional disebut juga sebagai pertahanan negara adalah segala usaha untuk memertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara lain kondisi demografi warga negara Indonesia akan menjadi ancaman pada dimensi pertahanan dan keamanan negara. Menurut Harjomataram, pertahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan dari dalam atau di luar, langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan ketahanan nasional suatu negara.

Apa yang dikhawatirkan di atas itu bukan hayalan belaka, tetapi pemerintah Republik Indonesia telah memiliki pengalaman seperti itu dan sampai saat ini masih ada. Misalnya, pada masa Orde lama pemerintah Republik Indonesia telah dikacaukan oleh pemberontakan DII/TII, pemberontakan Permesta, pemborontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, pemborontakan RMS di Maluku. Di zaman era Orde Baru pemerintah Republik Indonesia menghadapi pemberontakan

Gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sampai saat ini masih berjalan. Keinginan Papua ingin keluar dari Republik Indonesia saat ini bukan lagi hanya harapan segelintir organisasi Papua Merdeka, namun sudah menjadi harapan sebagian besar masyarakat Papua yang ingin keluar dari pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga halnya keinginan Provinsi Riau mendirikan negara merdeka berpisah dengan negara Kesatuan Republik Indonesia (Lukum, 2016: 2).

Oleh karena itu, kondisi multietnis, multiagama, multiras, multibangsa yang ada di Indonesia diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi suatu bangsa yang memiliki peradaban baru. Hal ini akan terwujud apabila antara suku etnis yang ada di Indonesia hidup rukun dan saling bergotong royong untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Namun untuk membangun kerukunan antara etnisitas yang ada di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, tentunya harapan ini melibatkan semua pihak baik masyarakat biasa dan tokoh-tokoh masyarakat, para elit lokal dan elit nasional, pemimpin partai politik, LSM, Pers maupun pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa untuk komitmen dalam mewujudkan negara multikulturalisme demi terciptanya harmoni sosial di dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan multikulturalisme adalah mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis itu secara stabil dan dapat dipertahankan secara moral (Gutman, 1993). Ada beberapa pandangan yang dapat diambil manfaat meskipun pandangan itu berbeda dengan idiologi kita, tetapi yang penting kita nilai kebaikan dari konsep tersebut. Misalnya, pandangan multikulturalisme berdasarkan pandangan demokrasi liberal salah satu mekanisme utama untuk mengakomodasi perbedaan kebudayaan adalah perlindungan atas hak-hak sipil dan politik orang perorang. Adalah tidak mungkin untuk terlalu

menekankan pentingnya kebebasan untuk berkumpul, beragama, berbicara, berpindah dan organisasi politik untuk melindungi perbedaan kelompok. Hak-hak itu memungkinkan setiap orang untuk membentuk dan memertahankan berbagai kelompok dan perkumpulan yang membentuk masyarakat sipil, untuk menyesuaikan pada kelompok-kelompok itu pada keadaan yang berubah, dan untuk menyiarkan pandangan serta kepentingan mereka ke masyarakat yang lebih luas. Perlindungan yang diberikan oleh hak-hak bersama warga Negara sudah cukup bagi kebanyakan dari bentuk-bentuk sah keragaman dalam masyarakat (Kymlicka, 2003: 38).

Pendapat para peneliti tentang konsep negara multikulturalisme oleh Kymlicka di atas memberikan petunjuk bagaimana menciptakan keharmonisan kepada kondisi negara bila warga negaranya terdiri dari berbagai ras, berbeda keyakinan, berbeda pilihan politik dsb., tetapi dapat hidup berdampingan dalam membangun negara secara kolektif sehingga amanatnya adalah kepada semua negara yang ada di belahan dunia harus melaksanakan konsep negara multikulturalisme dalam menjaga stabilitas negaranya. Harapan Kymlilicka tersebut sangat realistis bila melihat banyak negara di belahan dunia ini masih dalam suasana konflik berkepanjangan termasuk di negara Republik Indonesia sehingga diperlukan model membangun negara yang stabilitasnya tidak terhalangi oleh perbedaan dan perbedaan itu memicu konflik di antara sesama warga negara.

Untuk melengkapi bagaimana mengenal negara model multikulturalisme marilah kita lihat makna dari negara multikulturalisme menurut para ahli di bawah ini sebagai berikut.

Multilkulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Multikulturalisme pada

dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007). Sedangkan pengertian masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah adat serta kebiasaan (*a multicultural soceity, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinc conception of the world, system of meaning, values, forms of social organizations, historis, customs and practices*) (Parekh, 1997) yang dikutip dari Azra, 2007).

Pengertian lain dari multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Laurence Blum, dikutip Lubis, 2006: 174).

Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktik multikulturalisme yang diungkapkan oleh para ahli membuat seorang tokoh bernama Parekh (1997: 183:185) membedakan lima macam multikulturalisme (Azra, 2007, meringkas uraian Parekh) sebagai berikut.

1. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan

akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensetif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk memertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.

3. Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujud-kan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk memertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan, mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.
4. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.
5. Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Tantangan multikulturalisme adalah mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis itu secara stabil dan dapat dipertahankan secara moral (Gutman, 1993). Pandangan Gutman ini memberikan pesan bahwa tantangan dalam membangun model multikulturalisme adalah mengakomodasi perbedaan di antara warga negara yang tinggal dalam suatu wilayah sehingga diperlukan strategi dalam membangun keharmonisan di antara warga negara yang berbeda cita-cita, tujuan yang sifatnya, seperti tradisi, nilai-nilai keyakinan religiutas antaragama dan ras. Semua ini harus diakomodasi oleh negara atau pemerintah dalam mengambil kebijakan dan bagi warga negara untuk bisa menerima perbedaan dalam suatu negara atau wilayah.

Berdasarkan uraian di atas tentang multikulturalisme maka yang dimaksudkan dengan multikulturalisme adalah suatu kondisi warga negara dari satu negara yang terdiri dari berbagai etnis, dan berbagai bangsa, berbeda tradisi, berbeda agama namun dapat hidup rukun dalam suatu negara dengan mengedepankan prinsip egalitarian, sikap toleransi, sikap kerja sama, sikap otonomi dan sikap akomodatif kepada semua warganya tanpa membedakan dari asal usul warga negaranya, semuanya mendapatkan hak dan kewajiban bagi warganya dan negara berkewajiban mengakomodasi semua hak dan kewajiban warga negaranya itu.

Pengertian ini memberi makna yang mendalam dalam pengelolaan suatu negara untuk harus berhati-hati dalam pengelolaan negara yang terdiri dari berbagai bangsa, etnik, agama. Artinya, negara harus bersikap adil tidak diskriminatif terhadap perbedaan tersebut.

Ada beberapa negara yang gagal dalam mebangun *Nation state* negara multikulturalisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Will Kymlicka dalam bukunya kewarganegaraan Multikultural (2011: ix) runtuhnya Yugoslavia dan komunisme

Soviet memberi hikmah. Suatu politik yang ingin melancarkan homogenisasi atas keragaman sosial kultural di bawah penindasan sebuah ideologi dan kekerasan politis justru menabung dendam kultural. Elemen-elemen kolektif yang ditekan itu pada gilirannya akan memberontak dan mengkonstruksi tatanan politis dan ideologis bersama itu. Gagalnya proyek komunisme itu dan balkanisasi yang mengikutinya menjadi titik tolak perubahan besar di Barat dalam memahami masyarakat modern. Masyarakat modern semakin disadari sebagai sebuah masyarakat "multikultural", yakni sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai atau mengacu pada istilah Geertz di atas sebuah negeri dengan banyak bangsa. Dengan tragedi politik global itu yang menjadi usang tidak hanya impian sosialistis tentang masyarakat tanpa kelas, konsep "bangsa" yang dalam liberalisme tumbuh melalui Revolusi Prancis 1789 itu juga dipersoalkan. Liberalisme menganut asas kesamaan semua orang dihadapan hukum dan menjunjung hak-hak individu. Dengan cara ini menurut para kritikus liberalisme ada satu hal yang diabaikan, yaitu aspirasi warga negara sebagai anggota suatu kelompok minoritas kultural tertentu dalam masyarakat liberal itu. Dalam kadar tertentu problem. Balkan tidak asing di dalam masyarakat liberal, yaitu bukan hanya problem dengan kaum imigran, dengan minoritas-minoritas bahasa, agama atau etnis, melainkan juga dengan kelompok-kelompok feminis, kaum cacat, homoseksual dan orientasi-orientasi nilai lainnya yang mencari pengakuan akan identitas kolektifnya di dalam demokrasi liberal. Sejalan dengan pandangan Geertz di atas dapat ditarik anologi antara problem kelompok-kelompok etnis dan kelompok-kelompok sosial itu, karena kedua macam kelompok itu diekslusi atau dimarginalisasi dari problem mayoritas semata-mata karena

'keberlainan' mereka. Jadi, problem yang mendasar di sini adalah keadilan.

Berangkat dari kajian Will Kymlicka di atas menunjukkan membangun negara multikulturalisme sesuatu yang tidak gampang karena negara multikultural harus mengedepankan keadilan bagi warga negaranya yang terdiri dari beberapa bangsa. Di Indonesia sebagai negara kesatuan warga negaranya tidak hanya terdiri dari satu suku, satu agama, satu adat Istiadat, satu bahasa, satu ras. Tetapi terdiri dari beragam suku, beragam agama, beragam adat istiadat, beragam bahasa dan bahkan berbeda ras. Misalnya Warga negara Indonesia dari etnis Cina, Etnis Arab, Etnis Eropa. Dengan kondisi ini pemerintah harus memperlakukan semua warga negara dengan penerapan negara multikulturalisme dengan mengedepankan asas keadilan. Artinya pemerintah kita melarang memperlakukan warga negara Indonesia bukan warga negara asli secara diskriminatif. Karena semua warga negara, baik itu diperoleh melalui cara naturalisasi, maupun kewarganegaraan diperoleh melalui kewarganegaraan berdasarkan asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang diperoleh melalui asas naturalisasi. Karena konstitusi kita pada pasal 26 UUD NRI 1945 tidak lagi mengklasifikasi status kewarganegaraan. Artinya, proses naturalisasi pun diakui sebagai warga negara Indonesia. Dengan status tersebut pemerintah wajib melindungi, memberikan hak yang sama kepada warga negaranya yang diperoleh melalui proses naturalisasi tersebut.

Makna membangun model negara multikulturalisme tersebut memberi makna tidak ada lagi sekat-sekat di antara warga negara pada suatu negara, tetapi prinsip inipun masih bermasalah di republik ini, salah satu contoh adalah tentang penetapan hak politik warga negara proses naturalisasi. Warga negara proses naturalisasi berdasarkan konstitusi UUD NRI

1945 masih dibatasi bagi warga negara naturalisasi untuk mengajukan hak politik menjadi calon Presiden dan wakil Presiden. Di mana warga negara diperoleh dari proses naturalisasi yang dapat mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden adalah anak dari orang tua yang diberi kewarganegaraan melalui proses naturalisasi, itu artinya bagi warga naturalisasi tidak diberi hak menjadi calon Presiden dan wakil Presiden, terkecuali anak dari seorang warga negara Indonesia dari proses naturalisasi tersebut. Berarti generasi keduanya yang dapat maju sebagai calon Presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Bila permasalahan di atas dilakukan telaah konstitusi dan telaah model negara multikulturalisme, memang masih menyisihkan permasalahan artinya pembatasan konstitusi tersebut menunjukkan masih ada kekhawatiran para penyusun konstitusi kepada warga negara diperoleh melalui proses naturalisasi, sebaiknya perasaan itu harus ditepis ketika negara kita berkomitmen dalam mewujudkan negara multi-kulturalisme. Karena ketika warga negara Indonesia proses naturalisasi menjadi calon dan menjadi Presiden dan wakil Presiden ada lembaga legislatif (DPR dan MPR) yang dapat memberhentikan ketika Presiden dan wakil Presiden melanggar konstitusi. Menurut hemat penulis biarlah warga negara melalui proses naturalisasi maju sebagai calon presiden dan wakil Presiden. Yang terpenting bagi kita adalah membangun sistem ketatanegaraan dengan prinsip-prinsip negara multi-kulturalisme. Kekhawatiran itu tidak menjadi alasan karena sistem ketatanegaraan kita sudah jelas mencantumkan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden, tidak perlu membatasi warga negara proses naturalisasi generasi pertama dicekal dalam menggunakan hak-hak politiknya sebagai warga negara Indonesia.

Legal standing negara Indonesia sebagai negara multikulturalisme ada dalam konstitusi UUD NRI 1945. Ini menunjukkan negara Indonesia memiliki komimen kuat dalam melaksanakan negara *Nation state* atau negara multikultural. Landasan hukumnya ada pada pasal 26 UUD NRI 1945 dan pasal 27 UUD NRI 1945. Di mana pasal 26 UUD NRI menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah waga negara yang diperoleh dari kewaganegaraan (naturalisasi) dan diperoleh melalui keturunan orang Indonesia adalah warga negara Indonesia dan karena kelahiran (asas Ius soli). Apa yang muat dalam konstitusi sebagai aturan tertinggi perundang-undangan di Indonesia menjadikan semua warga negara di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pelayanan dan perlindungan kepada semua warga negaranya. Sebagaimana yang menjadi tujuan berdirinya negara yang termuat di dalam pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini terlihat dari tujuan pendirian negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan *legal standing* tersebut ternyata negara Indonesia sejak awal republik ini berdiri sudah merupakan negara multikulturalisme.

Legal standing lainnya ada pada pasal 27 UUD NRI 1945 yang mengharuskan pemerintah memperlakukan semua warga negaranya kedudukannya sama di depan hukum dan pemerintahan. Ini menunjukkan pemerintah Indonesia harus berlaku adil kepada semua warga negaranya tanpa ada pengecualian. Bila digali melalui pendekatan konstitusi tentang amanah melaksanakan negara multikulturalisme dapat kita lihat di bawah ini.

Cita-cita negara multikulturalisme di negara Republik Indonesia telah digaungkan oleh *The Founding Fathers* melalui keinginan untuk melaksanakan *Nation state* (konsep negara bangsa). Realisasi dari *The Founding Fathers* dalam mewujudkan negara multikulturalisme dapat kita gali melalui dasar negara Pancasila dan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945, pasal 18 UUD NRI 1945, pasal 27 UUD NRI 1945, pasal 28 UUD NRI 1945, Pasal 29 UUD NRI 1945 dan pasal 32 ayat 1 UUD NRI 1945. Di mana pasal-pasal ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai multikulturalisme. Makna pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 adalah mengharapkan negara Indonesia dalam menyikapi warga negara yang hetorogen berbeda suku, berbeda agama dan keyakinan, berbeda ras, berbeda pilihan politik dan berbeda tradisi dapat dipersatukan melalui pelayanan yang sama pemerintah pusat kepada warga negaranya dengan pilihan bentuk negara kita adalah Republik bukan monarki absolut. Makna republik berarti negara kita menganut paham demokrasi sebagai cikal bakal negara multikulturalisme mengandung makna semua warga negaranya diberikan kebebasan menggunakan hak dan dipersamakan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Demikian halnya pada pasal 18 UUD NRI1945 memberi makna bahwa pemerintah pusat harus memberikan otonomi kepada daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Ini membuktikan bahwa prinsip negara multikulturalisme dengan prinsip memberikan hak otonomi sudah diatur oleh konstitusi. Selanjutnya, pasal 27 UUD NRI 1945 sebagai realisasi dari prinsip egalitarian merupakan bagian dari prinsip multikulturalisme di mana pasal tersebut mengharapkan pemerintah bersikap adil pada semua warga negara dalam memperoleh kepastian hukum, pemerintah dalam menegakan hukum tidak bersikap diskriminatif pada

warga negaranya. Begitu juga pada pasal 28 dan pasal 29 UUD NRI 1945 merupakan pelengkap dari prinsip negara multikulturalisme, memberi makna negara harus menghormati hak asasi dari warga negara dalam menjalankan keyakinan beragama. Dan dengan pasal 29 UUD NRI 1945 memberikan ruang bagi warga negara melaksanakan prinsip toleransi sebagai bagian dari prinsip negara multikulturalisme. Serta pasal 32 UUD NRI 1945 ayat 1 mengamanatkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan nasional sehingga setiap warga negara Indonesia wajib menghormati kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Berdasarkan *legal standing* di atas menunjukkan *The Founding Fathers* memang bercita-cita dalam mendirikan negara *Nation state* dengan model negara multikulturalisme sebagai solusi dalam mewujudkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, komitmen dalam membangun negara multikulturalisme ini tidak konsisten di jalankan oleh penyelenggara negara, baik di era orde lama, di era orde baru dan bahkan di era reformasi, negara Indonesia masih bermasalah dalam mewujudkan negara multikulturalisme tersebut.

Bila dilihat dari sistem yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia di dalam menopang negara multikulturalisme atau *Nation state*, kita memiliki dasar negara Pancasila dan konstitusi cukup dalam membangun negara multikulturalisme. Inilah yang membedakan negara-negara yang gagal dalam membangun *Nation state* dengan negara kita.

Akan tetapi, kita juga tidak memungkiri ada beberapa kesalahan kebijakan pemerintah kita dalam mewujudkan negara *Nation state* (negara multikultural) di era Orde lama, Orde Baru dan di era Reformasi. Misalnya di masa Orde Lama dengan kasus pembantaian terhadap ulama oleh PKI, di era Orde baru pemberlakukan sistem sentralisme yang mengakibatkan daerah di bagian Indonesia Timur mengalami keterbelakangan terhadap pembangunan di daerahnya. Padahal amanah konstitusi UUD 1945 sistem pemerintahan daerah harus memberlakukan sistem desentralisasi, ini berlaku kurang lebih 25 tahun, mengakibatkan terjadinya pemberontakan di daerah misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh GAM di Aceh dan OPM di Papua. Semua ini kesalahan kebijakan pemerintah Orde baru dalam melaksanakan amanah *Nation state* dengan model negara multikulturalisme. Di era Reformasi masih terjadi pelanggaran HAM di mana kita masih melihat tindakan pemerintah mengabaikan kewajibannya dalam menegakan sistem *Nation state,* misalnya mengatasi masalah Papua yang tadinya kelompok OPM sekarang sudah menjadi kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kasus ini bila dilihat dari terminologi bahasa penamaan KKB bagi mereka yang melakukan aksinya masuk dalam tugas kepolisian, tetapi dalam praktiknya kelompok ini sebetulnya lanjutan dari gerakan OPM artinya kalau gerakan KKB ini lanjutan dari gerakan OPM semestinya yang menanganinya ada pada institusi TNI, bukan ada pada wilayah kepolisian. Dampak dari semua ini menimbulkan berlarut larutnya penanganan Papua dan ini merugikan masyarakat yang ada di daerah itu. Yang penulis ingin katakan penanganan KKB semestinya ditangani bersama TNI, agar supaya masyarakat yang ada di Papua mendapatkan perlindungan dari gangguan keamanan. Inilah kasus di era reformasi menyangkut masalah dalam membangun *Nation state* saat ini.

Selain apa yang dikemukakan di atas sebagai negara yang gagal dalam mewujudkan negara negara multikulturalisme, kita dapat melihat di era saat ini beberapa negara yang gagal dalam membangun model negara multikulturalisme di antaranya adalah negara India, negara Myanmar yang tidak mengakui warga Rohinya sebagai warga negara Myanmar. Di negara Myanmar tidak mengakui penduduk asli Rohinya sebagai warga negaranya padahal etnis Rohinya sudah lebih kurang seratus tahun menempati negara Myanmar, namun saat ini oleh Presiden sebagai kepala negaranya dan kebijakan pemerintahnya tidak mengakui warga Rohinya sebagai warga negara Myanmar.

Demikian halnya dengan negara India yang mengamendemen UU Kewarganegaraan, di mana amandemen kewarganegaraan Negara India tidak mengakomodasi mereka sebagai warga negara yang berasal dari turunan kasmir yang mayoritas berasal dari negara Fakistan mayoritas beragama Islam, sampai saat ini negara India gagal membangun negara multikulturalisme.

Berangkat dari beberapa negara yang gagal melaksanakan negara *Nation state* di atas menunjukkan negara Indonesia lebih maju dari negara di atas, bahkan negara *super power* Amerika Serikat pun masih bermasalah dengan issu rasisme sebagaimana yang terjadi pada salah satu warga negara George Floyd yang meninggal karena tindakan polisi kulit putih AS dengan menekan lehernya dan mengakibatkan kematian George Floyd ras Afrika atau kulit hitam mengakibatkan unjuk rasa bagi warga negaranya menuntut presiden Donald Trump untuk menjatuhkan hukuman kepada polisi kulit putih (pelakunya empat orang) supaya dijatuhkan hukuman bagi pelakunya. Namun, pemerintah Donald Trump terkesan lambat menyelesaikan kasus tersebut, akibatnya terjadi pandalisme di negaranya. Pengunjuk rasa dari warga negara Amerika

melakukan penjarahan dan pembakaran fasilitas negara serta pengrusakan fasilitas umum karena Donald Trump lambat menyelesaikan masalah kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum Polisi Amerika dari ras kulit putih yang terkesan masih diskriminatif terhadap ras kulit hitam.

Untuk menghindari aksi-aksi yang terjadi di negara-negara yang gagal melaksanakan model negara multikulturalisme di atas, termasuk pemerintah orde lama, pemerintah orde Baru dan di era reformasi. Sebaiknya kita komitmen dalam mewujudkan negara *Nation state* dengan model negara multikulturalisme, komitmen dalam menjalankan dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 sebagai konsensus bersama *The Founding Fathers* ketika merumuskan dasar negara dan mensyahkan konstitusi UUD NRI 1945, walaupun konstitusi UUD NRI 1945 masih banyak kelemahan dari segi substansi model trias politikanya. Mengapa kita harus konsisten pada hasil konsensus di atas, supaya negara kita tidak mengalami permasalahan konflik berkepanjangan seperti yang pernah terjadi di Indonesia konflik Poso, Konflik Maluku, konflik Madura dengan suku dayak, semua ini terjadi karena kesadaran dan komitmen dalam menjalankan sistem negara *Nation state* dilakukan dengan setengah hati oleh pemerintah, dan masyarakat masih menonjolkan sifat primordialisme dalam pergaulan antaretnis, di mana konflik terjadi karena ada sikap primordialisme menganggap etnis tertentu merasa superioritas etnisnya dibandingkan dengan etnis lain.

Kesadaran dalam membangun negara multikulturalisme harus menerima kehadiran dari etnis lain dalam pergaulan di masyarakat, multikulturalisme mengedepankan persamaan hak dan kewajiban antaretnis dan bangsa-bangsa yang ada di negara kita. Inilah yang dikenal dengan istilah "akseptansi" dan akan bermuara kepada sifat toleransi antara suku, agama, ras dan adat istiadat. Sikap akseptansi ini belum melembaga di Indonesia

sehingga faktor kegagalan mengimplemetasikan akseptansi inilah yang menimbulkan konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Bila kesadaran sikap akseptansi yakni sikap menerima segala perbedaan yang melahirkan sikap toleransi ini yang dikedepankan oleh setiap warga negara dan pemerintah sebagai wujud dari opersionalisasi menerapkan konsep *Nation state* dengan model negara multikulturalisme dapat kita wujudkan di negara kita. Sudah dapat dipastikan konflik antaretnis, konflik antaragama dan konflik antarras tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, kesadaran akan tradisi multikulturalisme melalui sosialisasi penerapan mata pelajaran Pancasila dan pendidikan agama mulai dari tingkat pendidikan SD sampai dengan pendidikan perguruan tinggi benar-benar di jalankan melalui kurikulum pendidikan. Pemikiran penulis sebaiknya dalam rangka internalisasi penerapan model negara multikulturalisme pemerintah membuat kebijakan pelajaran pendidikan pancasila dan pendidikan agama diberikan prioritas dalam arti jam mata pelajarannya ditambah waktunya. Misalnya, untuk perguruan Tinggi jumlah SKSnya dijadikan tiga (3) sks yang saat ini hanya dua (2) sks. Perlu juga dimasukan dalam kurikulum sekolah mata pelajaran pendidikan multikultural selain mata pelajaran Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Pendidikan multikulturan memiliki pendekatan keilmuan yang berbeda dengan mata pelajaran yang sudah ada sehingga dimasukan dalam kurikulum pendidikan disemua tingkatan pendidikan di negara kita. Rekomondasi ini didorong oleh kondisi demografi warga negara kita yang sangat berpotensi memicu konflik. Melalui pendidikan multikulturalisme di semua tingkatan pendidikan akan dapat meminimalisasi konflik horizontal dan konflik vertikal yang dipicu oleh perbedaan yang ada di kalangan warga negara kita. Ini hanya salah satu solusi alternatif dalam memperkuat melaksanakan negara model

negara multikulturalisme pada dimensi pendidikan. Masih banyak dimensi yang harus disentuh dengan pendekatan multikulturalisme dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman melaksanakan negara model negara multikulturalisme harus dipahami bahwa keinginan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan menyeragamkan semua perbedaan, tetapi memberikan peluang masyarakat dan daerah mengembangkan tradisi dengan adat istiadatnya sendiri-sendiri, namun masih tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kesadaran mewujudkan negara *Nation state* dengan model negara multikulturalisme pemerintah Republik Indonesia akan dapat menjaga stabilitas negara dari ancaman disintegrasi bangsa. Kita tidak mau republik ini masuk ke dalam katagori *Failed State* (negara gagal) dalam mewujudkan toleransi antaretnis, antarras, antargolongan, antaragama justru yang terjadi adalah sikap intoleransi dari warga negara. Semua ini dapat kita wujudkan bila masyarakat dan pemerintah menjaga amanah dari konsensus yang menetapkan Pancasila dijadikan sebagai dasar bernegara dan konstitusi dijadikan sebagai landasan berpijak negara dalam mengelola negara untuk dilaksanakan. Apalagi prinsip-prinsip negara multikultural telah dituangkan dalam konstitusi negara kita sebagai *legal standing* dalam menjalankan negara dengan model negara multikulturalisme.

Inilah yang dimaksudkan dalam bab 1 membangun tradisi multikulturalisme dalam suatu negara kebangsaan (*Nation state*). Semoga kajian dan penafsiran subtansi yang diulas dalam pembahasan ini dapat membantu kita, menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan sebagaimana yang terjadi di negara-negara Yugoslavia, negara Balkan Unisoviet, negara Myanmar dan negara India dan di beberapa daerah di Indonesia

yang mengalami kegagalan dalam mewujudkan negara *Nation state* dengan model negara multikulturalisme.

BAB III
INTERAKSI SOSIAL SEBAGAI *TOOLD* DALAM MEMBANGUN NEGARA MULTIKULTURALISME

Sebelum kita mengkaji apa yang sesungguhnya diharapkan dalam membangun negara multikulturalisme sebaiknya kita mempelajari pengalaman kegagalan negara-negara lain seperti negara Uni Soviet, negara Yugoslavia dan beberapa negara dikawasan Asia, seperti negara Nyanmar, negara India termasuk beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Maluku, daerah Ternate, Kabupaten Poso, Provinsi Kalimantan Timur kasus konflik suku Madura dan suku Dayak dalam membangun negara multikulturalisme. Gagal melaksanakan interaksi sosial sebagai suatu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan Nation State melalui model negara multikulturalisme. Sebagaimana dalam kajian Will Kymlicka (2011: xv) pada bukunya *Kewarganegaraan Multikultural* mengambil contoh negara yang gagal dalam membangun multikulturalisme, tetapi Kymlicka masih menyoroti apa yang terjadi di negara Republik Indonesia, temuan ini menunjukkan pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia harus memerhatikan fenomena ini, sebagai evaluasi kita dalam membangun negara multikulturalisme. Padahal kita lihat sosok penulis ini adalah orang luar bukan sebagai warga negara Indonesia, artinya pandangan ini sangat

objektif melihat fenomena yang terjadi di Indonesia sebagaimana ulasannya di bawah ini.

Golombang kerusuhan anti Cina di Jakarta, Solo, Medan, konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik agama di Maluku, gerakan-gerakan separatisme Aceh dan Papua, protes-protes dari kaum fundamentalis islam serta merebaknya tuntutan-tuntutan untuk memerintah sendiri di berbagai daerah setelah tumbangnya rezim Orde Baru persis menyingkapkan kenyataan bahwa problem Indonesia bukan sekedar polietnisitas, melainkan juga multinasionalitas yang mengancam keutuhan komunitas politis ini dari berbagai sudut. Fakta ini itu tentu sudah lama ada, tetapi rezim Orde Baru meredam dan menekan gejolak itu. Baru dengan krisis ekonomi dan politis di negeri ini dan jatuhnya Suharto, kita dipaksa untuk melihat dan mengakui kenyataan itu. Lepasnya Provinsi Timor-Timur dari Republik Indonesia menandai awal dari akhir era kenaifan yang membayangkan homogenitas bangsa. Makin jelas bahwa Indonesia ini multinasional dan polietnis. Kerusuhan kerusuhan SARA dapat dihitung sebagai gerakan-gerakan horizontal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok etnis.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Kymlicka di atas, ada benarnya pemerintah Indonesia menghadapi masalah dalam membangun negara multikulturalisme sehingga itu perlu pemahaman bersama terhadap apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Langkah awal dalam melaksanakan negara multikulturalisme warga negara harus memahami inti dari negara multikulturalisme, di antaranya yang harus dibangun oleh warga negara adalah memahami konsep interaksi sosial sebagai dasar dalam membangun negara multikulturalisme. Di bawah ini kita akan mengkaji beberapa konsep interaksi sosial yang menjadi dasar kita memahami apa sesungguhnya interaksi sosial itu.

A. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial menurut Susanto adalah hubungan antarmanusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil interaksi sangat ditentukan oleh nilai dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini. Selanjutnya, pandangan lain tentang interaksi sosial menurut Bonner adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih yang saling memengaruhi mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.

Pendapat lain tentang interaksi sosial menurut Soekanto adalah merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antarindividu, antarkelompok atau antarindividu dan kelompok. Selanjutnya, pandangan Muriyatmoko & Handayani interaksi sosial adalah hubungan antarmanusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial.

Hubungannya dengan membangun keharmonisan dengan konsep Bhineka Tunggal Ika dapat diinterpretasi melalui konsep interaksi sosial sebagai cara dalam membangun kebhinekaan di negara Indonesia. Melalui konsep interaksi sosial keharmonisan suatu negara dapat di jalankan sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat selalu dibangun melalui interaksi sosial.

Realitas yang ada dalam hidup bermasyarakat, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Salah satu interaksi sederhana yang sering sekali terjadi antara anggota masyarakat adalah berpapasan ketika sedang berjalan di trotoar atau jalan. Ketika dua orang akan saling menyapa, mereka sekilas akan saling memandang dari kejauhan. Namun, kemudian mereka saling berpaling dan menghindari kontak mata ketika saling melewati.

Soerjono Soekanto (1990: 67) menyatakan bahwa walaupun orang-orang yang bertemu di jalan tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi. Karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun isyarat orang orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semuanya itu menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan (Saptono dan Bambang, 2006: 67).

Erving Goffman (sebagaimana dikutip Giddens, 1994: 89) berpendapat bahwa dalam kejadian di atas telah terjadi "*civil inattention*" (ketidakpedulian damai atau ketidakpedulian yang sopan), yang sebenarnya berbeda dengan mengabaikan sama sekali orang lain karena masing-masing individu sadar akan kehadiran orang lain, tetapi menghindari gerakan atau bahasa tubuh yang mungkin dianggap mengganggu. Sikap seperti itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan cara itu seseorang mengatakan pada orang lain bahwa mereka tidak perlu saling mencurigai, membenci, atau menghindarinya. Bayangkan betapa runyamnya kehidupan jika setiap orang harus merasa was-was, takut, atau khawatir ketika berpapasan dengan orang lain (Saptono dan Bambang, 2006: 67).

H. Bonner dalam bukunya *social psychology* memberikan rumusan interaksi sosial sebagai berikut (sebagaimana yang dikutip Gerungan, 2010: 62) interaksi sosial adalah suatu hubugan antara individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.

Para ahli jiwa sosial dalam meninjau individu dalam hubungannya dengan dunia sekitar, terutama ditekankan pada sikap terhadap perkembangan misalnya bagaimana pengaruh dunia sekitar terhadap perkembangan individu, pengaruh itu

bersifat mutlak atau tidak. Maka timbullah anggapan bahwa manusia itu dalam hidupnya dan perkembangan pribadinya semata-mata ditentukan oleh dunia luar, dan bagi golongan ini pengaruh-pengaruh dari dalam (faktor keturunan) dianggapnya tidak ada. Misalnya manusia yang bersifat sombong, egoistik, dan sebagainya itu semua adalah karena pengaruh sekitar. Aliran ini disebut empirisme, dipelopori oleh John lock dengan teorinya tabula rasa (Abu Ahmadi, 2007: 50).

Adapun definisi interaksi sosial menurut para ahli (Saptono dan Bambang, 2006: 68) Macionis (1997: 149) mendefinisikan interaksi soisal sebagai proses bertindak (aksi) dan membalas tindakan (reaksi) yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Sementara itu, Broom & Selznic (1961: 11) menyebut interaksi sosial sebagai proses bertindak yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan proses menyesuaikan respons (tindakan balasan) sesuai dengan tindakan orang lain.

Jadi, interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok. Interaksi bukan berarti hubungan verbal antarindividu maupun kelompok, melainkan perilaku, sikap, bahasa tubuh seseorang jika bertemu dengan orang lain itu merupakan suatu bentuk interaksi sosial.

Berangkat dari uraian konsep di atas oleh para ahli memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya interaksi sosial merupakan hubungan antara individu, kelompok sosial dengan harapan hubungan ini dapat mengurai sumbatan menghadapi problem dalam diri individu atau kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah. Dapat dikatakan dengan interaksi sosial kita dapat menjembatani problem yang dihadapi oleh individu maupun kelompok masyarakat. Namun, interaksi sosial tidak juga dipahami sebagai suatu hubungan yang damai dapat juga hubungan atau

interaksi sosial dapat dilakukan melalui hubungan tidak normal, tetapi yang diharapkan kepada kita interaksi sosial diarahkan kepada suatu hubungan yang dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis.

Bila melihat realitas interaksi sosial yang tidak normal, seperti yang dikemukakan oleh Klymcka dalam tulisannya di atas mengemukakan beberapa kegagalan kita dalam membangun interaksi sosial yang normal. Misalnya membangun toleransi, gotong royong, solidaritas bersama yang menjadi harapan negara dengan model multikulturalisme, justru yang terjadi dikita adalah intoleransi, individualisme, konflik sosial. Semua ini merupakan bentuk kegagalan kita dalam membangun harapan *nation state* dengan model negara multikulturalisme. Untuk itu perlu kita melihat bagaimana terjadinya proses interaksi sosial di bawah ini.

B. Proses Terjadinya Interaksi Sosial

Proses terjadinya interaksi sosial yang dijelaskan (Saptono dan Bambang, 2006: 68) dalam bukunya Sosiologi bahwa Interaksi sosial terjadi karena adanya dua pihak yang saling kontak dan melakukan komunikasi. Secara harfiah, kontak berarti "bersama-sama menyentuh". Dalam sosiologi, istilah kontak diartikan sebagai "hubungan dengan orang lain". Hubungan dengan orang lain dapat dilakukan dengan cara tatap muka (langsung), maupun melalui sarana penghubung atau perantara (tidak langsung). Oleh karena itu, kontak sosial juga dapat bersifat langsung (lewat tatap muka), maupun tak langsung dengan menggunakan alat penghubung/alat komunikasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui berbagai sarana komunikasi. Dilihat dari segi interaksi sosial, komunikasi dapat dipandang sebagai proses peraturan informasi dan makna di antara pihak-pihak yang sedang berinteraksi sosial. Sarana utama dalam komunikasi antarmanusia adalah bahasa. Dengan bahasa, manusia mengadakan pembicaraan dengan sesama manusia. Komunikasi menggunakan bahasa disebut komunikasi verbal.

Selain menggunakan bahasa, komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan ekspresi wajah (tertawa, menangis, tersenyum, cemberut, mengerenyit, mengerling) dan gerakan tubuh menggeleng kepala, mengangguk, membungkuk, mengangkat bahu, menarik napas panjang, melambaikan tangan, menggerakan ibu jari atau telunjuk.

Proses terjadinya interaksi sosial ialah ketika individu yang satu dengan yang lainnya sudah mulai melakukan kontak atau komunikasi baik secara langsung atau bertatap muka maupun secara tidak langsung atau melalui media. Maupun secara verbal maupun nonverbal. Inilah awal terjadinya interaksi sosial dikalanga masyarakat kita. Namun, juga terkadang interaksi sosial gagal dibangun disebabkan oleh beberapa hal di antaranya dapat kita lihat di bawah ini.

C. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Keselarasan Sosial (Interaksi Sosial)

Dalam membahas tentang interaksi sosial, kita harus juga melihat beberapa faktor yang menyebabkan mendorong dan menghambat keselarasan sosial, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor-faktor pendorong keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat didorong oleh adanya kerja sama dan akomodasi.
2. Faktor penghambat keteraturan sosial adalah adanya persaingan, kontroversi, dan konflik sosial.

Berdasarkan analisis konsep di atas sebagai faktor yang mendorong dan menghambat keselarasan sosial dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis kondisi di suatu daerah yang memiliki fenomena multikulturalisme dalam membangun keharmonisan antaretnis di daerah. Faktor-faktor ini dapat dikembangkan di lapangan berdasarkan temuan-temuan riset yang menyebabkan mengapa daerah-daerah di Indonesia mengalami benturan antaretnis.

Bila dilihat fenomena yang ada saat ini pengaruh interaksi sosial atau keselarasan sosial dapat diamati melalui perilaku individu-individu yang merupakan bagian dari masyarakat menentukan bagaimana keadaan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebiasaan warga masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya akan membentuk situasi lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, rapih dan indah. Sebaliknya, jika masing-masing warga masyarakat tidak peduli dengan keadaan lingkungannya, maka situasi lingkungan masyarakat tersebut diwarnai dengan egoisme dan ketidakteraturan, kehidupan masyarakat terdapat sejumlah nilai dan norma yang membatasi perilaku seseorang demi terciptanya harmonisosial. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan kegagalan dalam membangun keselarasan sosial di masyarakat multikultural. Namun, apa yang disebutkan di atas bukan fenomena yang permanen dalam menganalisis kondisi keselarasan sosial, masih banyak yang dapat memengaruhi kegagalan masyarakat multikultural dalam membangun keselarasan sosial yang akan kita pelajari dari setiap fenomena hubungan antaretnis di Indonesia.

Untuk memperkuat penjelasan tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial dapat kita gunakan analisis di bawah ini sebagai berikut.

Interaksi sosial terjadi karena didorong oleh sejumlah faktor, dalam buku sosiologi Saptono dan Bambang (2006: 69) menyatakan bahwa interaksi sosial terjadi karena didorong oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri seseorang dan faktor dari luar individu.

1. Faktor dari Dalam Diri Seseorang

a. Dorongan Kodrati sebagai Makhluk Sosial

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk bergaul dengan sesama munusia. Bahkan menurut Howard Gardner, setiap manusia memiliki potensi kecerdasan antar pribadi, yaitu kecenderungan dalam mengelolah hubungan dengan orang lain.

b. Dorongan untuk Memenuhi Kebutuhan

Dalam kehidupan sehari-hari, menusia menyadari bahwa banyak hal dalam hidupnya yang tergantung pada orang lain. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, setiap orang memerlukan orang lain, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, diterima, dihargai, dan lain sebagainya jelas memerlukan orang lain sebagai sumber pemenuhannya. Oleh karena itulah, manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dirinya.

c. Dorongan untuk Mengembangkan Diri
dan Memengaruhi Orang Lain

Manusia juga memiliki potensi dan kehendak untuk menembangkan diri sendiri dan sesamanya. Upaya pengembangan pribadi tersebut antara lain dilakukan

dengan melakukan imitasi, identifikasi. Dalam rangka imitasi dan identifikasi itulah seseorang didorong untuk melakukan interaksi sosial.

2. Faktor dari Luar Individu

Di samping dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, interaksi sosial juga dirangsang oleh hal yang ada di luar diri seseorang. tindakan orang lain, sikap diam orang lain, atau kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar kehidupan seseorang merupakan hal-hal yang dapat merangsang timbulnya interaksi sosial. Karena disapa orang lain, maka kita terlibat interaksi dengan orang tersebut. Karena penasaran atas sikap diam orang yang kita kenal, maka kita terdorong untuk bertanya dan mencari tahu masalahnya sehingga terjadi interaksi sosial. Karena ingin mengetahui apa sebab-sebab sebuah kecelakaan lalu lintas. Kita bertanya kepada orang yang berada di tempat kejadian, maka terjadilah interaksi sosial. Interaksi sosial selalu terjadi karena ada aksi dan reaksi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Selain dari faktor-faktor di atas, adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial dalam bukunya Vide Bonner, *Social Psychology* yang dikutip oleh (Gerungan, 2010: 62).

a. Faktor Imitasi

Faktor ini telah diuraikan dalam perkembangan ilmu jiwa sosial mengenai pendapat Gabriel Tarde yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan faktor imitasi saja. Imitasi bukan merupakan dasar pokok dari semua interaksi sosial seperti yang diuraikan oleh Gabriel Tarde, melainkan merupakan suatu segi dari proses interaksi sosial yang menerankan mengapa dan bagaimana

dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku di antara orang banyak. Dengan cara imitasi, pandangan dan tingkah laku seseorang mewujudkan sikap-sikap, ide-ide, dan adat-istiadat dari suatu keseluruhan kelompok masyarakat, dan dengan demikian pula seseorang itu dapat lebih melebarkan dan meluaskan hubungan-hubungannya dengan orang-orang lain.

b. Faktor Sugesti

Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya adalah bahwa dalam imitasi itu orang yang satu mengikuti sesuatu diluar dirinya; sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya.

Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat kita rumuskan sebagai suatu proses di mana seorang indvidu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu.

c. Faktor Identifikasi

Faktor lainnya yang juga memegang peranan penting dalam interaksi sosial tersebut adalah identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dari uraian Freud mengenai cara-cara seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya hal tersebut dimulai pada sekitar umur 5 tahun.

Identifikasi dilakukan orang kepada orang lain yang dianggapnya ideal pada suatu segi, untuk memperoleh sistem norma, sikap, dan nilai yang dianggapnya ideal dan yang masih merupakan kekurangan pada dirinya.

d. Simpati

Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Peranan simpati cukup nyata dalam hubungan persahabatan antara dua atau lebih orang.

Simpati hanya dapat berkembang dalam suatu relasi kerja sama antara dua atau lebih orang, yang menjamin terdapatnya saling mengerti. Justru karena adanya simpati itu dapatlah diperoleh saling mengerti yang lebih dalam. *Mutual understanding* tidak dapat dicapai tanpa adanya simpati.

D. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Interaksi yang dilakukan secara berulang akan menghasilkan proses sosial. Proses sosial adalah perilaku berulang yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (interaksi sosial). Horton (1983: 74) menyebutkan 5 (lima) kemungkinan proses sosial, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja Sama

   Kerja sama adalah usaha bersama antarmanusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial individu-individu atau kelompok-kelompok berusaha saling menolong untuk mencapai tujuan bersama atau mengoordinasikan kegiatan mereka guna mencapai tujuan bersama.

Setiap bentuk interaksi sosial dapat berpengaruh kepada pribadi dan masyarakat yang bersangkutan. Kerja sama cenderung memunculkan pribadi yang sensitif pada orang lain, memerhatikan orang lain, merasa aman, tenang, dan kalem, serta tidak agresif.

2. Persaingan atau Kompetisi
   Persaingan adalah usaha untuk melakukan sesuatu secara lebih baik dibanding orang atau kelompok lain dalam mencapai tujuan.
3. Konflik
   Konflik adalah proses di mana orang atau kelompok berusaha memperoleh sesuatu (imbalan tertentu) dengan cara melemahkan atau menghilangkan persaingan atau kompetitor lain, bukan hanya mencoba tampil lebih baik seperti dalam kompetisi.
4. Akomodasi
   Akomodasi adalah proses mencapai persetujuan sementara di antara pihak-pihak yang sedang atau mempunyai potensi untuk berkonflik.
5. Asimilasi
   Asimilasi adalah proses peleburan beberapa kebudayaan menjadi satu, hingga akar konflik yang bersumber pada perbedaan kebudayaan terhapus.

Berangkat dari teori interaksi sosial di atas menunjukkan interaksi sosial bukan hanya ada pada hubungan yang harmonis, bisa saja hubungan interaksi sosial dapat dilihat melalui konflik sosial. Oleh karena itu, bila kita mengukur indeks interaksi sosial dapat kita gunakan landasan teori ini. Namun, saya kira belum lengkap bila dalam mengkaji interaksi sosial pada suatu masyarakat tidak dimasukan indikator akulturasi di mana akulturasi merupakan suatu bentuk interaksi yang menghendaki adanya peleburan antaretnis dalam suatu

kehidupan bersama, misalnya melalui hubungan pernikahan antaretnis yang berbeda.

Dengan demikian dalam mengukur indeks interaksi sosial dapat digabungkan antara teori di atas dengan tambahan indikator akulturasi supaya penilaian keharmonisan pada suatu daerah dalam menentukan apakah model negara multi-kulturalisme dapat dilaksanakan. Indikator akulturasi bisa menjadi penyempurna dalam menentukan indeks kehar-monisan sosial sebagai tolak ukur dalam menilai inplementasi negara multikulturalisme di suatu negara.

E. Upaya Membangun Keharmonisan melalui Konsep Kerukunan Antaretnis

Pengertian kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan dan saling menjaga satu sama lain. Maka dari itu, setiap tanggal 3 Januari dinyatakan sebagai hari kerukunan nasional. Kata kerukunan berasal dari bahasa arab ruknun (rukun) kata jamaknya adalah arkan yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya).

Dalam bahasa Indonesia arti rukun ialah: Rukun (nominal), berarti: Sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukunnya asas, yang berarti dasar atau sendi: semuanya terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya agama.

Rukun (ajektif) berarti: baik dan damai tidak bertentangan: hendaknya kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan berarti: mendamaikan menjadikan

bersatu hati. Kerukunan berarti: perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke ikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling memercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keruku-nan ialah hidup damai dan tenteram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

Teori kerukunan sosial memandang keselarasan/harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antar elemen masyarakat dan kulturnya. Setidaknya, ada lima teori dasar

berkaitan dengan kerukunan (Turner, 1991: 234, dalam jurnal Muhammad Rais, 2012: 190), yaitu sebagai berikut.

1. Teori nilai, adalah kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling menaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan di jalankan dalam masyarakat.
2. Teori struktural, adalah kerukunan sosial dipengaru-hi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain, kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan.
3. Teori idealis, adalah kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan.
4. Teori resiprositas, adalah kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap.
5. Teori interaksi, adalah kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antarkelompok, etnis, agama dll., dalam masyarakat yang saling mengun-tungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

Jadi, untuk mencapai kerukunan dalam suatu masyarakat, maka seluruh masyarakat dalam suatu daerah harus menaati seluruh Peraturan yang berada di daerah tersebut, kemudian harus tunduk terhadap norma-norma masyarakat yang menjadi kebiasaan masyarakat daerah, dan harus saling memahami akan setiap perbedaan yang berada di dalam masyarakat. Untuk melihat lebih jelas tentang kerukunan maka dapat dilihat melalui model-model membangun kerukunan sebagai berikut.

1. Konsep Melting Pot

Bill Watson (2004) yang dikutip oleh (Tanto Sukardi dan Subandowo, 2014: 102), pada tahap awal cita-cita masyarakat multirasial dan multikultural dibentuk melalui proses asimilasi kelompok minoritas ke dalam kelompok dominan. Kemudian pada tahap berikutnya berbagai kelompok tersebut mengasimilasikan dirinya sebagai masyarakat baru sehingga terbentuklah suatu masyarakat bangsa sebagai hasil dari asimilasi tersebut. Proses seperti itu diabadikan dalam sebuah teori terkenal, yaitu *melting pot.*

Teori *melting pot* pada awalnya diwacanakan oleh J. Hektor seorang imigran dari normandia. Dalam teorinya dia menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui, bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestan* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal dari Inggris yang Protestan (Dede Rosyada, 2014: 2).

Dalam jurnal (Ahmad Rivai Harahap, 2006: 29) menyatakan bahwa Dalam teori *melting pot* diupayakan menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya masing-masing. Jadi dalam hal ini teori *melting pot* merupakan suatu teori yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai macam konflik SARA terutama di negara yang memiliki multirasial atau multietnis yaitu dengan cara mengumpulkan dam membaurkan masyarakat yang multikultural, multietnis tersebut disuatu wadah atau daerah dengan meleburkan masing-masing kebudayaan tersebut dengan berbagai macam kebudayaan yang lain sehingga dari hasil peleburan dan perpaduan

antara kebudayaan tersebut melahirkan suatu keudayaan baru di daerah tersebut.

Dalam proses menuju integrasi antara etnis/ras dalam masyarakat Amerika Serikat scara berangsur-angsur terbentuk filsafat hidup yang berjalan secara integrasional dan komulatif. Proses terbinanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan proses terbinanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan proses yang panjang, merupakan proses yang penuh prasangka-prasangka etnis/ras dan kultural, tetapi dengan kearifan kolektif semua hambatan itu dapat diatasi. Bersamaan dengan itu terbentuk pula kemauan yang kuat untuk membentuk identitas kultur yang baru, yaitu identitas kultur Amerika Serikat yang bersifat multietnis/multirasial (Tanto Sukardi dan Subandowo, 2014: 102).

Ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk maka teori *melting pot* kemudian mulai dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl sebagai* sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Angso Saxon Protentant* (WASP) diakomodasi dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya, interaksi kultural antarberbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism,* yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan

mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa (Dede Rosyada, 2014: 2).

2. Konsep Sald Bowl

Menurut Nathan Glazer "*salad bowl*" atau "*glorious mosaic*", yang di dalamnya setiap unsur etnis dan ras dalam populasi dapat memertahankan kekhasannya. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada pandagan multikulturalis tunggal, melainkan macam-macam sikap tentang syarat multikulturalisme (Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, 2013: 572).

Jadi, teori *salad bowl* merupakan teori untuk mencegah atau mengantisipasi timbulnya konflik yang diakibatkan oleh multikultural ataupun multietnis yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai macam etnis ke dalam satu wadah atau tempat dengan tetap menjaga kebudayaan masing-masing etnis tersebut sehingga dengan hal ini secara langsung maupun tidak langsung setiap masyarakat akan sadar akan pentingnya menjaga kerukunan antara masyarakat berbagai macam etnis sehingga potensi konflik yang disebabkan karena keanekaragaman bisa dikendalikan.

3. Konsep Model Negara Multikulturalisme

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multi-kulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran

politik (Azyumardi Azra, 2007). Sedangkan pengertian masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah adat serta kebiasaan (*a multicultural soceity, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinc conception of the world, sistem of (meaning, values, forms of social organizations, historis,customs and practices"* Parekh,1997 yang dikutip dari Azra, 2007).

Berdasarkan teori multikulturalisme yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi dapat ditarik beberapa penegasan konsep sebagai indikator dalam mengukur kondisi model multikulturalisme bila suatu wilayah kehidupan warga negaranya yang berbeda keyakinan ideologi, berbeda ras, berbeda tradisi, berbeda pilihan politik dan berbeda cita-cita dan tujuan dapat dipersatukan oleh prinsip-prinsip yang ada di dalam negara multikulturalisme sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut di bawah ini.

a. Prinsip Egalitarian (Persamaan)

   Bila warga negara dalam satu negara mengang-gap bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama, maka kewajiban negara harus memperlakukan warga negaranya dengan pelayanan yang sama tanpa ada yang merasa bahwa dirinya tidak mendapatkan pelayanan dari negara sebagaimana warga negara lainnya. Perlakukan diskriminatif dari pemerintah yang mewakili negara pada warga negaranya inilah sebagai ukuran berlangsungnya kehidupan multikultural di suatu negara.

b. Prinsip Kerja Sama

Multikulturalisme menghendaki adanya kerja sama antarwarga negara tanpa ada yang merasa dirugikan kepentingan hidupnya. Dengan kesadaran selalu bekerja sama dengan warga negara yang berbeda etnis, berbeda keyakinan beragama, berbeda ras, berbeda tradisi, dan berbeda pilihan politik inilah sebagai salah satu kehidupan multikultural.

c. Prinsip Toleransi

Dalam negara multikulturalisme selalu mengedepankan sikap toleransi dalam hubungan interaksi sosial kepada mereka yang berbeda agama, ras. Tradisi, keyakinan ideologi dan pilihan politik. Dengan sikap toleransi yang terbangun di suatu negara dapat dikatakan negara tersebut dapat melaksanakan model negara multikulturalisme.

d. Prinsip Otonomi

Bila suatu negara dapat dikatakan telah melaksanakan model negara multikuralisme bila warga negara memiliki sikap otonom dalam segala aktivitasnya. Demikian juga daerah harus diberikan otonomi dalam mengelola pemerintahannya. Sikap otonom inilah sebagai standar dalam menuju negara model multikulturalisme.

e. Prinsip Akomodatif

Dalam negara multikulturalisme diperlukan sikap akomodatif (menampung aspirasi) warga negara dan penyelenggara negara dalam menjalankan kebijakan agar supaya kehidupan dalam suatu negara dapat berjalan normal. Dengan sikap akomodatif semua kepentingan dari warga negara yang berbeda etnis, berbeda ras, berbeda agama dan berbeda pilihan

politik dapat diselesaikan dengan cara-cara damai tanpa ada yang dirugikan kepentingannya.

Dalam mendukung teori tentang multikulturalisme di atas *Will Kymlicka* mengemukakan pendapatnya bagaimana mengelola negara model multikulturalisme sebagai berikut sebagaimana kutipan tulisannya tentang multikulturalisme mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri. Di mana minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai penaklukan dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri sampai pada imigrasi sukarela perorangan dan keluarga. Perbedaan-perbedaan dalam cara penggabungan itu memengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas (dalam bukunya kewargaan multikultural 2003: 13).

Berdasarkan kajian beberapa teori pada subpokok bahasan di atas menunjukkan membangun sebuah keharmonisan dalam suatu negara dengan kondisi demografi yang heterogen diperlukan berbagai model strategi dalam mewujudkan negara multikulturalisme di Indonesia. Di antara model tersebut diulas pada sub pokok di atas.

Dengan demikian, cita-cita dalam mewujudkan *Nation State* di Indonesia dapat kita gunakan beberapa perbandingan teori apakah menggunakan teori *melting poot* atau teori Sald Bowl atau model negara multikulturalisme. Yang jelas membangun negara *Nation State* harus ada model yang kita gunakan sebagai strategi dalam mewujudkan cita-cita *The Founding Fathers* dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Fakta-fakta yang ditemui di daerah-daerah di Indonesia adalah dalam mewujudkan *Nation State* dangan melakukan pendekatan

model negara multikulturalisme. Asumsi tersebut ditunjukan oleh substansi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang lebih banyak memuat model negara multikulturalisme dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang secara empirik kondisi demografi kita terdiri dari beberapa karakteristik yang dimiliki oleh berbagai etnis yang memiliki berbagai perbedaan di antara etnis. Untuk membahas lebih lanjut tentang karakeristik etnis dapat kita bahas pada bagian bab berikutnya guna mengetahui seperti apakah etnis tersebut.

Bila kita tidak mengetahui bagaimana karakeristik etnis di Indonesia model apapun yang kita gunakan dalam mewujudkan cita-cita *The Founding Fathers* akan mengalami kegagalan dalam mewujudkannya sehingga perlu diulas pada buku ini pada bab tersendiri tentang apa itu etnis dan bagaimana terbentuknya etnis dan karakteristik dari etnis, pengetahuan ini diperlukan sebagai dasar dalam menjalankan berbagai teori model membangun *Nation State* sebagaimana yang telah diulas pada sub pokok bahasan di atas. Untuk mengetahui konsep etnis yang menjadi fokus dalam membangun negara *Nation State* dapat kita ketahui maknanya pada bagian bab lahir dan tumbuhnya konsepsi etnisitas.

BAB IV
LAHIR DAN TUMBUHNYA KONSEPSI ETNISITAS

Negara Republik Indonesia sangat menarik untuk dilakukan pengkajian berkembangnya etnis atau etnik, mengapa demikian karena di Republik yang kita cintai ini, dihuni oleh penduduknya yang bukan hanya berasal dari salah satu etnik, namun di negara kita ini, tumbuh dan berkembang lebih kurang 300 etnik yang mendiami tanah air yang kita cintai. Kondisi demografi ini dapat dijadikan sebagai fakta sejarah tentang keanekaragaman negara yang kita cintai. Sebagai ungkapan rasa sukur kita terhadap kondisi demografi sampai saat ini penduduk yang mendiami dari berbagai etnik dapat hidup rukun, sekalipun di beberapa daerah ada gerakan menuntut keadilan kepada pemerintah pusat, tetapi tuntutan itu sangat manusiawi, karena semua warga negara darimanapun asal etniknya, pemerintah Pusat harus mengakomodasi keinginan rakyatnya tersebut.

Demikian halnya dengan konflik etnis yang terjadi antara etnik Papua dengan etnis Jawa yang ada di Jawa Timur, konflik Poso, Konflik Maluku yang dilatar belakangi oleh tidak saling menghargai keyakinan dan penghargaan kepada Ras etnik lain. Dapat dikatakan konflik terjadi di setiap daerah bisa diakibatkan kurang memahaminya masyarakat sebagai warga negara pada

kultur dan keyakinan agama dari etnik lain. Artinya, penyebab konflik di daerah yang bermasalah selalu diakibatkan oleh dua pihak, pihak pertama konflik bisa terjadi bila mayarakat tidak menghargai etnis lain yang berbeda ras keyakinan dan kultur, dan pihak kedua managemen negara dalam hal ini pemerintah Pusat yang tidak menyelesaikan secara bijaksana konflik yang terjadi kepada etnis yang bermasalah.

Dengan melihat fenomena demografi dan konflik di beberapa daerah tersebut, maka pemerintah Indonesia harus berhati-hati mengelola rakyatnya yang terdiri dari beragam etnik, kalau pihak pemerintah tidak berhati-hati memperlakukan etnik yang ada akan berakibat kepada *failed state*. Mengapa demikian? Karena semua etnik yang ada di Republik ini mau hidup sejahtera dan mendambakan keadilan dari pemerintah Pusat sebagaimana etnik Jawa yang ada di sekitar ibu Kota Negara. Pemahaman kita bicara Indonesia bukan hanya pulau Jawa, tetapi ada kewajiban pemerintah pusat harus memperlakukan yang sama, khususnya kesejahteraan etnik yang ada di luar pulau Jawa. Maksud penulis ketika pemerintah abai melaksanakan sesuai dengan amanah dasar negara Pancasila dan konstitusi pada pasal 18 UUD NRI 1945, pasal 27 UUD 1945, pasal 31, Pasal 32 UUD NRI 1945 dan pasal 34 UUD NRI 1945, maka Republik ini akan mengalami apa yang saya sebut sebagai gerakan separatisme yang berasal dari etnik tertentu. Salah satu contoh pemerintah Republik Indonesia mengalami masalah membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme, terjadinya gerakan separatisme dari etnik Aceh melalui gerakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Dua gerakan ini bila kita lihat memiliki tujuan yang sama, di mana kedua gerakan ini menuntut kepada pemerintah pusat untuk mendirikan negara baru keluar dari NKRI. Bila dilihat dari apa yang menjadi tuntutan kedua gerakan ini bermula dari

tuntutan keadilan dan kesejahteraan daerahnya, di mana gerakan ini menghendaki pemerintah pusat menghargai kultur dan keadilan dalam menuntut kesejahteraan bersama.

Sejarah kelam perjalanan negara di era orde baru dan di era Reformasi di atas, memberikan petunjuk kepada kita, supaya Pemerintah Pusat harus memahami karakter setiap etnis dan kehendak etnis tersebut. Bila hal ini tidak menjadi bahan renungan kita dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multukultikulturalisme, di mana kita melupakan fakta-fakta sejarah yang ada di era Orde Baru dan di era reformasi kegagalan dalam membangun negara multikulturalisme di atas. Pemerintah Pusat akan selalu berhadapan dengan masalah konflik etnis yang akan berkepanjangan, dan akhirnya akan bermuara kepada *failed state* atau negara gagal.

Untuk mengawali pemahaman kita dalam mengelola negara multikulturalisme, sebaiknya kita mengetahui konsep apa sesungguhnya itu etnik atau etnis tersebut. Untuk memahaminya marilah kita mengkaji apa sesungguhnya etnik atau etnis di bawah ini.

A. Pengertian Etnisitas

Kata etnis *(etnic*), berasal dari bahasa Yunani, *Etnhos* yang merujuk pada suatu pengertian (identik) pada dasar geografis dalam suatu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu (Rudolf: 1986: 2).

Istilah etnis umumnya hanya digunakan untuk suku-suku tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia, namun telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat, serta tetap memertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka yang dikerjakan, dan secara fisik mereka benar-benar khas, misalnya etnik Cina, etnik arab, etnis bugis, dan etnis Gorontalo.

Istilah etnis juga dipakai sebagai sinonim dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia, misalnya etnik Bugis, etnik Minang, etnik dari Pakpak, etnik Dani, etnik Sasak, etnik Gorontalo dan ratusan etnik lainnya. Akhir-akhir ini istilah suku mulai ditinggalkan karena berasosiasi dengan keprimitifan, istilah etnis sendiri merujuk pada pengertian kelompok masyarakat.

Etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal usul sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai identitas kita tergantung kepada apa yang kita pikiran sebagai bukan kita.

Pandangan yang mengatakan kesamaan etnis untuk mengelompokan etnis didasarkan pada adat kebiasaan dan padangan yang khas tidak cocok untuk diterapkan pada masyarakat yang latar belakang dan cara hidupnya berbeda sehingga homogenitas etnis tetap dipertahankan meskipun terdapat beragam cara hidup dan bentuk sosial. Penyebaran masyarakat yang berangkat dari budaya yang sama membentuk ciri etnis yang berbeda ketika masyarakat tersebut mulai menyebar dan beradaptasi dengan lingkungan tempat masing-masing dari mereka menetap dan tinggal.

Menurut *Frederich Bart* (1988: 9) istilah etnis menujuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal usul, ataupun kombinasi dari ketegori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. *Frederich Bart* (1988) dan Zastrow (1989), menganggap etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistim nilai budayanya.

Thomas Sowell (dalam Frederich Bart 1998: 9) yang menulis tentang *Ethnik of America,* mengemukakan bahwa etnis merupakan sekolompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma

misalnya, kesamaan agama, Negara asal, suku bangsa, kebudayaan, dan lain-lain yang semuanya berpayung pada suatu kelompok yang disebut kelompok etnis.

Narroll (dalam Frederich Bart 1998: 9) berpendapat bahwa etnis sebagai suatu populasi yang:

1. Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan.
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya.
3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan;
4. Membentuk ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan kelompok populasi lain.

Definisi etnis di atas menjelaskan pembatasan-pembatasan kelompok etnis yang didasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain.

Menurut Em Zul Fajri dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, etnis berkenaan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ariyuno Sunoyo dalam Kamus Antropologi, bahwa: "Etnis adalah suatu kesatuan budaya dan teritorial yang tersusun rapi dan dapat digambarkan ke dalam suatu peta etnografi" (Sunoyo, 1985).

Setiap kelompok memiliki batasan-batasan yang jelas untuk memisahkan antara satu kelompok etnis dengan etnis lainnya. Menurut Koentjaraningrat (1982), konsep yang tercakup dalam istilah etnis adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.

Suku bangsa yang sering disebut etnik atau golongan etnik mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri karakteristiknya. Ciri-ciri tersebut terdiri dari hal-hal berikut (Payung Bangun, 1998).

1. Memiliki wilayah sendiri.
2. Mempunyai struktur politik sendiri berupa tata pemerintahan dan pengaturan kekuasaan yang ada.
3. Adanya bahasa sendiri yang menjadi alat komunikasi dalam interaksi.
4. Mempunyai seni sendiri (seni tari lengkap dengan alat-alatnya, cerita rakyat, seni ragam hias dengan pola khas tersendiri).
5. Seni dan teknologi arsitektur serta penataan pemukiman.
6. Sistem filsafat sendiri yang menjadi landasan pandangan, sikap dan tindakan.
7. Mempunyai sistem religi (kepercayaan, agama) sendiri.

Etnisitas secara substansial bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya tetapi keberadaannya terjadi secara bertahap. Etnisitas adalah sebuah proses kesadaran yang kemudian membedakan kelompok kita dengan mereka. Basis sebuah etnisitas adalah berupa aspek kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, seperti misalnya adanya kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, ada kesamaan struktural sosial, bahasa, upacara adat, akar keturunan, dan sebagainya. Berbagai ciri kesamaan tersebut, dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu berperan dan dianggap biasa. Dalam kaitannya, etnisitas menjadi persyaratan utama bagi munculnya strategi politik dalam membedakan "kita" dengan "mereka" (Ivan dan Hadar, 2000).

Dari beberapa macam argumentasi mengenai etnis tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa yang mana etnis adalah sebuah komunitas masyarakat yang memiliki berbagai macam kesamaan dalam kehidupan sosiokulturalnya, kesamaan

tersebut yang membedakan mereka dengan komunitas-komunitas lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, yang muncul dalam kehidupan sehari-hari lebih menjurus pada pengklaiman "keakukan dan kekitaan".

Orang yang berasal dari suatu kelompok etnis cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik. Kecenderungan ini disebut sebagai etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk memandang norma dan nilai yang dianut seseorang sebagai hal yang mutlak dan digunakan sebagai standar untuk menilai dan mengukur budaya lain (Coleman dan Cressey, 1984).

Dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan sikap menurut Azwar (1998) adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan dan perubahan sikap ini adalah faktor internal dan eksternal individu (Gerungan, 1991).

1. Faktor-Faktor Internal

   Pengamatan dalam komunikasi melibatkan proses pilihan di antara seluruh rangsangan objektif yang ada di luar diri individu. Pilihan tersebut berkaitan erat dengan motif-motif yang ada dalam diri individu. Selektivitas pengamatan berlangsung karena individu tidak dapat mengamati semua stimulus yang ada.

2. Faktor-Faktor Eksternal

   Sikap dapat dibentuk dan diubah berdasarkan dua hal, yaitu karena interaksi kelompok dan komunikasi. Gerungan juga menambahkan apabila sikap sudah terbentuk dalam diri manusia, maka hal tersebut menentukan pola tingkah lakunya terhadap objek-objek sikap. Pembentukan sikap ini tidak terjadi dengan

sendirinya, namun berlangsung dalam interaksi manusia, yaitu interaksi di dalam kelompok dan diluar kelompok. Pengaruh dari luar kelompok ini belum cukup untuk merubah sikap sehingga membentuk sikap baru.

Dalam narasi politik Indonesia pasa reformasi 1998 terlihat secara jelas bagaimana politik etnis sebagai embrio atau dinamika tersendiri dalam perhelatan politik lokal. Seiring dengan dinamika fragmentasi masyarakat lokal ke dalam berbagai macam subsistem sosial membuat etnisitas sebagai suatu kekuatan politik dalam mendorong percaturan politik, baik Pemilu Presiden, DPR dan DPRD, maupun pemilihan kepala daerah.

B. Perkembangan dan Pembangunan Kelompok Etnis

Ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat dari suatu kelompok etnis, yaitu dari segi religi, interaksi, kulturasi, ritual, dan idealisasi.

1. Religi

   Religi merupakan sebuah akidah, agama, maupun kepercyaan yang dimiliki oleh setiap orang. Seseorang pasti memercayai keberadaannya Tuhan. Dan mengikuti ajaran yang diadakannya. Pada pembangunan kelompok etnis, religi merupakan pusat dalam menjalani pembangunan kelompok etnis. Semua suku memercayai tentang keajaiban. Adapun etnis yang hanya memercayai mengenai agama yang dianutnya dan melaksanakannya. Dewa, Tuhan, dan lain-lain semua etnis percaya mengenai keajaiban yang ada, serta menganut agama yang dimilikinya.

2. Interaksi

   Interaksi merupakan sebuah tangggapan yang dilakukan seseorang kepada orang yang lain. jika seseorang melihat orang mengalami kesulitan, pasti orang tersebut akan membantunya. Jika kita merasakan kesepian, kita dapat mengajak seseorang yang lain untuk berbicara. Dalam pembangunan kelompok etnis, biasanya jaringan interaksi merupakan komponen untuk bisa bersosialisasi dengan seseorang di dalam etnisnya sendiri. Adapun etnis yang berinteraksi dengan etnis lain, akan tetapi jika suatu etnis berkelompok dengan etnis lain kemudian menimbulkan suatu kerusuhan itu berarti salah dalam berinteraksi.

3. Kulturisasi

   Kulturisasi merupakan kebudayaan yang ada pada wilayah atau tempat itu sendiri. Semua orang pasti mempunyai kebudayaannya masing-masing. Apalagi jika kebudayaan itu merupakan kebudayaan sehari-hari dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam pembangunan kelompok etnis, kulturalisasi sangat diperlukan dalam membedakan etnis yang lain. Karena kulturisasi merupakan simbolis dan identitas dalam kelompok etnis.

4. Ritual

   Ritual merupakan sebuah atraksi yang dilakukan pada wilayah atau tempat tertentu dalam acara ritual, kebudayaan dan kepercayaan bergabung menjadi satu. Acara ritual merupakan cara di mana sudah menjadi tradisi dan mempercayakan hal-hal sesuatu yang kadang bersifat mistis. Pada zaman dahulu, kebudayaan nenek moyang kita selalu mengadakan acara ritual dan hingga saat ini ritual masih tetap saja ada, seperti ritual memuja nenek moyang kita yang telah meninggal, memanggil hujan, dan lain-lain. Dalam pembangunan kelompok etnis, ritual termasuk dalam religi dan kulturisasi. Kebanyakan

kelompok etnis, selalu mementingkan kebudayaan dan kepercayaan masing-masing agar tidak membawa bencana dari sekelompok etnis tersebut.

5. Idealisasi

   Idealisasi merupakan sebuah cita-cita yang dimiliki oleh seseorang untuk menggapai kesuksesan, keinginan orang menjadi sukses harus diperlukan dengan usaha yang keras. Pembangunan kelompok etnis, kelompok etnis memiliki tujuan dan cita-cita dalam menggapai masa depan yang cemerlang. Itupun dari sebuah ritual dan kulturisasi. Jika mereka menjalani semuanya dengan baik, maka sebuah idealisasi akan tercapai dengan baik dan meng-hasilkan nilai baik bagi masa depan. Masyarakat tradisional atau kelompok etnis, bebas untuk melakukan adat istiadat yang diyakininya tampa merasa terancam oleh kelompok etnis lain tetapi bila bersikap toleran terhadap kelompok etnis lain sehingga setiap orang tidak perlu meninggalkan ciri etnis dan budaya untuk berinteraksi dengan sekolompok etnis lain untuk menyesuaikan diri terhadap hubungan-hubungan institusi pasar.

   Kepatuhan akan keputusan bersama yang timbul baik konsitusi kenegaraan maupun hukum, tertulis atupun tidak tertulis karena berdasarkan pada kebiasaaan harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Meskipun mereka berasal dari etnis dan budaya yang berbeda tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban sipil sebagai warga Negara yang mendukung membangun Gorontalo kearah yang lebih baik.

C. Penyebaran Budaya Kelompok Etnis

Kebudayaan suku-suku ras tertentu mungkin bisa menjadi alternatif penyamaan budaya dan perkembangan kulturalisasi. Penemuan inovatif dan bermanfaat bagi kehidupan harus dikembangkan dan disebarkan ke seluruhnya untuk pengembangan dan pemanfaatan untuk kepentingan kehidupan sehari harinya. Begitu pun dengan budaya kelompok etnis. Teknik persebaran budaya kelompok etnis dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

1. Eksplorasi

   Eksplorasi merupakan penjelajahan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam penyebaran kultur etnis, eksplorasi merupakan hal utama untuk memancing perhatian etnis lainnya untuk masuk ke etnis itu sendiri. Salah satu contoh budaya yang menggunakan teknik eksplorasi, yaitu budaya Eropa menjelajah seluruh dunia, memberikan ilmu dan budayanya disebarkan ke tempat wilayah yang dijelajahinya.

2. Pewarisan

   Dalam bentuk-bentuk warisan ini, biasanya jika budaya tersebut hampir punah. Budaya tersebut diwariskan kesuku atau etnis yang yang lain sehingga kelompok etnis tersebut mendapatkan budaya yang sama dengan budaya yang diwariskannya itu. Terkadang banyak kelompok etnis yang tidak menginginkan budayanya dimasuki oleh budaya lain, contohnya budaya timur tidak mau dimasuki budaya barat. Teknik ini sebenarnya jarang dilakukan oleh etnis lain, karena hal yang telah dikatakan sebelumnya tidak ingin mencampuri dengan budaya lain.

3. Keturunan

   Banyak budaya yang tercampur dengan budaya lain, hal ini terjadi karena pencampuran budaya yang disebabkan

oleh keturunan. Keturunan juga berpengaruh bagi budaya kelompok etnis. Sebagai contoh, jika kita dewasa nanti, jika kita merupakan orang Sunda dan jodoh kita ialah orang Gorontalo maka keturunan yang akan dihasilkan ialah Sunda Gorontalo.

4. Provokasi (Peperangan)

   Provokasi merupakan penggusaran atau penghasutan. Teknik ini biasanya efek yang ditimbulkan ialah terjadinya perang antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Sistem ini merupakan sistem untuk menghasut dan menggusarkan budaya lain sehingga ada rasa kekesalan dan kemarahan terhadap budaya lainnya. Akhirnya, terjadilah peperangan, di balik peperangan pasti ada yang dinamakan kedamaian dan permusuhan. Jika terjadi kedamaian, maka penyebaran kelompok etnis menjadi satu karena perdamaian yang telah diselesaikan. Akan tetapi, jika terjadi permusuhan biasanya ada dua kemungkinan pada penyebaran kelompok etnis yaitu yang pertama memperbanyak pasukan kelompok etnis dan dan yang kedua kemungkinan banyaknya yang hilang dan berpindah ke kelompok etnis lainnya.

   Demikian kajian tentang bagaimana terjadinya penyebaran etnis di suatu wilayah, ekspansi etnis kewilayah tertentu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas dan untuk membahas lebih lanjut tentang pemahaman tentang etnisitas marilah kita analisis pandangan mengenai pengelompokan etnis di bawah ini.

D. Pandangan Mengenai Kelompok Etnis

Munculnya kelompok etnis secara hereditas menimbulkan suatu keyakinan bahwa suatu individu tidak akan mengalami

penolakan dalam kelompok etnis tersebut. Namun, kesadaran akan memurnikan keturunan agar tidak tercemar oleh ciri primordial suku atau etnis lain menimbulkan aktivitas *intermarriage*. Bahkan, dalam kasus tertentu, terdapat peraturan yang dibuat secara kostitusi yang melarang pernikahan dengan orang yang berbeda ras untuk menghindari affiliasi antara ras, hal ini dilakukan untuk memelihara kesamaan status sosial, kesamaan dalam pandangan hidup baik yang dibentuk secara turun-temurun ataupun secara religi dalam kehidupan yang mulai beragam.

Pandangan mengenai etnis lain menimbulkan batas antara satu etnis dengan etnis lainnya. Konstruksi-konstruksi dan dasar yang dikenakan kepada diri kita dan mereka merupakan salah satu aktivitas yang sering terjadi. Ciri antara etnis juga berpengaruh dalam interaksi sosial antaretnis di dalamnya, dalam pemikiran masing-masing anggota etnis. *Ideology general* mengenai suatu etnis menimbulkan pertentangan pada etnis tersebut. Pandangan inilah yang menimbulkan segregasi di antara etnis dan pula menimbukan konflik etnis tersebut peneguhan atas indentitas etnis yang dimiliki oleh satu kelompok etnis atas ras kelompok etnis lain dapat memicu ketegangan, bahkan konflik horizontal antaretnis.

Pengertian dalam antropologi ada tiga perspektif teori utama yang digunakan untuk membahas mengenai etnisitas, selain teori primordial, dua lainnya adalah teori situasional dan teori relasional. Teori situasional berseberangan dengan teori primordial. Teori situasional memandang bahwa kelompok etnis adalah entisitas yang dibangun atas dasar kesamaan para warganya, bagi mereka yang lebih penting bukan wujud kesamaan itu sendiri melainkan perihal penentuan dan pemeliharaan batas-batas etnis yang diyakini bersifat selektif dan merupakan jawaban atas kondisi sosial historis tertentu (Barth dalam Simatupang, 2003). Teori ini menekankan bahwa

kesamaan kultural merupakan yang lebih besar dibanding kesamaan darah dalam penggolongan orang ke dalam kelompok etnik.

Sementara itu, teori relasional berdasarkan pandangan bahwa kelompok etnik merupakan penggabungan dua etnisitas atau lebih yang memiliki persamaan maupun perbedaan yang lebih dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan pemeliharaan batas-batasnya. Menurut perspektif relasional ini, etnik ada karena adanya hubungan antaretnis yang berbeda-beda. Saat ini, seperti-nya tidak relavan lagi membicarakan mengenai etnik mengingat batas-batas etnik telah semakin kabur. Batas-batas budaya antaretnik telah semakin tidak jelas. Saat ini, segala manusia dari berbagai etnik telah semakin melebur dalam kehidupan sosial yang satu. Apalagi, globalisasi yang begitu deras dan nyaris tak tertahankan bertendensi memunculkan keseragaman budaya, baik dalam pola pikir, sikap, tingkah laku, seni dan sebagainya.

Berdasarkan kajian teori di atas menunjukkan bahwa etnis terbentuk di dasarkan kepada persamaan karakteristik yang melekat pada komunitas tertentu, komunitas inilah yang membentuk komunitas etnis sehingga antara komunitas etnis tertentu dapat berbeda dengan etnis yang lain yang ada diluar wilayah itu sehingga dari konsep pembentukan etnis dapat dikenali dari kondisi demografi di suatu wilayah sehingga ada istilah etnis lokal dan etnis pendatang. Dengan pragementasi etnis lokal dengan etnis pendatang inilah sering di suatu daerah memicu potensi konflik dengan etnis pendatang. Untuk melihat bagaimana pemahaman istilah etnis lokal dapat kita lihat melalui analisis di bawah ini.

E. Pengertian Etnis Lokal

Etnis lokal diartikan sebagai etnis asli yang mendiami suatu wilayah yang disamakan oleh keturunan yang sama, budaya yang sama, adat yang sama. Pengertian etnis lokal didasarkan kepada dasar teritorial sebagai penduduk asli yang mendiami wilayah pertama kalinya. Inilah ukuran dari terminologi dari istilah etnis lokal tersebut. Berangkat dari pengertian ini maka setiap daerah di Indonesia selalu digunakan istilah etnis lokal. Akan tetapi, pengertian di atas tidak dapat dipermanenkan karena terkadang di suatu wilayah penyebutan etnis lokal tidak dapat lagi digunakan karena daerah itu tidak dapat didentifikasi penduduk aslinya. Artinya, penduduk asli di suatu daerah telah mengalami proses akulturasi sehingga memunculkan budaya campuran sehingga terminologi istilah etnis lokal mengalami perubahan dari istilah asalnya.

Dapat dikatakan terkadang ada satu wilayah penduduknya bukan lagi berasal dari etnis lokal, melainkan berasal dari proses akulturasi budaya dari berbagai etnis pendatang. Berdasarkan analisis di atas, maka wilayah yang masih memertahankan istilah etnis lokal di Indonesia tinggal beberapa daerah, di antaranya Provinsi Gorontalo karena etnik Gorontalo masih ada tradisi keasliannya sehingga terminologi etnis lokal Gorontalo masih dapat di identifikasi. Sebagai contoh dapat dilihat dari nama-nama etnis lokal Gorontalo yang selalu menggunakan sistem patrimonial. Contohnya, penggunaan marga di belakang nama yang selalu mengikuti marga ayahnya. Berbeda dengan etnis Jawa yang tidak menggunakan marga di belakang nama dll.

Dengan demikian istilah etnis lokal untuk daerah Provinsi Gorontalo masih dapat digunakan dalam membedakan dengan etnis pendatang. Masih banyak karaketristik yang berbeda dengan etnis pendatang dalam mengidentifikasi istilah etnis

lokal Gorontalo sehingga istilah etnis lokal Gorontalo masih dapat kita gunakan hingga saat ini.

Dengan demikan, yang dimaksud dengan etnis lokal di daerah Provinsi Gorontalo adalah penduduk asli Gorontalo yang telah lama mendiami wilayah Gorontalo dengan karakteristik budaya dan tradisi lokal Gorontalo. Memang bila kita analisis tradisi etnis lokal Gorontalo ada yang memiliki kesamaan dengan etnis lain yang tinggal di daerah Gorontalo sehingga dapat dikatakan etnis lokal Gorontalo agak mudah melakukan interaksi dengan etnis pendatang yang menetap di daerah Gorontalo, seperti etnis Jawa, etnis Makasar, etnis Bali, etnis Bajo. Sedangkan etnis yang berbeda adalah etnik Tionghoa, etnik Arab.

Etnis lokal Gorontalo dikenal dengan tradisi adat bersendikan *syaraa*, *syaraa* bersendikan *kitabullah*. Inilah yang menjadi landasan masyarakat Indonesia di dalam melakukan aktivitas. Dengan tradisi seperti ini masyarakat Gorontalo dikenal sebagai masyarakat agamis. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat lain selain etnis Gorontalo yang berprilaku tidak sesuai dengan kepribadian etnis lokal, akan menghadapi tantangan dalam melakukan interaksi sosial.

Pengertian di atas hanya memberikan batasan ketika dalam tulisan ini mengkaji etnis lokal Gorontalo. Dengan batasan ini kita dapat melihat seperti apa sesungguhnya yang ada pada etnis lokal Gorontalo. Batasan pengertian sebagai definisi etnis lokal Gorontalo dalam buku ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami karekteristik yang ada pada etnis lokal Gorontalo.

Salah satu kegagalan kita membangun negara dengan model negara multikulturalisme adalah kita tidak memahami perilaku etnis tertentu sehingga yang terjadi adalah benturan tradisi yang mengarah kepada sikap egois dan akhirnya sikap inilah yang menyebabkan disharmoni sosial hubungan

antaretnis yang ada di Indonesia. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara etnis Madura dan etnis Dayak di Provinsi kalimantan Timur.

Kegagalan kita untuk tidak mau mempelajari dan memahami karekteristik etnis yang ada di Indonesia akan mengalami kegagalan dalam membangun *Nation State* sebagai dasar dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Apa yang disebut oleh Samuel Huntington mengenai *class of civilazation* atau konflik peradaban akan terjadi, bila kita tidak saling memahami karekteristik etnis tertentu yang ada di negara kita. Pernyataan Huntington ini sebagai strategi kita dalam mewujudkan impian dalam membangun negara multikulturalisme di negara kita.

Kajian pembahasan etnisitas pada bagian bab ini, digunakan untuk mengenal sesungguhnya apa yang dimaksud dengan etnis, dan bagaimana mengenal kehidupan karakeristik etnis. Bila warga masyarakat dan pemerintah memahami apa sesungguhnya makna etnisitas di Indonesia, akan memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan negara *Nation State* dengan model negara negara multikulturalisme.

Biasanya, kita mengalami kegagalan dalam membangun interaksi sosial karena tidak memahami terlebih dahulu makna dari etnisitas sehingga yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada gesekan antaretnis. Baik itu disebabkan karena gesekan agama, gesekan tradisi, gesekan ras, gesekan pilihan politik, dan lain-lain.

Gesekan ini terjadi bila masyarakat dan pemerintah baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperlakukan kebijakan kepada etnis tertentu dengan tidak bersandarkan kepada model negara multikulturalisme. Di mana kebijakan negara multikulturalisme selalu mengakomodasi aspirasi dari warga masyarakatnya di dasarkan kepada kearifan lokal yang ada pada setiap etnis di dalam suatu wilayah.

Kegagalan kita selalu mendasarkan kebijakan secara parsial dengan selalu menyemaratakan perbedaan, padahal kondisi demografi masyarakat kita, bila kita menganalisis tentang konsep etnisitas yang telah dibahas pada bagian bab ini, ternyata setiap etnis punya karakteristik yang berbeda-beda sehingga diperlukan kebijakan yang didasarkan kepada model negara multikulturalisme. Dapat dikatakan sebaiknya masyarakat dan pemerintah harus komitmen dalam menjalankan negara dengan model negara multikulturalisme sebagaimana yang ada pada dasar negara kita Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Inilah yang menarik ketika kita mengelola negara dengan kondisi yang hetorogen yang harus memahami benar tentang kondisi etnisitas yang ada di negara kita, dengan jumlah etnis kurang lebih terdiri dari 300 suku bangsa. Bila kita tidak memahami terlebih dahulu tentang bagaimana makna pemahaman etnisitas, akan menjadi pintu masuk (*triger*) dari kegagalan dalam mengelola negara dengan model negara multikulturalisme di Indonesia sehingga yang diperlukan kepada pembaca pada bagian bab ini adalah untuk memahami makna etnisitas di dalam membantu kita dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Biasanya kita mengalami gagal paham terhadap terminologi suatu konsep sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif dalam mendalami satu konsep terhadap istilah etnisitas sehingga tidak akan gagal paham, ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda etnis dengan kita.

BAB V
KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI STRATEGI DALAM MEMBANGUN NEGARA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Failed State atau negara gagal sangat tidak diharapkan oleh semua negara yang bercita-cita dalam membangun negara multuikulturalisme. Untuk menghindari kegagalan kita dalam membangun model negara multikulturalisme. Sudah seharusnya kita mulai dari memahami beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai dasar strategi dalam membangun negara multikulturalisme. Biasanya dimulai dari mempelajari teori yang sudah ada atau kita mencoba melalui perenungan sebagaimana para filosof memikirkan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara tersebut dalam menciptakan keselarasan. Bila melihat harapan tersebut alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami beberapa konsep yang ada dalam uraian di bawah ini sebagai berikut.

A. Konsepsi Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata "tahan", tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedang pengertian

nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah *national resilience* yang mengandung pengertian dinamis, dibandingkan pengertian *resistence* dan *endurence*.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan negara.

Ketahanan nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47, atau lihat Soemarsono dkk., 2001: 106).

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memerhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional (Soemarsono dkk., 2001: 106). Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep geostrategi Indonesia.

B. Landasan Fundamental Ketahanan Nasional

Ada tiga landasan ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Pancasila Landasan Idiil

Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa, serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing.

2. UUD 1945 Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan, serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara.

UUD 1945 bersikap tegas agar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi

usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam:

a. Pasal 28
   "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
b. Pasal 28E Ayat (3)
   "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

3. Landasan Visional (Wawasan Nusantara)

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia di mana wilayah Indonesia tersusun dari gugusan Kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan wadah serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang

berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan.

Berangkat dari beberapa landasan fundamental ketahanan nasional sebenarnya dalam landasan tersebut telah dimuat beberapa prinsip dasar dalam melaksanakan negara model multikulturalisme. Di mana landasan idiil ketahanan nasional yakni ideologi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan negara model multikulturalisme yang dioperasionalkan melalui konstitusi negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam batang tubuh bila dirinci tentang negara Republik Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan negara model multikulturalisme dapat kita analisis melalui pasal-pasal di antaranya adalah pasal 1 ayat 1, 2,3 UUD NRI 1945, Pasal 18 UUD NRI 1945, pasal 26 UUD NRI 1945, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 32 dan pasal 34 UUD NRI 1945. Ketentuan pasal ini lebih dioperasionalkan melalui instrumen undang-undang dalam memperkuat negara multikulturalisme, misalnya Undang-Undang Hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan landasan bagi negara dalam menegakan hak asasi manusia dan melaksanakan otonomi daerah. Ini berarti melalui landasan fundamental di atas negara Republik Indonesia serius dalam menjalankan negara model negara multiulturalisme sehingga itu perlu kita sebagai warga negara Indonesia mengawal terhadap pelaksanaan negara multikulturalisme di Indonesia supaya negara kita tidak akan mengalami apa yang disebut dengan

failed State atau negara gagal dalam membangun negara multikulturalisme. Salah satu ciri negara gagal adalah terjadinya intoleransi di beberapa daerah di Indonesia misalnya konflik agama di Maluku, di Poso, konflik etnis di Sampit Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa konflik rasial antara etnis Papua dengan sekelompok masyarakat di Jawa Timur.

C. Asas-Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari hal-hal berikut.

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

   Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dua hal ini kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara kehilangan relevansi keberadaannya. Dua hal ini merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional, tanpa kedua hal ini maka kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan yang telah dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional secara umum.

2. Asas Komprehensivitas Integral
   atau Menyeluruh dan Terpadu

   Ketahanan nasional sebagai sebuah cara dan metode dalam mencapai dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras harus dilaksanakan mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan

berbangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (integral-komprehensif).

3. Asas Kekeluargaan

   Karena di dalam Ketahanan nasional asas kekeluargaan dijunjung tinggi, maka perbedaan-perbedaan dan keragaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui. Perbedaan dan keragaman tersebut harus dikelola dan dijadikan kekayaan dan modal untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dalam konteks internasional, asas kekeluargaan bermakna menghargai perbedaan-perbedaan untuk mengembangkan hubungan kemitraan yang serasi agar tidak berkembang menjadi konflik.

4. Asas Mawas ke Dalam dan ke Luar

   Seluruh kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Selain itu, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat memengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam interaksi timbal balik tersebut maka sering muncul dampak positif maupun negatif. Maka sangat dibutuhkan suatu sikap mawas ke dalam maupun mawas ke luar.

   Mawas ke dalam, artinya ketahanan nasional harus berusaha menegok keunggulan dan kelemahan pada diri bangsa sendiri. Dengan cara tersebut, bangsa Indonesia dapat mengukur dan meningkatkan ketahanan nasionalnya dari aspek yang kurang. Hal ini juga berarti menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasar nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian sebuah bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau mengandung nasionalisme sempit.

> Mawas ke luar, ketahanan nasional harus mempunyai asas mawas keluar yang bertujuan untuk dapat mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksinya dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling memberi keuntungan (Soemarsono dkk, 2001: 108).

Bila kita menganalisis tentang asas wawasan nusantara negara Republik Indonesia sangat idial demi terwujudnya negara multikulturalisme di mana asas wawasan nusantara ini akan dijadikan landasan bagi pemerintah dalam merajuk hubungan antaretnis di Indonesia demi menjaga komitmen bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari asas tersebut memberi pesan bila pemerintah pusat dan daerah tidak bekerja atas dasar prinsip wawasan nusantara di atas, negara ini akan bubar karena kelalaian negara mengelola negara hanya dilakukan secara parsial tidak secara konfrehensip dalam mewujudkan cita-cita dari tujuan negara didirikan sesuai amanah yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga konflik antaragama, antarsuku, antarras dan bahkan antar golongan semuanya dapat disalahkan adalah pemerintah yang gagal mengimplementasikan visi wawasan nusantara yang terkandung model negara multikulturalisme tersebut.

Dengan berdasarkan analisis asas wawasan nusantara di atas diharapkan kepada semua pihak untuk komitmen dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan sikap melaksanakan apa yang ada pada asas wawasan nusantara Indonesia komitmen dalam membangun negara

multikulturalisme, supaya negara kita terhindar dari *Failed State* mengakibatkan negara kita mengalami berbagai problem sosial sebagaimana yang pernah terjadi di zaman orde baru, orde lama dan bahkan di era reformasi pun masih terulang masalah disintegrasi bangsa. Kita berharap dengan pemahaman beberapa landasan dan asas dalam membangun negara multikulturalisme di atas dipertahankan oleh seluruh generasi dalam komitmen menjaga negara *Nation State* model negara multikulturalisme sebagaimana yang tertuang dalam landasan idiil pancasila, konstitusi dan apa yang ada dalam visi wawasan nusantara Republik Indonesia atau geopolitik.

D. Rumusan Tannas menurut GBHN (1978, 1983, 1988)

Berdasarkan kajian pengertian ketahanan Nasional yang ada dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dapat diuraikan melalui paparan yang ada di bawah ini sebagai berikut.

1. Tannas adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.
2. Pada hakikatnya tannas adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.
3. Untuk tetap memungkinkan berjalannya bangsa yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu dipupuk terus menurut tannas yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara.

Uraian tentang konsep ketahanan nasional di atas memberikan gambaran singkat kepada kita bila bangsa dan negara Indonesia yang berkeinginan membangun negara multikulturalisme sehingga kita dapat mengetahui apa yang kita lakukan di dalam mewujudkan impian membangun negara multikulturalisme tersebut melalui strategi yang kita rencanakan terlebih dahulu.

Untuk memperkuat dalam mewujudkan negara multikulturalisme maka perlu kita mengahdirikan beberapa teori dalam mengukur indeks ketahanan wilayah di suatu daerah di antaranya teori sebagai berikut.

1. **Teori Perubahan Sosial**
   dalam Menentukan Strategi Ketahanan Wilayah

   Perubahan sosial merujuk kepada perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari dari cara hidup yang telah diterima karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, hingga adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat, terdapat beberapa teori perubahan sosial yaitu teori siklus, teori linear, teori gerakan sosial, teori modernisasi dan teori konflik.

   a. Teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tetapi umumnya membentuk pola yang berulang.
   b. Teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama. teori ini juga merangkum proses evolusi maupun revolusi.
   c. Teori gerakan sosial meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang.

d. Teori modernisasi menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu negara berkembang akan mencontohi negara industri atau negara maju.
e. Teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari adanya konflik antarkelompok atau golongan tertentu yang kemudian diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori perubahan sosial di atas suatu wilayah akan menuju kepada kondisi ketahanan wilayah yang tangguh bila masyarakat itu mengalami perubahan sosial. Dengan pengkajian teori perubahan sosial sudah saatnya daerah dalam mewujudkan kondisi ketahanan daerah yang tangguh harus melakukan gebrakan perubahan sosial dalam masyarakatnya, karena kita tidak menghendaki masyarakat kita masih dalam kondisi tidak berubah. Perubahan itu diperlukan tetapi tidak menambrak kearifan lokal yang ada pada setiap daerah.

2. Teori Penetapan Status Desa dalam Mengukur Progresitas Desa dalam Menentukan Ketahanan Wilayah

Setiap desa pasti mencapai tingkatan tersendiri dalam proses pengembangan untuk memajukan desanya. Karena itu desa dibedakan dalam klasifikasinya antara lain sebagai berikut.

a. Desa Swadaya

Desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini, masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi

dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Ciri desa ini adalah:

1) Daerahnya terisolir atau tertutup;
2) Penduduknya sedikit;
3) Mata pencahariannya homogen yang bersifat agraris;
4) Masyarakatnya memegang teguh adat atau tradisi;
5) Hubungan personal sangat erat;
6) Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang;
7) Teknologi yang ada masih rendah atau bahkan belum ada.

b. Desa Swakarya

Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa Swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, serta ber-kembangnya pembangunan desa dengan didiri-kannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-ciri desa Swakarya antara lain:

1) Tidak terikat dengan adat secara penuh;
2) Terbuka dengan pengaruh dari luar daerah;
3) Adanya sarana pendidikan, kesehatan, per-ekonomian dan prasarana penunjang lain-nya;
4) Teknologi sudah mulai digunakan masyarakat;
5) Akses menuju daerah lebih mudah;
6) Lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam.

c. Desa Swasembada

Desa Swasembeda biasa disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber

daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan tingkatan desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Ciri-ciri desa Swasembeda antara lain sebagai berikut:

1) Biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan;
2) Penduduknya mulai padat;
3) Masyarakat sudah terikat oleh adat;
4) Memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju;
5) Masyarakat yang lebih kreatif dan kritis;
6) Aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan teori ini, kita dapat menilai tentang kondisi ketahanan wilayah di suatu wilayah dalam rangka mewujudkan negara multikulturalisme. Negara multikulturalisme akan terwujud bila kondisi desa akan lebih meningkat dari status desa awal, dari desa Swadaya menuju desa Swakarya sampai pada tujuan pembangunan desa, yakni desa Swasembada. Bila ini dapat diwujudkan maka stabilitas wilayah akan mendapatkan indeks sangat tangguh dalam penilaian status ketahanan wilayah di suatu daerah.

3. Teori Kemiskinan dalam Menentukan Status Ketahanan Wilayah di Suatu Daerah

Demi mewujudkan negara multikulturalisme di suatu wilayah yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana menekan angka kemiskinan. Bila angka kemiskinan di suatu wilayah sangat tinggi, maka secara tidak langsung akan memengaruhi ketahanan wilayah di

suatu daerah. Mengapa karena kemiskinan sumber dari gesekan sosial, di mana kemiskinan akan banyak memberikan dampak sosial misalnya penjarahan kepada warga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, kemiskinan bisa saja memicu kerusuhan sosial dan sebagainya. Artinya, bila ingin mewujudkan negara multikultural, maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan marilah kita telaah dari beberapa analisis teori tentang pengertian dan batasan kemiskinan di bawah ini.

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Terjadinya kemiskinan penduduk secara garis besar disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal penduduk. Kemiskinan dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Kemiskinan absolut, adalah kemiskinan yang disebabkan faktor internal penduduk sendiri. Misalkan disebabkan tingkat pendidikan rendah, keterampilan rendah, budaya dan sebagainya.
b. Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal sehingga kemampuan akses sumber daya ekonomi rendah, pada gilirannya pendapatan penduduk menjadi rendah.

Menurut Kuncoro (2004), pengukuran kriteria garis kemiskinan di indonesia diukur untuk kemiskinan absolut, institusi pemerintah yang biasa menetapkan kriteria garis kemiskinan yaitu BPS (1994) kiteria kemiskinan menggunakan ukuran uang rupiah yang dibelanjakan per

kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum makanan dan bukan makanan.

Klasifikasi kemiskinan menurut Hendra Esmara (1986) dapat digolongkan sebagai berikut.

a. Miskin absolut, yaitu apabila hasil pendapatan-nya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, pangan, sandang, papan, pendidikan.
b. Miskin relatif, yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
c. Miskin kultural, yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Berdasarkan teori di atas membuat kita dapat mengetahui strategi apa yang kita gunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Ketahanan wilayah bergantung kepada kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah sehingga identifikasi kemiskinan berdasarkan teori di atas dapat memudahkan dalam menyusun strategi untuk membenahi kemiskinan di daerah di dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

Memang benar perdebatan yang mengatakan mana yang didahulukan ketika kita ingin memenangkan sebuah pertempuran dimedan perang. Ada yang beranggapan berperang itu tidak diperlukan strategi, tetapi semua fakta mengatakan ketika kita berperang tanpa menggunakan strategi selalu kegagalan yang diperoleh dari sebuah peperangan. Oleh karena itu, membangun negara multikulturalisme tidak sama dengan membalikan telapak tangan atau sim salibim langsung

jadi, tetapi semua harapan ini dapat diwujudkan, bila kita mengetahui bagaimana cara mewujudkan harapan tersebut. Inilah yang dimaksudkan dalam topik bahasan kita di bab 4 Konsepsi Ketahanan Nasional sebagai strategi dalam Membangun Negara Multikulturalisme di Indonesia. Topik ini dimaksudkan menemukan bagaimana mewujudkan impian oleh *The Founding Fathers* dalam membentuk negara Multikutulisme yang ada di negara yang kita cintai ini. Dengan ulasan yang ada pada bab ini menjawab semua apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

Untuk memperkaya pengetahuan kita dalam menyusun sebuah strategi dalam membangun negara multikulturalisme mari sama-sama kita menyimak apa yang dikemukakan oleh Will Kymlicka dalam bukunya Kewarganegaraan Multikultural (2011: 13–19) dalam ulasannya mengemukakan fenomena dalam membangun negara multikultural sebagai mana yang dia kemukakan di bawah ini sebagai berikut.

Mayarakat modern semakin sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka, dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Hal itu sering disebut sebagai tantangan dari multikulturalisme. Namun, istilah "multikultural" mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri. Ada berbagai cara di mana minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai dari penaklukan dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri sampai pada imigrasi sukarela perorangan dan keluarga. Perbedaan-perbedaan dalam cara penggabungan itu memengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena itu, generalisasi mengenai tujuan atau konsekuensi dari multikulturalisme dapat sangat menyesatkan. Memang banyak dari perdebatan publik mengenai multikulturalisme menderita karena salah kaprah itu misalnya, mereka yang menentang multikulturalisme, sering mengatakan bahwa hal itu menjadikan minoritas terkotak-kotak bagai dalam *geto* dan mengganggu integrasi mereka dalam masyarakat kebanyakan, para pendukung multikulturalisme mananggapi bahwa kepedulian akan integrasi mencerminkan imperealisme budaya, kedua tuduhan tersebut merupakan generalisasi yang berlebihan, mengabaikan perbedaan yang ada antarkelompok minoritas dan salah menginterprestasikan motivasi mereka sebenarnya.

Kymlicka memusatkan perhatian pada dua pola besar keragaman. Pada kasus pertama, keragaman budaya timbul masuknya ke dalam negara yang lebih besar, budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya terkonsentrasi secara teritorial, kebudayaan yang bergabung itu, yang saya disebut sebagai minoritas bangsa ingin memer-tahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di sisi kebudayaan mayoritas, dan menuntut berbagai bentuk otonomi atau pemerintahan sendiri untuk memastikan keberlangsungannya sebagai masyarakat tersendiri.

Pada kasus kedua, keragaman budaya timbul dari imigrasi perorangan atau keluarga. Para imigran itu sering bergabung ke dalam suatu perkumpulan lepas yang saya sebut sebagai kelompok etnis. Mereka biasanya ingin berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar dan diterima sebagai anggota penuh masyarakat tersebut. Sementara mereka sering mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas etnis mereka, tujuan mereka bukanlah untuk menjadi bangsa terpisah dan mempunyai pemerintahan sendiri di masyarakat yang lebih besar, melainkan mengubah institusi dan undang-undang

masyarakat dominan untuk menjadikannya lebih menerima perbedaan kebudayaan.

Berdasarkan pendapat Kymlicka di atas jelas memberikan pesan kepada kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercita-cita ingin membentuk *Nation State* dengan model negara multikulturalisme, seharusnya menghargai perbedaan dan pemberian otonomi kepada masing-masing daerah yang memiliki karekteristik yang beragam. Dengan ide tersebut, kita dapat membangun masyarakat Indonesia menjadi negara multikulturalisme, di mana pernyataan di atas negara multikulturalisme bukan melalui bentuk imperealisme, tetapi kelompok etnis terbentuk karena ada sekelompok keluarga besar yang memiliki persamaan ras, cita-cita dan tradisi serta kebudayaan yang sama membentuk sebuah komunitas, inilah yang disebut etnik atau etnis. Mereka inilah yang harus diperlakukan dengan mengedepankan kesetaraan kepada semua etnik yang ada. Kalau pemerintah dan masyarakat tidak menghargai keberadaan mereka sebagai etnik, maka hubungan tidak akan berjalan dengan baik, artinya akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai sebuah fakta yang harus kita jadikan sebagai pengalaman adalah ketika salah satu oknum mayarakat Jawa Timur mengatai etnik Papua dengan kalimat yang menurut etnik Papua merendahkan martabat etnik Papua misalnya kata-kata yang ada dikebun binatang yang seharusnya kalimat itu hanya pantas kita katakan pada komunitas hewan yang ada dikebun binatang. ini merupakan suatu bentuk kita tidak menghargai komunitas mereka (etnik Papua).

Menjadi pelajaran bagi kita semua janganlah merendahkan etnik lain yang berbeda dengan kita. Bila ini terulang kembali pada masyarakat kita nanti, berarti kita dapat dikatakan sebagai orang yang gagal faham dalam menerapkan negara dengan model multikulturalisme yang lebih menekankan pada prinsip kesetaraan etnis, artinya tidak ada etnis yang superior di negara

kita, semua etnis memiliki peradaban yang sama, kalaupun kita melihat ada etnik yang tertinggal dalam aspek pendidikan, itu bukan berarti etnik itu dikatakan rendah, tetapi yang dilihat bagaimana pemerintah mengelola pendidikan di Indonesia. Mereka-mereka yang mengalami ketertinggalan pendidikan di Indonesia bukan berarti sumber daya manusianya rendah, dibandingkan dengan mereka yang ada di Ibukota negara. Yang saya ingin katakan dalam kajian ini adalah ketertinggalan etnik lain dalam bidang pendidikan maupun ekonomi dan pembangunan ini bukan karena etnik tersebut bodoh atau dungu, tetapi semua yang terjadi di negara kita disebabkan oleh karena negara tidak sepenuhnya melaksanakan pembangunan dengan model negara multikulturalisme. Apa yang terjadi pada etnik yang mengalami ketertinggalan dalam pendidikan merupakan kelalaian negara mengelola pendidikan di Indonesia adalah tidak meratanya sarana dan prasarana yang diterima bagi etnis yang mengalami ketertinggalan pada aspek pendidikan tadi. Inilah yang saya katakan ada hal yang dirobah pemerintah dalam menjalankan kebijakan negaranya.

Semestinya, konsep membangun negara bukan didasarkan kepada *Center Development* pembangunan hanya ada di ibukota negara atau hanya berpusat di pulau Jawa. Membangun Indonesia harus dari semua etnik yang ada, mulai dari pulau Jawa sampai pada pulau-pulau terluar dan berada diperbatasan negara. Dengan konsep membangun negara melalui pinggiran, inilah sebagai salah satu bentuk dari strategi membangun negara dengan konsep negara multikulturalisme.

Selanjutnya mari kita analisis lanjutan kajian Kymlicka (2011: 14–16) yang mencoba melihat seperti apa mengelola negara multibangsa dan negara Polietnis. Dalam kajian Kymlicka konsep negara Multibangsa dan negara Polietnis sebagaimana yang dia ulas pada kajian di bawah ini:

Salah satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu, di mana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu mempunyai bahasa dan kebudayaan tersendiri. Suatu "bangsa" dalam arti sosiologis ini berkaitan erat dengan pengertian suatu "masyarakat "atau suatu "kebudayaan" memang konsep ini sering dipertukarkan. Oleh karena itu, suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa, bukanlah negara bangsa, melainkan negara multibangsa, dan kebudayaan terkecil membentuk "minoritas bangsa". Masuknya berbagai bangsa dalam satu negara dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika suatu masyarakat satu kebudayaan diserang dan ditaklukan oleh masyarakat lainnya, atau diserahkan dari satu kekuatan imperial lain kekuatan imperial lainnya atau ketika tanah mereka diduduki oleh pendatang yang menjajah. Namun, pembentukan negara multibangsa dapat juga terjadi secara sengaja ketika berbagai kebudayaan sepakat untuk membentuk suatu federasi untuk kepentingan bersama.

Banyak di dalam demokrasi Barat adalah multibangsa, misalnya ada sejumlah minoritas bangsa di Amerika serikat termasuk orang-orang Indian, Puerto Rico, keturunan Mexico (Chicanos) yang tinggal di barat daya ketika Amerika Serikat menganeksasi Texas, New Mexico dan California setelah perang Meksiko tahun 1846-1848, penduduk asli Hawai, orang Chomorros dari Guam dan berbagai penduduk kepulauan Pasifik lainnya. Kelompok-kelompok tersebut semuanya bergabung secara tidak sukarela ke dalam Amerika Serikat melalui penaklukan atau penjajahan. Apabila saat itu ada keseimbangan kekuatan, kelompok-kelompok itu mungkin dapat bertahan atau membentuk pemerintah berdaulat sendiri. Dan pembicaraan mengenai kemerdekaan sekali-sekali mengemuka di Puerto Rico di suku Indian terbesar. Namun

demikian, keinginan historis kelompok-kelompok itu bukunlah meninggalkan Amerika Serikat, melainkan mencari otonomi di dalam negara itu.

Ketika mereka tergabung, kebanyakan dari kelompok-kelompok itu memperoleh status politik khusus. Misalnya suku-suku Indian diakui sebagai "bangsa merdeka domestik" dengan pemerintahan sendiri, pengadilan hak melakukan perjanjian sendiri: Puerto Rico adalah "*Commonwealth*". Guam adalah "protektorat". Masing-masing dari masyarakat itu berfederasi pada negara Amerika dengan kekuasaan khusus pemerintahan sendiri.

Kelompok-kelompok itu juga mempunyai hak dalam hal bahasa dan penggunaan lahan. Di Guam dan Hawai, bahasa asli (Chamorro dan Hawai) mempunyai status yang sama dengan bahasa Inggris di sekolah, pengadilan dan segala sesuatu yang berusan dengan pemerintah, sedangkan bahasa Spanyol adalah satu-satunya bahasa resmi di Puerto Rico. Hak berbahasa pernah juga diberikan kepada suku Chicano di barat daya dengan Traktat Guadelupe Hidalgo tahun 1848, walau kemudian segera dihapus ketika para pemukim berbahasa Inggris membentuk mayoritas penduduk. Orang-orang asli Hawai, Eskimo di Alaska dan suku-suku Indian juga secara hukum mengajukan tuntutan tanah yang diakui, yang menyediakan lahan-lahan tertentu untuk dimanfaatkan oleh mereka saja, dan yang memberikan perwakilan terjamin pada badan-badan tertentu pemerintah. Singkatnya, minoritas bangsa di Amerika serikat mempunyai sejumlah hak yang dimaksud untuk mencerminkan dan melindungi status mereka sebagai komunitas budaya tersendiri, dan mereka telah berjuang untuk memertahankan dan menyebarluaskan hak-hak tersebut.

Berdasarkan temuan Klymcka ini memberikan dasar dan petunjuk kita khususnya pemerintah Indonesia dalam membentuk negara multikulturalisme, di mana pada

pemerintahan negara Amerika Serikat kehidupan multibangsa berjalan dengan baik. Di mana pemerintah federal Amerika Serikat memberikan otonomi kepada negara-negara yang berasal dari luar bangsa Amerika sehingga pemerintahannya sampai dengan saat ini tetap berdiri sebagai negara yang melaksanakan konsep dan strategi multibangsa.

Bila kita melihat perjalanan sejarah republik ini bangsa Indonesia yang berkeinginan mendirikan negara pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki komitmen dalam melaksanakan negara dengan konsep dan strategi yang sama yang dilakukan negara Amerika serikat. Karena komitmen dalam membangun negara multikulturalisme dan multibangsa sudah dimuat pada dasar negara dan konstitusi UUD NRI 1945, tetapi di dalam perjalanannya mengalami hambatan. Misalnya, pada era pemerintahan Orde Baru warga negara Indonesia dari bangsa *Chines* dalam merayarakan hari besar agamanya melakukan perayaan seni barongsai sebagai wujud dari perayaan Imlek, dilarang oleh pemerintah saat itu. Ini menunjukkan ada kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan komitmen melaksanakan negara multibangsa sebagai bagian dari implementasi negara multikulturalisme. Namun, ketika pemerintahan Orde Reformasi, kesalahan kebijakan ini diperbaiki oleh Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurahman Wahid atau sering disapa dengan panggilan Gusdur.

Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, presiden ke tiga, kebijakan yang dilakukan adalah memberikan otonomi kepada daerah dengan memberikan peluang daerah mengelola sesuai dengan karekteristik daerahnya, kebijakan ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan Klymca di Negara Amerika Serikat di mana pemerintah negara bagian diberikan hak untuk mengembangkan negara dengan kultur yang ada pada pemerintah negara bagian. Dengan demikian apa yang

diberikan oleh pemerintah BJ Habiebi merupakan negasi yang sampai saat ini dilakukan oleh pemerintahan di era Orde Reformasi Presiden Jokowidodo atau sering disapa dengan panggilan Jokowi dengan beberapa penyempurnaan kebijakan yang mengarah kepada negara multikultural.

Demikian halnya dengan pemerintahan Abdurahman Wahid, presiden ke empat, di mana di masa beliau etnis Cina dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan bebas melakukan perayaan Barongsay, serta di masa beliau hari imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dengan kebijakan ini presiden Abdurahman wahid atau yang disapa Gusdur dinobatkan sebagai bapak multikultural sebagai simbol kebebasan bagi etnis Cina melaksanakan ritual keagamaan imlek.

Apa yang dikemukakan di atas sebagai suatu model strategi dalam mewujudkan *Nation State* melalui model membangun bangsa dan negara dengan strategi multikulturalisme. Dengan temuan dan kajian di atas telah menjawab apa yang diharapkan pada bab 4 tentang konsepsi ketahanan nasional sebagai strategi dalam membangun negara multikulturalisme di Indonesia.

BAB VI

MEMBANGUN MASYARAKAT MULTIKULTURALISME DAN INDIKATOR KEBERHASILAN *NATION STATE* DI INDONESIA

Keselerasan sosial menjadi harapan semua pihak yang ada di dalam suatu negara di mana warga negara yang berbeda etnis, berbeda agama, suku bangsa, ras, dan adat istiadat hidup berdampingan dalam suatu negara. Bila kita melihat perjalanan beberapa negara yang mengalami kegagalan dalam membentuk negara multikulturalisme sebagaimana yang telah diulas pada bab terdahulu sebelum masuk dibab ini, negara besar seperti Unisoviet dan beberapa negara yang ada di belahan Eropa seperti negara Yugoslavia yang tadinya hanya satu negara berpisah menjadi tiga negara, di mana dari bentuk negara asal Negara Yugoslavia menjadi tiga negara di antaranya Negara Bosnia mayoritas warga negaranya beragama Islam dan negara Serbia yang beragama Kristen, kedua negara ini berpisah karena perbedaan kultur keagamaan. Demikian halnya dengan negara besar termasuk negara adikuasa Soviet yang mekar menjadi beberapa negara, hingga saat ini Unisoviet tinggal satu negara yang saat ini tinggal negara Rusia. Semua fakta ini memberikan gambaran kepada kita bila pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan strategi negara dalam model multikulturalisme akan mengalami nasib yang sama dengan negara yang

disebutkan di atas kegagalan dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

Untuk mengenal dan mengidentifikasi adakah potensi kegagalan dalam membangun negara multikulturalisme dapat dilihat melalui indikator interaksi sosial sebagaimana yang diulas dan dikaji pada beberapa indikator kegagalan negara dalam membangun negara multikulturalisme di bawah ini sebagai berikut.

A. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Interaksi yang dilakukan secara berulang akan menghasilkan proses sosial. Proses sosial adalah perilaku berulang yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (interaksi sosial). Horton (1983: 74) menyebutkan 5 (lima) kemungkinan proses sosial, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja Sama

   Kerja sama adalah usaha bersama antarmanusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial individu-individu atau kelompok-kelompok berusaha saling menolong untuk mencapai tujuan bersama atau mengoordinasikan kegiatan mereka guna mencapai tujuan bersama.

   Setiap bentuk interaksi sosial dapat bepengaruh kepada pribadi dan masyarakat yang bersangkutan. Kerja sama cenderung memuncukan pribadi yang sensitif pada orang lain, memerhatikan orang lain, merasa aman, tenang, dan kalem, serta tidak agresif.

2. Persaingan atau Kompetisi

   Persaingan adalah usaha untuk melakukan sesuatu secara lebih baik dibanding orang atau kelompok lain dalam mencapai tujuan.

3. Konflik

   Konflik adalah proses di mana orang atau kelompok berusaha memperoleh sesuatu (imbalan tertentu) dengan cara melemahkan atau menghilangkan persaingan atau kompetitor lain, bukan hanya mencoba tampil lebih baik seperti dalam kompetisi.

4. Akomodasi

   Akomodasi adalah proses mencapai persetujuan sementara di antara pihak-pihak yang sedang atau mempunyai potensi untuk berkonflik.

5. Asimilasi

   Asimilasi adalah proses peleburan beberapa kebudayaan menjadi satu, hingga akar konflik yang bersumber pada perbedaan kebudayaan terhapus.

6. Akulturasi

   Pengertian akulturasi adalah suatu proses sosial dalam masyarakat di mana terjadi interaksi antar dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru, tetapi unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada.

   Proses akulturasi sering terjadi pada kelompok-kelompok minoritas atau imigran yang secara budaya atau etnis berbeda dari masyarakat mayoritas di tempat mereka berimigrasi. Namun, proses akulturasi juga terjadi pada budaya masyarakat mayoritas yang mengadopsi unsur budaya masyarakat minoritas karena adanya interaksi di tingkat individu dan kelompok, baik secara langsung melalui media, seni, maupun sastra.

Ulasan konsep interaksi sosial di atas dapat digunakan dalam melihat sejauh mana kehidupan satu negara dapat memertahankan eksistensinya sebagai negara multikulturalisme. Artinya, bila dari beberapa indikator ini mengalami masalah, maka sebaiknya negara tersebut berusaha untuk mencari jalan dalam menyelesaikan ketidakselarasan tersebut. Bila ini diabaikan oleh pemerintah bisa saja akan terjadi turbolensi sosial yang akan mengarah kepada konflik horizontal dan bisa saja konflik tersebut akan berkembang luas menjadi konflik vertikal.

Misalnya, bila ada etnis tertentu dalam satu negara tidak mau konfromi dengan etnis lain yang menganggap etnisnya lebih superior dari etnis lain, maka sikap ini akan menyebabkan kerenggangan dalam hubungan sosial dan akan berakhir pada konflik sebagai contoh konflik antara suku Madura dan Suku dayak di Kalimantan Timur. Konflik antara mahasiswa Papua di jawa Timur.

Demikian halnya yang terjadi di Provinsi Maluku, Poso, semua berawal dari ketegangan sosial yang belum dapat menghadirkan sikap ekseptansi yang melahirkan sikap toleran kepada orang lain yang berbeda etnis, adat istiadat, ras, dan agama. Bila warga negara dapat menghadirkan sikap multikulturalisme dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa dan bernegara, semua bentuk-bentuk konflik dapat dimeminimalisasi dan dapat dilokalisasi konfliknya. Untuk lebih memahami bagaimana seharusnya kita berinteraksi sosial mari kita simak beberapa konsep di bawah ini sebagai berikut.

B. Faktor-Faktor Pendukung Terjadinya Interaksi

Interaksi sosial terjadi karena didorong oleh sejumlah faktor, dalam buku sosiologi Saptono dan Bambang (2006: 69)

menyatakan bahwa interaksi sosial terjadi karena di dorong oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri seseorang, dan faktor dari luar individu.

1. Faktor dari Dalam Diri Seseorang

a. Dorongan Kodrati sebagai Makhluk Sosial

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk bergaul dengan sesama munusia. Bahkan menurit Howard Gardner, setiap manusia memiliki potensi kecerdasan antarpribadi, yaitu kecenderungan dalam mengelolah hubungan dengan orang lain.

b. Dorongan untuk Memenuhi Kebutuhan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menyadari bahwa banyak hal dalam hidupnya yang tergantung pada orang lain. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, setiap orang memerlukan orang lain, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, diterima, dihargai, dan lain sebagainya jelas memerlukan orang lain sebagai sumber pemenuhannya. Oleh karena itulah manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dirinya.

c. Dorongan untuk Mengembangkan Diri dan Memengaruhi Orang Lain

Manusia juga memiliki potensi dan kehendak untuk mengembangkan diri sendiri dan sesamanya. Upaya pengembangan pribadi tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan imitasi, identifikasi. Dalam rangka imitasi dan identifikasi itulah seseorang didorong untuk melakukan interaksi sosial.

2. Faktor dari Luar Individu

Di samping dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, interaksi sosial juga dirangsang oleh hal yang ada di luar diri seseorang. Tindakan orang lain, sikap diam orang lain, atau kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar kehidupan seseorang merupakan hal-hal yang dapat merangsang timbulnya interaksi sosial. Karena disapa orang lain, maka kita terlibat interaksi dengan orang tersebut. Karena penasaran atas sikap diam orang yang kita kenal, maka kita terdorong untuk bertanya dan mencari tahu masalahnya sehingga terjadi interaksi sosial. Karena ingin mengetahui apa sebab-sebab sebuah kecelakaan lalu lintas. Kita bertanya kepada orang yang berada di tempat kejadian, maka terjadilah interaksi sosial. Interaksi sosial selalu terjadi karena ada aksi dan reaksi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Selain dari faktor-faktor di atas, adapun faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial dalam bukunya Vide Bonner "*Social Psychology*" yang dikutip oleh (Gerungan, 2010: 62).

1. Faktor Imitasi

   Faktor ini telah diuraikan dalam perkembangan ilmu jiwa sosial mengenai pendapat Gabriel Tarde yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan faktor imitasi saja. Imitasi bukan merupakan dasar pokok dari semua interaksi sosial seperti yang diuraikan oleh Gabriel Tarde, melainkan merupakan suatu segi dari proses interaksi sosial yang menerankan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku di antara orang banyak. Dengan cara imitasi, pandangan dan tingkah laku seseorang mewujudkan sikap-sikap, ide-ide, dan adat-istiadat dari suatu keseluruhan kelompok masyarakat, dan

dengan demikian pula seseorang itu dapat lebih melebarkan dan meluaskan hubungan-hubungannya dengan orang-orang lain.

2. Faktor Sugesti

   Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya adalah bahwa dalam imitasi itu orang yang satu mengikuti sesuatu diluar dirinya; sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya.

   Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat kita rumuskan sebagai suatu proses di mana seorang indvidu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu.

3. Faktor Identifikasi

   Faktor lainnya yang juga memegang peranan penting dalam interaksi sosial tersebut adalah identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dari uraian freund mengenai cara-cara seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya hal tersebut dimulai pada sekitar umur 5 tahun.

   Identifikasi dilakukan orang kepada orang lain yang dianggapnya ideal pada suatu segi, untuk memperoleh sistem norma, sikap, dan nilai yang dianggapnya ideal dan yang masih merupakan kekurangan pada dirinya.

4. Simpati

   Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Peranan simpati cukup nyata dalam hubungan persahabatan antara dua atau lebih orang.

Simpati hanya dapat berkembang dalam suatu relasi kerja sama antara dua atau lebih orang, yang menjamin terdapatnya saling mengerti. Justru karena adanya simpati itu dapatlah diperoleh saling mengerti yang lebih dalam. Mutual understanding tidak dapat dicapai tanpa adanya simpati.

C. Upaya Membangun Kerukunan Antaretnis

Kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan dan saling menjaga satu sama lain. Maka dari itu setiap tanggal 3 Januari dinyatakan sebagai hari kerukunan nasional. Kata kerukunan berasal dari bahasa arab ruknun (rukun) kata jamaknya adalah arkan yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya).

Dalam bahasa Indonesia arti rukun ialah: Rukun (nominal), berarti: sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukunya asas, yang berarti dasar atau sendi: semuanya terlaksana dengan baik tidak menyimpang dari rukunnya agama.

Rukun (ajektif) berarti: baik dan damai tidak bertentangan: hendaknya kita hidup rukun dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan berarti: mendamaikan menjadikan bersatu hati. Kerukunan berarti: perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan.

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (*unsure*/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal Balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling memercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

Teori kerukunan sosial memandang keselarasan/harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antarelemen masyarakat dan kulturnya. Setidaknya ada lima teori dasar berkaitan dengan kerukunan (Turner, 1991: 234, dalam jurnal Muhammad Rais, 2012: 190).

1. Teori nilai, adalah kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling menaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan di jalankan dalam masyarakat.

2. Teori struktural, adalah kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan.
3. Teori idealis, adalah kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan.
4. Teori resiprositas, adalah kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap.
5. Teori interaksi, adalah kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antarkelompok, etnis, agama dll., dalam masyarakat yang saling mengun-tungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

Jadi untuk mencapai kerukunan dalam suatu masyarakat maka, seluruh masyarakat dalam suatu daerah harus menaati seluruh Peraturan yang berada di daerah tersebut, kemudian harus tunduk terhadap norma-norma masyarakat yang menjadi kebiasaan masyarakat daerah, dan harus saling memahami akan setiap perbedaan yang berada di dalam masyarakat. Untuk melihat lebih jelas tentang kerukunan maka dapat dilihat melalui model-model membangun kerukunan sebagai berikut.

1. **Konsep Melting Pot**

   Bill Watson (2004) yang dikutip oleh Tanto Sukardi dan Subandowo, 2014: 102), pada tahap awal cita-cita masyarakat multirasial dan multikultural dibentuk melalui proses asimilasi kelompok minoritas ke dalam kelompok dominan. Kemudian pada tahap berikutnya berbagai kelompok tersebut mengasimi-lasikan dirinya sebagai masyarakat baru sehingga terbentuklah suatu masyarakat bangsa sebagai hasil dari asimilasi tersebut. Proses seperti

itu diabadikan dalam sebuah teori terkenal, yaitu *melting pot.*

Teori *melting pot* pada awalnya diwacanakan oleh J. Hektor seorang imigran dari normandia. Dalam teorinya dia menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui, bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestan* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal dari Inggris yang Protestan (Dede Rosyada, 2014).

Dalam jurnal (Ahmad Rivai Harahap, 2006: 29) menyatakan bahwa Dalam teori *melting pot* diupayakan menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya masing-masing. Jadi dalam hal ini teori *melting pot* merupakan suatu teori yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai macam konflik SARA terutama di negara yang memiliki multirasial atau multietnis yaitu dengan cara mengumpulkan dam membaurkan masyarakat yang multikultural, multietnis tersebut di suatu wadah atau daerah dengan meleburkan masing-masing kebudayaan tersebut dengan berbagai macam kebudayaan yang lain sehingga dari hasil peleburan dan perpaduan antara kebudayaan tersebut melahirkan suatu keudayaan baru di daerah tersebut.

Dalam proses menuju integrasi antara etnis/ras dalam masyarakat Amerika Serikat scara berangsur-angsur terbentuk filsafat hidup yang berjalan secara integrasional dan komulatif. Proses terbinanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan proses terbinanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan proses yang panjang, merupakan proses yang penuh prasangka-prasangka etnis/ras dan kultural, tetapi dengan kearifan kolektif

semua hambatan itu dapat diatasi. Bersamaan dengan itu terbentuk pula kemauan yang kuat untuk membentuk identitas kultur yang baru, yaitu identitas kultur Amerika Serikat yang bersifat multietnis/multirasial (Tanto Sukardi dan Subandowo, 2014: 102).

Ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk maka teori *melting pot* kemudian mulai dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl sebagai* sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Angso Saxon Protentant* (WASP) diakomodasi dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya, interaksi kultural antarberbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism,* yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa (Dede Rosyada, 2014: 2).

2. Konsep Sald Bowl

Menurut Nathan Glazer "*salad bowl*" atau "*glorious mosaic*", yang di dalamnya setiap unsur etnis dan ras dalam populasi dapat memertahankan kekhasannya. Namun

dalam kenyataannya, tidak ada pandagan multikulturalis tunggal, melainkan macam-macam sikap tentang syarat multikulturalisme (Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, 2013: 572).

Jadi, teori *salad bowl* merupakan teori untuk mencegah atau mengantisipasi timbulnya konflik yang diakibatkan oleh multikultural ataupun multietnis yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai macam etnis ke dalam satu wadah atau tempat dengan tetap menjaga kebudayaan masing-masing etnis tersebut sehingga dengan hal ini secara langsung maupun tidak langsung setiap masyarakat akan sadar akan pentingnya menjaga kerukunan antara masyarakat berbagai macam etnis sehingga potensi konflik yang disebabkan karena keanekaragaman bisa dikendalikan.

D. Indeks Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan suatu usaha untuk memertahankan wilayah dari berbagai macam ganguan maupun ancaman dari pihak luar maupun pihak yang bearada di dalam wilayah tersebut sehingga dalam memertahankan wilayah Desa Tri Rukun dapat dilihat melalui indeks ketahanan nasional dalam Thesis (Lukum, 2010).

1. Indeks Ketahanan Gatra Ideologi

Mengukur indeks ketahanan nasional gatra ideologi dapat dilihat melalui indikator di bawah ini sebagai berikut:

a. relegiutas dan ketakwaan;
b. toleransi;
c. kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial;
d. kesatuan wilayah;
e. persatuan bangsa (nasionalisme);

f. kesetaraan akses;
g. kekeluargaan.

2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik

Mengukur indeks ketahanan nasional gatra politik dapat dilihat melalui indikator di bawah ini sebagai berikut:

a. kapasitas pemerintah;
b. keterwakilan;
c. kepastian hukum;
d. ormas pemuda;
e. kapasitas kepartaian;
f. media masa.

3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi

Mengukur indeks ketahanan nasional gatra ekonomi dapat dilihat melalui indikator di bawah ini sebagai berikut:

a. pangan;
b. sandang;
c. perumahan;
d. pertambahan kekayaan;
e. kemiskinan;
f. kesempatan kerja;
g. pemerataan.

4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Mengukur indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya dapat dilihat melalui indikator di bawah ini sebagai berikut:

a. ekslusi sosial;
b. pendidikan;
c. kesehatan;
d. kerukunan sosial;
e. ketertiban sosial;
f. perilaku sosial.

5. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

Mengukur indeks ketahanan nasional gatra pertahanan dapat dilihat melalui indikator di bawah ini sebagai berikut:

a. gerakan separatisme;
b. etno nasionalisme;
c. etno sentrisme;
d. egosentrisme;
e. primordialisme.

Gatra Keamanan Negara tentang kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyaarakat sebagai berikut:

a. gesekan antargenerasi mudah;
b. gesekan antaretnis (suku);
c. gesekan keyakinan (agama);
d. gesekan budaya (tradisi);
e. gesekan ras;
f. gesekan ideologi (partai politik, organisasi kemasyarakatan);
g. gangguan keamanan dari luar.

Indikator di atas tentang indeks ketahanan nasional hanya dapat kita lihat melalui penerapan di lapangan, apakah indeks ini berada pada posisi sangat tangguh, atau justru ada kerawananan terhadap ketahanan nasional kita. Semuanya akan ditentukan oleh daerah bagaimana manajemennya dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Bila negara abai tidak melaksanakan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan multikulturalisme, sudah dapat dipastikan daerah itu akan mengalami kerawanan terhadap stabilitas wilayahnya, cirinya di daerah itu terjadi konflik, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Beberapa contoh kegagalan dalam

menjalankan model negara multikulturalisme seperti konflik Maluku, konflik Poso, konflik Sampit. Semua ini terjadi karena kerawanan sosial setelah dilakukan evaluasi terhadap indeks ketahanan nasional di wilayah konflik tersebut. Artinya, wilayah konflik tersebut sudah dipastikan gagal dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

Dengan demikian, sebagai bahan evaluasi kita bersama kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan adanya konflik tersebut untuk memperbaiki treatmennya dalam melaksanakan model negara multikultralisme. Mungkin ada yang salah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan sehingga menimbulkan konflik di daerah. Bisa saja juga konflik terjadi karena warga masyarakat yang gagal paham dalam mengimplimentasikan model negara multikulturalisme pada lingkungan keluarga dan dilingkungan masyarakatnya. Kegagalan warga masyarakat dalam melaksanakan prinsip egalitarian, prinsip kerajasama, prinsip toleransi, prinsip otonom dan prinsip akomodatif dalam berinteraksi dengan warga masyarakat yang berbeda etnis akan menjadi potensi konflik di suatu wilayah.

Dengan demikian, supaya konflik tidak terjadi pemahaman dan ketaatan warga masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan komitmen terhadap prinsip-prinsip model negara multikulturalisme digunakan dalam interaksi sosial pada lingkungan bermasarakat, berbangsa dan pada lingkungan bernegara. Pemahaman inilah yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah dan warga masyarakat sehingga menimbulkan gesekan sosial dan berujung kepada konflik horizontal dan konflik vertikal di indonesia.

Berangkat dari beberapa konsep kajian bagaimana membangun negara multikulturalisme yang menjadi harapan pada bab 6 tentang kajian terhadap membangun masyarakat multikulturalisme dan indikator keberhasilan *Nation State* di Indonesia terjawab sudah bagaimana memulai dan mengatasi bila kondisi negara kita mengalami turbolensi sosial akibat dari sikap pemerintah dan mayarakat yang tidak komitmen dalam melaksanakan model negara multikulturalisme sebagai bagian dari strategi *Nation State* yang dicita-citakan oleh semua negara yang ingin negaranya tidak mengalami apa yang disebut dengan *failed state.*

Ulasan konsep dan teori membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalismelah yang akan menjadi jawaban semua fenomena sosial yang terjadi di negeri kita tercinta ini sehingga harapan dalam membangun negara dengan model *Nation State* atau negara bangsa sebagai solusinya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa warga negara Indonesia saat ini masih asli artinya masih berasal dari nenek moyang bangsa kita yang berasal dari ras mongoloid, namun warga negara kita saat ini terdiri dari multibangsa karena warga negara kita saat ini ada dari Bangsa *Chines*, Bangsa Arab, Bangsa Melayu, dan Bangsa Eropa. Dengan kesadaran membangun negara *Nation State* akan membuat negara kita tetap ada hingga akhir zaman. Kita tidak mau lagi melihat ada daerah yang mendirikan negara seperti Provinsi Timor-Timor yang saat ini sudah menjadi negara Timur Leste terulang kembali. Semua harapan dalam mewujudkan negara *Nation state* dengan model negara multikulturalisme terletak ditangan pemerintah dan mayarakat sebagai warga negara di dalam komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui komitmen dalam menerapkan strategi pelaksanaan model negara multikulturalisme.

BAB VII

FENOMENA *NATION STATE* DI PROVINSI GORONTALO DESA TRI RUKUN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO ANTARETNIS LOKAL GORONTALO DENGAN ETNIS BALI

Perjalanan sejarah republik Indonesia memang sangat berliku dalam mewujudkan *Nation State,* mulai dari kerajaan Sriwijaya dan masa kerajaan Majapahit impian dalam mempersatukan bangsa ini sudah menjadi keinginan, namun kedua kerajaan besar ini tidak dapat mewujudkannya secara permanen, karena dirusak oleh imperealisme bangsa kolonial dengan masuknya bangsa Eropa seperti Bangsa Portugis, Bangsa Spanyol dan Bangsa Belanda dan Bangsa Jepang yang awalnya hanya untuk berdagang dan ingingin membela kepentingan Indonesia (slogan Tiga A Jepang, Nippon Pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia) berubah menjadi penjajah sehingga keinginan untuk mempersatukan bangsa ini terganggu. Namun, upaya dalam mewujudkan *Nation State* terwujud setelah bangsa Indonesia melakukan perjuangan secara kolektif mengusir penjajah membuah-kan hasil di masa abad ke XX pada masa angkatan tahun 1945 yang kita kenal dengan hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia sehingga sehari setelah pernyataan kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno telah dirumuskan konstitusi negara dalam melengkapi pendirian negara Republik Indonesia. Sejarah

perumusan konstitusi pertama inilah Republik Indonesia menyatakan secara *de Jure* atas kemerdekaannya dan menyatakan Indonesia dikelola secara konsep *Nation State* dengan model negara multikulturalisme di dalam mengawal bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengapa *The Founding Fathers* memilih konsep *Nation State* dengan model negara multikulturalisme karena melihat kondisi Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang hetorogen yang seharusnya dipahami sebagai peleburan antara etnis, agama, suku bangsa, ras, dan adat istiadat. Bila ini dipahami secara kolektif oleh semua warga negara Indonesia. Maka negara kita akan terhindar dari apa yang saya sebut diawal bab terdahulu sebagai negara gagal atau *failed state*. Untuk membuktikan fakta itu marilah kita melihat apa yang ada di daerah Provinsi Gorontalo yang sampai saat ini masih tetap terjaga stabilitas daerah dari berbagai turbolensi sosial yang mengarah kepada bentuk konflik horizontal maupun konflik vertikal. Untuk membuktikan hal itu, dapat dilihat melalui hasil riset yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa dengan memilih objek penelitian di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Desa Tri Rukun merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Wilayah ini merupakan suatu Desa yang menjadi objek penelitian. Penduduk (masyarakat) yang mendiami Desa ini terdiri atas tiga macam etnis yaitu etnis Bali, etnis Gorontalo, dan etnis Minahasa. Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah etnis Bali dan etnis Gorontalo di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari, yang mempunyai kebiasaan, keyakinan, dan kebudayaan yang sangat berbeda.

A. Sejarah Desa Tri Rukun

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Desa, Desa Tri Rukun adalah salah satu desa di mana penduduknya terdiri dari tiga suku dan tiga agama yaitu: Suku Gorontalo, Suku Bali, dan Suku Minahasa. Agama yang dianut terdiri dari agama Islam, agama Hindu, dan agama Kristen. Mula-mula Desa Tri Rukun adalah sebuah dusun yang bernama Dusun Damai bagian dari wilayah Desa Bongo Dua. Seiring dengan adanya pemekaran daerah dan berdirinya daerah Propinsi Gorontalo, dan terbentuknya Kabupaten Boalemo, serta berdirinya Kecamatan Wonosari, maka tahun 2003 Desa Bongo Dua dimekarkan menjadi tiga Desa, yaitu Desa Bongo Dua, Desa Tri Rukun, dan Desa Raharja. Jadi Desa Tri Rukun adalah awalnya berasal dari Dusun Damai bagian dari wilayah Desa Bongo Dua yang dimekarkan pada Tahun 2003.

Tahun 2003 aparat Dusun Damai, tokoh-tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat melaksanakan rapat untuk membicarakan tentang pemekaran desa. Untuk mendirikan sebuah desa, tentu harus memiliki sebuah nama desa, maka untuk memberi sebuah nama desa dikaji berdasarkan asal usul penduduk setempat. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Desa Tri Rukun terdiri dari tiga etnis, tiga suku, dan tiga agama, maka dalam rapat tersebut melahirkan sebuah nama Desa yaitu Tri Rukun yang artinya "Tiga Kerukunan Umat Beragama".

Setelah desa terbentuk kemudian ditunjuklah Sang Nyoman Warta sebagai pelaksana harian (PLH) pada tahun 2003 sampai 2004. Setelah itu, diadakan pemilihan kepala Desa yang dimenangkan oleh Sang Nyoman Warta sebagai kepala desa definitif untuk periode 2004—2010. Pada tahun 2010, kembali diadakan pemilihan kepala desa untuk kedua kalinya dan

menempatkan Sang Nyoman Warta sebagai kepala desa untuk kedua kalinya di Desa Tri Rukun, yaitu periode 2010—2016.

B. Letak Geografis Desa Tri Rukun

Berdasarkan data geografis dapat dikemukakan bahwa Desa Tri Rukun terletak pada ketinggian 0—14 m atas permukaan laut. Desa Tri Rukun adalah lokasi yang di jadikan objek penelitian memiliki luas wilayah kurang lebih 546,75 ha. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.1. Luas Wilayah Desa menurut Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luas
1.	Pemukiman	59 ha/m^2
2.	Perkebunan	209,5 ha/m^2
3.	Persawahan	196 ha/m^2
4.	Pekarangan	42,75 ha/m^2
5.	Kuburan	2,25 ha/m^2
6.	Perkantoran	0,75 ha/m^2
7.	Luas prasarana umum dan lain-lain	36.5 ha/m^2
Total Luas		**546.75 ha/m^2**

Sumber: Profil Desa Tri Rukun, 7 Juni 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Tri Rukun. Desa Tri Rukun mempunyai batas wilayah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Raharja, Kecamatan Wonosari.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamaju, Kecamatan Wobosari.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bongo II, Kecamatan Wonosari.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangea, Kecamatan Wonosari.

Desa Tri Rukun mempunyai luas wilayah 14 km^2 yang membentuk bujur sangkar terdiri atas lima dusun, yaitu:

1. Dusun Damai;
2. Dusun Mekar Sari;
3. Dusun Merta Jaya;
4. Dusun Mekar Wangi;
5. Dusun Gunung sari.

Tabel 7.2. Jumlah Penduduk Desa Tri Rukun pada Setiap Dusun

No.	Nama Dusun	Jumlah
1.	Dusun Damai	194 (jiwa)
2.	Dusun Mekar Sari	140 (jiwa)
3.	Dusun Merta Jaya	286 (jiwa)
4.	Dusun Mekar Wangi	226 (jiwa)
5.	Dusun Gunung Sari	171 (jiwa)
Jumlah		**1017 (jiwa)**

Sumber: Profil Desa Tri Rukun, 7 Juni 2020

Secara klimatologi Desa Tri Rukun memiliki suhu 27—30°C, dan Desa Tri Rukun memiliki curah hujan 2.000/3.000 mm. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Mei dan terendah pada bulan Februari.

C. Keadaan Demografis Desa Tri Rukun

Keadaan demografis merupakan keadaan suatu wilayah yang membahas keadaan penduduk, seperti halnya keadaan penduduk.

1. Keadaan Penduduk berdasarkan Usia

Adapun keadaan penduduk Desa Tri Rukun sebagai berikut.

Tabel 7.3. Keadaan Penduduk berdasarkan Usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0—15 tahun	133 orang	156 orang
16—55 tahun	293 orang	266 orang
Lebih dari 55 tahun	78 orang	72 orang
Total	**533 orang**	**484 orang**

Sumber: Data Desa Tri Rukun, 7 Juni 2020

Berdasarkan tabel 7.3 di atas, menujukan jumlah penduduk laki-laki lebih bayak dari jumlah penduduk perempuan dan jumlah usia produktif lebih banyak dari usia anak-anak dan lanjut usia, tabel 7.3 di atas juga meunjukan jumlah usia anak-anak, usia produktif dan lanjut usia lebih banyak adalah laki-laki.

2. Keadaan Penduduk berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar peserta didik bisa mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya atau kata lainnya meningkatakan sumber daya manusia sehingga bisa membawa perubahan untuk daerah menjadi lebih baik. Adapun keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Tri Rukun adalah sebagai berikut.

Tabel 7.4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Tri Rukun

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak tamat SD	134 orang
2.	Tamat SD	259 orang
3.	Tamat SMP/sederajat	123 orang
4.	Tamat SMA/sederajat	127 orang
5.	Diploma/sarjana	103 orang
Total		**746 orang**

Sumber: Data Desa Tri Rukun, 7 Juni 2020

Berdasarkan tabel 7.4 di atas, menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Desa Tri Rukun paling banyak adalah tamat SD, dan penduduk Desa yang tingkat pendidikannya sampai pada perguruan tinggi adalah yang paling sedikit.

3. Keadaan Penduduk Desa Tri Rukun berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan cara agar manusia bisa meme-nuhi kebutuhan sehari-hari agar bisa memertahankan kehidupannya. Adapun pekerjaan yang digeluti masyarakat Desa Tri Rukun adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tri Rukun

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1.	Buruh tani	126 orang
2.	Petani	267 orang
3.	Peternak	152 orang
4.	Pedagang	19 orang
5.	Tukang kayu	8 orang
6.	Tukang batu	14 orang
7.	Penjahit	-
8.	PNS	40 orang
9.	Pensiunan	3 orang
10.	TNI/POLRI	7 orang
11.	Perangkat desa	22 orang
12.	Pengrajin	10 orang
13.	Industri kecil	3 orang
Total		**671 orang**

Sumber: Desa Tri Rukun, 7 Juni 2020

Bedasarkan tabel 7.5 di atas, menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Tri Rukun sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani karena Desa Tri Rukun merupakan daerah yang banyak perkebunan dan persawahan.

4. Keadaan Penduduk Desa Tri Rukun berdasarkan Agama dan Etnik

Penduduk Desa Tri Rukun memiliki berbagai macam etnis dan agama, yaitu ada tiga etnis dan tiga agama. Etnis tersebut di antaranya etnis Bali, etnis Gorontalo dan etnis Minahasa. Kemudian agama yang di anut masyarakat Desa

Tri Rukun, yaitu agama Hindu, Agama Islam, dan Agama Kristen Katolik/Protestan. Namun, telah terjadi perubahan karena terjadi pernikan antaretnis yang menyebabkan sebagian pindah agama. Adapun jumlah masyarakat penganut setiap agama adalah sebagai berikut.

Tabel 7.6. Penduduk berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Agama Hindu	888 orang
2.	Agama Islam	85 orang
3.	Agama Kristen Katolik	24 orang
4.	Agama Kristen Protestan	16 orang
Total		**1013 orang**

Sumber: Data Desa Tri Rukun, 7 Juni 2020

Berdasarkan tabel 7.6 di atas, dapat dilihat dari ketiga agama yang berada di Desa Tri Rukun yang paling banyak penganutnya adalah agama Hindu, setelah agama Hindu, kemudian Penganut agama Islam dan selanjutnya penganut agama Kristen.

Tabel 7.7. Penduduk berdasarkan Etnik

No.	Etnik	Jumlah Penduduk
1.	Bali	885 orang
2.	Gorontalo	85 orang
3.	Minahasa	243orang
Total		**1013 orang**

Sumber: Wawancara, 7 Juni 2020

Berdasarkan tabel 7.7 di atas, dapat dilihat dari ketiga Etnis yang berada di Desa Tri Rukun yang paling banyak adalah Etnis Bali yaitu 87% dari 1013 orang, setelah Hindu kemudian adalah masyarakat Etnis Gorontalo 8% dan selanjutnya adalah etnis minahasa 5%.

Untuk melihat fenomena interaksi sosial di desa Tri Rukun dapat kita amati melalui hasil riset di antaranya yang dijadikan fokus dalam melihat bagaimana pemerintah desa Tri Rukun dalam mewujudkan negara dengan model multikulturalisme dapat kita lihat melalui beberapa permasalahan dalam riset ini di antaranya sebagai berikut.

D. Hubungan Interaksi antara Masyarakat Etnis Bali dan Etnis Gorontalo

Bila kita menganalisis hasil temuan penelitian membuktikan bahwa hubungan interaksi antara masyarakat etnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo di desa Tri Rukun pada posisi kualitatif sangat tangguh. Hal ini ditunjukan oleh hasil penelitian berdasarkan indikator interaksi sosial dan teori multikulturalisme yang digali dari beberapa teori sosial sebagai berikut:

Untuk menganalisis interaksi sosial yang terjadi pada warga masyarakat desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari dalam mendukung penilaian indeks ketahanan wilayah dapat pula kita melihat beberapa teori interaksi sosial di bawah ini sebagai berikut.

1. Konsep *Melting Pot*

Bill Watson (2004) yang dikutip oleh Tanto Sukardi dan Subandowo (2014: 102), pada tahap awal cita-cita masyarakat multirasial dan multikultural dibentuk melalui proses asimilasi kelompok minoritas ke dalam kelompok dominan. Kemudian pada tahap berikutnya berbagai kelompok tersebut mengasimilasikan dirinya sebagai masyarakat baru sehingga terbentuklah suatu masyarakat bangsa sebagai hasil dari asimilasi tersebut. Proses seperti itu diabadikan dalam sebuah teori terkenal, yaitu *melting pot.*

Teori *melting pot* pada awalnya diwacanakan oleh J. Hektor seorang imigran dari normandia. Dalam teorinya, dia menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui, bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestan* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal dari Inggris yang Protestan (Dede Rosyada, 2014).

Dalam jurnal (Ahmad Rivai Harahap, 2006: 29) menyatakan bahwa dalam teori *melting pot* diupayakan menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya masing-masing. Jadi, dalam hal ini teori *melting pot* merupakan suatu teori yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai macam konflik SARA terutama di negara yang memiliki multirasial atau multietnis, yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaurkan masyarakat yang multikultural, multietnis tersebut di suatu wadah atau daerah dengan meleburkan masing-masing kebudayaan tersebut dengan berbagai macam kebudayaan yang lain sehingga dari hasil peleburan dan perpaduan antara kebudayaan tersebut melahirkan suatu keudayaan baru di daerah tersebut.

Dalam proses menuju integrasi antara etnis/ras dalam masyarakat Amerika Serikat scara berangsur-angsur terbentuk filsafat hidup yang berjalan secara integrasional dan komulatif. Proses terbinanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan proses terbinanya suatu bangsa sampai sekarang merupakan proses yang panjang, merupakan proses yang penuh prasangka-prasangka etnis/ras dan kultural, tetapi dengan kearifan kolektif semua hambatan itu dapat diatasi. Bersamaan dengan itu terbentuk pula kemauan yang kuat untuk membentuk

identitas kultur yang baru, yaitu identitas kultur Amerika Serikat yang bersifat multietnis/multirasial (Tanto Sukardi dan Subandowo, 2014: 102).

Ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk maka teori *melting pot* kemudian mulai dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl sebagai* sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Angso Saxon Protentant* (WASP) diakomodasi dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya, interaksi kultural antara berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism,* yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa, (Dede Rosyada, 2014: 2).

2. Konsep *Sald Bowl*

Menurut Nathan Glazer "*salad bowl*" atau "*glorious mosaic*", yang di dalamnya setiap unsur etnis dan ras dalam populasi dapat memertahankan kekhasannya. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada pandagan multikulturalis tunggal, melainkan macam-macam sikap tentang syarat

multikulturalisme (Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, 2013: 572).

Jadi, teori *salad bowl* merupakan teori untuk mencegah atau mengantisipasi timbulnya konflik yang diakibatkan oleh multikultural ataupun multietnis, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai macam etnis ke dalam satu wadah atau tempat dengan tetap menjaga kebudayaan masing-masing etnis tersebut sehingga dengan hal ini secara langsung maupun tidak langsung setiap masyarakat akan sadar akan pentingnya menjaga kerukunan antara masyarakat berbagai macam etnis sehingga potensi konflik yang disebabkan karena keanekaragaman bisa dikendalikan.

3. Teori Multikulturalisme

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azra, 2007). Sementara itu, pengertian masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah adat serta kebiasaan (*a multicultural soceity, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinc conception of the world, sistem of (meaning, values, forms of social organizations, historis,customs and practices*) (Parekh, 1997, yang dikutip dari Azra, 2007).

Selain teori di atas, di dalam mewujudkan keharmonisan sosial ada teori lain sebagai pendukung dalam membangun keharmonisan hubungan antaretnis yakni teori innteraksi sosial. Interaksi yang dilakukan secara berulang akan menghasilkan proses sosial. Proses sosial adalah perilaku berulang yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (interaksi sosial). Horton (1983: 74) menyebutkan 5 (lima) kemungkinan proses sosial, yaitu sebagai berikut.

a. Kerja Sama
   Kerja sama adalah usaha bersama antarmanusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial individu-individu atau kelompok-kelompok berusaha saling menolong untuk mencapai tujuan bersama atau mengoordinasikan kegiatan mereka guna mencapai tujuan bersama.
b. Persaingan atau Kompetisi
   Persaingan adalah usaha untuk melakukan sesuatu secara lebih baik dibanding orang atau kelompok lain dalam mencapai tujuan.
c. Konflik
d. Konflik adalah proses di mana orang atau kelompok berusaha memperoleh sesuatu (imbalan tertentu) dengan cara melemahkan atau menghilangkan persaingan atau kompetitor lain, bukan hanya mencoba tampil lebih baik, seperti dalam kompetisi.
e. Akomodasi
   Akomodasi adalah proses mencapai persetujuan sementara di antara pihak-pihak yang sedang atau mempunyai potensi untuk berkonflik.

f. Asimilasi

Asimilasi adalah proses peleburan beberapa kebudayaan menjadi satu, hingga akar konflik yang bersumber pada perbedaan kebudayaan terapus.

g. Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusis dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

Demikian halnya dalam menetapkan kondisi ketahanan wilayah di suatu daerah apakah ketahanan wilayah berada pada posisi kualitatif sangat rawan, rawan, cukup tangguh, tangguh dan sangat tangguh sebagai parameter dalam mengukur ketahanan wilayah di suatu daerah. Penilaian ini dievaluasi melalui variabel dan indikator penelitian. Misalnya, variabel ideologi dengan indikator gesekan ideologi, gesekan agama, gesekan pilihan politik dsb. Bila kondisi ini berlangsung dengan normal maka kondisi ketahanan wilayah pada dimensi ideologi dapat dikatakan sangat tangguh. Begitu pula dengan dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan sebagai variabel memiliki indikator.

Berdasarkan teori di atas maka kita dapat mengukur indeks ketahanan wilayah di suatu daerah. Inilah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Di antaranya mengukurnya dengan teori interaksi sosial dan mengukurnya dengan indikator ketahanan wilayah. Untuk melihat hasil dari apa yang digunakan dalam mengukur indeks ketahanan wilayah dari teori interaksi sosial dapat kita analisis melalui temuan hasil penelitian.

Berdasarkan teori interaksi sosial dijelaskan di atas menunjukkan kondisi interaksi sosial bagi warga masyarakat desa Tri Rukun berada pada posisi sangat tangguh karena hasil riset menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo yang berada di Desa Tri Rukun terjadi dalam 5 bentuk interaksi, yaitu sebagai berikut.

1. **Interaksi dalam Bentuk Kerja Sama Antaretnis di Desa Tri Rukun**

   Dalam bentuk kerja sama dibuktikan dengan dilasanakan kegiatan gotong royong, dan selain Kerja sama juga terjadi dalam bidang kebudayaan yaitu pada pembuatan sampai pawai *ogoh-ogoh* ketika Nyepi, dan juga kerja sama pembuatan *alikusu* ketika menyambut hari raya Idhul Fitri dilakukan secara bersama antarwarga etnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo.

2. **Interaksi dalam Bentuk Persaingan Positif antara Masyarakat Etnis yang Berada di Desa Tri Rukun**

   Di desa Tri Rukun persaingan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali tidak terjadi justru yang terjadi adalah warga etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo dalam membuka usaha dalam menunjang ekonomi masyarakatnya dilakukan secara bersama, misalnya etnis Bali buka usaha pertokoan warga masyarakat etnis lokal menjadi konsumernya. Demikian juga bila warga etnis lokal membuka usaha kios-kios warga etnis Bali bersedia menampung atau melayani pembelian barang dagangan dari etnis lokal. Kehidupan usaha perdagangan tidak terjadi gesekan antaretnis Bali dan etnis lokal. Begitu juga dalam melaksanakan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan semua dilaksanakan dengan prinsip saling bekerja sama antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali. Dapat dikatakan suasana multikulturalisme di desa Tri Rukun terbangun atas dasar kesadaran warga

masyarakatnya dan didukung oleh pemerintah desa yang selalu mensosialisasikan kehidupan multikulturalisme melalui organisasi FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan melalui organisasi karana taruna di desa Tri Rukun.

3. **Interaksi dalam Bentuk Konflik antara Masyarakat Etnis yang Berada di Desa Tri Rukun**

   Tidak ditemukan konflik antarwarga masyarakat baik gesekan antarpemuda, gesekan antarbudaya, gesekan antar pilihan politik dan bahkan gesekan antar keyakinan beragama, semuanya berjalan dengan normal. Kalaupun ada dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kepala desa bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama dan tidak terjadi konflik horizontal dan konflik vertikal sebagaimana yang terjadi di daerah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku.

4. **Interaksi dalam Bentuk Asimilasi Masyarakat Etnis yang Berada di Desa Tri Rukun**

   Bila melihat proses asimilasi di desa Tri Rukun warga masyarakat etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo pada saat pelaksanaan mengarak ogoh-ogoh warga etnis lokal Gorontalo terlibat dalam kegiatan etnis Bali. Demikian pula sebaliknya warga masyarakat etnis Bali terlibat dalam tradisi etnis lokal Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan malam pasang lampu atau tradisi Tombilatohe. Bahkan, pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan seperti perayaan hari raya Idul Fitri dan hari Natal ketiga etnis yang ada di desa Tri Rukun etnis Bali, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa saling mengunjugi kepada mereka (etnis) yang merayakan hari-hari besar keagamaan tersebut.

5. **Untuk Proses Akulturasi Terjadi pada Warga Etnis Bali dan Etnis Lokal Gorontalo**
   Melangsungkan pernikahan antaretnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo pernikahan ini tidak menimbulkan benturan tradisi, benturan agama dan benturan etnis semuanya berjalan normal. Dan ini semuanya terjadi pada warga etnis Bali di desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Sebagai tambahan dalam pembahasan mengenai hasil penelitian di atas berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lokasi penelitian desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari dapat melaksanakan interaksi sosial dengan model negara multikulturalisme hal ini ditunjukan dari informasi yang diberikan oleh informan penelitian menunjukkan desa Tri Rukun merupakan salah satu desa warga desanya berasal dari transmigrasi yang mampu menjalin komunikasi dan interaksi secara baik dengan penduduk etnis lokal Gorontalo sehingga desa Tri Rukun dapat dikatakan sebagai suatu desa yang dapat melaksanakan model negara multikulturalisme. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini desa tersebut tingkat stabilitasnya bila dilihat dari aspek ketahanan nasional melalui indikator ketahanan nasional dari aspek Tri Gatra dan Panca Gatra serta Asta Gatra dapat dilaksanakan dengan baik. Artinya sampai dengan saat ini desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari tetap terjaga dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua ini terjadi karena warga masyarakat desa Tri Rukun yang terdiri dari etnis mayoritas etnis Bali, etnis Gorontalo dan etnis Minahasa melaksanakan prinsip-prinsip model negara multikulturalisme. Dengan demikian Desa Tri Rukun dapat dimasukan sebagai salah satu desa yang berhasil memertahankan negara multikulturalisme.

Sudah sepantasnya pemerintah daerah kabupaten Boalemo memberikan apresiasi kepada desa Tri Rukun dalam menjaga hubungan harmonis antara etnis yang ada di desa Tri Rukun ketika mereka mampu melaksanakan model negara multikulturalisme sebagaimana yang dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* tentang *Nation State*.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan beberapa teori interaksi sosial di atas menunjukkan warga desa Tri Rukun dan peran pemerintah desa Tri Rukun berhasil dalam membangun keharmonisan melalui harapan teori-teori interaksi sosial dan juga dapat dikatakan bahwa warga masyarakat desa Tri Rukun dapat mengembangkan prinsip-prinsip model negara multikulturalisme, hal ini ditunjukan pada hasil penelitian tentang interaksi sosial antara etnis lokal Gorontalo dan etnis Bali telah tercipta dengan penuh kesadaran warganya sikap egalitarian, sikap bekerja sama dalam melakukan aktivitas keagamaan di desa Tri Rukun, sikap saling menghargai satu sama lain, sikap saling menghormati pilihan ideologi politik masing-masing etnis sehingga dengan sikap yang ditunjukan warga masyarakat desa Tri Rukun dan peran pemerintah desa Tri Rukun dalam menjaga hubungan harmonis di desa Tri Rukun dapat dikatakan desa Tri Rukun berhasil dalam melaksanakan model negara multikulturalisme. Fakta-fakta pendukungnya adalah kondisi ketahanan wilayah di desa Tri Rukun pada posisi kualitatif sangat tangguh. Indeks ini diperoleh ketika hubungan interaksi sosial digunakan parameter interaksi sosial dan parameter ketahanan wilayah yang diarahkan pada kondisi pemahaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan warga masyarakat desa Tri Rukun.

Parameter ini ketika ditelusuri di lapangan ternyata kondisi interaksi sosial warga masyarakat desa Tri Rukun menunjukkan hubungan kerja sama antaretnis sangat tinggi.

Seperti sikap saling dukung mendukung dalam melakukan kegiatan ritual keagamaan, saling mendukung dalam perbedaan tradisi, terjadinya pernikahan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali dengan damai, tidak saling memaksakan kehendak dalam menentukan pilihan ideologi politik di saat momen pilkades, pilkada, pileg dan pilpres. Saling mendukung dalam kegiatan usaha perekonomian misalnya pembukaan lahan pertanian, usaha perkebunan secara bersama, usaha peternakan secara bersama bahkan usaha dalam membuka perdagangan pun dilakukan dengan prinsip bekerja sama dalam mengembangkan usahanya. Fakta-fakta hasil penelitian di atas merupakan gambaran deskriptif kualitatif atas penilaian indeks ketahanan wilayah bagi desa Tri Rukun pada posisi indeks yang sangat tangguh.

Posisi indeks sangat tangguh diberikan karena warga masyarakat desa Tri Rukun dan pemerintah desa dapat melaksanakan model negara multikulturalisme dengan sempurna sehingga bila dilihat dari implikasi ketahanan wilayah melalui indikator kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dapat dilalui secara normal, maka pantaslah desa Tri Rukun mendapat indeks penilaian sangat tangguh melalui parameter ketahanan wilayah.

Berdasarkan temuan riset pun membuktikan warga desa Tri Rukun hubungan interaksi sosialnya bila dilihat dari indikator interaksi sosial mendapatkan parameter sangat baik, sebagai contoh dari penerapan model negara multikulturalisme di bagian Timur Indonesia, bahkan bagian Barat Indonesia ada yang gagal menerapkan model negara multikulturalisme. Namun, di desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo warga transmigrasi berhasil melaksanakan model multikulturalisme. Mengapa karena sampai dengan saat ini, sejak warga transmigrasi di tempatkan di Kecamatan Wonosari sejak tahun 1990 an warga transmigrasi dapat membangun

kebersamaan dengan etnis lokal tanpa ada gesekan yang mengarah kepada bentuk disintegrasi bangsa. Padahal bila dilihat dari potensi konflik wilayah kecamatan Wonosari sebagai tempat penempatan Transmigrasi sangat berpotensi memunculkan konflik antaretnis.

Dengan penempatan warga transmigrasi kewilayah kecamatan Wonosari, khususnya pada lokasi penelitian sangat berpotensi munculnya konflik sosial karena etnis transmigrasi memiliki tradisi berbeda, agama berbeda, sikap politik berbeda. Namun, potensi konflik sosial itu di wilayah Kecamatan Wonosari khususnya desa Tri Rukun dapat dikelola secara baik. Hasilnya potensi konflik bila dilihat dari teori konflik sosial berpotensi melahirkan konflik sosial sebagaimana yang dikatakan oleh Samuel Huntington tentang teori konflik sosial tentang teori *social conflik of cilization* yang mengatakan bila terjadi perbedaan peradaban warga negara berada pada suatu wilayah sangat berpotensi terhadap terjadinya konflik sosial. Semua ini tidak terjadi di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Inilah yang menarik dalam fokus penelitian ini, tetapi semuanya terbantahkan, karena hasil riset menunjukkan sikap-sikap atau prinsip-prinsip multikulturalismelah sebagai salah satu sumber perekat terjalinnya hubungan antara etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali sampai dengan saat ini suasana damai terpelihara dan terjaga di desa Tri Rukun.

Bukan berarti teori konflik sosial dari Samuel Huntington tidak pantas untuk digunakan, tetapi teori konflik sosial dapat menunjukkan peta konflik sosial sehingga yang diperlukan bagaimana cara penanggulangan konflik tersebut. Teori ini akan dijawab dengan teori resolusi konflik yang mengatakan konflik sebagai lanjutan dari pertarungan kekuasaan. Artinya, konflik tidak dapat dihindari namun dengan konflik kita dapat menemukan solusi bagaimana jalan terbaik untuk hidup

berdampingan pada kelompok yang berbeda ideologinya, berbeda tradisi-nya, berbeda agamanya. Dengan mempelajari potensi konflik dan mengambil hikmah adanya konflik akan membuat kita lebih dewasa dalam menyelesaikan konflik. Solusinya dari kedua teori ini adalah memunculkan teori tentang model negara multikulturalisme. Teori ini mengajarkan bagaimana warga negara yang berbeda tradisi, pilihan ideologi politik, agama, ras dapat hidup bersama dalam satu negara besar. Teori multikulturalisme mengajarkan prinsip egalitaraian dalam bergaul dengan kelompok yang berbeda tujuan, cita-cita, keyakinan dsb.

Berangkat dari teori di atas maka untuk menganalisis apa yang terjadi di lokasi penelitian di desa Tri Rukun ternyata warga masyarakatnya dapat bertahan hidup berdampingan berbeda etnis, agama dan tradisi disebabkan pemerintah daerah membangun dengan cara dan strategi multikulturalisme dan ini didukung oleh kearifan lokal bagi setiap etnis yang mengajarkan sikap egalitarian dan religiutas di tengah-tengah masyarakat desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Satu hal yang menjadi temuan penelitian mengapa warga masyarakat Kecamatan Wonosari sebagai daerah tujuan transmigrasi secara nasional berhasil di daerah kabupaten Boalemo disebabkan oleh penempatan warga Transmigrasi di Kecamatan Wonosari masih dalam klasifikasi Ras yang sama yaitu Ras Mongoloid. Berdasarkan teori klasifikasi Ras dunia warga negara dikelompokan atas tiga kelompok ras besar yaitu Ras Mongoloid, Ras Negroid dan Ras Kaukosoid.

Di kecamatan Wonosari, sebagai daerah tujuan penempatan warga transmigrasi dari pemerintah pusat berhasil karena semua desa di kecamatan Wonosari khususnya desa Tri Rukun karena memiliki kesamaan ras, yaitu semua warga transmigrasi dan etnis lokal sama-sama berasal dari ras yang

sama Mongoloid sehingga apa yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini dapat juga terjawab oleh dua teori di atas, satu teori negara model negara multikulturalisme yang satunya lagi teori tentang pengelompokan warga negara berdasarkan ras besar.

Dapat dikatakan bila penyebaran transmigrasi itu di tempatkan pada wilayah yang berbeda ras akan menjadi permasalahan misalnya transmigrasi di tempatkan di wilayah Provinsi Irian Jaya yang memiliki ras Negroid berbeda ras warga transmigrasi yang memiliki ras Mongoloid sehingga konflik warga transmigrasi di Provinsi Irian jaya terjadi berbeda di daerah Provinsi Gorontalo.

Apa yang diperoleh dari hasil penelitian di atas akan membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah kecamatan Wonosari dan pemerintah desa Tri Rukun dalam menjaga hubungan harmonis antara etnis lokal Gorontalo dan etnis Bali di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dalam membangun negara multikulturalisme. Di kecamatan Wonosari khusunya di desa Tri Rukun mudah melakukan multikulturalisme karena warga transmigrasi dengan etnis lokal memiliki kesamaan ras yakni ras mongoloid. Tetapi bukan berarti warga desa Tri Rukun tidak memiliki potensi konflik, potensi konflik sekalipun kita hidup dalam kelompok ras yang sama namun berbeda etnis, berbeda keyakinan, berbeda pilihan ideologi, berbeda kepentingan. Dengan karekteristik ini maka memungkinkan terjadinya konflik sosial.

Berdasarkan identifikasi di atas hanya membantu meminimalisasi konflik karena etnis Gorontalo dengan etnis Bali sekalipun bersamaan dalam bentuk Ras tetapi berbeda dalam segala hal sehingga diperlukan strategi model negara multikulturalisme dalam membangun hubungan harmonis di antara etnis yang ada di desa Tri Rukun. Dengan model multikulturalisme warga desa Tri Rukun yang terdiri dari tiga

etnis yakni etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa dapat dipersatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita *The Founding Fathers* tentang *Nation State* dalam mendirikan negara kita tercinta Republik Indonesia.

Bila kita menggunakan analisis teori multikulturalisme tentang prestasi yang dicapai oleh pemerintah desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo di atas sejalan dengan teori multikulturalisme di mana Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azra, 2007).

Dengan demikian, pantas bila pemerintah desa Tri Rukun sangat tangguh di dalam melaksanakan model negara multikulturalisme dalam membangun hubungan harmonis antara etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali sesuai analisis teori multikulturalisme yang dibangun oleh Azyumardi Azra.

Di samping teori multikulturalisme yang menjadi alat perekat bersatunya etnis Bali mayoritas dengan etnis lokal Gorontalo di desa Tri Rukun, dapat pula diidentifikasi bahwa apa yang terjadi di desa Tri Rukun sesuai teori yang dikemukakan oleh Menurut Nathan Glazer "*salad bowl*" atau "*glorious mosaic*", yang di dalamnya setiap unsur etnis dan ras dalam populasi dapat memertahankan kekhasannya. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada pandangan multikulturalis tunggal, melainkan macam-macam sikap tentang syarat multikulturalisme (Gerald F. Gaus & Chandran Kukathas, 2013: 572). Di mana dengan teori ini dikemukakan masyarakat etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo tidak menggambungkan tradisi

menjadi tradisi baru meninggalkan tradisi asal tetapi yang terjadi warga masyarakat desa Tri Rukun mereka dapat hidup dengan tradisi masing-masing tanpa benturan antar tradisi sehingga sampai dengan saat ini warga masyarakat desa Tri Rukun dapat hidup berdampingan dalam membentuk kehidupan harmonis membangun desa Tri Rukun secara bersama.

Apa yang menjadi analisis di atas menjadi perhatian kita dalam membina hubungan harmonis warga transmigrasi di desa Tri Rukun dan desa-desa yang ada di kecamatan Wonosari dan seluruh wilayah yang di tempati warga transmigrasi di Provinsi Gorontalo, misalnya kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo di dalam menerapkan model negara multikulturalisme.

E. Faktor-Faktor Penghambat Membangun Keharmonisan antara Etnis Lokal Gorontalo dan Etnis Bali dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme di Desa Tri Rukun dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah

Cita-cita mewujudkan negara multikulturalisme memang akan mengalami tantangan ketika warga negara di suatu wilayah berbeda dalam segala hal. Di antaranya adalah perbedaan dalam aspek kebudayaan, perbedaan dalam aspek sosial, perbedaan dalam aspek ekonomi serta perbedaan etnis, suku dan ras. Semua perbedaan itu akan menjadi faktor penghambat masyarakat untuk melakukan interaksi dalam membangun keharmonisan antarwarga negara. Namun, apabila perbedaan ini dikelola atau ditangani melalui prinsip-prinsip model negara multikul-turalisme dengan mengedepankan sikap *egalitarian,* sikap kerja sama, sikap toleransi dan memberikan hak otonom kepada warga negara yang berbeda dalam pandangan

ideologi, tradisi, cita-cita dan tujuan, maka akan tercipta masyarakat multikulturalisme.

Sikap multikulturalisme merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong-menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan dan saling menjaga satu sama lain. Sikap multikulturalisme berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke ikhlasan.

Dengan demikian, sikap multikulturalisme akan memunculkan sikap positip dalam membina kerukunan antarsuku, antarras, antar golongan, antaragama yang berbeda merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling memercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Teori Kerukunan sosial memandang keselarasan/ harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antar elemen masyarakat dan kulturnya. Setidaknya ada lima teori dasar berkaitan dengan Kerukunan (Turner, 1991: 234) dalam jurnal (muhammad rais, 2012: 190), yaitu:

1. Teori Nilai

   Kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling menaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan di jalankan dalam masyarakat.

2. Teori Struktural
   Kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang menginteg-rasikan masyarakat. Dengan kata lain, kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan.
3. Teori Idealis
   Kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan.
4. Teori Resiprositas
   Kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap.
5. Teori Interaksi
   Kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antarkelompok, etnis, agama dll., dalam masyarakat yang saling menguntungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

Teori di atas sesuai dengan kondisi masyarakat antaretnis Desa Tri Rukun. Dalam teori nilai di Desa Tri Rukun yaitu dibuktikan dengan ketaatan masyarakat Bali dan Gorontalo dalam menjalankan kebudayaannya masing-masing. Pada teori struktural dibuktikan dengan adanya campur tangan pemerintah Desa dalam membangun kerja sama antara etnis Bali dan Gorontalo di Desa Tri Rukun, baik berupa motivasi dan nasihat-nasihat. Pada teori Idealis dibuktikan dengan adanya tujuan mendirikan Desa Tri Rukun yang awalnya masih bergabung dengan Desa Bongo Dua, kemudian teori resiprositas dan teori interaksi terbukti dengan terjalinya kehidupan sosial yang humanis dan adanya interaksi positif antara masyarakat etis Bali dan Gorontalo.

Selain dari teori di atas. Ada juga dua teori membentuk Kerukunan multietnis dan multikultural. Yaitu teori *melting pot* dan *salad bowl.* Teori melting pot pada awalnya diwacanakan oleh J. Hektor seorang imigran dari normandia. Dalam teorinya dia menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui, bahwa monokultur mereka itu lebih di warnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestan* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal dari inggris yang Protestan (Dede Rosyada, 2014: 2).

Ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk maka teori *melting pot* kemudian mulai dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam Keragaman, teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar *White Anglo Saxon Protentant* (WASP) diakomodasi dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhirnya, interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism,* yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa (Dede Rosyada, 2014: 2).

Kerukunan antar masyarakat etnis di Desa Tri Rukun terjadi sesuai dengan teori Kerukunan *salad bowl.* Karena proses akulturasi kebudayaan tidak pernah menghilangkan budaya lama masing-masing etnis, akan tetapi setiap etnis di Desa Tri Rukun diberikan ruang yang leluasa dalam mengembangkan kebudayaannya guna memberikan kotribusi di berbagai sektor, terutama sektor kebudayaan itu sendiri, yaitu sebagai budaya nasional.

Selain teori interaksi sosial diatas, di dalam menganalisis kondisi keharmonisan yang ada di desa Tri Rukun dapat kita lihat melalui teori multikuturalisme di mana teori multikulturalisme pada dasarnya menyatukan kelompok warga negara yang berbeda pandangan ideologi politiknya, berbeda ras, berbeda tradisi dan berbeda cita-cita dan tujuan, tetapi dapat menyadari perbedaan tersebut dengan mengedepankan sikap egalitarian, sikap kerja sama kelompok, sikap toleransi dan memberikan otonom kepada warga negara yang berbeda dalam mengelola pemerintahannya. Teori inilah yang dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* pada saat mendirikan negara Republik Indonesia dalam mewujudkan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme.

Berdasarkan penelusuran di lapangan dengan menemui *Key Person* di Desa Tri Rukun mengenai faktor-faktor penghambat dalam membangun keharmonisan sangat kecil penghambatnya bahkan faktor penghambat pun tidak ditemukan di desa Tri Rukun, karena sesuai pernyataan informan penelitian sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa pada aspek Tri gatra dan panca gatra serta asta gatra di desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

"Gesekan itu tidak pernah terjadi, karena warga masyarakat di Desa Tri Rukun yang dilihat dari namanya saja Tri Rukun. Tri artinya tiga etnis yang hidup rukun antaretnis lokal Gorontalo, etnis Minahasa dan etnis Bali. Konflik yang akan terjadi antaretnis dapat diredam dengan penamaan desa Tri Rukun. Artinya dari pemberian nama desa tersebut sedikitnya telah membantu dalam mempererat hubungan antaretnis di desa Tri Rukun. Dan ini juga didukung oleh kearifan lokal etnis Bali dikenal dengan istilah: **'Pari sade'** suatu organisasi keagamaan yang selalu menjadi pegangan masyarakat dalam membina hubungan harmonis antaretnis lokal dengan etnis Bali. Organisasi ini selalu mengajarkan himbauan kepada masyarakatnya untuk selalu menghargai agama lain dan selalu hidup rukun antara sesama etnis. Melalui organisasi 'Pari Sade' inilah etnis Bali dapat hidup rukun dengan etnis lokal etnis Gorontalo. Dan bukan hanya etnis lokal saja, dengan etnis Minahasa pun mereka dapat hidup rukun sesuai dengan nama desanya yakni Desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan Ibunda di atas menunjukkan bahwa di desa Tri Rukun aspek tri gatra, aspek panca gatra dan asta gatra tidak mengalami hambatan dalam mewujudkan hubungan harmonis antaretnis lokal dan etnis Bali.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Penamaan Desa menurut ibu Sekdes ada sejak tahun 2004 melalui pemekaran desa, dan penamaan desa ditetapkan melalui musyawarah desa melahirkan nama "**Desa Tri Rukun**" (tiga Desa yang rukun antara etnis Bali, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa) membuat desa Tri Rukun tidak memiliki hambatan dalam membangun interaksi sosial secara rukun. Artinya dengan nama desa itu warga desa Tri Rukun dapat memertahankan kerukunan antar-sesama etnis yang ada di desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun sama sekali tidak ada gesekan atau konflik. Hal ini dapat dilihat dari perayaan-perayaan hari besar agama masing-masing etnis yang saling menghargai dan saling bergotong royong satu sama lain dalam melaksanakan perayaan keagamaan di desa Tri Rukun. Dan ini dikatakan sejak tahun 1980 sejak mereka datang etnis Bali melalui program transmigarsi Pemerintah Pusat ke wilayah Wonosari Kabupaten Boalemo etnis Bali dapat diterima oleh etnis lokal Gorontalo di wilayah Kabupaten Boalemo (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun)".

Melihat data di atas yang telah dikonfirmasi kepada aparat desa Tri Rukun sebagai informan penelitian, menunjukkan pemerintah desa Tri Rukun tidak mengalami hambatan dalam membangun negara multikulturalisme di desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Hal ini ditunjukan data informan penelitian setelah dilaku-kan penelusuran kembali data yang diperoleh mahasiswa. Ternyata fakta-fakta yang ditemukan mahasiswa ada benarnya apa yang terjadi di desa Tri Rukun menyangkut hubungan interaksi sosial antaretnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo memiliki hubungan yang baik. Dalam kajian perspektif ketahanan nasional desa Tri Rukun dapat dikualifikasikan sangat tangguh dalam memertahankan stabilitas wilayahnya sehingga sampai saat ini desa Tri Rukun terjaga stabilitas interaksi sosial antara etnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo.

Berdasarkan dengan data hasil penelitian di atas tentang faktor-faktor penghambat dalam membangun keharmonisan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali di desa Tri Rukun tidak ditemukan karena warga masyarakatnya dan pemerintah desa telah melaksanakan prinsip-prinsip model negara

multikulturalisme, di mana masyarakatnya sangat toleran, sangat egaliter, selalu bekerja sama dalam membangun desa, dan memberikan hak otonom dalam melakukan kegiatan ritual keagamaan.

Salah satu yang merekatkan hubungan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali di desa Tri Rukun karena kedua etnis ini berasal dari ras yang sama, yakni ras mongoloid sehingga bila dibandingkan penempatan warga transmigrasi di Provinsi Irian Jaya yang memiliki Ras berbeda dengan warga transmigrasi tingkat segmentasinya sangat tinggi terjadinya potensi konflik, karena warga transmigrasi yang memiliki ras Mongoloid dengan ras warga masyarakat Irian Jaya berasal dari ras Negroid akan mengalami benturan dari segi ras sehingga dengan temuan ini membuktikan bahwa warga transmigrasi di desa Tri Rukun mudah untuk membangun hubungan harmonis antar ketiga etnis yang ada di desa Tri Rukun, yakni etnis Bali, etnis lokal Gorontalo dengan etnis Minahasa.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa faktor penghambat dari membangun hubungan harmonis antaretnis Bali dan etnis lokal Gorontalo dapat diatasi dengan sikap multikulturalisme yang selalu didorong oleh pemerintah desa melalui wujud penamaan desa Tri Rukun, artinya nama desa inipun membantu dalam mewujudkan terterimanya model negara multikulturalisme di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo.

Dengan demikian, terjawab sudah rumusan masalah penelitian tentang faktor-faktor penghambat pemerintah desa dalam membangun negara multikulturalisme di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

F. Upaya Pemerintah Desa Membangun Keharmonisan Antaretnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme di Desa Tri Rukun dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah

Model negara multikulturalisme sebagai harapan yang dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* dalam membangun negara *Nation State* (negara bangsa). Dalam mewujudkan keinginan tersebut semestinya sejak awal berdirinya republik ini sudah dikelola secara multikultural. Sebagai bukti bahwa komitmen negara menghendaki pelaksanaan managemen negara dengan model negara multikulturalisme dapat kita lihat melalui konstitusi dan dasar negara Republik Indonesia Pancasila.

Di dalam konstitusi perwujudan negara dalam model multikulturalisme adalah diatur pada pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 18, 27, 28, pasal 29 UUD NRI 1945 dan pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945. Di mana pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 berbunyi Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Makna dari negara kesatuan adalah apapun perbedaan yang ada pada setiap warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia wajib menyatukan kewajibannya dalam melayani semua warga negara yang berbeda.

Demikian juga pasal 18 UUD NRI 1945 memiliki makna sejak awal negara Indonesia mengelola negaranya dengan sistem model negara multikulturalisme, artinya pemerintah pusat wajib memberikan hak otonom kepada setiap daerah dalam mengelola pemerintahan daerahnya. Demikian juga dengan pasal 27 UUD NRI 1945 pengakuan negara pada sikap egalitarian di mana setiap warga negara bersamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan. Artinya pemerintah harus bersikap adil dalam menegakan hukum tanpa membeda-bedakan dari etnis, ras dsb.

Begitu pun dengan pasal 28 UUD 1945 dan pasal 29 UUD NRI 1945 sebagai landasan dalam menghormati hak asasi manusia, artinya pasal ini meminta kepada warga negara dan penyelenggara negara bersikap toleransi kepada semua warga negaranya dalam menjalankan hak dan kewajiban melakukan kegiatan ritual keagamaan. Serta pasal 31 ayat 1 UUD NRI 1945 mengamanahkan peran aktif pemerintah untuk menghormati kearifan lokal setiap etnis di daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaannya. Materi konstitusi tadi merupakan penjabaran operasional dari dasar negara Pancasila ke dalam konstitusi sebagai sumber tertib hukum tertinggi di negara kita.

Berangkat dari kajian dasar negara dan konstitusi UUD NRI 1945 di atas menunjukkan komitmen negara dalam mewujudkan *Nation State* melalui model negara multikulturalisme di dalam mencegah ancaman disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah sampai pada pemerintahan tingkat kecamatan dan desa agar selalu menjaga amanah *The Founding Fathers* dalam mewujudkan *Nation State* dengan model negara multikulturalisme dapat dilaksanakan.

Dalam mengupayakan Kerukunan di Desa Tri Rukun merupakan kewajiban semua pihak yang berada di Desa Tri Rukun. Termasuk di dalamnya adalah peran dari masyarakat Tri Rukun itu sendiri. Akan tetapi, untuk memperkuat Kerukunan di tengah-tengah masyarakat, sangat dibutuhkan campur tangan dari pemerintah Desa untuk memperkokoh Kerukunan tersebut. Hal ini seperti yang di ungkapkan dalam teori Struktural bahwa Kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain Kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan. Teori di atas menyatakan, bahwa dalam membagun Kerukunan di suatu

wilayah sangat dibutuhkan intervensi pemerintah. Dalam hasil penelitian, upaya yang dilakukan pemerintah Desa Tri Rukun dalam membangun Kerukunan antara etnis Bali dan Gorontalo yang berada di Desa Tri Rukun yaitu dengan cara memberikan motivasi, serta arahan maupun pesan-pesan kepada masyarakat Desa Tri Rukun tentang pentingnya sikap saling menghormati dan saling memahani antara masyarakat etnis yang berada di Desa Tri Rukun. Selain dari hal tersebut pemerintah Desa Tri Rukun selalu mengajak masyarakat yang berada di Desa Tri Rukun untuk saling gotong royong dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap etnis yang berada di Desa Tri Rukun.

Selain dari pemerintah Desa. Di sisi lain, para tokoh masyarakat dan tokoh agama ikut terlibat dalam menjaga kerukunan di Desa Tri Rukun, seperti pada agama hindu yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh agama hindu, bahwa pada agama hindu ada aturan khusus mengenai kerukunan yang berada di Desa Tri Rukun. Jika terjadi permasalahan antara masyarakat Hindu dengan Muslim, maka pihak dari agama hindu yang terlibat dalam permasalahan itu akan dikenakan sanksi dari Tokoh Agama Hindu. Selanjutnya, dari pihak muslim jika terjadi permasalahan maka sebelum permasalah menjadi besar dan sampai pada pihak kepolisian maka tokoh masyarakat dari muslim akan segera melakukan atau mencari jalan alternatif untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

Kerukunan masyarakat etnis yang berada di Desa Tri Rukun selama ini telah terbentuk secara alami. Artinya, masyarakat Desa Tri Rukun telah memahami keadaan mereka yang hidup beranekaragam dalam suatu wilayah sehingga dalam hal ini upaya merintah Desa Tri Rukun dalam mengupayakan kerukunan yaitu dengan cara melakukan pembinaan kepada masyarakat secara intensif. Walaupun Kerukunan di Desa Tri Rukun telah terbentuk, pemerintah Desa

Tri Rukun masih memiliki tantang maupun hambatan dalam menjaga Kerukunan tersebut, yaitu salah satu adalah media sosial yang serba elektronik. Karena melalui media tersebut, termasuk *facebook* dll., bisa menyebabkan terjadinya potensi konflik, yaitu dengan postingan yang menyangkut diskriminasi ras, etnisitas maupun agama.

Berdasarkan penelusuran di lokasi penelitian, upaya pemerintah desa Tri Rukun dalam menjaga hubungan harmonis antarsuku adalah dengan jalan penamaan desa Tri Rukun artinya nama ini merupakan bagian dari unsur perekat dalam membangun interaksi sosial yang ada di desa Tri rukun sehingga sampai saat ini desa tersebut masih dalam kondisi kondusif artinya tidak pernah terjadi konflik antarsuku.

Dengan demikian, Desa Tri Rukun semula hanya dusun damai membuat nama desa ini ikut dalam menjaga stabilitas desa dalam membangun negara multikulturalisme sehingga hasil observasi kami di lapangan menunjukkan warga Desa Tri Rukun mayoritas etnis Bali hidup berdampingan dengan etnis lokal Gorontalo dan dengan etnis Minahasa secara damai.

Untuk menelusuri upaya apa yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan negara multikulturalisme dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antarras, agama, etnis, budaya di wilayahnya sebagai berikut.

> "Pemerintah desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme, etnonasionalisme,

sikap primordialisme dan etnosentrisme, tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat ketika ada potensi gesekan antarsuku ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif seperti etno nasionalisme, egosentrisme dan sikap primordialisme dapat kami cegah sehingga bila ada gangguan keamanan dari luar desa kami warga masyarakat dapat mencegahnya" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala Desa Tri Rukun pemerintah desa pun ikut terlibat di dalam memelihara kerukunan beragama dan keharmonisan antaretnis di desa Tri Rukun. Melalui kegiatan FKUB yang rutin diselenggarakan pemerintah desa Tri Rukun di kantor desa dengan warganya khususnya kalangan generasi mudah dapat membantu dalam mempererat hubungan persaudaraan warga masyarakat desa Tri Rukun dan memperkuat pertahanan warganya dari gangguan keamaman dari pihak luar yang akan mengganggu hubungan harmonis di antara etnis di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Bolemo.

Untuk menelusuri apakah ada gerakan gangguan keamanan dari pihak luar di Desa Tri Rukun dan bagaimana upaya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan mengantisipasi gerakan gangguan keamanan dari luar. Peneliti menemui informan penelitian yang berasal dari staf Kecamatan Wonosari.

Di antara informan yang ditemui adalah Ibu Ni Wayan Putri Kepala, seksi Trantib Kecamatan Wonosari, ketika dikonfirmasi kondisi tentang gangguan keamanan yang datang dari fihak luar memberikan jawaban sebagai berikut.

"Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang ditempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antaretnis sebagaimana yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku. Salah satu contohnya adalah desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo, serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri Rukun artinya tiga etnis yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semuanya dalam kondisi stabilitas desanya sangat aman. Yang dimaksudkan warga masyarakat termasuk kalangan generasi mudahnya yang masih darah mudah yang berpotensi melakukan perilaku menyimpang. Mereka ini yang perlu mendapat perhatian bagai-mana menjaga hubungan antaretnis dari gangguan keamanan dari pihak luar" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak pemerintah kecamatan telah berusaha melakukan upaya preventif dalam mencegah ancaman gangguan yang datang dari luar warga kecamatan Wonosari baik secara langsung maupun dengan cara melalui media sosial yang bertujuan dalam memecah belah hubungan antaretnis sebagai warga transmigrasi di kecamatan Wonosari khususnya di desa Tri Rukun.

Dengan demikian, dapat dievaluasi tentang feno-mena interaksi sosial antara etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali di desa Tri Rukun setelah menghadirkan semua indikator interaksi sosial yang menunjukkan bahwa desa Tri Rukun sangat tangguh dalam menjaga stabilitas keamanan desanya dan ini berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kecamatan Wonosari dan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo yang akan di kaji pada bap 8 tentang implikasi dari penerapan model negara multikulturalisme terhadap implikasi ketahanan Wilayah di

daerah Provinsi Gorontalo Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

BAB VIII

IMPLIKASI MEMBANGUN KEHARMONISAN ANTARETNIS LOKAL GORONTALO DENGAN ETNIS BALI DALAM MEWUJUDKAN NEGARA MULTIKULTURALISME TERHADAP KETAHANAN WILAYAH

Cita-cita di dalam mewujudkan *Nation State* dengan model negara multikulturalisme dapat dilihat dari kondisi Ketahanan wilayah yang merupakan bagian dari ketahanan nasional. Artinya, jika lemah ketahanan wilayah setiap daerah maka lemah pula ketahanan nasional suatu negara sehingga itu perlu kita analisis makna dari Ketahanan nasional. Ketahanan nasional maknanya adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan negara Indonesia.

Berdasarkan makna ketahanan nasional di atas memberikan pesan kepada kita sebagai warga negara dan khususnya kepada pemerintah baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan strategi dalam mewujudkan *Nation State* melalui model negara multikul-turalisme sehingga kita tidak akan mengalami kondisi *failed state* (negara gagal) dalam memertahankan cita-cita pendirian bentuk negara kesatuan

sebagai implementasi dari *Nation State* dengan model negara multikulturalisme.

Harapan kita semua bahwa apa yang dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikuralisme dapat diwujudkan oleh pemerintahan saat ini sampai di akhir zaman. Semua ini akan tergantung bagaimana pemerintah pusat dalam mengelola negara. Bila negara tidak memiliki komitmen dalam menegakan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme, maka kita akan menghadapi *failed state* sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab terdahulu tentang konflik antaretnis di Maluku, Poso, dan di Kalimantan Timur yang pernah dialami daerah itu.

Untuk melihat fakta apakah pemerintah kabupaten Boalemo khususnya desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Provinsi Gorontalo dapat kita lihat melalui kondisi ketahanan wilayah dengan variabel dan indikator sebagai parameter dalam mengukur indeks ketahanan wilayah di desa Tri Rukun dalam membangun keharmonisan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali di bawah ini sebagai berikut.

A. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Ideologi

Ketahanan wilayah dalam perspektif ideologi merupakan suatu bentuk usaha menjaga keutuhanan wilayah dari sudut pandang ideologi. Karena di daerah yang pluralis selain berbeda agama dan etnisitas juga berbeda ideologi, baik ideologi politik dan lain sebagainya.

Untuk melihat indeks ideologi di Desa Tri Rukun dapat dilihat dari indikator yang ada pada dimensi ideologi di desa Tri Rukun sebagai berikut.

1. Religius dan Ketakwaan

Berdasarkan penelusuran di lapangan kehidupan religiusitas antara etnis lokal Gorontalo yang mayoritas beragama Islam dan etnis Bali di desa Tri Rukun sangat harmonis hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut. Menurut ibu Ngi ketut ketika di temui di kantor desa Tri Rukun memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti sebagai berikut.

> "Kehidupan antaretnis lokal dan etnis Bali dalam menjalankan pelaksanaan ibadahnya saling menghargai antaretnis lokal Gorontalo yang beragama Islam untuk melaksanakan peribadatannya. Salah satu contoh di Desa Tri Rukun tempat peribadatan untuk etnis lokal, seperti masjid diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan keagamannya demikian juga dengan tempat peribadatan umat Hindu yang mayoritas warga dari etnis Bali dalam melaksanankan peribadatannya tidak pernah diganggu oleh etnis lokal. Kehidupan keagamaan di desa Tri Rukun kehidupan keagamaannya terjaga dan terpelihara hubungan harmonis" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020).

Dengan demikian, kehidupan ideologi warga masyarakat Desa Tri Rukun dari indikator religiutas sangat toleran di antara kedua etnis yang ada, bahkan dengan etnis Minahasa yang mayoritas beragama Kristen pun berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian di atas terjadi hubungan yang baik antaretnis lokal dan etnis Bali.

Berdasarkan data di atas menunjukkan kehidupan reliutas antaretnis lokal dan etnis Bali terjadi hubungan yang harmonis karena kedua etnis tersebut melaksanakan peribadatannya sesuai dengan keyakinannya. Hal ini

terlihat juga di Desa Tri Rukun tempat peribadatan agama masing-masing etnis terpelihara di Desa Tri Rukun.

2. Toleransi

Salah satu indikator yang terpenting dalam mengukur indeks ideologi di desa Tri Rukun dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan informan penelitian di bawah ini sebagai berikut. Menurut Wiji Susanti (Sekdes Tri Rukun) ketika ditanyakan bagaimana kondisi toleransi antaragama etnis lokal dan etnis Bali Desa Tri Rukun jawabannya sebagai berikut.

> "Kehidupan keagamaan di desa Tri Rukun antaretnis lokal dan etnis Bali yang mayoritas beragama Hindu sangat harmonis. Hal dapat dilihat dari kerja samanya antaretnis lokal dan etnis Bali dalam perayaan keagamaan. Misalnya warga etnis lokal terlibat dalam pelaksanaan ritual pelaksanaan *ogoh-ogoh*. Etnis lokal mengarak bersama tanpa paksaan mereka menggotong *ogoh-ogoh* bersama dengan etnis Bali. Bentuk kegiatan keagamaan ini yang saya katakan terjalin di desa Tri Rukun. Demikian juga dengan etnis Bali yang menghargai kegiatan keagamaan dari etnis lokal dan etnis Minahasa yang beragama kristen katolik. Pada dasarnya kehidupan keagamaan dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama di desa Tri Rukun sangat terjalin dan terbina" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari informan penelitian di atas, toleransi antaragama sebagai indikator ideologi di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari sangat terjalin dengan baik, karena hubungan antaretnis lokal dengan etnis Bali di desa Tri Rukun saling menghargai dan bekerja sama dalam kegiatan keagamaan di antara etnis yang ada di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Dengan demikian toleransi antaretnis di desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memertahankan negara multikulturalisme sebagaimana hasil wawancara dengan para informan penelitian yang menunjukkan hubungan toleransi antaretnis di Desa Tri Rukun sangat tinggi. Di mana di Desa Tri Rukun tidak terjadi konflik yang diakibatkan karena perbedaan keyakinan beragama sehingga indikator toleransi di Desa Tri Rukun dapat berjalan normal sesuai keinginan dari nilai toleransi sebagai imple-mentasi negara multikulturalisme.

3. Kesetaraan Akses

Untuk melihat lebih lanjut indeks ideologi di Desa Tri Rukun dapat dilihat melalui indikator ketahanan wilayah di bidang ideologi yakni sejauhmana kesetaraan akses yang diberikan oleh pemerintah desa kepada warga masyarakat yang berbeda etnis di desa Tri Rukun.

Berdasarkan indikator kesetaraan akses tersebut peneliti menemui informan penelitian dari unsur pemerintahan desa sebagai jawaban bagaimana desa Tri Rukun memberikan layanan kesetaraan akses kepada warga masyarakatnya.

Untuk melihat kondisi kesetaraan akses tersebut dapat kita menyimak apa yang menjadi jawaban informan penelitian di bawah ini sebagai berikut. Menurut Ibu Ngiketut Dani, istri dari kepala desa, mengatakan bahwa:

> "Akses yang diberikan kepada tiga etnis yang berbeda agama di desa Tri Rukun adalah tempat peribadatan dari tiga agama di desa Tri rukun diberikan hak yang sama dalam menjalankan keyakinannya. Misalnya untuk agama Islam yang mayoritas dari etnis lokal Gorontalo setiap hari dalam lima waktu melakukan ajan di masjid dengan menggunakan pengeras suara, demikian juga agama hindu tiga waktu ibadah dalam

sehari pun memberikan hak yang sama untuk memanggil umatnya beribadah. Begitu juga etnis Minahasa yang beragama kristen gereja yang ada di desa Tri Rukun diberikan akses yang sama dalam menjalankan ibadahnya artinya pemerintah dan masyarakat mayoritas tidak saling mengganggu dalam kehidupan peribadatan di desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di kantor desa).

Pernyataan Ibunda di atas menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun tidak mengalami hambatan Desa Tri Rukun dalam mewujudkan hubungan harmonis antar etnsi lokal dan etnis Bali sehubungan dengan akses yang diberikan pemerintah Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun, ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Etnis lokal maupun etnis Minahasa tempat peribadatannya berbeda dengan etnis Bali yang beragama hindu mayoritas semua mendapat perlakukan yang sama dalam memanfaatkan tempat ibadahnya masing-masing" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan hasil jawaban informan penelitian di atas menunjukkan bahwa Desa Tri Rukun memperlakukan ketiga etnis dari segi indikator akses peribadatan diperlakukan sama untuk menjalankan keyakinannya dan beribadat sesuai tempat suci masing-masing etnis. Sampai saat ini, tempat peribadatan dari etnis Bali, etnis Gorontalo dan etnis Minahasa tetap terjaga dari gangguan stabilitas. Semua ini terjadi karena kesadaran warga masyarakatnya dalam memberikan toleransi kepada semua agama yang mendiami Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

4. Kesamaan Hak dalam Konteks Kehidupan Sosial

Untuk menelusuri lebih lanjut penilain terhadap indeks ketahanan nasional di bidang ideologi, maka yang menjadi indikator tentang indeks ketahanan nasional di bidang ideologi dapat dilihat melalui kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial. indikator ini akan melihat bagaimana kehidupan warga masyarakat desa Tri Rukun yang terdiri dari tiga etnis yang hidup dalam satu wilayah atau desa dalam mengelola keamaan hak dalam konteks kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian di lapangan menemukan kesamaan hak dalam konteks sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun Demikian halnya pernyataan dari Ibu Sekdes Tri Rukun, Ibu Wiji Susanti, kesamaan dalam bidang ekonomi sebagai berikut.

> "Etnis lokal maupun etnis Minahasa dalam mengembangkan usaha pertanian dan perdagangan mereka saling berinteraksi dalam memajukan usaha pertanian dan perdagangan, artinya ketiga etnis ini mendapat perlakukan yang sama dalam mengembangkan akses ekonomi. Biasanya bantuan di desa Tri Rukun tidak melihat penduduk mayoritas, tetapi melihat siapa yang paling membutuhkan bantuan usaha. Jadi, semua mendapatkan akses yang sama, tetapi dilihat dari siapa yang paling membutuhkan bantuan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Jawaban Ibu Sekdes menunjukkan indeks kesamaan hak dalam konteks sosial sangat baik di desa Tri Rukun, dengan melaksanakan atau memperlakukan warganya dengan prinsip kesamaan hak dalam konteks sosial membuat desa Tri Rukun sampai saat ini suasana

kehidupan inetraksi sosial tetap terjaga dalam menjaga stabilitas desanya. Dan ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan model negara multikulturalisme di desa Tri Rukun sangat tinggi.

Berdasarkan temuan tersebut, memosisikan Desa Tri Rukun memiliki indeks yang sangat tangguh dalam menjalankan ketahanan wilayah pada aspek ideologi. Hal ini ditunjukan oleh temuan-temuan penelitian, baik hasil dari maha-siswa maupun dosen sama-sama memberikan nilai yang sama tentang kondisi dimensi ideologi dalam berinteraksi antara etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali yang mayoritas beragama Hindu. Semoga kondisi ini dapat dipertahankan terus oleh warga masyarakat dan pemerintah desa Tri Rukun sesuai dengan nama desanya tiga etnis yang hidup rukun (Tri Rukun, etnis Bali, etnis Gorontalo dan etnis Minahasa).

B. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Politik

Ketahanan wilayah dalam persepektif politk merupakan suatu bentuk usaha menjaga keutuhan wilayah dari sudut pandang politik. Hal ini dikarenakan di daerah yang masyarakatnya homogen saja bisa terjadi pertikaian, bahkan sampai konflik yang dikarenanakan perbedaaan pandamg politik, apalagi dengan masyarakat yang pluralis yang tediri dari berbagi macam etnis dan agama. Hal ini tentunya bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di masyarakat yang berada di suatu wilayah.

Usaha menjaga keutuhan wilayah dari persepektif politik sangat relevan dengan Desa Tri Rukun karena masyarakat Desa Tri Rukun merupakan masyarakat yang heterogen. Namun, di

Desa Tri Rukun perbedaan pandangan politiki bukanlah menjadi suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut. Perbedaan pandangan politik masyarakat Desa Tri Rukun memungkinkan terjadinya Kerja sama.

Untuk melihat indeks ketahanan wilayah di bidang politik dapat kita lihat melalui indikator yang dijadikan sebagai indeks dalam mengukur ketahanan wilayah pada dimensi ideologi politik sebagai berikut.

1. **Kapasitas Pemerintah**

   Dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi politik secara kualitatif dapat kita lihat sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam membangun negara multikulturalisme. Untuk melihat peran pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam membangun negara multikulturalisme dapat dilihat sejauh mana kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Boalemo memberikan kontribusi kepada etnis Bali di Desa Tri Rukun. Perwakilan pemerintah daerah dapat kita lihat bagai-mana peran pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa Tri Rukun dalam memberikan perhatian kepada kehidupan demokrasi di Desa Tri Rukun. Semua ini dapat kita amati melalui hasil wawancara dari informan penelitian. Ibu Ngiketut Dani, istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

   > "Pemerintah desa Tri Rukun memberikan hak yang sama kepada warganya dalam melaksanakan kehidupan beragama dari ketiga etnis. Dan juga pemerintah desa dalam menentukan kepala desa dilaksanakan secara demokratis di mana pemilihan kepala desa Tri Rukun di buka untuk semua etnis. Hal ini disampaikan bahwa pada saat pemilihan kepala desa diikuti oleh etnis Minahasa dalam pemilihan kepala desa Tri Rukun. Situasi pemilihan kepala desa berlangsung secara demokratis tanpa tekanan dari

pemerintah desa kepada warganya dalam menggunakan hak pilihnya" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di desa Tri Rukun dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan peribadatan sampai pada kegiatan pemilihan kepala desa kapasitas pemerintah bersikap netral artinya mengayomi semua warga masyarakat di desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun Demikian halnya pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Pemerintah desa selalu berada dipihak netral bila ada bantuan yang diberikan kepada warga masyarakat di desa Tri Rukun. Pemerintah desa Tri Rukun selalu membagi bantuan dari pemerintah Kabupaten Boalemo selalu berdasarkan kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah bukan berdasarkan pada etnisitas mayoritas. Artinya pemerintah daerah selalu hadir di desa Tri Rukun dalam memberikan distribusi bantuan kepada semua desa. Misalnya pada saat perayaan ogoh-ogoh pemerintah desa mengajukan proposal kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Boalemo selalu direspons positif oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan kegiatan ritual keagamaan etnis Bali di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan ada intervensi pemerintah Kabupaten Boalemo dan pemerintah Kecamatan dalam membangun negara multikulturalisme di Desa Tri Rukun sehingga bila yang dipakai untuk mengukur indeks kapasitas pemerintah merupakan salah satu mengukur

ketahanan wilayah pada dimensi politik, maka jawabannya pemerintah Kabupaten Boalemo melalui koordinasi pemerinyak kecamatan sampai kepada pemerintah Desa Tri Rukun dapat melakukan kegiatan dalam membangun negara multikulturalisme. Fakta ini terlihat intervensi pemerintah daerah terhadap pembangunan negara multikulturalisme di desa Tri Rukun.

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Peran Pemerintah desa Tri Rukun dengan membantu kegiatan Karang taruna yang diperoleh dari dana desa (ADD) untuk menggerakan kegiatan Karang Taruna sehingga dengan bantuan kepada karang Taruna memberikan manfaat dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan kesenian dalam rangka menyatukan persaudaraan melalui kegiatan olahraga 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan dan pagelaran kesenian budaya dari ketiga etnis. Kegiatan ini mendapat sambutan yang meriah dari warga masyarakatnya. Secara tidak langsung dengan adanya kegiatan yang diintervensi pemerintah desa menjadi perekat bagi warga masyarakat desa Tri Rukun untuk hidup berdampingan sampai dengan saat ini" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Dengan demikian, indeks kapasitas pemerintah pada dimensi politik di desa Tri Rukun menunjukkan ada keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun di dalam membangun negara multikulturalisme.

Untuk menindaklanjuti lebih dalam dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi politik dapat kita lihat melalui indikator di bawah ini sebagai lanjutan indikator ketahanan wilayah pada dimensi politik sebagai berikut.

2. Keterwakilan

Keterwakilan merupakan salah satu indikator dalam menilai ketahanan wilayah pada dimensi politik. Di mana keterwakilan merupakan bagian dari suatu kekuatan aspirasi dari etnis tertentu yang hidup di tengah-tengah mayoritas sehingga indikator keterwakilan dapat dijadikan jembatan dalam menyuarakan aspirasi etnis minoritas kepada kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Bila satu etnis punya keterwakilan di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif akan memberikan pengaruh positif bagi etnis minoritas dalam menjembatani aspirasi dari etnis minoritas sehingga itu indeks keterwakilan menjadi salah satu indikator dalam menilai dimensi ketahanan wilayah pada suatu daerah.

Untuk menelusuri konsepsi indeks ketahanan wilayah pada dimensi politik diatas dapat kita lihat pada hasil penelusuran terhadap informan penelitian di bawah ini sebagai berikut.

Menurut Wiji Susanti (Sekdes Tri Rukun) ketika ditanyakan bagaimana kondisi ketika dilaksanakan pemilihan kepala Desa Tri Rukun dan calon anggota legislatif dari etnis Bali jawabannya sebagai berikut.

> "Pemilihan kepala Desa Tri Rukun tidak hanya diikuti oleh mereka dari etnis Bali, tetapi konstentan pilkades ada yang berasal dari etnis Minahasa. Tetapi yang terpilih dari etnis Bali. Etnis Minahasa memperoleh suara kurang lebih 11%. Perolehan suara etnis lokal tersebut diperoleh suaranya melalui *e-voting* ada dari etnis Bali Sedangkan untuk calon legislatif daerah dari etnis Bali desa Tri Rukun pernah mengajukan calon namun belum terpilih sebagai anggota Dewan (anggota DPRD)" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di kantor Desa Tri Rukun).

Senada dengan pernyataan di atas menurut I Dewa Gede Semaraputra anggota BPD desa Tri Rukun bahwa:

> "Masyarakat etnis Bali dan Gorontalo yang ada di Tri Rukun bisa bekerja sama walaupun berbeda ideologi. Karena di Desa Tri Rukun sudah berapa kali pilkada, pikades, pileg dan berapa kali pemilihan presiden tidak pernah merasa perbedaan ideologi menjadi penghambat terjadinya demokrasi, dan terlebih terjadi konflik. cukup dipemilihan saja masyarakat panas, setelah itu sudah tidak ada lagi. Karena masyarakat berpikir, 'siapa pun yang duduk kita akan tetap menjadi masyarakat, walaupun teman kita yang duduk jadi kepala Desa atau anggota DPRD kalau kita tidak bekerja kita tidak dapat uang.' Seperti itulah pemaham masyarakat Desa Tri Rukun. Jadi, walaupun berbeda partai politik dan berbeda pilihan itu tidak menjadi masalah" (wawancara 2 Januari 2019).

Data di atas menunjukkan bahwa indeks keterwakilan dalam dimensi politik antara etnis di desa Tri Rukun sudah dilaksanakan dengan melihat pemilihan kepala desa yang di mana calonnya tidak hanya penduduk etnis Bali, tetapi diikuti oleh etnis Minahasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan ada intervensi pemerintah Kabupaten Boalemo dan pemerintah Kecamatan dalam membangun negara multikulturalisme di desa Tri Rukun sehingga bila yang dipakai untuk mengukur indeks kapasitas pemerintah merupakan salah satu mengukur ketahanan wilayah pada dimensi politik, maka jawabannya pemerintah Kabupaten Boalemo melalui koordinasi pemerintah kecamatan sampai kepada pemerintah Desa Tri Rukun dapat melakukan kegiatan dalam membangun negara multikulturalisme. Fakta ini terlihat intervensi pemerintah daerah terhadap

pembangunan negara multikulturalisme di Desa Tri Rukun.

Demikianlah kehidupan politik di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo. Dari hasil survei ini menunjukkan desa Tri Rukun dapat dikatakan sebagai suatu desa yang telah melaksanakan prinsip-prinsip negara multikulturalisme di bidang politik.

3. Kepastian Hukum

Dalam mengukur indeks dimensi politik di desa Tri Rukun tidak cukup bila hanya indikator berkutak sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas. Untuk melengkapi hasil penelitian dalam mengukur indeks ketahanan wilayah dimensi politik, maka pertanyaan penelitian diarahkan kepada kepastian hukum bila terjadi konflik antarsuku di desa Tri Rukun. Ini merupakan indeks yang dapat mengukur tentang ketahanan wilayah pada dimensi politik. Mengapa bila terjadi konflik antaretnis lalu pemerin-tah desa tidak menyelesaikannya dengan prinsip kepastian hukum di desa Tri Rukun akan berdampak pada stabilitas di desa Tri Rukun.

Untuk melihat bagaimana indeks ketahanan wilyah pada dimensi politik maka peneliti menemui informan penelitian mempertanyakan bagaimana cara pemerintah desa bila terjadi konflik antaretnis di desa Tri Rukun sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Biasanya gesekan antaretnis di desa Tri Rukun bila yang beragama Hindu dari etnis Bali yang bermasalah diselesaikan lewat organisasi keagamaan 'Pari Sade' dan untuk mereka etnis lokal dan etnis Minahasa bila terjadi gesekan akan diselesaikan di Kantor Desa oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dengan difasilitasi kepala desa dalam menyelesaiakan

masalah di desa. Proses penyelesaian masalah selalu berakhir dengan perdamaian" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di desa Tri Rukun dalam mewujudkan dalam melaksanakan kepastian hukum menyelesaikan masalah warganya selalu diselesaikan secara musyawarah untuk mendamaikan ketika warganya mengalami masalah. Apalagi permasalahannya antaretnis yang ada di desa Tri Rukun.

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas menunjukkan proses penyelesaian masalah di desa Tri Rukun selalu dapat diterima oleh masyarakatnya melalui keputusan musyawarah. Hal ini membuktikan bahwa peneyelesaian masalah di desa Tri Rukun selalu mengedepankan tradisi demokrasi tertua di Indonesia dengan cara-cara sebagaimana yang ada pada Pancasila sila ke empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.

Tradisi inilah yang selalu dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Bila permasalah tidak dapat diselesaikan dengan masyarakat maka jalur yang akan ditempuh lewat jalur hukum yang ada, misalnya Polsek Wonosari. Tetapi jalur ini jarang dipakai oleh pemerintah desa Tri Rukun karena permasalahan dapat diselesaikan di tingkat desa melalui jalur musyawarah desa.

Berangkat dari hasil temuan di lapangan menunjukkan Desa Tri Rukun bila dilihat dari indeks kualitatif kepastian hukum dalam menyelesaiakan konflik di desa masih sangat tangguh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Memang proses penyelesain musyawarah jauh lebih efektif daripada penyelesaian melalui jalur hukum. Mengapa demikian karena bila jalur hukum digunakan

selalu ada ketidak puasan dari salah satu pihak, dan ini akan memicu konflik berkepanjangan. Berbeda dengan jalur musyawarah yang selalu ditempuh oleh pemerintah desa di Tri Rukun yang selalu berakhir dengan perdamaian antar mereka yang berperkara.

Bila dilihat dari hasil pengamatan di lapangan memang masyarakat Desa Tri Rukun sepertinya tidak ada permasalahan mengenai konflik berkepanjangan, karena kehidupan mereka yang saling menghargai antaretnis yang ada di Desa Tri Rukun. Dengan demikian apa yang menjadi harapan dari indikator kepastian hukum di Desa Tri Rukun masih sangat tangguh di Desa Tri Rukun. Artinya, sampai dengan saat ini di desa Tri Rukun tidak pernah terjadi konflik horizontal maupun konflik vertikal antaretnis. Semua ini karena indikator kepastian hukum dalam menyelesaikan gesekan antaretnis dapat dilaksanakan di Desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

4. Ormas Pemuda

Salah satu hal yang dilihat dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi politik adalah melihat bagaimana Ormas Pemuda di Desa Tri Rukun. Untuk melihat aktivitas ormas pemuda tersebut mari kita lihat hasil penelusuran di lapangan tentang kondisi Ormas Pemuda yang ada di Desa Tri Rukun di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Biasanya gesekan antaretnis di desa Tri Rukun bila yang beragama Hindu dari etnis Bali yang bermasalah diselesaikan lewat organisasi keagamaan 'Pari Sade' dan untuk mereka etnis lokal dan etnis Minahasa bila terjadi gesekan akan diselesaikan di Kantor Desa oleh

> tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dengan di fasiltasi kepala desa dalam menyelesaiakan masaalah di desa. Proses penyelesaian masalah selalu berakhir dengan perdamaian" (wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun dalam mewujudkan dalam melaksanakan kepastian hukum menyelesaikan masalah warganya selalu diselesaikan secara musyawarah untuk mendamaikan ketika warganya mengalami masalah. Apalagi permasalahannya antaretnis yang ada di Desa Tri Rukun.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Pemerintah desa selalu mengaktifkan ormas kepemudaan lewat organisasi karang taruna dalam rangka mewujudkan keakraban antargenerasi mudah di desa Tri Rukun. Kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna seperti kegiatan kesenian dan kegiatan olahraga, biasanya keaktifan organisasi ini pada saat pelaksanaan hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan. Dengan adanya karang Taruna generasi mudah dapat mengembangkan bakat dan kreatifitas seninya. Dengan kegiatan yang dilakukan oleh karang Taruna yang ditopang dana melalui dana desa Tri Rukun, kegiatan Karang taruna dapat berperan aktif dalam meningkatkan persaudaraan generasi mudah antaretnis di desa Tri Rukun melalui kegiatan pertandingan Sepak Bola antardusun, Volly Ball, Takraw dan malam pagelaran seni budaya dari ketiga etnis (wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Peran Pemerintah desa Tri Rukun dalam mengaktifkan karang taruna di desa Tri Rukun dapat membuat generasi antaretnis Bali, Gorontalo dan Minahasa dapat dipersatukan lewat kegiatan olahraga dan malam pagelaran kesenian antaretnis. Melalui kegiatan ini generasi mudah desa Tri Rukun dapat bersatu dan merasa sebagai keluarga besar sehingga kegiatan karang taruna selalu mendapat perhatian pemerintah desa dalam membantu kegiatan mereka dengan bantuan dari dana desa (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berangkat dari hasil penelusuran peneliti mengenai indikator Ormas Pemuda menunjukkan di Desa Tri Rukun kegiatan kepumudaan dapat berjalan dengan baik karena pemerintah desa selalu mendukung dengan dana desa dalam mengaktifkan kegiatan organisasi masyarakat bergerak dalam kegiatan kepemudaan. Karang taruna sebagai wadah berkumpulnya generasi mudah di Desa Tri Rukun memiliki peran utama dalam mempererat hubungan persaudaraan generasi pemuda antaretnis di Desa Tri Rukun.

Selain organisasi karang taruna, organisasi keagamaan pun berperan aktif dalam membangun negara multikulturalisme di desa Tri Rukun. Seperti organisasi Pari Sade untuk generasi mudah hindu dan NU dan Muhamadiyah organisasi keagamaan generasi Mudah Islam di desa Tri Rukun dan ada juga organisasi keagamaan Kristen untuk generasi mudah kristen di desa Tri Rukun. Semua oraganisasi ini berkoordinasi dalam mewujudkan negara multikuturalisme di desa Tri rukun dalam wujud kegiatan keagamaan.

Dengan demikian, indeks dalam mengukur ketahanan wilayah pada dimensi politik melalui indikator organisasi kepumudaan di desa Tri rukun berjalan dengan baik

dengan indeks kualitas ketahanan nasional sangat tangguh. Semua ini terjadi karena pemerintah desa menjadi motor penggerak dalam mengaktifkan organisasi kepemudaan di Desa Tri Rukun. Dalam struktur kelembagaan organisasi kepemudaan pihak pemerintah desa merupakan salah satu dari unsur pembinaan organisasi kepemudaan di Desa Tri Rukun sehingga itu organisasi kepumudaan di desa Tri Rukun selalu ada sentuhan dari pihak pemerintah desa, berupa anggaran yang diperoleh dari dana Desa Tri Rukun.

5. Kapasitas Kepartaian

Salah satu penilaian indeks ketahanan wilayah pada dimensi politik adalah bagaimana eksistensi kappa-sitas kepartaian yang ada di desa Tri Rukun. Ternyata setelah dilakukan penelusuran kepada informan penelitian di lokasi penelitian ternyata etnis Bali yang ada di desa Tri Rukun belum ada calon anggota legislatif dari Desa Tri Rukun. Hal ini terjadi warga masyarakat Desa Tri Rukun ketika mencalonkan anggota legislatif belum berhasil menduduki DPRD Kabupaten Boalemo.

Hasil observasi di atas di dukung oleh hasil jawaban informan penelitian di bawah ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Pada pemilihan calon legislatif Daerah (DPRD Kabupaten Boalemo) warga masyarakatnya belum ada yang terpilih sebagai anggota Dewan legislatif daerah padahal desa Tri Rukun ada warganya menjadi Caleg legislatif tetapi belum terpilih, tetapi kami tetap berharap ada warganya yang duduk di lembaga legislatif Daerah kabupaten Boalemo agar supaya desa mereka akan banyak perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di desa Tri Rukun belum ada yang mewakili mereka di lembaga legislatif, namun mereka tidak kecewa karena sekalipun mereka tidak punya perwakilan di DPRD Kabupaten Boalemo mereka sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo melalui kegiatan pembangunan di desa Tri Rukun. Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakatnya ada yang menjadi calon legislatif pada tahun kemarin 2019/2024, tetapi calon dari desa Tri Rukun belum terpilih" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Ternyata calon DPRD Kabupaten Boalemo dari desa Tri Rukun belum terpilih sebagai anggota legislatif, padahal warga masyarakat desa Tri Rukun sangat berharap ada warganya yang dapat menyambung aspirasi bagi masyarakat ayang ada di desa Tri Rukun. Harapan kami agar supaya masyarakat di dapil kecamatan Wonosari memberikan kepercayaan kepada calon anggota legislattif berasal dari desa Tri Rukun. Namun, konstestasi pileg tidak menjadi masalah bagi warga masyarakat kami" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berdasarkan indikator kapasitas kepartaian desa Tri Rukun identik dengan Partai PDIP, tetapi calon dari desa Tri Rukun belum ada yang diberikan kepercayaan masyarakat Kabupaten Boalemo khu-susnya dapil Kec. Wonosari. Hal ini membuktikan bahwa indeks kapasitas kepartaian untuk desa Tri rukun masih belum dikatakan tangguh. Namun, dengan indikator kapasitas kepartaian di

desa Tri rukun tidak mengalami masaalah dalam hubungan-nya dengan pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Mengapa demikian kalau diidentifikasi dari jumlah warganya 87% etnis Bali sebagai warga masyarakat Desa Tri Rukun. Ini menunjukkan Desa Tri Rukun identik dengan kapasitas partai penguasa di daerah Kabupaten Boalemo sehingga itu pembangunan di Desa Tri Rukun selalu mendapat perhatian dari kepala daerah Kabupaten Boalemo dari kader Partai PDIP.

Dengan melihat garis partai penguasa dengan perilaku pemilih warga masyarakat desa Tri Rukun 87 % dan afiliasinya kepada partai PDIP membuat desa Tri Rukun sangat stabil dalam interaksi dengan penguasa daerah di Kabupaten Boalemo. Semua ini karena kekuasaan selalu melalui jalur partai politik dan calon indivenden. Akan tetapi, untuk Kabupaten Boalemo menurut pengamatan di lapangan desa Tri Rukun akan dapat dijadikan sebagai basis masa dari partai PDIP. Namun, kapasitas partai politik tidak menjadikan warga masyarakat desa Tri Rukun terkotak-kotak dengan simbol partai. Kondisi desa Tri Rukun sangat baik dalam kehidupan politik karena warga masyarakatnya diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya tanpa tekanan dan intimidasi dari pemerintah desa.

6. Media Massa

Dalam menilai indeks ketahanan wilayah pada dimensi politik melaui indikator kondisi media masa di desa Tri Rukun dapat dijadikan sebagai bahan penilaian menentukan ketahanan wilayah pada dimensi politik. Artinya, bila media masa diberikan kebebasan di desa Tri Rukun untuk dinikmati oleh masyarakatnya berarti kondisi ketahanan nasional di desa tersebut berjalan

dengan normal. Bila akses media massa dipreteli oleh pemerintah Desa Tri Rukun kepada warganya atau warga masyarakatnya tidak punya akses meliputi berita malalui RRI, Koran, TV swasta, Pers dilarang berada di Desa Tri Rukun, maka desa tersebut dianggap indeks ketahanan wilayahnya sangat rawan dalam membangun ketahanan wilayah pada aspek atau dimensi politik. Untuk itu, harapannya pada indikator media massa dalam indeks ketahanan wilayah supaya Desa Tri Rukun warganya tidak ditekan dalam memperoleh informasi.

Berdasarkan penelusuran di lapangan peneliti menemui informan penelitian sebagai berikut. Ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun warga masyarakatnya dengan mudah mendapatkan akses informasi, bahkan internet pun sudah masuk di desanya. Jadi warga masyarakatnya dapat mengetahui informasi dari RRI, TV Swasta, TVRI, bahkan koran, seperti Harian Gorontalo, Kompas, dan lain-lain" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di desa Tri Rukun sangat terbuka akses informasi yang dapat dinikmati oleh warganya sehingga warganya dapat mengetahui apa yang terjadi secara nasional maupun berita internasional. Jawaban ini menunjukkan desa Tri Rukun bukan desa yang terisolir dan juga bukan desa terpencil yang ada di daerah Kabupaten Boalemo.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga Masyarakatnya sangat mudah memperoleh informasi dari media massa seperti RRI, TVRI dan TV swasta bahkan internet sudah terpasang di kantor desa bahkan di rumah-rumah masyarakat yang

> tergolong punya kemampuan, begitu pun dengan koran-koran seperti Harian Gorontalo dll. Saya mengatakan desa Tri Rukun sangat mudah memperoleh akses informasi sehingga desa kami bukan desa terpencil, tetapi desa berkembang" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Desa kami sangat mudah mendapatkan informasi dari mana saja RRI, TVRI, RCTI TV Swasta lainnya, Koran Harian Gorntalo, dan lain-lain" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berdasarkan hasil wawancara di atas desa Tri Rukun sangat mudah mengakses media massa. Ini menunjukkan Desa Tri Rukun bukan desa yang terisolir, tetapi desa yang sudah semakin berkembang dan dapat dikatakan sebagai desa mandiri sehingga dengan kondisi desa tersebut dapat dikatakan Desa Tri Rukun bila dinilai dari kondisi ketahanan wilayah memiliki indeks sangat tangguh dalam membangun kesadaran politik masyarakatnya karena dengan informasi yang diperoleh masyarakatnya melalui media massa akan menjadikan pengetahuan politik masyarakat Desa Tri Rukun akan lebih baik.

C. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Ekonomi

Ketahanan wilayah dalam perspektif ekonomi merupakan suatu usaha menjaga keutuhan wilayah dari dimensi sudut pandang ekonomi karena dalam realita masyarakat, salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor ekonomi. Maka, untuk itu memperkuat kegiatan perekonomian

masyarakat merupakan salah satu cara menjaga ketahanan wilayah suatu daerah dapat kita lihat melalui indeks ketahanan wilayah gatra ekonomidi Desa Tri Rukun sebagai berikut.

1. **Pangan**

   Dilihat dari kondisi ekonomi di desa Tri Rukun sangat mendukung dalam meningkatkan pangan. Kondisi ini dapat dilihat melalui observasi di lokasi penelitian di mana Desa Tri Rukun lebih banyak areal pertanian yang dimanfaatkan masyarakatnya dalam menopang kehidupan perekonomian rumah tangga warga masyarakatnya.

   Untuk menelusuri kondisi perekonomian warga masyarakat desa Tri Rukun dapat kita simak melalui hasil penelusuran di lokasi penelitian yang dikemu-kakan oleh informan penelitian sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

   > "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya mayoritas bergerak di sektor pertanian. Perdagangan hanya sebagai pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya demikan juga dengan keterampilan pertukangan yang lebih banyak dimiliki etnis Bali dalam pembuatan ukiran yang dipakai untuk tempat ibadah Pura melalui keterampilan seni pertukangan, etnis Bali memiliki seni yang sangat tinggi dalam pembuatan seni ukir bangunan, demikian juga dengan etnis lokal Gorontalo yang melakukan usaha pertanian dan kegiatan membuka usaha seperti kios-kios. Tetapi usaha jasa perdagangan etnis Bali ada yang sudah setara dengan usaha besar seperti tokoh yang menjual semua kebutuhan masyarakat, seperti sembako dan kebutuhan bangunan" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun sudah sangat berkembang sektor perekonomiannya dan pendapatan masyarakatnya dalam memertahankan kelangsungan hidupnya sudah semakin maju. Kehidupan perekonomian di desa Tri Rukun sangat dipengaruhi oleh etos kerjanya etnis Bali dalam kegiatan pertanian dan usaha perdagangan sehingga desa ini sudah menjadi desa yang berkembang dan menuju desa mandiri.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat desa Tri Rukun mayoritas bergerak di sektor pertanian karena lahan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada warga etnis Bali sangat memungkinkan mereka mengembangkan sektor pertanian. Dengan lahan yang besar etnis Bali mengembangkan usaha peternakannya seperti memelihara Sapi, Ayam dan Kambing. Menurut mereka untuk membuka sektor pertanian dan peternakan sangat mudah dikembangkan di desa Tri Rukun. Demikian halnya dengan etnis lokal Gorontalo sama-sama bekerja dalam usaha pertanian dengan saling bertukar pengalaman dalam mengembangkan sektor pertanian di desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Desa kami dalam menopang perekonomiannya warga masyarakatnya lebih banyak bekerja di sektor pertanian. Apalagi lahan yang diberikan kepada kami etnis Bali sebagai masyarakat Transmigrasi. Lahan inilah yang digarap oleh etnis Bali. Tetapi etnis Balipun mengembangkan sektor usaha pertukangan ukir dan usaha jasa perdagangan dalam menopang kehidupan masyarakatnya. Etnis Gorontalo selalu mendukung kegiatan etnis Bali dalam usaha pertanian

dan perdagangan, mereka saling bekerja sama dalam mengembangkan usaha yang dilakukan oleh etnis Bali dan saat ini etnis Gorontalo pun banyak mempelajari pengalaman etnis Bali begitupun sebaliknya" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berdasarkan penelusuran di lokasi penelitian tentang kondisi perekonomian masyarakat desa Tri Rukun yang telah dikonfirmasi kepada informan penelitian menunjukkan desa Tri Rukun sangat tangguh dalam menjaga kondisi Pangan di desa Tri Rukun.

Untuk menelusuri lebih lanjut tentang kondisi ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi di desa Tri Rukun kita pelajari melalui indikator di bawah ini sebagai berikut.

2. Sandang

Dalam menganalisis tentang ketahanan wilayah pada dimensi ketahanan wilayah pada sektor ekonomi sebagai penentunya adalah sandang masyarakatnya, kemampuan masyarakat dalam melengkapi kehidupannya, seperti pakaian, kebutuhan dasar masyarakatnya (sembako) dan lain sebagainya.

Kemampuan masyarakat dalam melengkapi kebutuhan akan sandang akan menjadi penentu dalam menilai indeks ketahanan wilayah di sektor ekonomi masyarakat desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan penelusuran peneliti di lokasi melalui informan penelitian tentang kondisi sandang bagi masyarakat desa Tri Rukun sebagai berikut. Menurut Ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya dalam memenuhi sandang dapat terpenuhi, mengapa karena warga masyarakatnya dapat menambah penghasilan melalui sektor pertanian dan kerajinan tangan lewat keterampilan pertukangan dan sektor jasa perdagangan yang dilakukan etnis Bali sehingga kebutuhan akan sandang terpenuhi bagi etnis Bali. Demikian juga etnis Lokal Gorontalo dengan etnis Minahasa semua terpenuhi karena semangat kerja keras mereka dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan di desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di desa Tri Rukun kebutuhan akan sandang dapat dipenuhi oleh masyarakatnya. Warga masyarakat desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memenuhi kebutuhan akan sandang sebagai kebutuhan dasar manusia.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat desa Tri Rukun untuk kebutuhan akan sandang sangat mencukupi dalam menunjang kehidupan rumah tangganya. Mengapa demikian karena warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat giat dalam mengembangkan sektor pertanian dan sektor perdagangan sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan sandangnya. Apalagi pemerintah desa menstimulus dengan usaha UKM melalui PKH dan sebagainya dalam rangka mengembangkan usaha pertanian dan perdagangan bagi masyarakat yang ada di Desa Tri Rukun. Pemerintah desa mendistribusikan dana yang ada dalam ADD desa untuk pengembangan usaha pertanian dan perekonomian kepada semua etnis yang ada di Desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memenuhi kebutuhan akan sandang sebagai bahan

evaluasi pada indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi.

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Untuk memenuhi kebutuhan akan sandang bagi warga masyarakat desa Tri Rukun untuk setiap KK sangat baik, karena warga masyarakatnya untuk sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Boalemo, kebutuha akan sekolah seperti pakaian seragam sekolah, sepatu, buku disediakan pemerintah Kabupaten Boalemo. Di tambah dengan usaha warga masyarakat desa Tri Rukun yang mayoritas bergerak di sektor pertanian dan peternakan, sebagai usaha sampingan adalah berdagang" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Pernyataan informan ini mempertegas bahwa warga masyarakat desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memenuhi kebutuhan akan sandang.

Untuk menelusuri lebih lanjut tentang ketahanan wilayah di sektor ekonomi di desa Tri Rukun dapat kita lihat melalui indikator ketahanan wilayah di bawah ini sebagai berikut.

3. Perumahan

Sektor perumahan pun akan menjadi ukuran stabiitas perekonomian di suatu wilayah dikatakan tangguh. Untuk itu dalam mengukur ketahanan wilayah pada sektor dimensi perekonomian di Desa Tri Rukun salah satu indeks mengukurnya adalah hunian bagi warga masyarakat yang ada di Desa Tri Rukun. Selayaknya warga masyarakat Desa Tri Rukun harus mendapat hunian yang memenuhi syarat

untuk menjadi tempat berteduhnya warga masyarakat di Desa Tri Rukun.

Hunian yang memenuhi syarat untuk menjadi hunian warga adalah rumah-rumah permanen di mana rumah tersebut sudah berlantaikan mesel menggunakan semen kalau dapat sudah beralaskan tehel, beratapkan seng atau genting, memiliki MCK, memilki penerangan listrik dan sanitasi yang baik. Inilah ukuran hunian yang direkemondasikan kepada warga masyarakat yang telah dikatakan layak menempati hunian rumah.

Untuk menelusuri hunian yang memenuhi syarat di desa Tri Rukun melakukan observasi dan mewawancarai informan di lokasi penelitian baik masyarakatnya maupun warga masyarakat yang menempati hunian di Desa Tri Rukun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian di lapangan mempertanyakan tentang kelayakan hunian yang di tempati oleh warga masyarakat di desa Tri Rukun sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya dalam memenuhi hunian yang layak di tempati sesuai dengan persyaratan kelayakan hunian sudah semakin baik. Mengapa demikian di desa Tri Rukun untuk hunian yang layak diperhatikan oleh pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Boalemo. Bagi mereka yang tidak mampu mendirikan hunian perumahan yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Tetapi menurut saya warga masyarakat Desa Tri Rukun mengenai rumah hunian yang memenuhi syarat hampir sebagian besar telah memenuhi syarat hunian. Mengapa demikian warga Desa Tri Rukun dapat membangun dan melengkapi rumahnya dengan fasilitas pendukung sebagai

kebutuhan dasar hunian, misalnya MCK dan pengatapan rumah dan lantai rumahnya sudah sebagian besar beralaskan mesel yang memiliki tehel atau sudah semen permanen" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun kebutuhan akan perumahan dapat dipenuhi oleh masyarakatnya. Warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan layak huni bahkan lebih dari standar layak huni sebagai kebutuhan dasar manusia.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat Desa Tri Rukun untuk kebutuhan akan perumahan sudah layak huni. Kalaupun ada masyarakatnya yang rumah huniannya tidak layak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo maupun pemerintah Provinsi. Dengan demikian untuk memenuhi syarat hunian yang normal pada warga masyarakat Desa Tri Rukun selalu menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo untuk membantu kepada semua etnis yang mendiami Desa Tri Rukun sifatnya penyaluran bantuan tidak bersifat pilih kasih" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan sebagai bahan evaluasi pada indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi.

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana Staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Memang masalah hunian layak huni menjadi salah satu program desa Tri Rukun kepada warga masyarakatnya dengan tidak melihat dari mana etnisnya, pemerintah desa Tri Rukun selalu memberikan perhatian kepada kebutuhan dasar bagi hunian warga masyarakatnya, misalnya kebutuhan akan MCK, fasilitas listrik dan PAM bagi warga masyarakat Desa Tri Rukun untuk setiap KK sangat baik. Program bantuan ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Misalnya, bantuan pemasangan listrik dengan daya listrik 450 s/d 900 wat demikian juga dengan PAM, tetapi bantuan ini disalurkan secara merata bagi warga masyarakat desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian di atas menujukan Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam mengelolah perumahan tempat hunian bagi seluruh warga masyarakat di Desa Tri Rukun.

Untuk melihat kondisi lain dari sisi dimensi ketahanan wilayah di bidang ekonomi dalam menunjang kehidupan rumah tangga memperbaiki kualitas hunian di tempat tinggal mereka, biasanya perumahan yang dimiliki oleh warga transmigrasi diawal mereka tinggal hanya rumah papan berukuran 36 M^2 tetapi saat ini rumah yang mereka tempati sudah bangunan fisik (rumah batu) sehingga perlu bagi kita melihat potensi ekonomi yang mereka lakukan, tetapi tidak menimbulkan gesekan ekonomi antara warga transmigrasi etnis Bali dengan etnis lokal di dalam mengembangkan usahanya di Desa Tri Rukun.

Berdasarkan penesuran mahasiswa di lapangan tentang interaksi di bidang ekonomi antarwarga masyarakat etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo sangat kondusif dalam membangun sektor perekonomian di desa

Tri Rukun. Ini sangat relevan apa yang menjadi hasil temuan peneliti sebagai ketua tim dalam penelitian, di mana warga masyarakat Desa Tri Rukun dapat memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak huni diperoleh melalui usaha kerja keras warga masyarakatnya melalui usaha pertanian dan usaha perdagangan. Di samping itu, rumah layak huni yang dimiliki warga masyarakat Desa Tri Rukun mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dengan tidak membedakan etnis dalam menyalurkan bantuan kepada warga masyarakat desa Tri Rukun.

4. Pertambahan Kekayaan

Salah satu indikator dalam mengukur ketahanan wilayah sebagai bagian dari ketahanan nasional dapat dilihat melalui indikator pertambahan kekayaan yang dimiliki oleh warga masyarakat desa Tri Rukun. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi objek dalam menilai pertambahan kekayaan adalah bagaimana kondisi pertambahan kekayaan yang dimiliki oleh etnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo. Dalam arti indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi adalah mengukur sejauh mana perubahan sosial yang terjadi pada kedua etnis di Desa Tri Rukun melalui indikator pertambahan kekayaan. Tetapi dalam perspektif ketahanan nasional dan wujudnya melalui ketahanan wilayah hasil pertambahan kekayaan di antara kedua etnis tersebut tidak berdampak kepada stabilitas keamanan wilayah terganggu.

Dalam situasi normal dimensi ketahanan ekonomi sebagai indikator pertambahan kekayaan di suatu wilayah atau desa Tri Rukun akan berguna dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat di desa Tri Rukun.

Artinya, pertambahan kekayaan yang diperoleh oleh warga etnis tertentu dalam suatu wilayah akan berdampak kepada pembangunan wilayah itu, mengapa karena kesejahteraan masyarakat di suatu daerah akan memberikan kontribusi melalui pajak yang mereka setorkan kepada pemerintah daerah, akan digunakan untuk pembangunan yang ada di wilayah itu, dan pertambahan kekayaan dari seseorang akan berdampak kepada kualitas kehidupan dari masyarakatnya. Misalnya terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan warga masyarakatnya yang diperoleh lewat kerja keras berpengaruh pada pendapatan keluarganya, semua ini akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Di mana semakin sejahtera warga masyarakat di suatu wilayah akan memengaruhi angka harapan hidup masyarakatnya, artinya usia hidup warga masyarakatnya bisa saja di atas angka 70 tahun. Inilah fungsinya dalam penelitian ini mengungkap pertambahan kekayaan. Akan tetapi, yang terpenting dalam kajian ketahanan nasional adalah pertambahan kekayaan dari etnis tertentu, tidak menimbulkan adanya kecemburuan sosial yang berujung pada konflik antaretnis di wilayah itu. Artinya pada dasarnya bila etnis tertentu dapat bertambah kekayaannya di suatu wilayah, secara tidak langsung akan dapat bermanfaat bagi daerah itu dalam meningkatkan pembangunan daerah sehingga yang diperlukan adalah kesadaran nasional masyarakat akan pentingnya pertambahan kekayaan dari suatu etnis di wilayah tempat etnis itu bermukim. Seperti inilah sikap yang harus dimiliki oleh warga masyarakat yang ada di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, bila ada warga masyarakatnya yang memiliki pertambahan kekayaan dari hasil usaha kerja keras yang dilakukan oleh etnis tersebut,

harus didukung oleh warga semua etnis yang ada di desa Tri Rukun.

Untuk menelesuri tentang kondisi pertambahan kekayaan yang dimiliki oleh kedua etnis antara etni lokal Gorontalo dan etnis Bali di desa Tri Rukun, marilah kita lihat penelusuran terhadap informan penelitian di lapangan sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun warga masyarakatnya memang sudah mengarah kepada desa mandiri (berkembang), mengapa demikian karena warga masyarakatnya mengalami peningkatan kesejahteraan. Semua ini diperoleh dari pertambahan kekayaan dari hasil usaha yang dibangun oleh warganya. Namun, di Desa Tri Rukun sentimen kepada etnis tertentu tidak pernah terjadi, justru warga masyarakat di desa Tri Rukun saling membantu dalam mengembangkan usahanya. Ini dapat dilihat dari hunian perumahan yang dimiliki warga masyarakat Desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun peningkatan pertambahan kekayaan warga masyarakatnya mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam mengembangkan usaha pertanian dan perdagangan.

Demikian halnya yang dikemukakan oleh ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat desa Tri Rukun untuk keuntungan yang mereka peroleh dari hasil usaha pertanian dan perdagangan dapat kita lihat juga dari kepemilikan Pura di rumah-rumah penduduk yang beragama hindu dari etnis Bali. Memang ukuran pertambahan kekayaan warga etnis Bali dapat dilihat bila etnis Bali dapat mendirikan tempat usaha setara toko dan mendirikan Pura Permanen tempat

peribadatan bagi warga etnis Bali yang beragama Hindu. Namun keberhasilan etnis Bali tidak menjadi masalah bagi etnis Gorontalo dan etnis Minahasa, justru ketiga etnis ini selalu bekerja sama dalam mengembangkan usaha pertanian dan perdagangan di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memacu kesejahteraan melalui usaha pertanian dan perdagangan sebagai upaya dalam meningkatkan pertambahan kekayaan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Keberhasilan warga masyarakat desa Tri Rukun dalam meningkatkan pertambahan kekayaan sebagai bahan evaluasi pada indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi.

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

"Warga etnis Bali dan etnis Gorontalo selalu rukun dalam mengembangkan usahanya masing-masing sehingga dari etnis Bali ada yang sudah punya tokoh, ada yang membangun tempat peribadatan Pura permanen di rumah-nya, ini menunjukkan ada peningkatan pertambahaan kekayaan yang diperoleh etnis Bali, tetapi etnis lokal Gorontalo tidak mengusik ketenangan etnis Bali. Justru yang terjadi adalah komunikasi etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali adalah saling bertukar pengalaman dalam mengembangkan usaha masing-masing" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Untuk membuktikan kembali kondisi tersebut, mari kita simak kembali pernyataan dari ibu Ngi ketut ketika ditemui di kantor Desa Tri Rukun memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti sebagai berikut.

"Kehidupan masyarakat Etnis Bali memang mengalami peningkatan penghasilan pendapatan keluarganya. Ini dapat dilihat pada etnis Bali yang kehidupan rumah tangganya sudah semakin mapan. Ini ditunjukan rumah tempat kediaman etnis Bali yang sudah sejahtera. Bukti ini dapat dilihat dari beberapa rumah tangga yang dapat membangun Pura permanen dan pendapatan hasil pertanian yang diperoleh dari ladang dan sawah yang mereka miliki. Keber-hasilan ekonomi etnis Bali tidak membuat etnis lokal merasa rendah diri dan sakit hati melihat kesuksesan dari etnis Bali. Semua yang diper-oleh oleh etnis Bali melalui usaha perdagangan dan pertanian tidak dipersoalkan dari etnis lokal (wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan etnisitas antara masyarakat Bali dan Gorontalo yang berada di Desa Tri Rukun bukanlah menjadi penghalang terjalinnya Kerja sama dalam bidang perekonomian. Selain dari itu perbedaan etnis antara etnis Bali dan Gorontalo tidak pernah menyebabkan terjadinya persaingan negatif antara masyarakat Bali dan etnis Gorontalo, apalagi persaingan yang berujung pada konflik. Hal tersebut belum pernah terjadi pada masyarakat yang berada di Desa Tri Rukun.

Bila dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat etnis Bali di Desa Tri Rukun sangat progresif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, hal ini terlihat dari rumah hunian dan tempat usaha yang dimiliki oleh etnis Bali. Di mana kami menemukan di lokasi penelitian masyarakat etnis Bali sangat berhasil dalam mengelola pertanian dan membuka usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangganya. Salah satu juga yang membuktikan bahwa etnis

Bali berhasil dalam mengembangkan ekonomi-nya, mereka bisa mendirikan Pura di rumah-rumah dengan kondisi bangunan permanen sehingga bila diukur dengan indeks kesejahteraan, ternyata etnis Bali sudah berada pada level masyarakat yang mapan, dan berhasil dalam mengembangkan usaha perekonomiannya.

Dengan keberhasilan etnis Bali dalam mengembangkan usaha pertaniannya dan usaha perdagangannya memberikan kontribusi secara tidak langsung kepada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Keberhasilan pembangunan yang diberikan oleh etnis Bali kepada pembangunan daerah, memperkuat kesadaran masyarakat etnis lokal untuk tidak mengusik warga masyarakat etnis Bali di Desa Tri Rukun. Fakta ini terjawab ketika hasil observasi dan wawancara kita di kantor desa Tri Rukun, informan penelitian yang kita wawancarai memberikan informasi bahwa hubungan interaksi sosial antaretnis Bali dan etnis lokal tidak terganggu dengan kemapanan dari etnis Bali, karena etos kerjanya yang tinggi. Justru etnis lokal memberikan dukungan dan mau belajar tentang mengapa etnis Bali berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya, inilah yang kami anggap sesuatu yang unik di Desa Tri Rukun. Karena di daerah lain seperti di Provinsi Maluku etnis pendatang (etnis Cina) mengalami pengusiran oleh etnis lokal karena faktor kecemburuan ekonomi. Di Desa Tri Rukun, etnis Bali dapat terterima secara baik. Hal ini terjadi karena kesadaran berbangsa dan bernegara di desa Tri Rukun terbangun. Kesadaran itu dapat diklasifikasikan sebagai suatu model Negara Multikulturalisme yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa Tri Rukun.

Data di atas memberikan petunjuk kondisi ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi warga masyarakat desa Tri Rukun yang saling menunjukkan sikap positif dalam membangun negara multikulturalisme dengan mengedepankan akseptansi yang melahirkan sikap toleran kepada sesama etnis yang ada di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

5. Kemiskinan

Kondisi sosial masyarakat menjadi dasar penilaian indeks ketahanan ekonomi suatu wilayah. Dalam arti kondisi yang diharapkan dalam memperkuat ketahanan ekonomi adalah kondisi sosial masyarakatnya yang mapan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya sehingga ukuran dalam menilai ketahanan ekonomi adalah dengan tidak adanya masyrakat yang miskin dalam suatu wilayah. Dengan demikian mengukur indeks kemiskinan harus memiliki standar dalam mengukur kemiskinan.

Berdasarkan kriteria kemiskinan yang dijadikan dasar *Word Bank* bahwa kategori miskin bila pendapatan masyarakat dalam sehari tidak lebih dari $2 dolar perhari. Ada juga yang melihat kemiskinan dari fasilitas perumahan yang di tempati oleh warga negara. Namun juga kemiskinan dapat terjadi oleh beberapa faktor ada kemiskinan natural ada juga kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan karena disebabkan oleh kondisi georafis di mana warga negara itu tinggal, misalnya karena tinggal di wilayah yang daerahnya dekat dengan garis khatulistiwa sehingga alamnya yang sangat panas tidak tumbuhnya sumber daya alam di sana. Tetapi juga ada kemiskinan karena disebabkan oleh kesengajaan negara artinya karena

kebijakan negara membuat daerah tersebut menjadi miskin. Semua ini menjadi dasar kita melihat bagaimana kondisi suatu wilayah dalam memertahankan ketahanan nasional pada dimensi ekonomi yang salah satunya dilihat dari indikator kemiskinan.

Untuk menelusuri kondisi di lokasi penelitian, maka sebaiknya kita melihat hasil penelusuran mengenai kondisi kemiskinan di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo melalui konfirmasi kepada informan penelitian di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun, warga masyarakatnya memang sudah mengarah kepada desa mandiri (berkembang) sehingga ukuran kemiskinan di desa Tri Rukun hampir dapat diselesaikan dari upaya kerja keras warganya dalam peningkatan kesejahteraan. Misalnya, melalui usaha pertanian dan usaha perdagangan sehingga dengan aktivitas warga masyarakat desa Tri Rukun dapat mengatasi kemiskinan di desa Tri Rukun. Dalam filsafat Gorontalo pun yang menjadi pegangan adalah Olohiu Butuhio, Polangio landingio. Berdasarkan filsafat Gorontalo etnis Gorontalo pun berusaha untuk tidak menjadi miskin bersama dengan etnis Bali di desa Tri Rukun dengan etos kerjanya yang tinggi" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun peningkatan taraf hidup masyarakatnya mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam mengembangkan usaha pertanian dan perdagangan dalam mengentaskan kemiskinan di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan temuan di lapangan ini, ternyata kemiskinan itu hadir bila warga masyarakat di Desa Tri Rukun tidak memiliki etos kerja dalam memertahankan hidup. Memang fakta di lapangan yang kami temui sebagian besar penduduk Desa Tri Rukun dari etnis Bali kehidupan ekonominya sangat mapan, tetapi kondisi ini tidak mengakibatkan hubungan antara etnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali berkonflik karena perbedaan pendapatan justru etnis lokal dan etnis Bali saling bekerja sama dalam bidang usaha pertanian dan perdagangan. Namun, bila diukur dari indikator kemiskinan warga masyarakat di desa Tri Rukun sudah sangat tangguh dalam mencegah kemiskinan.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tinggi etos kerjanya sehingga dengan prinsip ini warga masyarakatnya tidak ada yang hidup apa adanya, semua bekerja keras dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dengan etos kerja ini warga masyarakatnya dapat keluar dari garis kemiskinan. Apalagi pemerintah Kabupaten Boalemo dan pemerintah kecamatan Wonosari yang selalu memerhatikan kebutuhan warga masyarakat Desa Tri Rukun. Demikain juga dengan pemerintah desa melalui dana desa digunakan untuk program pemberdayaan dan pembangunan fisik dalam menunjang ekonomi masyarakat di Desa Tri Rukun, memberikan bantuan kepada warga masyarakatnya untuk berusaha di bidang pertanian dan perdagangan, kerajinan dan pertukangan semua ini bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memacu kesejahteraan melalui usaha pertanian dan perdagangan sebagai upaya dalam menghilangkan kemiskinan. Keberhasilan warga masyarakat Desa Tri Rukun dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai bahan evaluasi pada indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi.

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Kondisi kemiskinan di desa Tri Rukun saat ini sudah dapat diatasi oleh warga masyarakatnya. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo selalu memberikan perhatian kepada desa Tri Rukun. Apalagi dana desa yang ada dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik dalam menunjang perekonomian masyarakat di Desa Tri Rukun" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berdasarkan data di atas menunjukkan kondisi kemiskinan di desa Tri Rukun dapat teratasi melalui program-program pemerintah daerah dan dukungan masyarakatnya hal ini terlihat dari etos kerja masyarakat desa Tri Rukun, dan yang paling utama adalah di desa Tri Rukun tidak terjadi gesekan ekonomi dalam membangun ketahanan wilayah di sektor ekonomi sehingga dapat dikatakan melalui evaluasi indeks kualitatif ketahanan wilayah desa Tri Rukun sangat tangguh dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya. Inilah harapan dari indeks ini dalam rangka menciptakan stabilitas ketahanan wilayah di daerah kabupaten Boalemo.

Untuk menindaklanjuti lebih dalam tentang penilaian indeks ketahanan ekonomi dapat dilihat melalui indikator di bawah ini sebagai berikut.

6. Kesempatan Kerja

Sering gesekan ekonomi terjadi bila ada pelayanan pemerintah yang tidak memegang strategi pemba-ngunan multikulturalisme. Artinya bila ada warga masyarakat yang merasa dianaktirikan oleh peme-rintah baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah sampai pada pemerintahan desa mengenai kesempatan kerja, akan menimbulkan potensi konflik di wilayah itu. Oleh karena itu, dalam mengukur indeks ketahanan ekonomi di suatu daerah mema-sukan salah satu dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi adalah indikator pemerataan. Artinya, harus pemerintah daerah mela-kukan distribusi yang sama kepada semua warga negaranya dalam memperoleh kesempatan kerja atau dalam membuka kesempatan kerja bagi warga masyarakatnya.

Untuk menelusuri kondisi ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi melalui indikator kesempatan kerja, maka peneliti melakukan penelusuran infor-masi kepada beberapa informan penelitian yang ada pada lokasi penelitian sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya mendapatkan bantuan yang merata dari pemerintah daerah kabupaten Boalemo melalui pemerintah kecamatan. Demikian halnya bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah desa didistribusikan secara merata kepada semua etnis yang ada di desa Tri Rukun dengan tujuan warga masyarakatnya

mendapatkan kesempatan yang sama dalam membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan perdagangan, begitu juga pertukangan dan kerajinan bagi warganya. Pemerintah desa tidak pilih kasih kepada warganya dalam membuka sektor lapangan pekerjaan dan perdagangan serta pertukangan di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun sangat membuka lebar bagi semua etnis yang ada di Desa Tri Rukun dalam membuka lapangan pekerjaan di bidang usaha pertanian dan perdagangan, serta pertukangan dan kerajinan. Ini semua dilakukan pemerintah desa kepada warganya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sehingga dapat dikatakan warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam membuka kesempatan kerja di sektor informal di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Namun, berdasarkan data di lapangan, warga masyarakatnya juga ada yang berkerja di sektor formal seperti PNS (guru, pegawai kantoran), TNI dan POLRI. Semua fakta ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengukur indeks ketahanan ekonomi di desa Tri Rukun. Dengan kesadaran bersama dan rasa persaudaraan antaretnis membuat desa Tri Rukun, sampai dengan saat ini ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi berdasarkan indeks kualitatif kesempatan kerja bagi warga masyarakatnya dikatakan sangat tangguh. Mengapa demikian karena berdasarkan data hasil wawancara dengan informan penelitian di lapangan interaksi ekonomi di desa Tri Rukun tidak mengalami hambatan dalam membangun negara multikuturalisme, dengan prinsip saling

menghargai antaretnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tinggi etos kerjanya sehingga untuk berkerja di sektor informal kesempatan kerja bagi warganya terbuka lebar. Apalagi pemerintah Kabupaten Boalemo dan pemerintah kecamatan Wonosari. Demikain juga dengan pemerintah desa melalui dana desa digunakan untuk program pemberdayaan dan pembangunan fisik dalam menunjang ekonomi masyarakat di desa Tri Rukun, memberikan bantuan kepada warga masyarakatnya untuk berusaha di bidang pertanian dan perdagangan, kerajinan dan pertukangan. Semua ini bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Tetapi warga masyarakat kami pun ada yang bekerja di sektor formal seperti PNS (guru, pegawai pemda) TNI dan POLRI. Untuk mereka yang pengangguran pemerintah desa selalu men-*support* lewat bantuan dana desa dengan pemberian modal kepada semua etnis yang ada di desa Tri Rukun untuk membuka lapangan pekerjaan, seperti pertukangan, perdagangan, usaha kerajinan meobel, dan keterampilan ukir, serta usaha dalam bidang pertanian dan peternakan" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam memacu kesempatan kerja melalui usaha pertanian dan perdagangan sebagai upaya dalam menghilangkan kemiskinan. Keberhasilan warga masyarakat Desa Tri Rukun dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai bahan evaluasi pada indeks ketahanan wilayah pada dimensi

ekonomi melalui indikator kesempatan kerja bagi warga desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo.

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

> "Kondisi kesempatan kerja di Desa Tri Rukun saat ini sudah dapat diatasi oleh warga masyarakatnya. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo selalu memberikan perhatian kepada Desa Tri Rukun. Apalagi dana desa yang ada dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik dalam menunjang perekonomian masyarakat di desa Tri Rukun. Dengan bantuan ini warga masyarakatnya bekerja disemua sektor ada yang bekerja di sektor formal seperti PNS, TNI dan anggota POLRI dan ada juga yang bekerja di sektor informal sebagai pengrajin, pertukangan dan bekerja di sektor pertanian, peternakan dan perdagangan sehingga hampir tidak ada pengangguran pada warga kami. Kalaupun itu ada karena warga masyarakatnya tidak mau diberdayakan oleh pemerintah desa" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berangkat dari hasil penelusuran kepada informan penelitian di lokasi penelitian menjawab semua apa yang menjadi bahan evaluasi dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi melalui indikator kesempatan kerja bagi warga masyarakat di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang ketahanan wilayah pada dimensi ketahanan wilayah pada aspek ekonomi, terakhir indikator yang dijadikan sebagai penilaian indeks ketahanan wilayah pada dimensi

ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi dapat kita lihat pada indikator di bawah ini sebagai berikut.

7. Pemerataan (Distribusi)

Sebagai bagian akhir dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi adalah menyangkut bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mendistribusikan segala potensi yang dimiliki pemerintah daerah berupa barang dan jasa, serta pembagian keuangan sebagai modal dalam mengembangkan usaha pada warga masyarakatnya. Artinya bila distribusi ini tidak dilakukan dengan prinsip pemerataan, sebagaimana indeks dalam menilai sta-bilitas ekonomi di suatu wilayah. Sudah dapat dipastikan pasti daerah itu akan mengalami turbulensi dalam membangun negara multikulturalisme.

Dengan dasar inilah maka indikator pemerataan dijadikan sebagai bagian terakhir dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi di Desa Tri Rukun.

Untuk mengetahui sejauhmana indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi melalui indikator pemerataan dapat kita lihat melalui hasil penelusuran peneliti kepada informan penelitian di lokasi penelitian sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya mendapatkan distribusi yang sama dari pemerintah desa. Pemerintah desa menyalurkan secara merata kepada semua etnis yang ada di desa Tri Rukun bantuan sosial yang datang dari Pemerintah Kabupaten Boalemo dan pemerintah Provinsi dan bahkan pemerintah desa Tri Rukun menganggarkan ADD Desa pada usaha pemberdayaan dan pembangunan fisik dalam

> mendorong ekonomi di desa Tri Rukun menjadi baik. Semua dilakukan kepada warga desa Tri Rukun dengan tujuan warga masyarakatnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan perdagangan, begitu juga pertukangan dan kerajinan bagi warganya. Pemerintah desa tidak pilih kasih kepada warganya dalam membuka sektor lapangan pekerjaan dan perdagangan, serta pertukangan di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan distribusi pemerintah desa terhadap bantuan selalu memerhatikan prinsip pemerataan bagi semua warga mayarakatnya tanpa melihat dari mana asalnya warga masyarakatnya sehingga sampai saat ini di desa Tri Rukun tidak pernah terjadi konflik mengenai pendistribusian bantuan dari pemerintah desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Hal ini menunjukkan di desa Tri Rukun sikap esklusi sosial tidak pernah kami melakukannya.

Pernyataan informan penelitian ini sesuai dengan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Di mana di desa Tri Rukun warga masyarakatnya hidup berdampingan, saling bekerja sama, saling menghargai satu sama lainnya. Dengan demikian sikap esklusi sosial di kalangan warga masyarakat Desa Tri Rukun pun tidak terjadi.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat desa Tri Rukun mendapatkan distribusi yang sama dari pemerintah Kabupaten Boalemo dan pemerintah kecamatan Wonosari. Demikain juga dengan pemerintah desa melalui dana desa digunakan untuk program pemberdayaan dan pembangunan fisik dalam menunjang ekonomi masyarakat di desa Tri Rukun, memberikan bantuan kepada warga masyarakatnya untuk berusaha di bidang pertanian dan perdagangan, kerajinan dan pertukangan semua ini bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo" (wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat desa Tri Rukun sangat tangguh dalam melaksanakan pendistribusian bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, pemerintahan kecamatan Wonosari dan dari pemerintahan desa Tri Rukun dengan prinsip asas pemerataan.

Senada dengan jawaban di atas informan penelitian atas nama Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun sejak tahun 2013. Menurut beliau sebagai berikut.

"Pendistribusian bantuan di Desa Tri Rukun tidak terlepas dari asas pemerataan kepada semua warga masyarakat di Desa Tri Rukun baik itu etnis Bali yang mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semua diperlakukan dengan adil berdasarkan prinsip pemerataan dengan mengedepankan siapa yang paling membutuhkan bantuan yang diberikan baik dari pemerintah Kabupaten Boalemo, pemerintahan kecamatan sampai dari dana desa ADD Desa Tri Rukun. Perlakuan yang sama inilah yang membuat Desa Tri Rukun tidak pernah terjadi gesekan antaretnis" (Wawancara, tanggal 27 Juni 2020 di Kantor Desa Tri Rukun).

Berangkat dari hasil penelusuran kepada informan penelitian di lokasi penelitian menjawab semua apa yang menjadi bahan evaluasi dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi melalui indikator Pemerataan bagi warga masyarakat di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Penjelasan informan di atas pada semua indikator ketahanan wilayah pada dimensi ekonomi menunjukkan desa Tri Rukun sangat tangguh dalam mengelola ekonomi sebagai bagian dari penilaian indeks ketahanan wilayah di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

D. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Sosial Budaya

Ketahanan wilayah dalam perspektif sosial budaya merupakan suatu usaha menjaga keutuhan wilayah dalam sudut pandang sosial dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat salah satu faktor penyebab terjadinya konflik atau pertikaian adalah masalah sosial dan budaya. Dalam kehidupan sosial biasanya terdapat hal-hal yang bisa menyebabkan konflik seperti tidak adanya keadilan sosial atau istilah lain pilih kasih dalam kehidupan sosial. Sedangkan dari segi kebudayaan, perbedaan kebudayan masyarakat kadangkala menjadi penyebab konflik dalam bermasyarakat. Hal ini tentunya disebabkan karena kurangnya sikap saling memahami dan menghormati perbedaan dalam bermasyarakat.

Untuk lebih mengetahui bagaimana kondisi ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya dapat kita telusuri melalui indikator ketahahan wilayah pada dimensi sosial di bawah ini sebagai berikut.

1. Ekslusi Sosial atau Marginalisasi Sosial

Ekslusi sosial adalah tindakan penyingkiran atau pengucilan ke pinggiran masyarakat atau proses marginalisasi. Bila dilihat dari pemahaman istilah ini, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya. Dengan kondisi esklusi sosial yang masih ada di masyarakat akan membuat stabilatas sosial di suatu wilayah terganggu sehingga kondisi normal dalam melihat indeks ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya bila warga masyarakat di suatu daerah tidak mengarah pada sikap esklusi sosial. Artinya, sikap ini memang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang belum melaksanakan prinsip membangun negara multikulturalisme, tetapi pada negara yang sudah melaksanakan strategi negara dalam membangun negara multukulturalisme sikap-sikap anti multikulturalisme tadi tidak terjadi lagi.

Dengan demikian, harapan kita bersama pemerintah Indonesia mampu melaksanakan strategi negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme yang menghilangkan sikap-sikap negatif dari indikator ketahanan nasional pada dimensi sosial budaya, seperti sikap ekslusi sosial.

Untuk menelusuri kondisi ketahanan nasional pada dimensi sosial budaya marilah kita menelusuri hasil wawancara dengan informan penelitian di lokasi penelitian sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya tidak ada yang diperlakukan diskriminasi atau dimarginalkan. Semua mendapatkan bantuan yang merata dari pemerintah daerah kabupaten Boalemo melalui

pemerintah kecamatan. Demikian halnya bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah desa didistribusikan secara merata kepada semua etnis yang ada di desa Tri Rukun dengan tujuan warga masyarakatnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan perdagangan, begitu juga pertukangan dan kerajinan bagi warganya. Pemerintah desa tidak pilih kasih kepada warganya dalam membuka sektor lapangan pekerjaan dan perdagangan, serta pertukangan di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan proses pendistribusian bantuan bagi masyarakat di desa Tri Rukun dilakukan dengan memerhatikan prinsip pemerataan sehingga esklusi sosial tidak terjadi di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari. Hal ini ditunjukan pada saat pemerintah mendistribusikan bantuan, baik bantuan dari pemerintah Kabupaten Boalemo, bantuan dari Provinsi Gorontalo sampai bantuan pemerintahan Desa Tri Rukun yang dianggarkan lewat Dana Desa (ADD). Semua warga mayarakatnya tanpa melihat dari mana asalnya warga masyarakatnya mendapatkan bantuan sehingga sampai saat ini di desa Tri Rukun tidak pernah terjadi konflik mengenai pendistribusian bantuan dari pemerintah desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat desa Tri Rukun mendapatkan perlakuaan yang sama dalam melaksanakan ritual keagamaan. Misalnya etnis Bali yang beragama Hindu bersama-sama dengan etnis lokal merayakan

perayaan ritual Ogoh-Ogoh. Di mana ada yang dari etnis lokal Gorontalo mengarak ogoh-ogoh. Demikian juga halnya dengan perayaan agama etnis lokal etnis Bali pun berpartisipasi melaksanakan ritual etnis Gorontalo seperti perayaan Tombilatohe, etnis Bali ikut memasang lampu Tombilatohe di rumah-rumah etnis Bali, bahkah dikantor desa Tri Rukun pun dilakukan pemasangan lampu Tombilatohe sebagai wujud dukungan akan tradisi etnis lokal Gorontalo. Demikian juga halnya dengan perayaan idul Fitri dan perayaan Natal bagi etnis Minahasa. Warga etnis Bali dan Gorontalo saling mengunjungi. Dan yang paling diperhatikan oleh pemerintah desa adalah kebebasan umat beragama melaksanakan ibadahnya diberikan hak yang sama sehingga di desa Tri Rukun tempat peribadatan dari tiga agama ada dan tidak pernah mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan ritualnya" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari informan penelitian terhadap pertanyaan tentang indikator esklusi sosial di Desa Tri Rukun, memberikan petunjuk bahwa di Desa Tri Rukun tidak terjadi esklusi sosial yang mengganggu stabilitas wilayah pada dimensi ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang esklusi sosial pertanyaan dikonfirmasi kepada informan penelitian diarahkan kepada ibu sekdes Tri Rukun. Menurut Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Di Desa Tri Rukun kehidupan antaretnis sangat rukun sesuai dengan nama desa Tri Rukun. Di mana kehidupan sosial antara etnis lokal Gorontalo, etnis Bali dan etnis Minahasa terbangun suasana kekeluargaan. Bahkan dikatakan warga Desa Tri Rukun sudah seperti satu keluarga besar yang saling membutuhkan. Ini terlihat pada setiap perayaan keagamaan ketiga etnis ini saling membantu dan

menghargai kegiatan ritual yang dilaksanakan oleh setiap etnis. Misalnya Etnis Bali merayakan hari Nyepi etnis lokal pun menghargainya sekalipun standar larangan yang dilakukan oleh etnis Bali beragama Hindu tidak sama Etnis Bali di daerah asalnya yang menutup semua kativitas warganya karena menghormati etnis lokal maka perayaan Nyepi agak dilonggarkan aktivitas warganganya. Namun, warga etnis lokal dan etnis Minahasa sangat menghargai perayaan Nyepi dari etnis Hindu. Demikian sebaliknya bila etnis lokal dan etnis Minahasa merayakan hari-hari besar keagamaan etnis Bali yang beragama Hindu pun menghormati dan membantu mensukseskan kegiatan ritual dari etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan penelusuran dari peneliti di lapangan dan jawaban informan penelitian di atas menunjukkan bahwa sikap esklusi sosial tidak terjadi di Desa Tri Rukun.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya marilah kita menelusuri melalui indikator lain terhadap ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya di bawah ini sebagai berikut.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan stabilitas sosial budaya. Mengapa demikian karena semakin banyak warga masyarakat yang melek huruf maka ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Karena bila dilihat salah satu faktor penentu berkembangnya dan mundurnya suatu negara dapat ditentukan oleh sumber daya manusia di negara itu. Bahkan kehidupan demokrasi pun sangat ditentukan oleh faktor pendidikan di suatu negara

sehingga itu dalam mengukur bagaimana kondisi pendidikan di suatu negara dapat kita lihat melalui konstitusi suatu negara. Artinya, berapa anggaran yang dialokasikan negara kepada pendidikan. Di zaman Orde Lama dan Orde Baru anggaran pendidikan yang dialokasikan hanya sekitar 6% dari APBN, sedangkan negara tetangga kita (Negara Malaysia) sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sudah di atas 20 persen sehingga itu jangan kita heran dulu warga negara Malaysia dalam mengembangkan SDM belajar di negara Indonesia, sekarang kita belajar di negara Malaysia mengapa karena kita kurang memberikan perhatian kepada sektor pendidikan.

Dengan pendidikan suatu negara akan memiliki stabilitas sosial yang sangat tangguh. Inilah harapan yang kita kehendaki bersama, semoga indikator pendidikan ini akan menjadi prioritas bangsa dan negara kita. Dengan kajian ketahanan nasional ini maka pemerintah melakukan perubahan kebijakan di dalam negara kita. Di mana di era reformasi anggran pendidikan sudah ditetapkan 20 persen dari apben hal ini sudah dituangkan dalam konstitusi. Dampak dari kebijakan ini hampir semua daerah meng-gratiskan pendidikan mulai dari tingkat pendidikan SD sampai dengan tingkat pendidikan SLTA. Bahkan pendidikan di tingkat perguruan tinggipun pemerintah pusat banyak memberikan bantuan beasiswa bagi warganya.

Perubahan kebijakan ini harus disikapi oleh pemerintah daerah sampai di tingkat pemerintahan desa. Agar supaya warga negara Indonesia tentang *Human Development Index*-nya (HDI) sudah di angka 75%. Ini berarti pemerintah daerah wajib juga mengalokasikan melalui anggran APBD sebesar 20%. Demikian juga desa

harus juga memerhatikan warga masyarakatnya untuk menimbah ilmu di bangku pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Dalam arti pemerintah desa pun dapat membantu warganya yang mengalami kesulitan pembiayaan pendidikan dasar di desanya.

Untuk melihat sejauh mana ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya khususnya indikator pendidikan di Desa Tri Rukun, marilah kita analisis kondisi pendidikan di Desa Tri Rukun sebagaimana yang kami peroleh melalui observasi data di lapangan sebagai berikut.

Tabel 8.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Tri Rukun

No.	Tidak Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Tidak tamat SD	134 orang
2.	Tamat SD	259 orang
3.	Tamat SMP/sederajat	123 orang
4.	Tamat SMA/sederajat	127 orang
5.	Diploma/sarjana	103 orang
Total		**746 orang**

Sumber: Data Desa Tri Rukun, 17 Juni 2020

Berdasarkan tabel 8.1 di atas menunjukkan bahwa masih ada sekitar 134 orang atau 17,96 % warga masyarakat Desa Tri Rukun yang tidak tamat sekolah dasar. Warga masyarakat yang tidak tamat SD ini yang harus dilatih pemerintah Desa Tri Rukun supaya warganya ini harus dapat menerima pendidikan paket A yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam mengilangkan buta aksara. Selebihnya, warga masyarakat Desa Tri Rukun sudah melek huruf karena warganya sudah tamat SD, tamat SLTP.

Sementara itu, warganya sudah lulus pada pendidikan SLTA bila dibandingkan dengan warga masyarakatnya yang sempat menyelesaikan sampai pada tingka

SLTA sebesar 127 orang atau 17,02% yang sudah memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi. Artinya, standar kelulusan SLTA dapat digunakan sebagai dasar seseorang menduduki jabatan politik. Mengapa seseorang ketika sudah dapat menyelesaiakan pendidikan SLTA dikatakan dewasa dalam bidang sosial budaya karena seseorang sudah tamat SLTA dapat mengorganisir kegiatan yang dia tekuni, baik dalam dunia politik, sosial budaya maupun dalam bidang ekonomi. Apalagi bila warga masyarakat Desa Tri Rukun sampai kepada tingkatan Perguruan Tinggi. Mereka yang sudah lulus dalam perguruan tinggi dianggap lebih profesional dalam mengembangkan keahliannya, baik di bidang politik, sosial budaya maupun kegiatan di bidang ekonomi.

Ternyata data di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya ada yang sudah tamat perguruan Tinggi lulusan D3 sampai dengan Sarjana. Mereka ini berjumlah 103 orang atau 13,81%. Ini menunjukkan warga masyarakat Desa Tri Rukun sudah tangguh dalam membangun pendidikan sebagai indikator ketahanan sosial budaya.

Akan tetapi, juga pemerintah Desa Tri Rukun punya pekerjaan rumah dalam memberantas buta huruf terutama warga masyarakatnya yang tidak tamat pendidikan dasar sekitar 134 orang atau 17,96%.

Untuk menelusuri apa yang dilakukan oleh pemerintah desa Tri Rukun dalam mengentaskan buta huruf di wilayahnya kita dapat menganalis hasil wawancara dengan informan penelitian bapak Kepala Desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra di bawah ini sebagai berikut.

"Upaya pemerintah desa di dalam mengatasi warganya yang putus sekolah adalah dengan melanjutkan pada pendidikan paket C, tetapi yang menjadi permasalahan di desanya mereka yang tidak tamat sekolah dasar itu adalah ada satu atau dua orang lansia sehingga untuk memfasilitasi mereka lansia di dalam mengikuti belajar lewat pendidikan paket A, B dan C pun bermasalah karena lansia tidak mau mengikuti pendidikan paket A sampai dengan pendidikan Paket C. Namun, pemerintah desa berusaha bagi warga masyarakatnya yang masih bisa di sekolahkan lewat pendidikan Paket C. Pemerintah Desa Tri Rukun tidak pasif dalam memberantas buta huruf di desanya melalui berbagai usaha dan memotivasi warganya untuk melanjutkan pendidikan bagi warga masyarakatnya yang putus sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SLTP dan SLTA" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan jawaban informan tersebut menun-jukkan pemerintah desa melakukan intervensi bagi warganya yang mengalami kegagalan dalam menempu pendidikan SD sampai dengan pendidikan SLTA melalui pendidikan paket A, B, dan pendidikan paket C yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Kapasitas kepala Desa Tri Rukun tidak hanya membantu secara moril tetapi bantuan secara materil lewat dana pemberdayaan desa pun dikeluarkan anggaran dalam membantu warga masyarakatnya yang mengalami kegagalan di dalam melanjutkan sekolah. Namun, terkendala bila yang putus sekolah itu ada pada usia lansia, ini yang tidak lagi dapat diupayakan dalam mengikuti pendidikan paket A, B, dan C yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Sekalipun pemerintah desa warganya ada yang tidak tamat SD atau putus sekolah dan tidak bisa membaca bukan berarti warganya tidak mampu membiayai

pendidikan, tetapi karena motivasi warga masyarakatnya yang mungkin saat itu pendidikan dianggap sulit atau ada faktor lain yang membuat warganya tidak tamat pendidikan dasar. Mengapa ini disampaikan karena dilihat dari tingkat pendapatan warga masyarakat mampu melaksanakan pendidikan dasar apalagi pendidikan dasar di daerah Kabupaten Boalemo telah digratiskan untuk saat ini.

Dengan melihat fenomena masih ada yang putus sekolah sekalipun pendidikan dasar telah digratiskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, berati ini akan menjadi tugas pemerintah desa untuk memberikan motivasi warganya dalam mengikuti pendidikan dasar bagi warga masyarakat Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Bila melihat fenomena di atas berarti permasala-han pendidikan di Desa Tri Rukun, bukan ada pada persoalan pembiayaan pendidikan tetapi ada pada *mainset* sebagian warga masyarakatnya terhadap pentingnya pendidikan dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi warga masyarakat yang akan menentukan penilaian terhadap *Human Development Index* (HDI) bagi penetapan ketahanan wilayah di sektor pendidikan. Artinya masih ada sebagian kecil warga masyarakat di Desa Tri Rukun yang mengabaikan akan pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas hidup warga masyarakatnya.

Dengan demikian, yang harus dilakukan pemerintah desa adalah untuk tidak henti-hentinya mendorong warganya untuk selalu memprioritaskan pendidikan bagi keluarganya. Ini pun sudah dilaksanakan pemerintah Desa Tri Rukun melalui program Paket A, B dan C agar warganya tidak ada yang buta huruf dan warganya dapat melakukan apa saja yang diinginkan dalam memenuhi

angkatan kerja. Biasanya bila bekerja di sektor formal selalu ijasah menjadi sebuah persyaratan dalam memasuki angkatan kerja. Dengan pendidikan paket C warganya minimal telah memenuhi syarat formal ketika warganya memilih melamar bekerja pada sektor formal.

Bila dianalisis berdasarkan data dan fakta di lapangan pendidikan formal tidak menjadi ukuran bagi warganya dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Tri Rukun, mengapa demikian karena hampir sebagaian besar warganya bekerja di sektor non formal, seperti bertani, beternak dan menjadi pedagang dan tukang, semua profesi ini tidak terlalu membutuhkan syarat-syarat formal seperti pekerja formal. Dengan fakta dan data ini memberikan petunjuk bahwa warga masyarakat Desa Tri Rukun masih ada yang tidak serius dalam melanjutkan pendidikan formal.

Keterampilan yang di dapat warganya adalah merupakan ketrampilan *life skill* yang diturunkan ayahnya atau lingkungannya seperti kebiasaan bertani, beternak dan menjadi pengrajin atau tukang. Dan profesi inilah yang membuat warga masyarakat desa Tri Rukun bisa *Survaivel* dalam melanjutkan dan memertahankan hidupnya sehingga dengan kondisi ini bisa menjadi faktor penyebab mengapa masih ada warga masyarakat Desa Tri Rukun yang tidak tamat SD. Tetapi ini hal yang penting menjadi tugas pemerintah desa untuk merubah *mainset* warganya keterampilan warga masyarakatnya bila ditunjang oleh pendidikan akan lebih produktif dan profesional dalam memasarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh warga masyarakat Desa Tri Rukun saat ini.

3. Kesehatan

Stabilitas pada dimensi sosial budaya merupakan sebuah persyaratan yang harus dipenuhi bagaimana angka harapan hidup warga masyarakat Desa Tri Rukun. Artinya idealnya angka harapan hidup secara nasional adalah di atas angka harapan hidup 75 tahun keatas. Artinya, warga masyarakat diharapkan meninggal pada umur di atas 75 Tahun. Semua ini dapat ditentukan melalui kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh fasilitas pendukung kesehatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Selain pendukung angka harapan hidup yang tinggi rata-rata angka kematian di atas dari umur 75 tahun adalah kesejahteraan warga masyarakatnya. Ternyata angka harapan hidup pun dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan warga masyarakatnya selain fasilitas kesehatan seperti keberadaan Rumah Sakit, Puskesmas, sanitasi, MCK, dll., yang dapat memengaruhi angka harapan hidup bagi masyarakat suatu negeri.

Dengan demikan, angka harapan hidup dapat diupayakan oleh pemerintah daerah. Kita tidak boleh punya aliran fatalisme selalu menyerahkan kepada nasif atau takdir. Dalam agama pun dikatakan Allah tidak akan merubah nasif suatu kaum, terkecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ajaran inilah yang kita harus pegang yang mengamanatkan kepada manusia untuk menjaga kesehatan supaya angka harapan hidup di suatu negara dapat mencapai di atas 75 tahun.

Untuk melihat bagaimana kondisi awal kese-hatan warga masyarakat desa Tri Rukun dapat kita analisis melalui hasil observasi di lapangan melalui tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 8.2 Keadaan Penduduk berdasarkan Usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan
0—15 tahun	133 orang	156 orang
16—55 tahun	293 orang	266 orang
Lebih dari 55 tahun	78 orang	72 orang
Total		**484 orang**

Sumber: Data Desa Tri Rukun, 17 Juni 2020

Berdasarkan data hasil observasi di atas menunjukkan angka harapan hidup masyarakat di desa Tri Rukun warga masyarakatnya yang berusia di atas 75 tahun belum ada. Ini menunjukkan ada permasalahan kesehatan di desa Tri Rukun. Semestinya usia di atas 75 tahun itu harus terisi.

Dengan demikan, data ini menunjukkan warga masyarakat desa Tri Rukun angka harapan hidupnya masih di bawah 75 tahun, artinya pada usia 72 tahun orang sudah meninggal, padahal ajal manusia bisa kita perpanjang bila kita mengikuti aturan kesehatan dan kesejahteraan yang diberikan negara kepada kita warga negaranya terpenuhi.

Analisis penelitian ini bukan membantah adanya takdir, tetapi ilmu pengetahuan mengatakan usia manusia dipengaruhi oleh peran negara dalam memberikan perhatian serius pada angka harapan hidup masyarakatnya. Salah satu contoh negara-negara yang sudah di atas angka harapan hidupnya 75 tahun seperti negara di kawasan Asia Tenggara (Negara Singapura) Asia selatan (Negara Cina), negara di belahan Eropa (Negara Swedia, Negara Kanada dsb), di benua Amerika (negara Amerika). Negara-negara yang saya sebutkan di atas telah melewati angka harapan hidup di atas 75 tahun. Mengapa ini terjadi karena negara ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap kesehatan, dan juga negara ini telah

berstandar negara maju sehingga kebutuhan warga negaranya sudah terpenuhi sesuai standar kesehatan dunia (WHO).

Untuk menelusuri upaya apa yang dilakukan pemerintah Desa Tri Rukun dalam meningkatkan angka harapan hidup dapat kita analisis melalui peran pemerintah desa di dalam meningkatkan jaminan kesehatan bagi warga masyarakatnya. Berdasarkan keterangan dari Bapak Kepala Desa Tri Rukun I Wayan Candra dalam memenuhi angka harapan hidup memberikan keterangan tentang upaya memenuhi target yang diharapkan pemerintah di bawah ini sebagai berikut.

> "Pemerintah desa mengupayakan beberapa usaha dalam meningkatkan angka harapan hidup di antaranya program yang di jalankan pemerintah desa adalah memberikan fasilitas kesehatan, seperti Postu sebagai fasilitas kesehatan yang ada di desa sebelum warganya ke Puskesmas di Kecamatan Wonosari. Demikian juga dengan pencegahan stanting kepada ibu hamil dan balita pemerintah desa membantu dalam menangani masalah stanting dengan menganggarkan melalui dana desa Tri Rukun dengan memberikan hasupan gizi kepada ibu hamil dan balita dalam rangka mencegah giji buruk bagi anak pada usia balita dan dengan tujuan membantu angka kematian ibu melahirkan. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah kabupaten Boalemo dengan menempatkan tenaga medis di desa seperti bidan desa" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan informasi dari informan penelitian di atas pemerintah desa pun telah melakukan intervensi terhadap peningkatan kualitas kesehatan bagi warga masyarakat yang ada di desa Tri Rukun. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan di desa Tri Rukun sangat tinggi di dalam memerhatikan kebutuhan warganya terhadap fasilitas kesehatan bagi warganya.

Bila kita lihat bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada di wilayahnya dalam menunjang kesehatan masyarakat di tingkat desa yang ada di Kecamatan Wonosari. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan memang pemerintah daerah Kabupaten Boalemo telah mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Boalemo dengan mendirikan Rumah Sakit Daerah.

Dengan hadirnya rumah sakit daerah di wilayah kabupaten Boalemo akan lebih meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Biasanya warga masyarakat kabupaten Boalemo, bila ada pasien yang *emergency* selalu dilarikan kerumah sakit Umum Provinsi Gorontalo. Yang terdekat di Rumah sakit Ainun Habiebi. Tetapi bila dilihat dari jarak tempuh dari kabupaten Boalemo kerumah sakit terdekat membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Jarak tempuh ini juga salah satu yang dapat mengurangi angka harapan hidup warga masyarakat yang ada di kabupaten Boalemo. Apalagi bila pasien diruju ke Rumah Sakit Alio Saboe yang jaraknya lebih jauh dari rumah sakit Ainun Habiebe. Kondisi ini akan memperparah kondisi angka harapan hidup masyarakat yang ada di kabupaten Boalemo. Dapat dikatakan banyak pasien kemungkinan akabn gagal hidup karena keterlambatan penanganan kesehatan yang dibutuhkan pasien yang *emergency*.

Dengan adanya pemikiran angka harapan hidup yang bermasalah di wilayah Kabupaten Boalemo Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mengupayakan Rumah Sakit daerah yang sangat didambakan oleh warga masyarakatnya dalam meningkatkan angka harapan hidup.

Analisis di atas baru sebatas indikator fasilitas kesehatan, belum menyentuh kepada alat dan laboratorium, tenaga medis seperti dokter spesialis, perawat ini belum ditelusuri peneliti. Tetapi dengan indikator fasilitas kesehatan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, sedikitnya telah membantu dalam meningkatkan angka harapan hidup warga masyarakat yang ada di Kabupaten Boalemo dalam menunjang fasilitas yang ada di Puskesmas Kecamatan Wonosari dan sekitarnya sampai ketingkat fasilitas kesehatan yang ada di desa berupa postu.

Inilah gambaran kualitas kesehatan yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sampai ketingkat desa yang ada di wilayah kabupaten Boalemo. Penelusuran kesehatan di wilayah Kabupaten Boalemo sampai ketingkat desa khususnya Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari untuk menilai seberapa tangguh ketahanan wilayah pada dimensi kesehatan di kabupaten Boalemo dalam rangka meningkatkan angka harapan hidup sesuai harapan *Human Development Indeks* (HDI) sebagaimana hara-pan pemerintah pusat dalam menunjang ketahanan nasional pada dimensi kesehatan.

Apa yang ditemukan di lapangan pemerintah kabupaten Boalemo telah siap menyonsong target angka harapan hidup yang ditentukan oleh nilai dari *Human Development Indeks* (HDI) dalam mengukur kualitas kesehatan untuk semua kabupaten kota dan Provinsi di Indonesia.

4. Kerukunan Sosial

Dalam menilai indeks ketahanan nasional pada dimensi sosial budaya dapat diukur melalui indeks kerukunan sosial antaretnis di suatu wilayah. Banyak fakta yang

menunjukkan konflik sosial terjadi karena indikator kerukunan sosial diabaikan oleh warga masyarakat yang hidup dalam satu komunitas bersama antaretnis.

Bila kerukunan sosial ini terpelihara di masyarakat kita, maka stabilitas sosial akan lebih mempererat hubungan antaretnis di suatu wilayah sehingga itu indikator kerukunan sosial menjadi salah satu indikator penentu dalam mengevaluasi ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya.

Kerukunan sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi interaksi sosial yang terbangun antarsesama etnis yang hidup dalam suatu daerah atau wilayah dengan prinsip persaudaraan, toleransi, penghargaan atas hak dan kewajiban etnis lain dan keadilan.

Dengan konsepsi kerukunan sosial di atas menjadi parameter dalam mengukur ketahanan wilayah yang ada di Desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Untuk menelusuri kondisi kerukunan sosial, peneliti mengkofirmasi kepada informan penelitian di lokasi penelitian di antaranya sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya saling bekerja sama satu sama lain. Seperti etnis Bali yang mayoritas beragama Hindu selalu bekerja sama dengan etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa yang beragama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, kerukunan ini dapat dilihat dari kebebasan antaretnis dalam menjalankan ibadahnya. Di Desa Tri Rukun ketiga etnis ini memiliki tempat ibadah seperti Pura, Masjid, dan Gereja di tempat ibadah ini ketiga etnis itu menjalankan keyakinannya tanpa ada gangguan dari

pihak warga masyarakat desa Tri Rukun. Sikap saling menghargai antar umat beragama ini masih sangat kental di desa Tri Rukun dan masih dipertahankan oleh masyarakatnya sampai dengan saat ini" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan kerukunan sosial bagi masyarakat di Desa Tri Rukun masih tetap dipertahankan dan sudah menjadi tradisi sesuai dengan nama desanya Tri Rukun. Dengan demikian, indeks kerukunan sosial di Desa Tri Rukun justru sudah menjadi kearifan lokal yang dipatenkan pada nama desanya (Desa Tri Rukun). Memang ada yang bertanya apa artinya sebuah nama, tetapi ternyata nama Desa Tri Rukun merupakan salah satu strategi dalam mempererat hubungan antar ketiga etnis yang hidup berdampingan di Desa Tri Rukun.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat desa Tri Rukun mendapatkan perlakuan yang sama dalam melaksanakan ritual keagamaan. Misalnya etnis Bali yang beragama Hindu bersama-sama dengan etnis lokal merayakan perayaan ritual Ogoh-Ogoh di mana ada yang dari etnis lokal Gorontalo mengarak ogoh-ogoh. Demikian juga halnya dengan perayaan agama etnis lokal etnis Bali pun berpartisipasi melaksanakan ritual etnis Gorontalo, seperti perayaan Tombilatohe, etnis Bali ikut memasang lampu Tombilatohe di rumah-rumah etnis Bali, bahkah dikantor desa Tri Rukun pun dilakukan pemasangan lampu Tombilatohe sebagai wujud dukungan akan tradisi etnis lokal Gorontalo. Demikian juga halnya dengan perayaan idul Fitri dan perayaan Natal bagi etnis Minahasa. Warga etnis Bali dan Gorontalo saling mengunjungi. Dan yang paling diperhatikan oleh pemerintah desa adalah kebebasan

umat beragama melaksanakan ibadahnya diberikan hak yang sama sehingga di desa Tri Rukun tempat peribadatan dari tiga agama ada dan tidak pernah mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan ritualnya" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari informan penelitian terhadap pertanyaan tentang indikator kerukunan sosial di Desa Tri Rukun, memberikan petunjuk bahwa di Desa Tri Rukun kerukunan sosial menjadi dasar berpijak dalam melakukan interaksi antaretnis. Dengan kebiasaan memperkuat kerukunan sosial pada warga masyarakat Desa Tri Rukun membuat desa ini stabilitas wilayah pada dimensi ketahanan wilayah dapat dinilai sangat tangguh dalam melaksanakan kewajiban dalam menjaga stabilitas sosial budaya di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang kerukunan sosial pertanyaan ini dikonfirmasi kepada informan penelitian diarahkan kepada ibu Nenglis Suriana staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Di desa Tri Rukun kehidupan antaretnis sangat rukun sesuai dengan nama Desa Tri Rukun. Di mana kehidupan sosial antara etnis lokal Gorontalo, etnis Bali dan etnis Minahasa terbangun suasana kekeluargaan. Bahkan dikatakan warga Desa Tri Rukun sudah seperti satu keluarga besar yang saling membutuhkan. Ini terlihat pada setiap perayaan keagamaan ketiga etnis ini saling membantu dan menghargai kegiatan ritual yang dilaksanakan oleh setiap etnis. Misalnya Etnis Bali merayakan hari nyepi etnis lokal pun menghargainya sekalipun standar larangan yang dilakukan oleh etnis Bali beragama Hindu tidak sama Etnis Bali di daerah asalnya yang menutup semua aktivitas warganya. Karena menghormati etnis lokal maka perayaan Nyepi agak

dilonggarkan aktivitas warganganya. Namun, warga etnis lokal dan etnis Minahasa sangat menghargai perayaan Nyepi dari etnis Hindu. Demikian sebaliknya bila etnis lokal dan etnis Minahasa merayakan hari-hari besar keagamaan etnis Bali yang beragama Hindu pun menghormati dan membantu mensukseskan kegiatan ritual dari etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Pernyataan informan penelitian di atas tentang kerukunan sosial menunjukkan Desa Tri Rukun warga masyarakatnya sangat melaksanakan prinsip kerukunan sosial sebagaimana harapan dari indeks ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan Desa Tri Rukun merupakan sebuah desa yang warganya dapat melaksanakan prinsip negara multikulturalisme.

5. Ketertiban Sosial

Indikator ketertiban sosial berbeda dengan indikator kerukunan sosial, ketertiban sosial lebih ditekankan pada kondisi sosial yang patuh kepada kearifan lokal yang ada di setiap etnis. Sebagai misal etnis Bali pada saat menjalankan kegiatan ritual keagamaan pada saat hari Nyepi. Semua warga masyarakat di desa Tri Rukun dengan tertib dan khidmat dalam menghormati ritual keagamaan bagi etnis Bali. Demikian pula sebaliknya bila umat Islam etnis lokal dalam melaksanakan salat wajib dan salat tarwih dibulan ramadan, etnis Bali pun tertib menghormati perayaan ritual etnis lokal Gorontalo. Demikian halnya dengan etnis Minahasa ketika melaksanakan ibadah pada hari minggu dan perayaan natal etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo sangat tertib dalam menjaga kegiatan ritual bagi umat Kristen etnis Minahasa. Sedangkan kerukunan sosial

lebih pada kehidupan saling menghargai, kerja sama dan menghormati antaretnis.

Untuk melihat kebenaran dari konsepsi keter-tiban sosial sebagai bagian dari indikator ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya, mari kita analisis hasil wawancara dengan informan penelitian di lapangan di bawah ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya sangat tertib dalam melaksanakan kegiatan ritual agamanya dan bahkan tidak saling mengganggu dalam hal beribadah. Seperti etnis Bali yang mayoritas beragama Hindu selalu merasa nyaman dalam melaksanakan peribadatannya. Demikian juga dengan etnis Gorontalo pada saat melaksanakan ibadah sangat tertib dan merasa nyaman dengan kegiatan rirtual keagamaannya. Demikian juga dengan etnis Minahasa yang setiap hari Minggu melaksanakan peribadatan dan merasa nyaman. Dalam arti ketiga etnis ini tertib melaksanakan kewajiban dan larangan agama untuk melakukan kegiatan yang akan merugikan etnis tertentu" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan keter-tiban sosial bagi masyarakat di Desa Tri Rukun selalu diperhatikan oleh warganya. Dengan demikian indeks ketertiban sosial di Desa Tri Rukun dapat dinilai secara kualitatif pada posisi sangat tangguh dalam melaksanakan konsepsi ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat Desa Tri Rukun sangat tertib melakukan kegiatan ritual dan tidak ada gangguan, di mana ketiga etnis ini sangat tertib melaksanakan kegiatan ritualnya dan merasa nyaman. Untuk agama Islam setiap lima waktu ajan berkumandang lewat pengeras suara, umat Hindu yang dari etnis Bali melaksanakan tiga waktu dalam sehari dengan nyaman, begitu juga dengan etnis Minahasa melaksanakan peribadatan tertib setiap hari minggu di Gereja dan tidak terusik peribadatannya" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari informan penelitian terhadap pertanyaan tentang indikator ketertiban sosial di Desa Tri Rukun, memberikan petunjuk bahwa di Desa Tri Rukun ketertiban sosial menjadi dasar berpijak dalam melakukan interaksi antaretnis. Dengan kebiasaan memperkuat ketertiban sosial pada warga masyarakat Desa Tri Rukun membuat desa ini stabilitas wilayah pada dimensi ketahanan wilayah pada indikator ketertiban sosial dapat dinilai sangat tangguh dalam melaksanakan kewajiban dalam menjaga stabilitas sosial budaya di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gontalo.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang ketertiban sosial sosial pertanyaan ini dikonfirmasi kepada informan penelitian diarahkan kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Di Desa Tri Rukun ketertiban sosial sangat dijunjung tinggi warganya, etnis lokal sangat tertib dalam mematuhi kewajiban untuk menghormati perayaan ritual agama Hindu pada saat pelaksanaan hari Nyepi, di mana dengan perayaan hari Nyepi masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ritual Nyepi, tetapi di Desa Tri rukun

diberi kelonggaran bagi etnis lain untuk melakukan kegiatan, tetapi tidak harus memengaruhi kekhusuan etnis Bali dalam melaksanakan ritual penyepian. Itupun diindahkan oleh etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa. Demikian juga bila ada kegiatan ritual untuk etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa, etnis Bali pun sangat tertib untuk tidak melakukan kegiatan yang akan meganggu kekhusuan dalam menjalankan ritual keagamaan. Dapat dikatakan di desa Tri Rukun ini warga masyarakatnya bersikap sesuai nama desanya Tri Rukun" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan penelusuran peneliti di lokasi penelitian terjawab sudah kondisi aktual tentang jawaban pada indikator ketertiban sosial pada warga masyarakat Desa Tri Rukun. Indeks yang dapat diberikan kepada warga Desa Tri Rukun pada posisi kualitatif sangat tangguh dalam menjaga ketertiban sosial di Desa Tri Rukun.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan. Bahwa perbedaan sosial budaya masyarakat etnis Bali dan Gorontalo yang berada di Desa Tri Rukun bukanlah suatu faktor pemicu terjadinya konflik antar kedua etnis tersebut. Namun, perbedaan kebudayaan antara etnis Bali dan Gorontalo di desa Tri Rukun, justru memperkuat hubungan kekeluargaan kedua etnis tersebut yaitu dibuktikan dengan terjalinya hubungan kerja sama antara kedua etnis tersebut. Namun walaupun demikian, tidak adanya guru kebudayaan di sekolah dasar merupakan suatu faktor penghambat terjalinnya akulturasi kebudayaan.

Sebagai tambahan analisis tentang aspek kebudayaan sebagai indikator mengukur kondisi ketahanan wilayah di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dilihat dari fakta-fakta temuan penelitian di atas

menunjukkan Desa Tri Rukun sangat tangguh dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme. Karena di desa Tri Rukun ketiga kebudayaan etnis dapat saling mengisi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Demikian halnya dengan hubungan interaksi sosial di desa Tri Rukun sehingga dengan fakta-fakta temuan penelitian ini, memberikan status kepantasan kepada desa Tri Rukun sebagai miniatur bangsa Indonesia dalam menjalankan model negara multikulturalisme yang menjadi harapan dan cita-cita *The Founding Fathers* dalam mendirikan republik ini.

6. Perilaku Sosial

Perilaku sosial merupakan indikator terakhir yang dapat digunakan dalam menilai kondisi ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya di desa Tri Rukun. Bila dilihat indikator perilaku sosial ini memang sudah tergambar pada indikator-indikator ketahanan wilayah pada dimensi sosial budaya yang sudah ditemukan jawabannya di lokasi penelitian. Tetapi indikator perilaku sosial sebagai alat untuk mengukur kondisi ketahanan wilayah harus dapat menyimpulkan semua fakta-fakta perilaku sosial yang mengarah kepada potensi terjadinya konflik antaretnis di Desa Tri Rukun. Misalnya gesekan antargenerasi mudah antaretnis yang mengarah kepada gangguan stabilitas ketahanan wilayah pada aspek sosial budaya dsb.

Untuk meneluri apakah ada perilaku sosial yang menyimpang dari warga Desa Tri Rukun marilah kita analisis tentang hasil penelusuran penelitian melalui informan penelitian di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya dengan tegas mengatakan di desa Tri Rukun tidak pernah terjadi perilaku menyimpang di antaranya konflik antaretnis disebabkan karena agama, masaalah budaya, masalah ekonomi semua dapat di atasi. Artinya, kalaupun ada kami dapat selesaikan secara kekeluargaan baik itu melalui "Para Sade" untuk umat hindu atau di fasilitasi oleh kepala desa dan tokoh-masyarakat di desa Tri Rukun dengan cara musyawarah" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan perilaku menyimpang yang mengganggu stabilitas di desa Tri Rukun hampir tidak pernah terjadi. Memang sulit menyatukan keluarga besar yang di dalamnya ada tiga etnis memang sesuatu yang butuh kerja keras dalam menyatukan dalam suasana kekeluargaan. Artinya potensi konflik itu ada, tetapi dapat diselesaikan oleh pemerintah desa lewat pendekatan keagamaan dan pendekatan musyawarah di kantor desa.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat desa Tri Rukun perilaku sosialnya sangat menghargai antarsesama etnis. Hal ini ditunjukan pada saat kegiatan keagamaan semuanya dalam suasana kekeluargaan tidak mengembangkan sikap negatif, misalnya sikap egoisme, etnonasionalisme. Semua etnis dianggap sama sehingga sampai saat ini desa kami tidak pernah terjadi konflik antarsuku sampai dengan saat ini" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari informan penelitian terhadap pertanyaan tentang indikator perilaku sosial di desa Tri Rukun, memberikan petunjuk bahwa di desa Tri

Rukun perilaku sosial warga masyarakatnya dapat dikatakan desa yang paling rukun dalam segala hal. Fakta ini ditunjukan oleh hasil temuan di lapangan yang memperlihatkan kondisi aktual warga masyarakat desa Tri Rukun melakukan interaksi sosial secara baik antarsesama etnis yang ada di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang perilaku sosial sosial pertanyaan ini dikonfirmasi kepada informan penelitian diarahkan kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat karang taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada karang taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas desa Tri Rukun. Melalui karang taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam karang taruna" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas menunjukkan perilaku sosial yang mengarah kepada potensi memecah belah persaudaraan warga masyarakat desa Tri Rukun dapat di atasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kearifan lokal yang menjadi pegangan masing-masing etnis yang ada di desa Tri Rukun membuat desa Tri Rukun terbebas dari ancaman disintegrasi bangsa.

E. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Pertahanan Wilayah

Ketahanan wilayah Desa Tri Rukun dalam perspektif pertahanan wilayah merupakan suatu usaha masyarakat untuk memertahankan wilayahnya dari gangguan dan ancaman pihak luar. Seperti di Desa Tri Rukun, walaupun masyarakatnya berbeda etnis dan agama, hal tersebut bukanlah penghalang kedua etnis tersebut bekerja sama dalam memertahankan wilayah.

Gangguan stabilitas daerah akan berpengaruh kepada aspek pertahanan negara sehingga itu pemerintah berupaya untuk menjaga kedaulatan negara melalui hubungan antarwarga negaranya. Gangguan pertahanan negara dapat dilihat melalui beberapa indikator pertahanan negara di bawah ini sebagai berikut.

1. Gangguan Separatisme

Separatisme merupakan gangguan pertahanan negara yang perlu diwaspadai dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Karena sipat dari gangguan ini dapat kita lihat dengan cara-cara memecah belah hubungan antaretnis. Sebagaimana yang terjadi di daerah konflik Maluku, Poso, Provinsi Kalimantan Timur. Semua ini disebabkan karena ada gerakan separatis yang melakukan gerakan provakasi kepada warga masyarakat di daerah itu. Dengan tujuan agar hubungan antaretnis yang ada di wilayah itu mengalami perpecahan. Inilah harapan para provakator dalam mengganggu stabilitas pertahanan negara kita.

Bila negara kita mengalami konflik antaretnis sudah tentu negara kita mengalami apa yang kita sebut dengan *failed State* (negara gagal) dalam membangun toleransi antarwarga masyarakatnya. Dapat dikatakan telah terjadi

intoleransi di negara kita. Dan ini akan dijadikan parameter lembaga Organisasi Internasional PBB bahwa Indonesia banyak melakukan pelanggaran HAM dan akhirnya negara kita dikucilkan dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, penting bagi kita melihat sejauh manakah peran provakator yang ada di setiap wilayah Republik Indonesia termasuk di daerah kabupaten Boalemo di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Provinsi Gorontalo yang dihuni oleh tiga etnis yaitu etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa.

Bila dilihat dari demografi desa Tri Rukun merupakan suatu desa yang memiliki potensi untuk diganggu dalam hal stabilitas. Mengapa karena desa tersebut yang menempati desa ini bukan warga yang homogen, melainkan warga masyarakat yang hetorogen sehingga dengan kondisi demografisnya memiliki potensi untuk diadu domba hubungan antaretnisnya. Siapakah yang akan melakukan provakasi tersebut dapat kita telusuri melalui penelusuran di lapangan tentang kondisi stabiltas pertahanan di desa tersebut.

Berdasarkan penelusuran peneliti tentang kondisi pertahanan di wilayah Desa Tri Rukun terhadap beberapa informan penelitian di lapangan memberikan jawaban pada pertanyaan peneliti yang kita dapat analisis melalui respons yang di berikan seperti hasil wawancara di bawah ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

"Di Desa Tri Rukun, warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap menjaga stabilitas pertahanan. Sifatnya gangguan stabilitas mengarah kepada perpecahan antaretnis belum pernah terjadi di desa kami" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan integritas warga masyarakat desa Tri Rukun masih sangat tangguh dalam menghadapi ancaman gangguan dari pihak lain atau dari dalam desa Tri Rukun yang ingin mengganggu stabilitas pertahanan. Memang sulit menyatukan keluarga besar yang di dalamnya ada tiga etnis memang sesuatu yang butuh kerja keras dalam menyatukan dalam suasana kekeluargaan. Artinya potensi konflik itu ada, tetapi dapat diselesaikan oleh pemerintah desa lewat pendekatan keagamaan dan pendekatan musyawarah di kantor desa.

Untuk mengetahui lebih lanjut kita perlu menghadirkan informan penelitian lain di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat desa Tri Rukun belum pernah terjadi konflik antaretnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa sampai dengan saat ini ketiga etnis hidup berdampingan dan saling menghargai dan bekerja sama. Provakator yang ingin merusak stabilitas desa kami belum ada, dan kalaupun ada warga masyarakat desa Tri Rukun tidak terpengaruh dengan issu tersebut, salah satu contoh tentang kejadian di negara India dan di negara Yanmar tidak berpengaruh terhadap issu dari negaara India tersebut yang memperlakukan etnis lain diluar agama hindu dengan tindakan diskriminatif" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari informan penelitian terhadap pertanyaan tentang indikator isu separatisme di Desa Tri Rukun, memberikan petunjuk bahwa di desa Tri Rukun gerakan separatisme tidak pernah terjadi di desa Tri Rukun. Fakta ini ditunjukan oleh hasil observasi di lapangan yang memperlihatkan kondisi aktual warga masyarakat desa Tri Rukun melakukan interaksi sosial secara baik antarsesama etnis yang ada di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang perilaku sosial sosial pertanyaan ini dikonfirmasi kepada informan penelitian diarahkan kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun, generasi mudah dipersatukan lewat karang taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada karang taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku me-nyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas Desa Tri Rukun. Melalui karang taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penye-lenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam karang taruna. Jadi seandainya ada gerakan separatisme warga masyarakat khususnya generasi mudah tidak akan terpengaruh oleh issu ataupun gerakan separatis yang ingin membuat desa kami terpecah belah" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Memang bila dilihat dari potensi itu ada gangguan stabilitas pertahanan, tetapi dengan jawaban informan di atas sepertinya gerakan separatis baik dari orang luar desa Tri Rukun maupun dari dalam desa Tri Rukun tidak akan bisa merusak hubungan interaksi sosial yang sudah sekian

lama dibangun oleh warganya sesuai dengan nama desanya Tri Rukun. Dengan nama desa inipun sudah efektif dalam menjaga stabilitas pertahanan warga masyarakat desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dengan demikian kondisi desa Tri Rukun dapat dikatakan secara kualitatif dengan indeks sangat tangguh dalam menghadapi gerakan separatisme yang akan memecah hubungan persaudaraan antaretnis Bali dengan etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa. Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa ketahanan wilayah pada dimensi pertahanan di desa Tri Rukun sampai dengan saat ini masih tetap terjaga dan terpelihara hubungan harmonis dalam membangun negara multikulturalisme.

Untuk menindaklanjuti penelusuran tentang kondisi ketahanan wilayah tidak hanya berhenti pada indikator gerakan separatisme, tetapi masih ada indikator lain yang dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengukur secara kualitatif tentang kondisi ketahanan wilayah pada dimensi pertahanan di antaranya dapat kita lihat di bawah ini.

2. Etnonasionalisme

Etnonasionalisme merupakan paham kebangsaan yang didasarkan pada sentimen suku, ras, agama sebagai dasarnya. Berangkat dari konsepsi etnonasionalisme di atas menunjukkan paham ini merupakan lawan dari gerakan nasionalisme yang menganjurkan bahwa kita bangsa Indonesia menanggalkan sikap negatif dari nagara *Nation State*. Sebagai negara bangsa sudah seharusnya perasaan sentimen kepada etnis lain, agama, ras tidak dikedepankan pada sikap warga negara Indonesia sehingga itu perlu kita menghilangkan sikap negatif

sebagaimana yang menjadi konsepsi daripada pengertian etno nasionalisme.

Bila bangsa kita keluar dari sikap negatif dalam memecah belah bangsa ini, maka dapat dikatakan stabilitas nasional atau wilayah pada dimensi pertahanan negara secara kualitatif dapat dikatakan sangat tangguh, dan bila sikap etno nasionalisme itu masih ada pada bangsa dan negara kita, berarti kondisi ketahanan nasional atau wilayah kita masih dianggap rawan.

Dengan demikian, sikap kita sebagai warga masyarakat yang menghendaki sikap nasionalisme mempertanyakan kepada pemerintah tentang upayanya dalam menghilangkan sikap negatif dari etno nasionalisme hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Yang perlu dipertanyakan bagaimana upaya dari pemerintah dalam menghilangkan sikap negatif itu. Demikian juga dengan di daerah Kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari tentang sikap etno nasionalisme pada kalangan warga masyara-katnya. Untuk melihat kondisi pertahanan dilihat melalui indikator sikap etno nasionalisme di desa Tri Rukun hanya dapat diketahui melalui riset.

Dengan risetlah kita dapat membuktikannya apakah sikap etnonasionalisme masih ada di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di desa Tri Rukun sebagai desa yang didiami oleh ketiga etnis (Etnis Bali, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa).

Untuk menelusuri kondisi tersebut marilah kita analisis hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian di bawah ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala Desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

"Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap menjaga stabilitas pertahanan. Sifatnya gangguan stabilitas mengarah kepada perpecahan antaretnis belum pernah terjadi di desa kami. Sikap etno nasionalisme sebagaimana penjelasan penanya tidak pernah hadir di kalangan generasi mudah atau pada kalangan masyarakat kebanyakan, mereka menganggap warga masyarakat desa Tri Rukun sebagai satu keluarga besar yang mengedepankan sikap saling menghargai dan saling menghormati antaretnis Bali, etnis lokal Gorontalo dengan etnis Minahasa" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan sikap etno nasionalisme warga masyarakat desa Tri Rukun tidak pernah terjadi fakta-fakta di lapangan akan menjadi saksi dari perjalanan sejarah tentang prinsip-prinsip model negara multikulturalisme dapat berjalan dengan baik di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi etno nasionalisme di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lain sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dalam kehidupan keagamaan, dalam mengelola pertanian bahkan dalam usaha perdagangan pun mereka merasa bersaudara" (wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari informan penelitian terhadap pertanyaan tentang indikator etnonasionalisme di Desa Tri Rukun, memberikan petunjuk bahwa di Desa Tri Rukun sikap etnonasionalisme tidak pernah terjadi di Desa Tri Rukun. Fakta ini ditunjukan oleh hasil observasi di lapangan yang memperlihatkan kondisi aktual warga masyarakat desa Tri Rukun melakukan interaksi sosial secara baik antarsesama etnis yang ada di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang sikap etnonasionalisme pertanyaan ini kami konfirmasi kepada informan penelitian kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas Desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak muncul karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Dengan demikian, jawaban akan sikap etnonasionalisme pada warga masyarakat desa Tri Rukun agak sulit muncul di kalangang warga masyarakat desa Tri Rukun, karena ketiga etnis tersebut hidup berdampingan dan lagi pula generasi mudahnya selalu berkomunikasi

melalui kegiatan yang bertujuan menyatukan antaretnis di desa Tri Rukun. Apalagi kegiatan karang Taruna selalu mendapat *support* dari pemerintah desa berupa anggaran kegiatan untuk pelaksanaan olahraga dan kesenian. Melalui kegiatan karang Taruna ini, generasi mudah dari ketiga etnis dipertemukan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Karang Taruna.

Berdasarkan kondisi aktual hasil jawaban informan penelitian di atas menunjukkan desa Tri Rukun secara kualitatif indeks ketahanan wilayah pada dimensi pertahanan negara masih pada posisi sangat tangguh. Ini memberikan gambaran bahwa kehidupan antaretnis Bali dan etnis lokal Gorontalo serta etnis Minahasa tidak terjadi sikap etnonasionalisme yang akan mengganggu stabilitas kerukunan sosial antaretnis Bali, etnis lokal Gorontalo dengan etnis Minahasa di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

3. Sikap Etnosentrisme

Etnosentisme adalah suatu persepsi yang dimiliki kebudayaan yang mereka miliki tiap individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang mereka miliki lebih baik dari budaya lainnya atau dapat dikatakan etnosentrisme itu adalah fanatisme suku bangsa.

Pengertian lain tentang etnosentrisme, yaitu penilaian terhadap kebudayaan lain di atas dasar nilai dan standar budayanya orang etnosentrisme kelompok lain relatif pada kelompok dan kebudayaannya khususnya jika berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan dan agama, etnosentrisme ini mungkin terkadang tampak maupun tidak tampak meskipun ini dianggap sebagai kecenderungan alamiah.

Berangkat dari pengertian konsepsi di atas maka sikap etnosentrisme tidak dapat diterima dalam pergaulan sosial antaretnis, karena sikap ini dapat menjadi ancaman pertahanan negara. Mengapa bila sikap ini dikembangkan oleh warga masyarakat dapat berakibat pada sebuah perpecahan hubungan baik antaretnis di Indonesia.

Untuk melihat apakah sikap ini ada pada masyarakat kita, marilah kita telusuri pernyataan dari para informan penelitian di lokasi penelitian yang telah dihubungi penelitian di bawah ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap menjaga stabilitas pertahanan. Sifatnya gangguan stabilitas mengarah kepada perpecahan antaretnis belum pernah terjadi di desa kami. Sikap *etnosentrisme* sebagaimana penjelasan penanya tidak pernah hadir di kalangan generasi mudah atau pada kalangan masyarakat kebanyakan, mereka menganggap warga masyarakat Desa Tri Rukun sebagai satu keluarga besar yang mengedepankan sikap saling menghargai dan saling menghormati antaretnis Bali, etnis lokal Gorontalo dengan etnis Minahasa" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan sikap etno sentrisme warga masyarakat desa Tri Rukun tidak pernah terjadi di desa Tri Rukun justru ketiga etnis yang berbeda agama ini selalu menjunjung tinggi kepada penghargaan tradisi kepada ketiga etnis yang ada di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi etno sentrisme di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lain sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dalam kehidupan keagamaan, dalam mengelola pertanian bahkan dalam usaha perdagangan pun mereka merasa bersaudara sehingga sikap etnos sentrisme yang mononjolkan tradisi lebih tinggi pada tradisi etnis lain tidak pernah ada, justru ketiga etnis merasa semua tradisi yang ada kepada tiga etnis di desa Tri Rukun harus mereka hormati sehingga tidak muncul sikap etno sentrisme tersebut di kalangan warga kami" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menambah keyakinan kita memang benar di Desa Tri Rukun sikap etnos sentrisme yang dapat memecah belah hubungan di antara tiga etnis yang ada di Desa Tri Rukun tidak pernah terlintas dalam benak warga masyarakat Desa Tri Rukun. Dengan sikap positif yang selalu ditunjukan oleh ketiga etnis di desa Tri Rukun membuat desa Tri Rukun sampai dengan saat ini terpelihara hubungan harmonis antara tiga etnis Gorontalo, etnis Bali dan etnis Minahasa.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang sikap etnosentrisme pertanyaan ini kami konfirmasi kepada informan penelitian kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Di Desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas Desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak muncul karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna. Kegiatan yang dilaksanakan melalui karang taruna menghapus sikap-sikap negatif dalam menonjolkan etnis tertentu saja sehingga generasi mudah dan warga masyarakat kami menganggap ketiga etnis memiliki tradisi sendiri-sendiri wajib dihormati oleh siapapun warga masyarakat Desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Sikap yang ditunjukan oleh warga masyarakat desa Tri Rukun di atas memang di desa Tri Rukun tidak nampak sikap negatif dari hubungan ketiga etnis karena ketiganya memiliki sikap saling menghargai dan menghormati tradisi masing-masing etnis. Dengan sikap positip yang ada pada warga masyarakat desa Tri Rukun telah membantu pemerintah Kabupaten Boalemo dalam membangun negara multikulturalisme di wilayahnya.

Apa yang terjadi di desa Tri Rukun pun dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaretnis di wilayahnya sebagai berikut.

"Pemerintah Desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah

Kabupaten Boalemo) di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap etno sentrisme tidak pernah ada pada sikap warga desanya" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian menunjukkan bahwa sikap etno sentrime tidak pernah ada pada warga masyarakat desa Tri Rukun. dengan hasil jawaban para informan penelitian di atas menujukan secara keseluruhan informan memberikan pendapat yang sama terhadap sikap warganya yang tidak mengarah kepada sikap etno sentrime. Dengan pernyataan para informan penelitian ini membuktikan ada hubungannya antara kondisi harmonis yang saat ini terbangun di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

4. Sikap Egosentrisme

Dalam kamus bahasa Indonesia egosentrisme di defenisikan sebagai sifat dan kelakuan yang selalu menjadikan diri sendiri sebagai pusat segala hal. Sedangkan dalam Wikipedia, istilah egosentrisme (*egocentrim)* disebutkan berasal dari kata bahasa Yunani dan latin "ego" yang artinya saya, aku, atau diri. Egosentrisme merupakan istilah psikologi yang bermakna diferensiasi yang tidak sempurna antar diri *(The self)* dengan dunia diluar diri (*The world),* termasuk orang lain; kecenderungan untuk melihat *(perceive),* memahami (*understand),* dan menafsirkan *(interpref),* dunia menurut pandangan dirinya.

Dalam kamus istilah psikologi (Kartono dalam Chaplin, 2008: 160), egosentrisme didefinisikan sebagai menyangkut diri sendiri, keasikan terhadap diri sendiri; menurut Piaget. Berkaitan dengan kemampuan berbicara dan berpikir yang diarahkan pada kebutuhan pribadi. Sementara egosentrisme didefi-nisikan sebagai kecenderungan menilai objek-objek atau peristiwa–peristiwa berdasarkan kepentingan pribadi dan menjadi kurang sensitive terhadap kepentingan-kepentingan atau hal-hal yang menyangkut orang lain; menurut Piaget, merupakan ketidakmampuan memahami bahwa orang lain juga mempunyai kepentingan atau pandangan yang mungkin berbeda dengan yang dimilikinya (Kartono & Gulo dalam Chaplin 2003: 160. Shafter (2009) mendefenisikan egosentrisme sebagai kecenderungan untuk memandang dunia dari perspektif pribadi seseorang tanpa menyadari bahwa orang lain biasa memiliki sudut pandang yang berbeda.

Dari beberapa pengertian umum yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa egosentrisme adalah kemampuan persepsi yang terbatas pada kepentingan dan/atau kebutuhan pribadi, tidak berorientasi pada pemisahan/pembedaan antara diri sendiri dengan orang atau objek lain (Fauzi, 2010) (*Ethese UIN Malang ac.id* dalam *Google egosentrisme*).

Berdasarkan uraian definisi tentang egosentrisme peneliti dapat mengambil dasar bahwa sikap egosentrisme merupakan sikap yang ada pada diri seseorang yang bersifat negatif di dalam menjalin interkasi sosial. sikap ini dapat menjadi potensi terjadinya gesekan sosial bila berada pada kehidupan bersama dengan etnis lain.

Harapan dalam kehidupan bersama antaretnis yang berbeda agama adalah kita harus hidup dalam suasana memegang prinsip model negara multikulturalisme dengan tujuan kehidupan bersama dengan etnis yang berbeda harus lebih mengedepankan sikap-sikap positif dalam menjaga kehidupan harmonis di antara etnis yang berbeda dalam suatu komunitas bersama.

Prinsip model negara multikulturalisme itu adalah selalu mengedepankan sikap egalitarian kepada semua etnis yang berbeda keyakinan, berbeda agama dan bahkan berbeda ras. Sikap ini lah yang salalu diharapkan dalam pergaulan antaretnis dengan tujuan supaya kelangsungan dan kehidupan satu negara tidak mengalami kegagalan dalam menyatukan warga negaranya dalam suatu kehidupan bersama dalam bernegara. Dalam arti kita bangsa dan negara Indonesia tidak menghendaki negara kita mengalami apa yang disebud dengan *failed State (*negara gagal) sebagaimana yang dialami negara-negara seperti Unisoviet, Yugoslafia, dll).

Untuk menelusuri fenomena etnosentrisme di Desa Tri Rukun marilah kita simak apa yang dikatakan oleh para informan penelitian di bawah ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap terjaga stabilitas sosial. Sifatnya gangguan stabilitas mengarah kepada perpecahan antaretnis belum pernah terjadi di desa kami. Sikap *egosentrisme* di kalangan generasi mudah atau pada kalangan masyarakat tidak pernah ditemukan, mereka menganggap warga masyarakat desa Tri Rukun sebagai satu keluarga besar yang mengedepankan

sikap saling menghargai dan saling menghormati antaretnis Bali, etnis lokal Gorontalo dengan etnis Minahasa" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan sikap egosentrisme warga masyarakat Desa Tri Rukun tidak pernah terjadi di Desa Tri Rukun justru ketiga etnis yang berbeda agama ini selalu menjunjung tinggi kepada penghargaan tradisi kepada ketiga etnis yang ada di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi egosentrisme di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lain sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat Desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dalam kehidupan keagamaan, dalam mengelola pertanian bahkan dalam usaha perdagangan pun mereka merasa bersaudara sehingga sikap ego sentrisme yang mononjolkan tradisi lebih tinggi pada tradisi etnis lain tidak pernah ada, justru ketiga etnis merasa semua tradisi yang ada kepada tiga etnis di Desa Tri Rukun harus mereka hormati sehingga tidak muncul sikap egosentrisme tersebut di kalangan warga kami dan ini ditujukan dengan kerja sama yang terbangun kepada warga kami dalam melaksanakan hari-hari besar keagamaan walaupun penduduk mayoritas etnis Bali beragama hindu warganya tidak merasa sebagai etnis superi-oritas bergaul dengan etnis lokal" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menambah keyakinan kita memang benar di desa Tri Rukun sikap egosentrisme yang dapat memecah belah hubungan di antara tiga etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak pernah terlintas dalam benak warga masyarakat desa Tri Rukun. Dengan sikap positif yang selalu ditunjukan oleh ketiga etnis di desa Tri Rukun membuat desa Tri Rukun sampai dengan saat ini terpelihara hubungan harmonis antara tiga etnis Gorontalo, etnis Bali dan etnis Minahasa.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang sikap etnosentrisme pertanyaan ini kami konfirmasi kepada informan penelitian kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas Desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak muncul karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna. Kegiatan yang dilaksanakan melalui karang taruna menghapus sikap-sikap negatif dalam menonjolkan etnis tertentu saja sehingga generasi mudah dan warga masyarakat kami menganggap ketiga etnis memiliki tradisi sendiri-sendiri wajib dihormati oleh siapapun warga masyarakat Desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Sikap yang sama dengan penjelasan pada penjelasan sebelumnya terhadap etno nasionalisme pun senada dengan jawaban ketika diperanyakan sikap etnosentrisme ditunjukan oleh warga masyarakat desa Tri Rukun di atas memang di Desa Tri Rukun tidak nampak sikap negatif dari hubungan ketiga etnis karena ketiganya memiliki sikap saling menghargai dan menghormati tradisi masing-masing etnis. Dengan sikap positip yang ada pada warga masyarakat desa Tri Rukun telah membantu pemerintah Kabupaten Boalemo dalam membangun negara multikulturalisme di wilayahnya.

Apa yang terjadi di desa Tri Rukun pun dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaretnis di wilayahnya sebagai berikut.

> "Pemerintah Desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo) di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun Desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat ketika ada potensi gesekan antarsuku ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif seperti etnonasionalisme, egosentrisme" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan upaya pemerintah Desa Tri Rukun dalam mencegah sifat-saifat negatif yang akan dapat memcah hubungan keharmonisan

antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali di atas memberilkan pesan bahwa Desa Tri Rukun sikap psikologis yang ada pada warga masyarakat desa Tri Rukun terhadap sikap egosentrisme dapat di atasi melalui Forum Komunikasi umat beragama yang selalu mensosialisaikan bahagaimana kehidupan harmonis sebagai salah satu dalam menjalankan prinsip negara multikultura-lisme. Dengan adanya pertemuan rutin yang selalu diselenggarakan oleh pemerintah Desa Tri Rukun bersama warganya dapat meminimalisasi sikap-sikap negatif yang berpotensi dalam memecah belah warga masyarakat Desa Tri Rukun.

Pernyataan kepala desa Tri Rukun senada dengan pernyataan informan penelitian Ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari tentang sikap Primordialisme di Desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Sikap pemerintah Kecamatan dalam menang-gulangi sikap sentimen pada etnis transmigrasi pemerintah kecamatan selalu mengundang kepala-kepala desa yang ada di Wilayah Kecamatan Wonosari di kantor camat dan selalu menekankan kepada pihak kepala desa membangun sikap multikulturalisme. Namun, intervensi kecamatan selalu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang selalu dipusatkan di kecamatan Wonosari dengan tujuan agar supaya warga masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosari menyaksikan hari-hari besar keagamaan dari etnis lain dengan tujuan kegiatan ini dalam rangka untuk menyatukan sikap saling menghargai dan saling menghormati antaretnis yang ada di Kecamatan Wonosari. Dipertegas juga oleh pihak kecamatan bahwa Kecamatan Wonosari khususnya desa Tri Rukun tidak pernah terjadi gesekan antaretnis baik yang disebabkan oleh tradisi, keyakinan beragama, usaha ekonomi dan politik yang

ada di desa Tri Rukun, ditegaskan kembali bahwa pihak pemerintah kecamatan tidak pernah menangani konflik antaretnis di wilayahnya semuanya berjalan normal" (Wawancara tanggal 3 Juni 2020).

Berdasarkan pernyataan informan dari pihak kecamatan Wonosari dapat menunjukkan kepada kita bahwa di desa Tri Rukun dan desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh penduduk transmigrasi tidak pernah ada gesekan antaretnis, semuanya berjalan normal. Kondisi ini terjadi karena ada sinegitas antara pemerintah daerah kabupaten Boalemo, pemerintah kecamatan serta peran serta pemerintah desa dalam mewujudkan stabiltas wilayah di desa Tri Rukun sehingga peran serta pemerintah daerah komitmen menegakan negara multikulturalisme dapat berinplikasi terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk melihat lebih lanjut bagaimana kondisi pertahanan di desa Tri Rukun dapat kita lihat kembali melalui indikator di bawah ini sebagai berikut.

5. Sikap Primordialisme

Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang di bawah sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepecayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.

Bila dilihat dari secara etimologi dan bahasa, kata primordil atau primordialisme berasal dari dua kata bahasa latin yakni *primus* dan *ordiri.* Kata pri mus artinya pertama, sedangkan kata *ordiri* memiliki arti tenunan atau ikatan, menurut KBBI, definisi primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Primordialisme sebagai identitas sebuah gelongan atau kelompok sosial

merupakan faktor yang penting dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok bersangkutan dalam menghadapi ancaman dari luar. Primordialisme mampu membangkitkan semangat kebangsaan.

Namun, di sisi lain juga ada dampak-dampak negatif dari timbulnya sikap primordialisme ini. Adanya primordialisme juga bisa membangkitkan prasangka buruk serta menyebabkan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial lainnya yang berbeda.

Berdasarkan pengertian konsepsi primordialisme dapat dipahami dari sisi positif dapat membang-kitkan semangat nasionalisme kedaerahan bila terjadi kompetisi olahraga di mana sikap primordialisme dapat memotivasi dalam meraih prestasi misalnya diefent PON, tetapi primordialisme bisa menjadi ancaman bila PON (pekan olahraga Nasional) terjadi konflik dalam pertandingan tersebut. Sikap konflik dalam PON tersebut adalah bentuk sikap negatif dalam mengelola sikap primordialisme.

Untuk menyatukannya sikap primordialisme negatif harus dikelola secara positif dengan mengedepankan sikap primordialis yang mengedepankan sikap multikulturalisme yang positif. Dengan sikap multikulturlisme sikap-sikap primor-dialisme yang negatif tadi akan dapat kita cegah di dalam membentuk warga negara yang multikultural sehingga contoh konflik yang sering terjadi dalam kegiatan PON pada saat momen pertandingan sepak Bola akan berakhir dengan sikap perdamaian sesuai dengan tujuan penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) yang bertujuan menyatukan semua bangsa yang ada di negara Indonesia.

Dalam menelusuri apakah ada sikap-sikap negatif dari primordialisme dapat kita lihat hasil survei di lapangan berdasarkan hasil jawaban informan penelitian di bawah

ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap terjaga stabilitas sosial. Sifatnya gangguan stabilitas mengarah kepada perpecahan antaretnis belum pernah terjadi di desa kami. Sikap *primordialisme* di kalangan generasi mudah atau pada kalangan masyarakat tidak pernah ditemukan, mereka menganggap warga masyarakat desa Tri Rukun sebagai satu keluarga besar yang mengedepankan sikap saling menghargai dan saling menghormati antaretnis Bali, etnis lokal Gorontalo dengan etnis Minahasa. Dengan kesadaran mereka sebagai satu keluarga besar dan disatukan oleh nama desa Tri Rukun sikap primordialisme tidak muncul di kalangan generasi mudah dan mayarakat secara keseluruhan" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan sikap primordialisme bagi warga masyarakat desa Tri Rukun tidak pernah terjadi di desa Tri Rukun justru ketiga etnis yang berbeda agama ini selalu menjunjung tinggi kepada penghargaan tradisi kepada ketiga etnis yang ada di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi primordialisme di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lain sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat Desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dalam kehidupan keagamaan, dalam mengelola pertanian bahkan dalam usaha perdagangan pun mereka merasa bersaudara sehingga sikap primordialisme yang mononjolkan tradisi lebih tinggi pada tradisi etnis lain tidak pernah ada, justru ketiga etnis merasa semua tradisi yang ada kepada tiga etnis di desa Tri Rukun harus mereka hormati sehingga tidak muncul sikap primordialisme tersebut di kalangan warga kami dan ini ditujukan dengan kerja sama yang terbangun kepada warga kami dalam melaksanakan hari-hari besar keagamaan walaupun penduduk mayoritas etnis Bali beragama hindu warganya tidak merasa sebagai etnis superi-oritas bergaul dengan etnis lokal. Sikap primordialisme muncul saat pemilihan kepala desa Tri Rukun tetapi primordialisme yang muncul adalah sikap positif dari primordialisme sehingga yang selalu terpilih adalah etnis Bali sebagai kepala desa Tri Rukun, positifnya semua menerima keputusan hasil pilkades" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020)".

Berdasarkan jawaban informan di atas menambah keyakinan kita memang benar di Desa Tri Rukun sikap primordialisme yang dapat memecah belah hubungan di antara tiga etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak pernah terlintas dalam benak warga masyarakat desa Tri Rukun. Dengan sikap positif yang selalu ditunjukan oleh ketiga etnis di desa Tri Rukun membuat desa Tri Rukun sampai dengan saat ini terpelihara hubungan harmonis antara tiga etnis Gorontalo, etnis Bali dan etnis Minahasa.

Bila kita menelusuri kepemimpinan di desa Tri Rukun memang yang muncul sikap primordialisme tetapi primordialisme mengarah kepada yang positif artinya dengan kepemimpinan kepala desa adalah etnis Bali itu adalah realitas politik yang ada pada Desa Tri Rukun sehingga keputusan pilkades berdasarkan *voting* sebagai

keputusan politik bagi warga masyarakat desa Tri Rukun yang diterima secara baik oleh etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa. Positifnya adalah sikap pemerintah desa yang mengakomodasi seluruh kebutuhan warganya tanpa melihat etnis tertentu. Inilah sikap positif dari sikap primordialisme di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang sikap primordialisme pertanyaan ini kami konfirmasi kepada informan penelitian kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas Desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak muncul karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna. Kegiatan yang dilaksanakan melalui karang taruna menghapus sikap-sikap negatif dalam menonjolkan etnis tertentu saja sehingga generasi mudah dan warga masyarakat kami menganggap ketiga etnis memiliki tradisi sendiri-sendiri wajib dihormati oleh siapapun warga masyarakat Desa Tri Rukun. demikian juga dengan sikap primordialisme di kalangan generasi mudah tidak terlihat pada saat mereka melakukan kegiatan pertandingan olahraga dan kegiatan malam pagelaran seni yang dilaksanakan oleh karang taruna, semuanya aman tidak ada yang menonjolkan tradisinya dan kompetisi olahraga

sesuai dengan yang diharapkan sebagai alat pemersatu bagi generasi mudah di Desa Tri Rukun. Berdasarkan fakta itu saya menyatakan desa Tri Rukun sikap primordialisme dapat diatasi di desa kami" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Sikap yang sama dengan penjelasan pada penjelasan sebelumnya terhadap primordialisme pun senada dengan jawaban ketika diperanyakan sikap primordialisme ditunjukan oleh warga masyarakat Desa Tri Rukun di atas memang di desa Tri Rukun tidak nampak sikap negatif dari hubungan ketiga etnis karena ketiganya memiliki sikap saling menghargai dan menghormati tradisi masing-masing etnis. Demikian juga dengan penyelenggaraan kompetisi dalam pertandingan olahraga dan pagelaran seni yang dilaksanakan oleh Karang taruna semuanya berjalan sesuai dengan harapan yang positip. Dengan sikap positip yang ada pada warga masyarakat desa Tri Rukun telah membantu pemerintah Kabupaten Boalemo dalam membangun negara multikulturalisme di wilayahnya.

Apa yang terjadi di Desa Tri Rukun pun dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaretnis di wilayahnya sebagai berikut.

"Pemerintah Desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo) di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun Desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa,

Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat ketika ada potensi gesekan antarsuku ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif seperti etno nasionalisme, egosentrisme dan sikap primordialisme" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala desa Tri Rukun pemerintah desa pun ikut terlibat di dalam memelihara kerukunan beragama dan keharmonisan antaretnis di desa Tri Rukun. Melalui kegiatan FKUB yang rutin diselenggarakan pemerintah desa Tri Rukun di kantor desa dengan warganya dapat membantu dalam mepererat hubungan persaudaraan warga masyarakat Desa Tri Rukun.

Untuk menelusuri keterlibatan pemerintah desa dalam menjaga hubungan harmonis antaretnis kita menemui informan sampai di kantor camat. Tujuan kami menghadirkanminforman penelitian dari pihak pemerintah kecamatan adalah ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah Kecamatan dalam menjaga hubungan harmonis warga masyarakat di desa Tri Rukun dan di desa- desa yang di tempati oleh warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari tentang sikap Primordialisme di desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi memberikan jawaban sebagai berikut.

"Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini. Salah satu contoh desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri

Rukun, artinya tiga etnis yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semuanya dalam kondisi stabilitas desanya sangat aman" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan penelusuran ketingkat kecamatan mengenai bagaimana sikap primordialisme masyarakat di desa Tri Rukun menemukan petunjuk bahwa warga masyarakat desa Tri Rukun masih dapat di atasi potensi gesekan pada warga masyarakatnya. Semua ini tidak terlepas dari peran pemerintah kecamatan dalam memelihara hubungan harmonis antara warga transmigrasi dengan etnis lokal Gorontalo, ketika ditanya apa yang dilakukan pemerintah kecamatan dalam memelihara hubungan harmonis antaretnis transmigrasi dengan etnis lokal pihak pemerintah kecamatan melalui ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari memberikan keterangan sebagai berikut.

"Pemerintah Kecamatan selalu mengundang kepala desanya ada yang dipimpin oleh kepala desa yang beragama Islam, dan ada juga kepala desa dari umat Islam dan bahkan ada kepala desa dari agama Kristen dalam hal mengatasi potensi gesekan yang ada pada masyarakat, melalui kegiatan rapat koordinasi dengan semua kepala desa pemerintah kecamatan bapak Camat Wonosari selalu berpesan untuk menjaga stabilitas wilayahnya masing-masing dalam menjaga hubungan antaretnis di wilayah kecamatan Wonosari. Bentuk yang lain yang dilakukan pemerintah kecamatan adalah penyelenggaran ritual keagamaan yang dipusatkan di lapangan Kecamatan Wonosari dengan harapan agar semua warga menyaksikan dan mendukung kegiatan ritual yang dilaksanakan oleh warganya yang berbeda etnis, agama dan tradisi" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan keterangan pihak pemerintah kecamatan menunjukkan adanya sinergitas antara pemerintah kabupaten Boaalemo, pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa dalam menjaga hubungan harmonis di desa Tri Rukun sehingga fakta-fakta yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukkan hubungan harmonis selama ini di desa Tri Rukun merupakan kerja kolektif dari pemerintah Kabupaten Boalemo sehingga melalui kegiatan dalam membangun negara multikulturalisme akan dapat dipertahankan oleh generasi kegenerasi. Karena apapun alasannya warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang menjadi tujuan penempatan transmigrasi harus selalu mendapat sentuhan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo sampai ketingkat pemerintahan desa dalam menjaga stabilitas Wilayahnya.

Pernyataan di atas mengisaratkan tidak ada keluarga yang tidak berpotensi konflik, apalagi keluarga besar warga masyarakat desa Tri Rukun sebagian besar sebagai warga Transmigrasi yang banyak memberikan kontribusi bagi pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi pemerintah Kabupaten Boalemo melalui PAD dan pajak itu digunakan kembali dalam membangun daerah kabupaten Boalemo.

Dengan kondisi warga masyarakat warga transmigrasi yang berhasil dalam mengembangkan daerahnya perlu kita apresiasi dan dijaga stabilitas wilayahnya. Namun, semua itu terbantahkan dengan hasil survei di lapangan bahwa warga etnis lokal dan etnis transmigrasi hidup bersama dalam kehidupan sebagai keluarga besar dengan prinsip-prinsip negara multikulturalisme sehingga warga masyarakat kecamatan Wonosari warga Transmigrasi khususnya di Desa Tri Rukun hidup bersama tanpa ada gesekan.

Semua prestasi ini terwujud karena pemerintah daerah kabupaten Boalemo sampai ketingkat desa menjaga stabilitas wilayahnya dengan model negara multikulturalisme. Intervensi pemerintah daerah sampai di tingkat pemerintahan desa lebih menambah kesadaran warganya tentang arti pentingnya hidup dalam kebersamaan di antara etnis yang berbeda dalam membangun daerah kabupaten Boalemo secara bersama.

F. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun dalam Perspektif Keamanan Wilayah

Dimensi keamanan wilayah merupakan variabel terakhir dari indeks ketahanan wilayah di suatu daerah. Artinya menentukan kondisi ketahanan wilayah di suatu daerah harus dilihat pada variabel keamanan wilayah karena bila keamanan wilayah pada posisi rawan, maka seluruh aktivitas ideologi, politik, perekonomian, sosial budaya akan terganggu. Untuk itu, dalam mengukur indeks ketahanan wilayah harus secara konfrehensip dan bukan parsial di dalam menentukan ketahanan wilayah setiap daerah di Indonesia.

Untuk melihat kondisi ketahanan wilayah melalui indeks keamanan wilayah di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo dapat kita telusuri melalui indikator keamanan di bawah ini sebagai berikut.

1. **Gesekan Antargenerasi Mudah**

   Gesekan antargenerasi mudah akan menjadi ancaman bagi keamanan di daerah. Gesekan itu terjadi antarmuda-mudi, seperti kelompok geng motor, geng kelompok etnis, gesekan kompetisi dalam kegiatan olahraga dan kesenian, dan lain-lain.

Untuk menentukan bahwa wilayah kabupaten Boalemo khususnya warga yang ada di desa Tri Rukun yang didiami oleh ketiga etnis yaitu etnis Bali sebagai mayoritas dan etnis lokal Gorontalo, serta etnis Minahasa dapat kita lihat melalui hubungan generasi mudahnya. Di daerah lain banyak konflik terjadi karena gesekan antarpemuda dan memicu kepada konflik horizontal sehingga harapannya konflik bermula pada generasi mudah ini tidak terjadi di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Kondisi kisruh antargenerasi mudah dapat diredam bila pemerintah daerah dan generasi mudah saling memahami karakter masing-masing. Bila ini diabaikan maka yang terjadi adalah konflik sehingga menurut konsepsi ketahanan nasional konflik dapat diatasi bila kita menyiapkan strategi untuk itu. Bila dibiarkan, gesekan antarpemuda yang berbeda etnis akan mengancam kepada keamanan wilayah sehingga harapannya hubungan antargenerasi mudah antaretnis di desa Tri Rukun harus berjalan dengan normal.

Bila hubungan generasi mudah berjalan normal, maka dapat dikatakan stabilitas wilayah pada bidang keamanan dianggap tangguh. Untuk itu, marilah kita telusuri bagaimana kondisi keamanan dari sisi hubungan antarpemudah di Desa Tri Rukun melalui informan penelitian di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi tentang kondisi gesekan generasi mudah, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap terjaga

> stabilitas sosial, terutama potensi konflik berawal dari generasi mudah di desa Tri Rukun masih terjaga melalui kegiatan Karang Taruna" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan generasi mudah di desa Tri Rukun dapat dipersatukan melalui organisasi Karang taruna yang menjadi pembina kegiatan adalah pemerintah desa Tri Rukun sehingga hubungan antargenerasi mudah yang berbeda etnis dapat teratasi di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi gangguan keamanan di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lain sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Generasi mudah di desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dan ini ditunjukan melalui kegiatan Karang taruna di desa Tri Rukun generasi mudahnya saling mendukung satu sama lain dalam mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kebiasaan generasi mudah bertemu dalam wadah karang Taruna telah meminimalisasi gesekan antarpemudah berbeda etnis dan saya tegaskan lagi di desa kami gesekan antarpemuda tidak pernah melebar menjadi konflik horizontal karena semua bergabung dalam kegiatan karang taruna kalaupun ada dapat diselesaikan secara musyawarah" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menambah keyakinan kita memang benar di Desa Tri Rukun gesekan antargenerasi mudah tidak pernah terjadi sehingga hubungan generasi mudah di antara tiga etnis yang ada di

Desa Tri Rukun masih tetap terjaga dari gangguan keamanan konflik antargenerasi mudahnya.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang gesekan antargenerasi mudah di Desa Tri Rukun kami konfirmasi kepada informan penelitian kepada ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak muncul karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna. Kegiatan yang dilaksanakan melalui karang taruna menghapus sikap-sikap negatif dalam menonjolkan etnis tertentu saja sehingga generasi mudah dan warga masyarakat kami menganggap ketiga etnis memiliki tradisi sendiri-sendiri wajib dihormati oleh siapapun warga masyarakat desa Tri Rukun. Demikian juga dengan sikap primordialisme di kalangan generasi mudah tidak terlihat pada saat mereka melakukan kegiatan pertandingan olahraga dan kegiatan malam pagelaran seni yang dilaksanakan oleh karang taruna, semuanya aman tidak ada yang menonjolkan tradisinya dan kompetisi olahraga sesuai dengan yang diharapkan sebagai alat pemersatu bagi generasi mudah di Desa Tri Rukun. Berdasarkan fakta itu saya menyatakan desa Tri Rukun sikap primordialisme dapat diatasi di desa kami" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas memperkuat bahwa generasi mudah di desa Tri Rukun dapat diatasi melalui organisasi Karang Taruna yang dibina oleh pemerintah desa Tri Rukun. Wadah inilah yang membantu meminimalisasi gesekan antarpemuda yang berbeda etnis di desa Tri Rukun.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaretnis di wilayahnya sebagai berikut.

> "Pemerintah Desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun Desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat ketika ada potensi gesekan antarsuku ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif, seperti etno nasionalisme, egosentrisme dan sikap primor-dialisme" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala desa Tri Rukun pemerintah desa pun ikut terlibat di dalam memelihara kerukunan beragama dan keharmonisan antaretnis di desa Tri Rukun. Melalui kegiatan FKUB yang rutin diselenggarakan pemerintah desa Tri Rukun di kantor desa dengan warganya khususnya kalangan generasi mudah dapat membantu dalam mempererat hubungan persaudaraan warga masya-rakat Desa Tri Rukun.

Untuk menelusuri keterlibatan pemerintah desa dalam menjaga hubungan harmonis antaretnis kita menemui informan penelitian sampai pada staf kantor camat Wonosari. Tujuan kami menghadirkan informan penelitian dari pihak pemerintah kecamatan adalah ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah Kecamatan dalam menjaga hubungan harmonis warga masyarakat khususnya kalangan generasi mudah di desa Tri Rukun dan di desa-desa lain yang di tempati oleh warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari ketikat dikonfirmasi kondisi tentang konflik antargenerasi mudah di Desa Tri Rukun memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini. Salah satu contoh desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri Rukun artinya tiga etnis yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semuanya dalam kondisi stabilitas desanya sangat aman. Yang dimaksudkan warga masyarakat termasuk kalangan generasi mudahnya yang masih darah mudah yang berpotensi melakukan perilaku menyimpang. Mereka ini yang perlu mendapat perhatian bagaimana menjaga hubungan antaretnis" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Memang perhatian pemerintah daerah selalu pada potensi yang sangat rentang terjadinya gesekan yakni generasi mudahnya yang akan selalu menjadi perhatian pemerintah Kecamatan dalam menjaga stabilitas wilayahnya sehingga Pemerintah kecamatan selalu

melakukan pertemuan rutin melalui kegiatan FKUB dalam mensosialisasikan tentang pentingnya hidup dalam kebersamaan antaretnis, antaragama dan antarras dalam membangun daerah. Melalui kegiatan ini dapat meminimalisasi gang-guan keamanan yang dilakukan generasi mudah yang berbeda etnis, berbeda keyakinan dan berbeda tradisinya di desa Tri Rukun dan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan Wonosari.

Untuk menelusuri lebih lanjut tentang ketahanan wilayah pada dimensi keamanan dapat kita lihat melalui indikator keamanan lainnya sebagai berikut.

2. Gesekan Antaretnis

Gesekan antaretnis menjadi penting dalam survei ini, karena ketika hubungan antaretnis di desa Tri Rukun mengalami potensi gesekan akan mempercepat dalam penanganan bagi pemerintah desa. Biasanya konflik horizontal terjadi bila potensi gesekan itu diabaikan oleh pemerintah desa, pemerintah desa menganggap potensi itu hanya fenomena sesaat. Menurut konsepsi ketahanan nasional bila dalam suatu wilayah gesekan antaretnis terjadi lalu kita mengabaikan akan menambah potensi akan melebar kepada konflik horizontal bahkan menjurus kepada konflik vertikal dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

Untuk memperjelas sebenarnya apa artinya konflik kita definisikan dulu pengertian konflik menurut para ahli konflik adalah sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Alo liliweri konflik adalah

bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain.

Berangkat dari definisi konflik tersebut kehidupan bersama antaretnis memang sulit dipersatukan dalam tujuan yang sama pada satu kepentingan sehingga potensi konflik selalu ada dalam hubungan antaretnis yang hidup bersama dalam satu wilayah. Kesadaran sikap multikulturalismelah yang akan dapat meminimalisasi perbedaan tujuan dalam melaksanakan suatu aktivitas bersama dengan etnis lain. Bila sikap ini tidak kita tunjukan yang akan terjadi adalah konflik antaretnis pada suatu wilayah atau daerah bahkan negara.

Sebagai contoh apa yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku dan daerah lain yang mengalami konflik antaretnis disebabkan beda kepentingan yang tidak terdeteksi potensi konflik antaretnis oleh pemerintah daerah. Pendeteksian potensi konflik terkesan lambat pemetaannya mengakibatkan konflik masih tetap berlangsung. Oleh karena itu, dalam konsepsi ketahanan nasional perlu kita memahami potensi-potensi konflik antaretnis pada satu wilayah yang warganya berasal dari berbagai suku, agama, budaya dan ras dapat diketahui sejak dini sehingga konflik tidak akan berkelanjutan menjadi konflik horizontal maupun konflik vertikal.

Mengapa konflik terjadi setelah ditangani pemerintah, karena pemerintah baru berbuat setelah ada permasalahan konflik antaretnis. Semestinya konflik dapat teratasi bila kita selalu mengenali potensi-potensi konflik, lalu dilakukan *treatment* dalam penanganannya. Jangan menunggu potensi menjadi konflik. Kita tidak mau pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan hanya

seperti pemadam kebakaran, bertindak bila sudah terjadi. Harapan kita kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan konflik, selalu melihat potensi terjadinya konflik, lalu menyelesaikannya dengan strategi model negara multikulturalisme.

Analisis kita tentang konflik biasanya pula terjadi karena *treatment* yang diberikan pemerintah pada daerah-daerah yang hidup bersama di antara berbagai etnis tidak mengikuti prinsip-prinsip model negara multikulturalisme. Dalam arti mengabaikan prinsip-prinsip multikulturalisme yang selalu mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan serta penghargaan kepada kearifan lokal. Pemerintah mengabaikan sikap multikulturalisme ini sebagai Contohnya penanganan konflik antara pemerintah pusat dengan GAM. Gerakan separatis GAM berakhir ketika pemerintah pusat memberikan dan menyerahkan pemerintah Aceh melaksanakan kearifan lokal dengan menerapkan hukum agama di daerah Aceh. Ini sesuai dengan pasal 18 UUD NRI 1945, bahwa negara harus menghormati daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Provinsi Aceh merupakan daerah Istimewa yang harus dihormati oleh negara kearifan lokalnya. Dengan strategi model negara multikulturalisme GAM tidak lagi mengangkat senjata melawan pemerintah pusat. Demikan halnya dengan penanganan konflik etnis di berbagai daerah konflik. Pemerintah daerah sudah seharusnya membangun hubungan daerahnya dengan model negara multikulturalisme sehingga potensi konflik tidak akan menjadi konflik antaretnis sebagaimana yang terjadi kepada daerah konflik seperti Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku dll.

Untuk melihat kondisi gesekan antaretnis alangkah baiknya kita mengenali potensi-potensi konflik antaretnis melalui hasil survei sebagai pemberi informasi diawal kepada pemerintah daerah tentang apakah di daerah Kabupaten Boalemo khususnya di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari ada potensi konflik antaretnisnya. Bila ditemukan potensi gesekan itu ada, maka pemerintah daerah Kabupaten Boalemo, melalui pemerintahan Kecamatan bekerja sama dengan pemerintah desa segera melakukan *treatment* pada potensi konflik etnis tersebut.

Membuktikan apakah ada potensi konflik di desa Tri Rukun marilah kita menganalisis hasil penelusuran peneliti kepada beberapa informan penelitian di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi tentang kondisi gesekan antaretnis, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini Desa Tri Rukun masih tetap terjaga stabilitas sosial, terutama potensi konflik karena perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat dilihat ketika warga kami melakukan usaha perdagangan, usaha perdagangan berjalan dengan baik, begitu juga pada saat pemilihan kepala desa semua warga menerima keputusan hasil pemilihan" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan warga masyarakat di desa Tri Rukun masih dalam kondisi saling menghargai dan bekerja sama dalam menjalankan aktivitas dalam menunjang kehidupannya, belum ada benturan yang mengarah kepada kompetisi negatif. Dan ini disampaikan secara tegas bahwa warga desa Tri Rukun

potensi konflik antaretnis pada saat warga melakukan usaha perdagangan dan pemilihan kepala desa secara langsung pun warganya tidak mengalami permasalahan dalam menyatukan tujuan dalam membangun desanya.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi gesekan antaretnis di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lainnya sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat di Desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dan ini ditunjukan melalui kegiatan Karang taruna di desa Tri Rukun generasi mudahnya saling mendukung satu sama lain dalam mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kebiasaan generasi mudah bertemu dalam wadah karang Taruna telah meminimalisasi gesekan antarpemuda berbeda etnis dan saya tegaskan lagi di desa kami gesekan antaretnis tidak pernah melebar menjadi konflik horizontal karena semua bergabung dalam kegiatan karang taruna kalaupun ada dapat diselesaikan secara musyawarah. Demikan juga dengan warga masyarakat umum baik tua dan mudah sama-sama bekerja sama dalam membangun desa dengan penuh persaudaraan sehingga saya dengan tegas warga desa Tri Rukun belum pernah terjadi konflik antaretnis lokal dengan etnis Bali dan etnis Minahasa di desa kami" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menambah keyakinan kita memang benar di desa Tri Rukun gesekan antaretnis tidak pernah terjadi sehingga hubungan di antara tiga etnis yang ada di Desa Tri Rukun masih tetap terjaga dan terpelihara hubungan harmonis dari tiga etnis tersebut.

Prestasi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Memang bila dilihat potensi konflik di desa Tri Rukun tidak terjadi, tetapi kita tidak boleh lengah dengan kondisi tersebut. Dapat dikatakan bila kita abai dengan kehadiran dari tiga etnis hidup dalam sau desa yang secara konsepsi ketahanan nasional dan dari terminologi konflik dikatakan potensi konflik ada bila kita berada dengan kelompok lain yang berbeda dengan lingkungan kita. Pesan ini menunjukkan bahwa di Desa Tri Rukun bila dipetakan potensi konflik dapat berawal dari perbedaan etnis yang di tempatkan dalam satu desa, namun mengapa potensi konflik tidak menjadi konflik, karena ada kesadaran dari warganya untuk hidup bersama dan saling menghargai antara etnis satu dengan etnis lainnya. Demikian juga bila pemerintah desa tidak melakukan intervensi kepada warganya melalui kebijakan dalam mempersatukan warganya, dapat diprediksi kondisi kondusif akan berubah menjadi tidak kondusif sehingganya peme-rintah Desa Tri Rukun harus selalu mewaspadai akan potensi konflik yang ada, supaya potensi konflik tidak akan menjadi konflik antaretnis yang penanga-nannya akan membutuhkan energi besar. Istilahnya penanganan konflik sedini mungkin harus kita lakukan di desa Tri Rukun sehingga energi besar tadi tidak akan dialami oleh pemerintah Desa Tri Rukun.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang gesekan antaretnis di Desa Tri Rukun kami konfirmasi kembali kepada informan penelitian ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Di Desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas Desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di Desa Tri Rukun tidak muncul karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna. Kegiatan yang dilaksanakan melalui karang taruna menghapus sikap-sikap negatif dalam menonjolkan etnis tertentu saja sehingga generasi mudah dan warga masyarakat kami menganggap ketiga etnis memiliki tradisi sendiri-sendiri wajib dihormati oleh siapapun warga masyarakat desa Tri Rukun. Demikian juga dengan sikap primordialisme di kalangan generasi mudah tidak terlihat pada saat mereka melakukan kegiatan pertandingan olahraga dan kegiatan malam pagelaran seni yang dilaksanakan oleh karang taruna, semuanya aman tidak ada yang menonjolkan tradisinya dan kompetisi olahraga sesuai dengan yang diharapkan sebagai alat pemersatu bagi generasi mudah di desa Tri Rukun. Berdasarkan fakta itu saya menyatakan desa Tri Rukun sikap primordialisme dapat diatasi di desa kami sehingga konflik antaretnis tidak terjadi" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas memperkuat bahwa di Desa Tri Rukun tidak terjadi konflik antaretnis, upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah pembinaan generasi mudah melalui organisasi karang taruna yang dibina oleh pemerintah Desa Tri Rukun. Wadah inilah yang membantu meminimalisasi gesekan antarpemuda yang berbeda etnis di Desa Tri Rukun.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaretnis di wilayahnya sebagai berikut.

> "Pemerintah Desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat ketika ada potensi gesekan antarsuku ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif, seperti etno nasionalisme, egosentrisme dan sikap primordialisme" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala Desa Tri Rukun pemerintah desa pun ikut terlibat di dalam memelihara kerukunan beragama dan keharmonisan antaretnis di desa Tri Rukun. Melalui kegiatan FKUB yang rutin diselenggarakan pemerintah desa Tri Rukun di kantor desa dengan warganya khususnya kalangan generasi mudah dapat membantu dalam mempererat hubungan persaudaraan warga masyarakat Desa Tri Rukun.

Dengan intensnya pemerintah desa dalam berkomunikasi dengan warganya melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dapat meminimalisasi konflik antaretnis di desa Tri Rukun. Karena FKUB ini memang suatu organisasi yang berpusat di pemerintah kabupaten Boalemo sebagai wadah dalam

menyatukan perbedaan tujuan, kepentingan bagi warga masyarakat yang berbeda etnis, berbeda agama, berbeda ras, berbeda kebudayaan dalam menyatukan visi bersama bangsa dan negara Indonesia dalam membangun negara multikulturalisme dengan slogan Bhihneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu.

Untuk menelusuri keterlibatan pemerintah kecamatan dalam menjaga hubungan harmonis antaretnis yang ada di desa Tri Rukun kita menemui informan penelitian sampai pada staf kantor camat Wonosari. Tujuan kami menghadirkan informan penelitian dari pihak pemerintah kecamatan adalah ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah Kecamatan dalam menjaga hubungan harmonis warga masyarakat khususnya di desa Tri Rukun dan di desa- desa lain yang di tempati oleh warga transmigrasi di wilayah kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari ketika dikonfirmasi kondisi tentang konflik antaretnis di Desa Tri Rukun memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antar etnsi sebagaimana yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku. Salah satu contohnya adalah desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri Rukun artinya tiga etnis yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semuanya dalam kondisi stabilitas desanya sangat aman. Yang

dimaksudkan warga masyarakat termasuk kalangan generasi mudahnya yang masih darah mudah yang berpotensi melakukan perilaku menyimpang. Mereka ini yang perlu mendapat perhatian bagaimana menjaga hubungan antaretnis" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan kunci *(key person)* bahwa warga desa Tri Rukun masih dalam posisi sangat tangguh dalam memelihara hubungan antaretnis. Semua ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo bekerja sama dengan pemerintah kecamatan Wonosari dan pemerintah desa dalam menjaga potensi konflik antaretnis di Desa Tri Rukun dalam membangun negara multikulturalisme.

Prestasi yang gemilang dalam menjaga hubungan harmonis antaretnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo serta etnis Minahasa di desa Tri Rukun selalu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam membina warga desa Tri Rukun sebagai salah satu desa yang di tempati oleh warga Transmigrasi di kecamatan Wonosari. Bila kita hanyut dengan prestasi gemilang dan mengabaikan potensi konflik antaretnis yang ada kondisi ini akan berubah.

Untuk mengevaluasi kondisi ketahanan wilayah dari dimensi keamanan dapat kita perkuat kembali melalui indikator lain pada dimensi keamanan nasional di bawah ini.

3. Gesekan Keyakinan Agama

Salah satu yang harus diamati dari kondisi keamanan di suatu wilayah adalah adanya gesekan antaragama. Bila kondisi ini terjadi di suatu wilayah di mana warga masyarakatnya didiami oleh warga yang berbeda etnis dan

keyakinan akan menjadi ancaman bagi ketahanan wilayah di daerah itu. Oleh karena itu, sedini mungkin kita harus mengetahui potensi gesekan agama di daerah itu supaya potensi konflik beragama tidak terjadi. Sebagaimana yang dialami oleh warga Poso di awal tahun 1990an terjadi konflik agama antara Islam dan penganut agama Kristen. Konflik ini terjadi karena ulah para provokator yang memengaruhi mereka untuk melakukan konflik. Dengan isu-isu yang direkayasa untuk membenturkan antara dua agama pun berhasil mereka lakukan.

Fakta konflik agama di daerah Poso supaya tidak terjadi di desa Tri Rukun yang dihuni oleh tiga etnis berbeda agama di antaranya etnis Bali mayoritas beragama hindu, etnis lokal Gorontalo beragama Islam dan etnis Minahasa beragama Kristen dengan perbedaan keyakinan beragama berharap tidak terjadi gesekan antar keyakinan sebagaimana yang terjadi di daerah Poso. Bila ini terjadi di desa Tri Rukum akan dapat memengaruhi ketahanan wilayah di daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, penting bagi kita melakukan deteksi dini tentang potensi gesekan agama tersebut pada warga masyarakat Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo agar supaya potensi tidak akan berubah menjadi konflik.

Untuk mengetahui apakah ada potensi konflik beragama di Desa Tri Rukun marilah kita analisis hasil jawaban informan penelitian tentang kondisi gesekan agama di Desa Tri Rukun di bawah ini sebagai berikut. Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi tentang kondisi gesekan antaragama, mengatakan bahwa sebagai berikut.

"Di Desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini Desa Tri Rukun masih tetap terjaga stabilitas sosial, terutama potensi konflik karena perbedaan agama. Perbedaan agama dapat dilihat ketika warga kami melakukan usaha kegiatan ritual keagamaan, pada saat agama Hindu melaksanakan kegiatan ibadah Nyepi semua warga di Desa Tri Rukun menghormati pelaksanaan hari Nyepi dengan tidak ada kegiatan warga masyarakatnya melakukan aktivitas yang akan mengganggu kekhusuan umat Hindu dalam menjalankan peribadatannya melakukan penyepian. Begitu juga dengan kegiatan mengarak Ogoh-Ogoh masih bagian dari ritual Nyepi. Kegiatan mengarak Ogoh-Ogoh dilakukan secara bersama dengan warga etnis Gorontalo dan etnis Minahasa secara sukarela. Demikian juga dengan kegiatan ritual umat islam dan Kristen, misalnya hari raya Idul Fitri warga etnis Bali dan etnis Minahasa saling mengunjungi warga etnis lokal yang merayakan hari raya idul Fitri. Bagi umat Kristen yang merayakan Natal etnis Bali dan Gorontalo pun ikut bersama dalam menjaga keamanan bagi mereka melaksanakan peribadatan dalam melaksana-kan Natal. Di desa kami kerukunan beragama antar ketiga etnis saling menghargai dan sampai dengan saat ini tidak terjadi gesekan antaragama di desa kami" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan warga masyarakat di desa Tri Rukun masih dalam kondisi saling menghargai dan bekerja sama dalam menjalankan aktivitas ritual keagamaan, belum ada benturan yang mengarah kepada potensi konflik agama. Dan ini disampaikan secara tegas bahwa warga Desa Tri Rukun potensi konflik antaragama pada saat warga melakukan kegiatan ritual keagamaan dan bahkan melaksanakan hari kebahagiaan seperti hari raya untuk setiap agama tidak mengalami

permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ritualnya maupun melaksanakan hari raya besarnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi gesekan antaragama di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lainnya sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut.

Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti tentang kondisi gesekan agama di desa Tri Rukun di bawah ini.

> "Warga masyarakat di Desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu dalam melaksanakan kegiatan ritual keagamaan, semuanya merasa bersaudara dan ini ditunjukan melalui kegiatan hari besar Nyepi untuk agama hindu. Semua warga masyarakat Desa Tri Rukun menghormati dan menjaga keamanan berlangsungnya kegiatan hari Nyepi di Desa Tri Rukun. Begitu juga ketika etnis lokal melaksanakan tradisi keagamaan misalnya pasang lampu Tombilatohe kami warga etnis Bali ikut bersama melakukan pemasangan lampu Tombilatohe di rumah pendu-duk etnis Bali begitu juga di kantor desa Tri Rukun. Semua ini merupakan bentuk dukungan warga etnis Bali pada perayaan tradisi etnis lokal dalam menjalankan tradisinya. Demikian halnya dengan perayaan hari raya umat islam dan umat kristen pada saat mereka melaksanakan hari besar. Etnis Bali saling mengunjungi rumah-rumah warga masyarakat yang melaksanakan hari raya idul fitri dan hari raya Natal. Bukan cuman itu suasana saling menghargai pula dapat dilihat melalui penghormatan warga etnis lokal Gorontalo melaksanakan kewajiban dalam menjalankan salat lima waktu dengan panggilan ajan berkumandang di masjid dengan menggunakan pengeras suara. Warga etnis Bali tidak mengusiknya. Begitu juga dengan etnis Minahasa pada saat mereka melakukan ibadah ritual warga etnis lokal dan etnis Bali pun menghormatinya. Begitupun sebaliknya bila umat Hindu dan Kristen memanggil umatnya beribadat melalui pengeras suara atau simbol bunyi-bunyian warga masyarakatnya tidak saling mengganggu sehingga suasana kegiatan ritual di desa kami tidak terjadi potensi yang mengarah kepada konflik agama. Semuanya berjalan normal" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menambah keyakinan kita memang benar di desa Tri Rukun gesekan antaragama tidak pernah terjadi, dan fakta ini memberikan petunjuk bahwa ketahanan wilayah pada dimensi keamanan masih sangat tangguh di desa Tri Rukun.

Prestasi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Memang bila dilihat konflik agama di desa Tri Rukun tidak terjadi, tetapi kita tidak boleh lengah dengan kondisi tersebut. Karena bisa saja kondisi yang kondusif bisa menjadi kondisi yang tidak kondusif, bila kita tidak mempelajari potensi konflik. Potensi konflik di desa Tri Rukun itu ada, tetapi dapat dijaga potensi akan berubah menjadi konflik. Alasannya memang di desa Tri Rukun tidak hanya didiami oleh salah satu etnis saja, tetapi ada tiga etnis yang hidup bersama yang berbeda keyakinan. Ini merupakan salah satu potensi konflik yang akan berubah menjadi konflik. Bila kita abai melakukan usaha dalam mencegah terjadinya konflik suasana kondusif akan berubah menjadi suasana tidak kondusif. Semua ini kita tidak mengharapkannya akan terjadi konflik agama di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang gesekan antaragama di desa Tri Rukun kami konfirmasi kembali kepada informan penelitian ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di Desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas desa Tri Rukun. Melalui

Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di Desa Tri Rukun bersumber dari genarasi muda tidak muncul, karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna sehingga perasaan bersaudara sangat tinggi. Melalui organisasi Karang Taruna sikap generasi muda di Desa Tri Rukun dapat menghilangkan sikap-sikap negatif terhadap sikap menonjolkan etnis tertentu saja (primordialisme) sehingga generasi mudah dan warga masyarakat kami menganggap ketiga etnis itu memiliki tradisi sendiri-sendiri dan wajib dihormati oleh siapapun warga masyarakat desa Tri Rukun. Kegiatan pertandingan olahraga dan kegiatan malam pagelaran seni yang dilaksanakan oleh Karang Taruna, diharapkan sebagai alat pemersatu bagi generasi mudah di desa Tri Rukun. Berdasarkan fakta itu saya menyatakan desa Tri Rukun sikap primordialisme dapat di atasi di desa kami sehingga konflik antaragama tidak terjadi" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas memperkuat bahwa di desa Tri Rukun tidak terjadi konflik antaragama, upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah pembinaan generasi mudah melalui organisasi Karang Taruna yang dibina oleh pemerintah desa Tri Rukun. Wadah inilah yang membantu meminimalisasi gesekan antarpemuda yang berbeda etnis, berbeda agama di Desa Tri Rukun bila terjadi gesekan antaragama. Melalui kegiatan Karang Taruna juga konflik agama dapat diatasi yang disebabkan gesekan pemuda di Desa Tri Rukun. Bisa saja konflik agama dapat berawal dari konflik generasi mudah. Tetapi melalui Karang Taruna sedikit membantu dalam membangun hubungan harmonis antaragama di Desa Tri Rukun.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaragama di wilayahnya sebagai berikut.

> "Pemerintah Desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis yang berbeda agama dalam membangun desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme, primordialisme tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat. Ketika ada potensi gesekan antarsuku, konflik antar keyakinan beragama ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif seperti etno nasionalisme, egosentrisme dan sikap primordialisme yang akan menjadi potensi konflik agama" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala desa Tri Rukun pemerintah desa pun ikut terlibat di dalam memelihara kerukunan beragama dan keharmonisan antaretnis di desa Tri Rukun. Melalui kegiatan FKUB yang rutin diselenggarakan pemerintah desa Tri Rukun di kantor desa dengan warganya khususnya kalangan generasi mudah dapat membantu dalam mempererat hubungan persaudaraan warga masyarakat desa Tri Rukun.

Dengan intensnya pemerintah desa dalam berkomunikasi dengan warganya melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dapat meminimalisasi konflik antaragama di desa Tri Rukun. Karena FKUB ini memang

suatu organisasi yang berpusat dipemerintah kabupaten Boalemo sebagai wadah dalam menyatukan perbedaan tujuan, kepentingan bagi warga masyarakat yang berbeda etnis, berbeda agama, berbeda ras, berbeda kebudayaan dalam menyatukan visi bersama bangsa dan negara Indonesia dalam membangun negara multikulturalisme dengan slogan Bhihneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu.

Untuk menelusuri keterlibatan pemerintah kecamatan dalam menjaga hubungan harmonis antaretnis yang beda agama di desa Tri Rukun, peneliti menemui salah satu staf kantor camat Wonosari dijadikan sebagai informan penelitian dalam mendalami kondisi gesekan antaragama di desa Tri Rukun dan di desa-desa lain yang ada dalam *domain of powernya* pemerintahan Kecamatan Wonosari.

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala Seksi Trantib kecamatan Wonosari ketika dikonfirmasi kondisi tentang konflik antaragama di Desa Tri Rukun memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antaragama sebagaimana yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku. Salah satu contohnya adalah desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo, serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri Rukun artinya tiga etnis yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa dalam kehidupan yang rukun. Upaya pemerintah kecamatan dalam mencegah terjadinya konflik agama dilakukan lewat FKUB bersama pemerintah desa bersama-sama mensosialisasikan tentang toleransi antar umat

beragama dan menghimbau warga masyarakat di kecamatan Wonosari dalam menjaga hubungan harmonis antaretnis yang berbeda agama. Kegiatan ini membuahkan hasil sampai dengan saat ini warga transmigrasi dan etnis lokal Gorontalo belum pernah mengalami konflik yang disebabkan oleh karena perbedaan keyakinan beragama" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban dari beberapa informan penelitian di atas menunjukkan kondisi keamanan bila dilihat dari indikator gesekan agama di desa Tri Rukun tidak pernah terjadi gesekan antaragama. Mengapa karena kondisi keagamaan yang digambarkan oleh para informan penelitian desa Tri Rukun sangat menjujung tinggi prinsip model negara multikulturalisme, di mana prinsip multikulturalisme saling menghargai, saling menghormati, sikap egalitarian kepada semua etnis, sikap toleransi membuat warga desa Tri Rukun dapat hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama dan berbeda etnis dan ras. Apalagi di desa Tri Rukun terlihat ada intervensi pemerintah daerah melalui pemerintahan kecamatan sampai ketingkat pemerintahan desa melakukan sosialisasi model negara multikulturalisme lewat Forum Komunikasi umat beragama (FKUB) dalam menyatukan persepsi kebangsaan untuk memertahankan persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia sesuai dengan slogan Bhineka Tunggal Ikanya berbeda-beda tetap satu.

Sinergitas dalam membangun negara dengan model negara multikulturalisme inilah yang dapat menyatukan perbedaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa inilah yang dapat membuat desa Tri

Rukun sampai dengan saat ini masih dalam kondisi kondusif.

Untuk mengevaluasi ketahanan wilayah dari dimensi keamanan dari suatu daerah tidak cukup lengkap bila hanya mendasarkan pada indikator di atas, untuk itu perlu kita mencari indikator pendukung lain dalam menetapkan kondisi ketahanan wilayah pada dimensi keamanan di desa Tri Rukun. Indikator pendukung itu adalah sebagaimana yang dapat kita amati di bawah ini sebagai berikut.

4. Gesekan Budaya (Tradisi)

Gesekan tradisi sebagai salah satu dari indikator ketahanan wilayah yang harus mendapat perhatian kita bersama. Biasanya perbedaan tradisi dapat mengakibatkan turbolensi sosial dalam membangun keharmonisan antaretnis. Untuk itu kondisi tradisi yang berbeda itu harus dikelola secara strategi model negara multikulturalisme supaya tidak menjadi konflik sosial.

Dalam memperkuat pendapat di atas kita simak apa yang dikatakan oleh Samuel Huntington tentang teorinya *Social conplic of civilization* yang menyatakan perbedaan peradaban akan dapat memicu terjadinya konflik peradaban bagi warga negara. Berdasarkan teori ini menunjukkan potensi konflik bisa saja terjadi bila peradaban yang berbeda dari warga negaranya. Kondisi ini bisa terjadi bila masing-masing warga tidak konfromi dengan peradaban warga negara yang berbeda etnis dan berbeda tradisi. Salah satu contoh konflik peradaban di Indonesia antara kultur orang Barat dan orang Timur tidak dapat disatukan, orang Barat berpaham liberalisme dan orang Timur yang lebih menonjolkan ritual keagamaan dalam per-gaulan, akan bermasalah bila dipraktikan

peradaban liberalisme di suatu negara yang memiliki ideologi peradaban ketimuran. Mengapa demikian? Karena liberalisme lebih mengedepankan pada kebebasan individualisme sehingga semuanya diserahkan kepada hak warga negaranya. Dengan hak kebebasan individualisme di negara Barat seperti negara Amerika, negara-negara Eropa perkawinan sesama jenis dibolehkan demi penghargaan kepada hak kebebasan individualisme. Negara Indonesia dan negara-negara di belahan Timur yang memiliki peradaban berbasis kepada ritual keagamaan melarang warganya untuk melakukan perkawinan sejenis sehingga kalau peradaban orang Barat itu dipraktikan di Indonesia atau di negara Timur Tengah akan mengalami konflik sosial atau turbolensi sosial.

Di Indonesia dengan peradaban ketimuran yang berideologi Pancasila sangat menentang keras peradaban sosial dari orang Barat dengan ideologi liberalnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa peradaban sosial orang Barat, akan menjadi potensi konflik pada suatu negara sebagaimana yang dikatakan oleh Samuel Huntington dengan teorinya sosial *conflic of civilization* tentang konflik peradaban.

Untuk negara Indonesia sebagai negara yang memiliki peradaban hetorogen memang akan menjadi potensi bagi terjadinya konflik peradaban, bila tidak dikelola secara prinsip-prinsip negara multikulturalisme atau apa yang dicita-citakan oleh *The Founding Fathers* tentang *Nation State* negara bangsa. Apabila keinginan *The Founding Fathers* ini kita tidak laksanakan, maka negara Indonesia akan mengalami apa yang disebut dengan *Failed State* (negara gagal) kegagalan negara dalam memer-tahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah berpengalam tentang kegagalan itu misalnya konflik etnis beda agama di

Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, konflik Maluku konflik antar-agama. Bahkan yang lebih berat diterima negara Indonesia ketika Provinsi Timor-Timor keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri sebagai satu negara yang berdaulat.

Semua fakta benturan peradaban di atas jangan terjadi di daerah Provinsi Gorontalo khususnya di daerah Kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari. Dan untuk menelusuri potensi konflik peradaban mari kita analisis hasil wawancara dengan informan penelitian di lokasi penelitian di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi tentang kondisi gesekan antarbudaya (tradisi), mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap terjaga stabilitas sosial, terutama potensi konflik karena perbedaan tradisi. Perbedaan tradisi dapat dilihat ketika warga kami melakukan usaha kegiatan Ogoh-Ogoh. Kegiatan mengarak Ogoh-Ogoh dilakukan secara bersama dengan warga etnis Gorontalo dan etnis Minahasa secara sukarela. Demikian juga dengan warga etnis lokal yang melaksanakan tradisi Tombilatohe pemasangan lampu minyak di rumah-rumah penduduk warga Gorontalo etnis Bali dan Minahasa ikut menyalakan lampu Tombilatohe" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan warga masyarakat di desa Tri Rukun tidak mempersoalkan tradisi daerah masing-masing. Justru yang terjadi berdasarkan keterangan informan penelitian ketiga etnis bekerja

bersama dalam mensukseskan tradisi dari etnis Bali, etnis Gorontalo serta tradisi etnis Minahasa.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi gesekan antar tradisi di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lainnya sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut

Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti tentang kondisi gesekan agama di desa Tri Rukun di bawah ini.

> "Warga masyarakat di desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu dalam melaksanakan kegiatan tradisi keagamaan, maupun tradisi daerahnya masing-masing semuanya merasa bersaudara dan ini ditunjukan melalui kegiatan hari besar Nyepi untuk agama hindu. Semua warga masyarakat desa Tri Rukun menghormati dan menjaga keamanan berlangsungnya kegiatan hari Nyepi di desa Tri Rukun. Begitu juga ketika etnis lokal melaksanakan tradisi keagamaan misalnya pasang lampu Tombilatohe kami warga etnis Bali ikut bersama melakukan pemasangan lampu Tombilatohe di rumah penduduk etnis Bali begitu juga di kantor desa Tri Rukun. Semua ini merupakan bentuk dukungan warga etnis Bali pada perayaan tradisi etnis lokal dalam menjalankan tradisinya. Demikian halnya dengan perayaan hari raya umat islam dan umat kristen pada saat mereka melaksanakan hari besar. Etnis Bali saling mengunjungi rumah-rumah warga masyarakat yang melaksanakan hari raya idul fitri dan hari raya Natal. Bukan cuman itu suasana saling menghargai pula dapat dilihat melalui penghormatan warga etnis lokal Gorontalo melaksanakan kewajiban dalam menjalankan salat lima waktu dengan panggilan ajan berkumandang di masjid dengan menggunakan pengeras suara. Warga etnis Bali tidak mengusiknya. Begitu juga dengan etnis Minahasa pada saat mereka melakukan ibadah ritual warga etnis lokal dan etnis Bali pun menghormatinya.

> Begitupun sebaliknya bila umat Hindu dan Kristen memanggil umatnya beribadat melalui pengeras suara atau simbol bunyi-bunyian warga masyarakatnya tidak saling mengganggu sehingga suasana kegiatan ritual di desa kami tidak terjadi potensi yang mengarah kepada konflik peradaban. Konflik tradisi etnis juga dapat dilihat dari penerimaan etnis Bali menikah dengan etnis lokal Gorontalo, masing-masing membawa tradisi ke daerahannya pada perayaan acara pernikahan. Semuanya berjalan normal tanpa benturan tradisi dari masing-masing adat daerahnya" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menam-bah keyakinan kita memang benar di desa Tri Rukun gesekan antar tradisi budaya dan tradisi keagamaan tidak pernah terjadi, dan fakta ini memberikan petunjuk bahwa ketahanan wilayah pada dimensi keamanan melalui indikator gesekan tradisi masih sangat tangguh di Desa Tri Rukun.

Prestasi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Boalemo untuk dipertahankan demi mewunjudkan negara multikultural.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang gesekan antar peradaban di desa Tri Rukun kami konfirmasi kembali kepada informan penelitian ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Benturan tradisi dari masing-masing etnis di Desa Tri Rukun tidak terjadi karena buktinya pada perayaan ritual keagamaan yang berbeda tradisi dengan etnis lokal tidak menjadi masalah bagi warga etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa. Semuanya saling menghormati tradisi yang di bawah melalui agamanya atau kearifan lokal bagi setiap etnis. Salah satu contoh tradisi Ogoh-Ogoh semua warga

termasuk etnis Gorontalo pun ikut mengarak Ogoh-Ogoh secara bersama dengan etnis lokal Gorontalo. Demikan juga tradisi Tombilatohe warga etnis Bali dan etnis Minahasa secara bersama memasang lampu Tombuilatohe di rumahnya bahkan di kantor desa sebagai pusat pemerintahan di desa memasang lampu Tombilatohe" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas memperkuat bahwa di desa Tri Rukun tidak terjadi konflik antar tradisi etnis Bali, dan etnis Gorontalo sampai etnis Minahasa pun terlibat di dalam merayakan tradisi dari etnis Bali begitupun sebaliknya. Tetapi potensi konflik tradisi di antara etnis itu ada tetapi telah terkelola secara pendekatan model negara multikulturalisme sehingga perbedaan tradisi antaretnis tidak menjadi konflik di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaragama di wilayahnya sebagai berikut.

"Kebijakan pemerintah desa Tri Rukun agar tidak terjadi benturan tradisi yang mengarah kepada konflik antarwarga, kami di desa ini selalu melakukan kegiatan sosialisasi yang diwadahi oleh organisasi kepemudaan dan organisasi FKUB (Forum Komunikasi umat beragama) dalam menghilangkan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan tradisi masing-masing etnis. Justru melalui karang taruna generasi mudah menyelenggarakan kegiatan kesenian yang memperkenalkan tradisi lewat kegiatan seni, misalnya drama tentang tradisi masing-masing etnis dengan tujuan melalui pagelaran seni, tradisi masing-masing etnis dapat diketahui oleh warga yang berbeda etnis. Pelaksanaan tradisi di kantor desa Tri Rukun sangat kental dengan tradisi masing-masing etnis dalam menyambut tamu dari pemerintah

daerah. Begitu juga tradisi pemularasan jenazah. Semua berjalan normal tanpa ada benturan tradisi yang menghalangi tradisi etnis lain pada pelaksanaan ritual pernikahan sampai kepada ritual tradisi pemularasan jenazah" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala desa Tri Rukun warga masyarakatnya telah terbangun kesadaran untuk saling menghargai tradisi masing-masing etnis yang ada di desa Tri Rukun. Dapat dikatakan warga desa Tri Rukun berdasarkan keterangan informan penelitian di desa Tri Rukun tradisi masing-masing etnis diberikan kebebasan dalam melaksanakan sepanjang tradisi tidak bertentangan nilai-nilai Pancasila yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal yang positif. Berdasarkan keterangan informan penelitian di atas menunjukkan bahwa warga desa Tri Rukun tidak terjadi benturan tradisi antaretnis.

Untuk menelusuri lebih lanjut ada tidaknya peran pemerintah daerah melalui perpanjangan kepada pemerintah kecamatan dalam menjaga hubungan harmonis antaretnis yang beda agama di desa Tri Rukun dalam upaya mencegah terjadinya benturan tradisi antaretnis. Peneliti menemui salah satu staf kantor Camat Wonosari yang dijadikan sebagai informan penelitian dalam mendalami kondisi gesekan tradisi di desa Tri Rukun dan di desa-desa lainnya yang ada dalam *domain of powernya* pemerintahan Kecamatan Wonosari .

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala Seksi Trantib kecamatan Wonosari ketika dikonfirmasi kondisi tentang benturan tradisi di desa Tri Rukun memberikan jawaban sebagai berikut.

"Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi terutama benturan tradisi yang sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik tradisi masing-masing etnis. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Wonosari dalam mencegah terjadinya benturan tradisi antaretnis selalu melakukan pertemuan dengan kepala desa dan selalu berpesan menghidupkan tradisi yang positif dari masing-masing etnis. Bentuk kegiatan dalam menyatukan tradisi adalah melakukan kegiatan keagamaan dipusatkan di lapangan Kecamatan Wonosari, misalnya pelaksanaan Ogoh-Ogoh mengambil star di lapangan kecamatan Wonosari dan finishnya di desa Tri Rukun sebagai pusat kegiatan perayaan Ogoh-Ogoh. Dengan tujuan agar supaya warga masyarakat Wonosari menghargai dan menghormati kegiatan ritual dari agama Hindu etnis Bali. Demikian juga dengan pelaksanaan MTQ bagi umat Islam etnis Jawa dan Gorontalo dilaksanakan di lapangan Kantor Camat Wonosari" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan dukungan pemerintah kecamatan Wonosari di atas potensi benturan antar tradisi etnis transmigrasi dapat terterima oleh warga etnis lokal Gorontalo. Memang potensi tradisi itu selalu ada bila kita hidup dalam satu keluarga besar yang berbeda etnis. Begitu juga di desa Tri Rukun namun strategi pemerintah kabupaten Boalemo dan pemerintah Kecamatan Wonosari bekerja secara bersama dengan pemerintah desa dalam menjaga keutuhan hubungan antaretnis, potensi konflik bersumber dari perbedaan tradisi dapat dicegah.

Untuk mendalami kembali tentang stabilitas wilayah di desa Tri Rukun perlu dihadirkan indikator keamanan sebagai indeks dalam mengukur ketahanan wilayah pada dimensi keamanan wilayah sehingga penilaian ketahanan

wilayah pada dimensi keamanan tidak parsial, tetapi secara komprehensif dalam menentukan indeks ketahanan wilayah pada dimensi keamanan tersebut.

Sehingga perlu dihadirkan indikator keamanan selain yang telah dibahas di atas. Indikator ini dijadikan sebagai pendukung dalam menentukan ketahanan keamanan sebagaimana yang akan dikaji pada indikator di bawah ini.

5. Gesekan Ras

Dalam membahas tentang ras dijadikan sebagai indikator dalam mengukur ketahanan wilayah pada dimensi keamanan perlu kita batasi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ras itu. Karena perbedaan ras pada suatu negara bisa saja akan menjadi potensi konflik sosial bila tidak terkelola secara adil. Biasanya bila warga negaranya didominasi oleh ras tertentu akan menjadi bermasalah bagi ras yang minoritas. Padahal permasalahan ras tidak menjadi soal bila kita berprinsip pada model pembangunan negara melalui model negara multikulturalisme.

Untuk memperjelas sesungguhnya apa yang dimaksud dengan ras perlu kita definisikan dulu pengertian dari ras dalam mempermudah pada pengkajian kita tentang indikator gesekan ras sebagai bagian dari indeks ketahanan wilayah pada dimensi keamanan.

Pengertian Ras adalah: suatu pengelompokan manusia ke dalam suatu kelompok besar dengan perbedaan masing-masing kelompok yang diwariskan turun temurun salah satu perbedaanya warna kulit.

Pengertian lainnya dari Ras adalah: merupakan sistem pengelompokan yang digunakan untuk mengkategorikan manusia ke dalam kelompok atau kelompok besar dan berbeda dengan ciri tenotipe, asal usul geografis, fisik dan suku yang diwarisi.

Berdasarkan pengertian ras di atas dapat kita pahami bahwa ras sesungguhnya pengelompokan asal usul manusia yang ditandai dari ciri-ciri yang ada pada organ biologis (fisik) warga negara, asal usul geografisnya, suku yang diwarisi. Pengertian ras di atas menunjukkan ras bisa menjadi permasalahan bila sikap warga negara dan sikap pemerintah yang mendominasi dalam suatu wilayah memperlakukan kebijakan pemerintah dengan diskriminatif pada distribusi sumber daya alam atau pada pembangunan infrastruktur atau juga dapat bermasalah bila distribusi kekuasaan hanya didominasi oleh ras tertentu saja.

Sebagai contoh di negara Amerika Serikat warga kulit hitam dari ras negroid dianggap kelas warga negara yang memiliki derajat terendah di kalangan warga negara Amerika dibandingkan dengan warga negara Amerika yang berasal dari ras kaukosoid berkulit putih. Inilah yang dikenal dengan politik *apartheid* sehingga warga kulit hitam tidak dianggap sebagai warga negara yang superior di negaranya, bahkan mereka dijadikan sebagai budak. Demikian halnya di negara Yanmar warga negara ras dari suku rohinya diusir dari negara Yanmar mereka dianggap bukan bagian dari warga negaranya. Contoh-contoh ini merupakan bagian daripada gangguan ras di belahan dunia.

Apa yang terjadi di negara-negara yang gagal menerapkan model negara multikulturalisme di atas, supaya tidak terjadi pada negara Indonesia khususnya di daerah kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Provinsi Gorontalo. Apabila kita menganalisis tentang kondisi demografi di Kabupaten Boalemo khususnya di desa Tri Rukun atau skala lebih besar warga negara Indonesia sebagian besar berasal dari ras

mongoloid dan sebagian kecilnya berasal dari ras negroid seperti warga masyarakat Provinsi Irian Jaya. Demikian juga dengan warga masyarakat yang ada di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari semuanya berasal dari ras yang sama yaitu ras mongoloid. Artinya klasifikasi ras ini menunjukkan kita berasal dari ras yang sama, namun berbeda suku bangsa karena dilihat dari klasifikasi ras yang ada di belahan dunia.

Dengan identifikasi ras sesungguhnya di desa Tri Rukun tidak bermasalah bila yang menjadi ukurannya ras dari segi fisik, karena semua berasal dari ras yang sama, yaitu ras mongoloid. Namun bila kita gunakan ras dari asal usul suku bangsa, maka suku yang ada di desa Tri Rukun di diami oleh tiga etnis atau suku yakni suku Bali, suku Gorontalo dan suku Minahasa sebagai penempatan warga transmigrasi lokal dan transmigrasi nasional oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan kondisi demografi desa Tri Rukun di atas perlu kita menelusuri akan adanya potensi gesekan antarras di wilayah desa Tri Rukun dengan menghadirkan informan penelitian guna mengetahui apakah di desa Tri Rukun ada gesekan antarras di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi tentang kondisi gesekan antarras, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun warga masyarakatnya masih terjaga hubungan harmonis antarwarga Etnis Bali dan etnis lokal Gorontalo bersama etnis Minahasa, sampai dengan saat ini desa Tri Rukun masih tetap terjaga stabilitas sosial, terutama potensi konflik karena perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat dilihat ketika warga kami melakukan usaha perdagangan, usaha perdagangan berjalan dengan baik, begitu juga pada saat pemilihan kepala desa semua warga menerima keputusan hasil pemilihan" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan warga masyarakat di desa Tri Rukun masih dalam kondisi saling menghargai dan bekerja sama dalam menjalankan aktivitas demi menunjang kebutuhan hidupnya. Berdasarkan fakta yang disampaikan oleh para informan menunjukkan belum ada benturan yang mengarah kepada kompetisi negatif, yakni gesekan antara etnis berasal dari ras yang sama. Ini disampaikan secara tegas bahwa warga desa Tri Rukun potensi konflik antarras pada saat warga melakukan usaha perdagangan dan pemilihan kepala desa secara langsung pun warganya tidak mengalami permasalahan dalam menyatukan tujuan dalam membangun desanya.

Bila dilihat gesekan antarras yang diwakili melalui kondisi hubungan antaretnis yang ada di desa Tri Rukun tidak bermasaalah selama ini karena warga masyarakatnya menganggap mereka berasal dari Ras yang sama, namun hanya berbeda suku bangsa saja. Inilah juga yang membuat warga masyarakatnya bisa bersama dalam membangun desa Tri Rukun sampai dengan saat ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi gesekan antarras di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lainnya sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat di desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dan ini ditunjukan melalui kegiatan Karang taruna di desa Tri Rukun generasi mudahnya saling mendukung satu sama lain dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kebiasaan generasi mudah bertemu dalam wadah

karang Taruna telah meminimalisasi gesekan antarpemuda berbeda etnis dan saya tegaskan lagi di desa kami gesekan antaretnis tidak pernah melebar menjadi konflik horizontal karena semua bergabung dalam kegiatan karang taruna kalaupun ada dapat diselesaikan secara musyawarah. Demikan juga dengan warga masyarakat umum baik tua dan mudah sama-sama bekerja sama dalam membangun desa dengan penuh persaudaraan sehingga saya dengan tegas warga desa Tri Rukun belum pernah terjadi konflik antaretnis lokal dengan etnis Bali dan etnis Minahasa di desa kami" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menam-bah keyakinan kita memang benar di desa Tri Rukun gesekan antarras tidak pernah terjadi sehingga hubungan di antara tiga etnis yang mewakili ras yang sama ada di desa Tri Rukun masih tetap terjaga dan terpelihara hubungan harmonis dari tiga etnis tersebut. Kesadaran sebagai satu ras yakni berasal dari ras mongoloid telah memperkuat persaudaraan antaretnis lokal Gorontalo, etnis Bali dan etnis Minahasa di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari sampai dengan saat ini.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang gesekan antarras di desa Tri Rukun kami konfirmasi kembali kepada informan penelitian ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Di desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan

pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Sentimen negatif pada etnis yang ada di desa Tri Rukun tidak muncul karena para generasi mudah seluruh etnis tergabung dalam kegiatan Karang Taruna. Kegiatan yang dilaksanakan melalui karang taruna menghapus sikap-sikap negatif dalam menonjolkan etnis tertentu saja sehingga generasi mudah dan warga masyarakat kami menganggap ketiga etnis memiliki tradisi sendiri-sendiri wajib dihormati oleh siapapun warga masyarakat desa Tri Rukun. Demikian juga dengan sikap primordialisme di kalangan generasi mudah tidak terlihat pada saat mereka melakukan kegiatan pertandingan olahraga dan kegiatan malam pagelaran seni yang dilaksanakan oleh karang taruna, semuanya aman tidak ada yang menonjolkan tradisinya dan kompetisi olahraga sesuai dengan yang diharapkan sebagai alat pemersatu bagi generasi mudah di desa Tri Rukun. Berdasarkan fakta itu saya menyatakan desa Tri Rukun sikap primordialisme dapat diatasi di desa kami sehingga konflik antaretnis tidak terjadi" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas memperkuat bahwa di desa Tri Rukun tidak terjadi konflik antaretnis dari ras yang sama mongoloid, upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah pembinaan generasi mudah melalui organisasi karang taruna yang dibina oleh pemerintah desa Tri Rukun. Wadah inilah yang membantu meminimalisasi gesekan antarpemuda yang berbeda etnis tetapi dalam kelompok ras yang sama di desa Tri Rukun.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antarras di wilayahnya sebagai berikut.

> "Pemerintah desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat ketika ada potensi gesekan antarsuku ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif seperti etnonasionalisme, egosentrisme dan sikap primordialisme" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala desa Tri Rukun pemerintah desa pun ikut terlibat di dalam memelihara kerukunan beragama dan keharmonisan antaretnis di desa Tri Rukun. Melalui kegiatan FKUB yang rutin diselenggarakan pemerintah desa Tri Rukun di kantor desa dengan warganya khususnya kalangan generasi mudah dapat membantu dalam mempererat hubungan persaudaraan warga masyarakat desa Tri Rukun yang berasal dari ras yang sama.

Secara etimologi perbedaan ras di desa Tri Rukun memang tidak ada, karena bila kita menganalisis berdasarkan kondisi demografis warga desa Tri Rukun berasal dari ras yang sama, tetapi berbeda suku bangsanya, budayanya dan keyakinan beragama sehingga ketika menelusuri gesekan antara ras tidak dapat ditemukan karena warga masyarakat desa Tri Rukun berasal dari ras yang sama, yaitu ras mongoloid dalam klasifikasi ras di dunia.

Untuk menelusuri apakah ada gesekan antarras di desa Tri Rukun dan bagaimana upaya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Peneliti menemui informan penelitian dari staf kecamatan Wonosari yang dianggap mengetahui dengan pasti kondisi warganya.

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari ketika dikonfirmasi kondisi tentang konflik antarras diwakili etnis yang ada di desa Tri Rukun memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antar etnsi sebagaimana yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku. Salah satu contohnya adalah desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri Rukun artinya tiga etnis yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semuanya dalam kondisi stabilitas desanya sangat aman. Yang dimaksudkan warga masyarakat termasuk kalangan generasi mudahnya yang masih darah mudah yang berpotensi melakukan perilaku menyimpang. Mereka ini yang perlu mendapat perhatian bagaimana menjaga hubungan antaretnis" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas tentang bagaimana kondisi gesekan antarras di desa Tri Rukun tidak terjadi masalah, karena semua hasil jawaban informan penelitian menunjukkan bahwa warga desa Tri Rukun menyadari mereka berasal dari ras yang sama dari ras mengoloid yang hanya dibedakan dari suku bangsa

sehingga ketiga etnis ini dapat bekerja sama dalam segala bidang demi mensukseskan pembangunan di desa Tri Rukun.

Dengan kesadaran sebagai ras yang hidup bersama, tetapi berbeda suku bangsa memperkuat jalinan hubungan persaudaraan antara etnis Bali Mayoritas, etnis lokal Gontalo dan etnis Minahasa dalam membangun desa Tri Rukun tempat mereka mengais rezeki secara bersama. Kondisi inilah yang ditemui di lapangan membuktikan pemerintah desa Tri Rukun dengan mudahnya membangun hubungan harmonis di antara warganya yang berbeda suku tetapi masih dalam ras yang sama yaitu ras mongoloid. Inilah yang memperkuat persaudaraan antara etnis Bali, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari.

Dengan demikian dapat dibuktikan melalui survei konflik ras di desa Tri Rukun tidak terjadi karena wilayah kabupaten Boalemo sebagai daerah transmigrasi di tempati oleh warga yang memiliki persamaan ras tidak akan mengalami gesekan sebagaimana pernyataan dari Samuel Huntington tentang teori konflik sosial. Artinya, kesadaran sebagai satu ras di wilayah kabupaten Boalemo khususnya di desa Tri Rukun, lebih memperkuat rasa persaudaraan di antara ketiga etnis dalam membangun desa Tri Rukun secara bersama.

Dapat saya katakan gesekan antarras terjadi bila dalam suatu wilayah di tempati oleh ras yang berbeda, misalnya di Indonesia penempatan transmigrasi di daerah Provinsi Irian Jaya. Bila transmigrasi dari ras mongoloid di tempatkan di provinsi Irian Jaya akan bermasalah dari gesekan ras dilihat dari analisis ras dari sudut pandang fisik karena Provinsi Irian Jaya berasal dari ras negroid. Berbeda dengan daerah Provinsi Gorontalo yang memiliki

ras yang sama dengan warga transmigrasi, yakni ras mongoloid sehingga tidak bermasalah karena secara fisik mereka berasal dari ras yang sama, tetapi hanya berbeda dari asal etnisnya. Artinya, permasalahan di kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun warga transmigrasi akan lebih terterima dibandingkan dengan di daerah Provinsi Irian Jaya yang berasal dari ras negroid. Akan tetapi, kita tidak harus melihat dari segi ras dalam membangun Indonesia, karena tujuan pendirian negara Indonesia adalah dengan prinsip *Nation State* dengan model negara multikulturalisme yang menganggap semua ras itu punya hak yang sama dalam menikmati hasil sumber daya alam Indonesia dan pembangunan infra strukturnya. Dan ini diatur pada konstitusi pada pasal 26 UUD NRI 1945 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan pasal 26 UUD NRI 1945 tersebut semestinya persoalan ras tidak lagi dipersoalkan dalam membangun kesejahteraan rakyatnya sehingga jelas pemerintah Republik Indonesia dalam membangun negara kita ini, selalu mengedepankan prinsip *Nation state* dengan model negara multikulturalisme dengan mengedepankan prinsip egalitarian bagi semua warga negaranya, tidak melihat dari segi ras, yang terpenting penduduknya adalah warga negara Indonesia.

Dengan aturan konstitusi itu mewajibkan kepada negara memperlakukan sama kepada semua warga negaranya, baik dia berasal dari ras mongoloid, dari ras negroid, dan ras kaukasoid, semuanya diperlakukan sama oleh negara untuk mendapatkan hak-hak kesejahteraan bagi semua warga negaranya.

Berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada negara-negara lain seperti negara Amerika Serikat, negara India, negara Myanmar dan negara Israel yang selalu mempersoalkan ras dalam menentukan kewarganegaraan serta dalam kebijakan pemberian kesejahteraan pada warga negaranya. Dan bahkan negara Yanmar tidak mengakui kewarganegaraan penduduk rohingya yang sudah hampir seratus tahun mendiami negara Myanmar, tetapi oleh pemerintah Yanmar mereka diperlakukan sangat diskriminatif, bahkan diusir dari tanah kelahirannya karena akibat dari persoalan keyakinan beragama yang berbeda dengan warga negaranya yang mayoritas beragama hindu. Penduduk Rohingya bila dianalisis dari klasifikasi ras kemungkinan rasnya sama dengan penduduk mayoritas, tetapi hanya berbeda keyakinan beragamanya. Etnis Rohingya beragama Islam sedangkan penduduk mayoritas Myanmar beragama hindu. Begitu juga di negara India penduduknya berasal dari ras yang sama, tetapi berbeda keyakinan beragama, dengan perbedaan ini negara India tidak mengakui warga negaranya yang memiliki keyakinan berbeda dengan warga negara India yang mayoritas beragama hindu. Akibatnya warga negara India yang beragama Islam menurut RUU Kewarganegaraan India tidak diakui sebagai warga negara India. Dan ini membuat warga negara India yang beragama Islam melakukan demonstrasi monolak RUU Kewarganegaraan yang diskriminatif tersebut.

Apa yang terjadi di negara-negara yang gagal dalam membangun kebersamaan antara ras, golongan agama, etnis, dan budaya di atas tidak terjadi di Kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Provinsi Gorontalo. Di mana ketiga etnis yang ada di desa Tri

Rukun etnis Bali, etnis Gorontalo dan etnis Minahasa berasal dari ras yang sama yakni ras mengoloid, namun berbeda keyakinan beragama, berbeda tradisi dapat hidup rukun dan diperlakukan oleh pemerintah daerah sampai pemerintah tingkat desa secara baik dengan prinsip negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme. Perlakuan pemerintah daerah sampai di tingkat desa dengan strategi model negara multikulturalisme berimplikasi pada hubungan antaretnis di desa Tri Rukun terpelihara hingga saat ini tidak terjadi gesekan ras yang sama diwakili oleh etnis berbeda etnis Bali, etnis Gorontalo dan etnis Minahasa. Sebagaimana yang terjadi pada negara-negara yang gagal dalam membangun model negara multikulturalisme seperti negara Amerika Serikat, negara India, negara Myanmar dsb.

6. Gesekan Ideologi
(Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan)

Gesekan ideologi merupakan salah satu yang dapat digunakan dalam mengukur indeks ketahanan wilayah pada dimensi keamanan di suatu daerah. Mengapa demikian ketika terjadi perbedaan ideologi antarwarga masyarakat dengan penguasa daerah setelah momentum pemilihan baik itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan kepala desa, biasanya berdampak pada perlakukan diskriminatif oleh penguasa pada warganya. Karena warga masyarakat yang tidak mendukung berdasarkan ideologi penguasa disaat dia baru sebagai calon tersebut menjadi pemenang dan akhirnya calon tersebut menjadi penguasa, biasanya sikap penguasa akan memperlakukan kepada warga masyarakat yang tidak mendukung dia sebagai calon dengan cara diskriminatif kepada semua lawan-lawan politiknya.

Kondisi ideologi seperti di atas akan menjadi momok yang menakutkan warganya bila pilihan warganya berbeda dengan penguasa. Atau juga antarwarga masyarakat yang berbeda pilihan ideologi saling melakukan intimidasi kepada mereka yang berbeda pilihan ideologi politiknya.

Penerapan ideologi yang ideal adalah warga masyarakat diberikan kebebasan di dalam menggunakan hak pilihnya, setelah momen politik berakhir kehidupan menjadi normal kembali. Artinya tidak ada warga masyarakatnya karena beda pilihan ideologi diperlakukan diskriminatif di dalam kehidupannya. Dapat dikatakan dalam berideologi politik yang normal tidak dikenal politik balas dendam. Bila politik balas dendam masih terjadi pada warga masyarakat setelah berakhirnya momentum pemilu baik itu momen Pilpres, Pileg, dan pilkada, serta pilkades akan menjadi preseden buruk bagi kelangsungan demokrasi di suatu negara.

Kehidupan normal dalam berideologi adalah menghilangkan konflik ideologi di dalam masyarakat. Untuk membahas tentang ideologi sebaiknya kita definisikan dulu apa sesungguhnya gesekan ideologi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Konflik Ideologi adalah merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan persepsi maupun pemikiran mengenai gagasan, pandangan, pedoman, sikap serta perbedaan tujuan/cita-cita sehingga menimbulkan pertentangan ideologi. Sedangkan konflik politik adalah merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan, persaingan, serta pertentangan kepentingan baik antarkelompok maupun organisasi dalam hal kebijakan dan pengaturan dan pemerintah di dalam suatu negara.

Berdasarkan pengertian di atas konflik ideologi dan konflik politik dapat terjadi bila terjadi perbedaan pilihan tujuan atau cita-cita mengenai gagasan, dalam membangun wilayah dengan penguasa. Dari asumsi di atas semestinya pada pelaksanaan ideologi di suatu negara perbedaan ideologi tidak menjadi penghalang di dalam melaksanakan pemerintahan, justru perbedaan ideologi antara pemerintah dan warga negaranya di dalam membangun negara diperlukan mekanisme *Checks and balances* artinya terjadi mekanisme saling kontrol antara wraga masyarakat sipil dengan pemerintah di dalam melaksanakan pemerintahan.

Harapannya di wilayah kabupaten Boalemo khususnya di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari tidak terjadi gesekan ideologi akibat dari pelaksanaan sistem demokrasi melalui saluran pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, Pileg dan Pilkades. Bila terjadi gesekan ideologi di suatu wilayah khususnya di desa Tri Rukun akan menghambat pembangunan desa, karena warga masyarakatnya merasa tidak nyaman dengan kondisi gesekan hanya karena perbedaan pilihan ideologi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah secara langsung diseleng-garakan.

Untuk melihat bagaimana kondisi gesekan ideologi di lokasi penelitian marilah kita analisis jawaban informan penelitian bagaimana warga Desa Tri Rukun sebelum dan setelah melewati pelaksanaan momen Pilkada, Pileg dan pilkades di bawah ini sebagai berikut.

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi tentang kondisi gesekan ideologi, mengatakan bahwa sebagai berikut:

> "Di desa Tri Rukun warga masyarakatnya saat pemilihan kepala desa semua warga menerima keputusan hasil pemilihan. Dan suasana pemilihan kepala desa diserahkan penuh kepada pilihan warganya tanpa ada tekanan dari pemerintah desa, demikian halnya dengan pemilihan kepala daerah dan pileg semuanya berdasarkan pilihan hati nurani warganya. Ditegaskan pula setelah terpilihnya kepala desa pemerintah desa menyalurkan bantuan kepada warganya tanpa melihat perbedaan pilihan politik atau ideologi dari warga desa Tri Rukun demikian juga dengan dari pemda kepada desa Tri Rukun diserahkan tanpa melihat perbedaan pilihan ideologi warganya semuanya mendapat porsi yang sama menerima bantuan (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Berdasarkan jawaban informan penelitian kondisi pemilihan kepala desa dan setelah pemilihan kepala daerah dan pileg tidak memengaruhi sikap pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada warga desa Tri Rukun. Semuanya diperlakukan sama oleh pemerintah desa Tri Rukun. Suasana kehidupan warga masyarakat desa Tri Rukun berjalan normal setelah berakhir kegiatan pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah serta pemilihan anggota legislatif. Warga kembali kepada aktivitas kesehariannya tanpa tekanan dari siapapun. Dapat digambarkan perbedaan pilihan politik warga masyarakat desa Tri Rukun tidak menjadi penghalang bagi warganya dalam melaksanakan aktivitas yang bersentuhan dengan kepentingan warganya kepada pemerintah desa dan begitu juga pemerintah desa Tri Rukun dalam menyalurkan bantuan kepada warganya didistribusi merata pada warganya tidak didasarkan pada pilihan ideologi politik warganya.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi gesekan antar ideologi di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lainnya sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

> "Warga masyarakat di desa Tri Rukun tidak memiliki perasaan sentimen kepada etnis tertentu, semuanya merasa bersaudara dan ini ditunjukan melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa Tri Rukun bukan hanya diikuti calon dari etnis Bali, ada juga etnis Minahasa ikut dalam pemihan kepala desa, kedua-duanya memperoleh suara dari warga masyarakat yang berbeda etnis. Suasana pemilihan kepala desa diserahkan sepenuhnya pilihannya kepada warganya tanpa tekanan dari pihak manapun. Kalaupun terjadi mobilisasi dalam menarik dukungan itu adalah sesuatu yang wajar tetapi setelah pemilihan kepala desa atau pemilhan kepala daerah atau pileg, pilpres semuanya berjalan normal kembali tanpa ada permusuhan di antara warga masyarakat desa Tri Rukun" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas memperkuat tentang kondisi gesekan ideologi tidak pernah terjadi sehingga hubungan di antara tiga etnis yang ada di desa Tri Rukun masih tetap terjaga dan terpelihara hubungan harmonisnya. Perbedaan pilihan ideologi di dalam momen pilkades, pilkada dan pileg dan pilpres tidak menjadi penghalang bagi warga mayarakat desa Tri Rukun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang gesekan ideologi di desa Tri Rukun kami konfirmasi kembali kepada informan penelitian ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

> "Di desa Tri Rukun pada saat pilkades calonnya tidak hanya dari warga etnis Bali tetapi ada calon dari etnis Minahasa keduanya memperoleh suara dari warganya. Pilkades hak pilihnya diserahkan kepada warganya tanpa tekanan dan hasil dari perhitungan suara tidak dipersoalkan artinya calon menerima hasil perolehan suara yang diperoleh calon terpilih demikian juga dengan pemilihan kepala daerah, pileg semuanya diserahkan kepada pilihan warganya, kalaupun ada kompetisi di antara calon merupakan sesuatu yang wajar tetapi saya tegaskan di desa Tri Rukun tidak ada konflik hanya karena perbedaan ideologi partai, beda pilihan politik" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas memperkuat bahwa di desa Tri Rukun tidak terjadi konflik antar ideologi sikap pemerintah desa Tri Rukun memberikan kebebasan pada warganya untuk menggunakan hak pilih dan kondisi desa Tri Rukun sebelum dan seudah momen pesta demokrasi tidak mengalami konflik ideologi, warganya bekerja sesuai profesinya di lapangan tanpa membicarakan hasil dan mempersoalkan hasil pemilihan kepala desa atau pileg.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antaretnis di wilayahnya sebagai berikut.

> "Pemerintah desa Tri Rukun dalam mengakomodasi ketiga etnis memasukan dalam struktur pemerintahan artinya kepala desa terpilih melibatkan warga etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa ada pada struktur organisasi pemerintahan desa dengan tujuan kebijakan pemerintah desa akan selalu memberikan pemerataan pada warga masyarakatnya dengan tidak mempertimbangkan pilihan ideologi politiknya sehingga pemerintah desa dalam penyaluran bantuan kepada warganya selalu melihat kebutuhan dari

warganya siapa yang sangat membutuhkan. Dan suasana pemilihan kepala desa atau pileg dan pilkada berjalan normal artinya pilihan itu diserahkan kepada warganya. Fakta ini dapat dilihat kepada sikap kami menyalurkan bantuan setelah pasca pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala daerah, dan pileg" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala desa Tri Rukun menujukan di desa Tri Rukun konflik ideologi tidak pernah dihidupkan di desa Tri Rukun, karena sikap pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan dari kepala daerah selalu menyalurkan bantuan kepada siapa yang membutuhkan bukan kepada siapa yang telah mendukung kepala desa atau kepala daerah terpilih. Semua dilakukan atas dasar prinsip *egalitarian* atau distribusi yang merata pada warga masyarakatnya. Sikap pemerintah desa yang sangat egaliter memengaruhi kondisi keamanan di desa Tri Rukun.

Pernyataan Kepala Desa di atas senada dengan pernyataan warga masyarakat di desa Tri Rukun yang melihat tentang kondisi gesekan ideologi, Indriani Hasan juga mengungkapkan bahwa peran pemerintah Desa Tri Rukun dalam mengupayakan Kerukukan di Desa Tri Rukun pada saat selesai pemilihan pilkades di mulai dari penataan Struktur Aparat Desa sebagai berikut.

"Upaya pemerintah Desa dalam membagun Kerukunan di awali melalui penataan struktur Desa di mana pada aparat Desa Tri Rukun itu terdiri dari berbagi suku yang ada di Tri Rukun yang di tempatkan pada setiap jabatan sehingga dari setaip suku punya perwakilan untuk menempati jabatan di kantor Desa. Selama ini pemerintah tidak pernah membuat peraturan khusus Desa yang memuat tentang peraturan mengenai Kerukunan di Desa Tri Rukun" (Wawancara 25 Februari 2019).

Berdasarkan pernyataan warga masyarakat sebelum dilaksanakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan ada kesamaan jawaban dalam menyatukan gesekan ideologi di desa Tri Rukun melalui penataan struktur aparat desa yang diisi oleh tiga perwakilan dari tiga etnis yakni etnis Bali, etnis Gorontalo dan etnis Minahasa di tempatkan pada posisi dalam struktur aparat desa Tri Rukun.

Untuk menelusuri apakah ada gesekan antar ideologi di desa Tri Rukun dan bagaimana upaya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan menghadapi benturan ideologi pada wilayah jangkauan kekuasaannya. Peneliti menemui informan penelitian dari staf kecamatan Wonosari yang dianggap mengetahui dengan pasti kondisi warganya.

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari ketika dikonfirmasi kondisi tentang konflik ideologi memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antarideologi. Salah satu contohnya adalah desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo, serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri Rukun artinya tiga etnis yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semuanya dalam kondisi stabilitas desanya sangat aman. Kondisi tersebut pada saat sebelum pemilu dan setelah pemilu warga masyarakatnya tidak ada konflik ideologi. Bahkan ketika ditanyakan apakah ada dari etnis Bali yang dipercayakan masyarakatnya menjadi anggota dewan DPRD Boalemo dan DPRD Provinsi jawabannya ada

artinya warga desa di kecamatan Wonosari memilih berdasarkan hati nuraninya dan setelah pemilihan mereka hidup normal tanpa ada tekanan atau intimidasi dari dampak pemilihan kepala daerah atau pileg dan pilpres" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban di atas menunjukkan bahwa warga masyarakat di wilayah kecamatan Wonosari lebih khusus desa Tri Rukun gesekan ideologi tidak bermasalah, karena semua warga masyarakatnya diberikan kebebasan hidup dalam pilihan ideologinya, apakah ideologi agamanya, pilihan politiknya semuanya diserahkan kepada warga masyarakatnya tanpa intervensi dari siapa pun. Kalaupun terjadi kompetisi itu sesuatu yang normal menjelang pilkada atau pilkades, atau Pileg dan pilpres. Tetapi yang terpenting kompetisi politik tidak menyebabkan warga masyarakatnya tekotak-kotak oleh pilihan ideologinya. Semuanya kembali normal, inilah salah satu keberhasilan dari warga desa Tri Rukun dalam menjalankan ideologinya. Karena ideologi itu diperlukan kehadirannya di masyarakat, mengapa dengan ideologi warga masyarakat memiliki cita-cita, tujuan dalam membangun desanya. Dan biasanya ideologi dapat berbentuk pada pilihan politik yang ada pada partai-partai yang ada. Ada partai yang berbasis agama (PPP, PKS, PKB, PAN) dan ada partai berbasis ideologi nasionalis seperti partai (PDIP, Demokrat, Golkar, Nasdem, Gerindra, Perindo).

Pilihan ideologi warga masyarakat yang berbeda-beda di desa Tri Rukun tidak menghambat kehidupan warga masyarakatnya dalam membuka usaha perniagaan, usaha pertanian dan usaha peternakan yang membutuhkan lisensi dari pemerintah desa dalam memulai usaha tersebut. Justru dapat dikatakan ada kedewasaan politik

pemerintah desa dan warga masyarakat di desa Tri Rukun dalam menjalankan pilihan ideologinya, mengapa biasanya perbedaan ideologi di suatu negara atau wilayah akan menjadi potensi konflik misalnya warga masyarakatnya yang berbeda ideologi dengan pemenang pilkades atau pilkada tidak akan dilayani ketika warga yang berbeda pilihan ideologi dengan pemenang membutuhkan layanan dari pemerintah desa atau pemerintah daerahnya. Dan ini tidak kita harapkan bersama. Justru di desa Tri Rukun perbedaan pilihan ideologi diberikan kebebasan pada warganya, yang terpenting ideologi tersebut tidak bertentangan dengan ideologi pancasila sebagai dasar negara kita. Dan pelayanan pemerintah desa dan pemerintah daerah tetap memberikan hak yang sama kepada warganya. Seakan-akan pemerintah desa telah melupakan apa yang terjadi pada saat paska pemilihan kepala desa atau kepala daerah, semuanya berjalan normal kembali melayani masyarakatnya sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pilkades atau pilkada, pileg dan pilpres.

7. Gangguan Keamanan dari Luar

Dalam penilaian indeks keamanan wilayah perlu diperlukan perluasan indikator dalam mengukur stabilitas wilayah pada dimensi keamanan di suatu daerah dalam rangka mengetahui secara komprehensif bagaimana kondisi stabilitas wilayah sehingga dalam penelitian ini indikator penelitian yang ditambahkan adalah indikator gangguan keamanan dari pihak luar artinya dalam menjaring informasi tentang kondisi keamanan, maka kita perlu menggunakan analisis swot, salah satu indikatornya adalah ancaman yang datang dari luar dalam rangka memecah belah hubungan antaretnis di suatu daerah.

Bila kita melihat konflik antaretnis di daerah-daerah yang dilanda konflik seperti di kabupaten Poso dan Provinsi Maluku penyebab kisruhnya hubungan antaretnis yang beda agama karena ada gangguan keamanan dari luar wilayah itu, yang sengaja masuk kedaerah untuk memecah belah hubungan harmonis yang sudah lama terbangun di daerah Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku. Pihak yang dituding adalah pihak ketiga yang kita sebut para perusuh atau provakator. Dan biasanya intelektual *dadernya* adalah mereka para intelektual yang haus akan kekuasaan karena kalah bersaing dalam pertarungan politik dan akhirnya ingin merusak stabilitas nasional dengan tujuan agar kondisi stabilitas nasional kita mendapat perhatian internasional untuk memejokan Indonesia dari pergaulan Internasional.

Demikian halnya di wilayah Kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun kecamatan Wonosari yang sampai dengan saat ini desanya hidup dengan suasana kedamaian. Sikap provokator selalu melihat potensi konflik yang bisa dimainkan dalam memenuhi harapannya ketika mereka kalah dalam pertarungan kekuasaan.

Untuk melihat apakah di daerah Kabupaten Boalemo ada gerakan gangguan keamanan dari pihak luar apakah masuknya melalui orang perorang atau melalui lewat media sosial dalam rangka memecah belah hubungan antaretnis yang sudah terbangun di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari. Dapat ditelusuri melalui survei kepada informan penelitian untuk membuktikan apakah desa Tri Rukun ada potensi gangguan keamanan dari pihak luar.

Dalam melihat apakah ada gerakan dalam rangka memecah belah hubungan harmonis di desa Tri Rukun yang datangnya dari gangguan keamanan dari luar desa

Tri Rukun marilah kita analisis jawaban informan penelitian di bawah ini sebagai berikut:

Menurut ibu Ngiketut Dani istri dari kepala desa Tri Rukun ketika dikonfirmasi tentang kondisi gangguan keamanan dari luar desa Tri Rukun, mengatakan bahwa sebagai berikut.

> "Untuk gangguan keamanan dari pihak luar di desa Tri Rukun belum ada karena sampai dengan saat ini masyarakat kami belum ada gesekan antaretnis, antaragama, antarras, antarbudaya. Ini menunjukkan belum ada pengaruh dari gerakan keamanan dari luar, kalaupun ada warga kami tidak akan terpengaruh. Jawaban ini kita tanyakan bagaimana kalau pengaruhnya dari media sosial atau siaran TV swasta dll. Dikatakan warganya tidak akan terpengaruh karena warganya selalu hidup bersama lagi pula pemerintah desa selalu memantau dan menyo-sialisasikan akan adanya ancaman dari luar yang akan memecah belah hubungan warga masyarakatnya melalui FKUB dan organisasi karang taruna" (Wawancara tanggal 17 Juni 2020 di Kantor Desa).

Pernyataan ibunda di atas menunjukkan warga masyarakat di desa Tri Rukun dapat mengantisipasinya melalui gerakan FKUB dan gerakan karang taruna dalam menghalau ancaman yang datang dari luar desa mereka. Fakta bahwa desa Tri Rukun mampu menghalau gangguan keamanan yang datang dari luar adalah kondisi keamanan desa kami masih sangat tangguh dalam menghadapi ancaman yang datang dari gangguan dari pihak luar.

Untuk mengetahui lebih lanjut dan meyakinkan kita tentang kondisi gangguan kemananan dari pihak luar di desa Tri Rukun, perlu menghadirkan informan penelitian lainnya sebagai pembanding di antaranya sebagai berikut. Sesuai pernyataan dari ibu Sekdes Tri Rukun ibu Wiji Susanti sebagai berikut.

"Warga masyarakat di desa Tri Rukun tidak terpengaruh gangguan dari pihak luar, misalnya ketika ditanya bagaimana tanggapan warganya atas penyiaran TV swasta akan konflik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri konflik antaragama dll. Mengatakan tidak berpengaruh pada hubungan warga masyarakatnya dalam menjalin kerja sama dengan etnis Bali, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa" (Wawancara tanggal 25 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan di atas menunjukkan bahwa warga desa Tri Rukun tidak terpengaruh atas informasi konflik di dalam negeri dan di negara-negara lain adanya konflik agama, konflik antaretnis bahkan informasi seperti ISIS, organisasi alqaidah yang memanfaatkan simbol agama dalam memecah belah hubungan antaretnis di Indonesia khususnya di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Boalemo tidak memengaruhi kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara etnis yang ada di desa Tri Rukun.

Untuk lebih meyakinkan peneliti tentang ancaman gangguan keamanan dari pihak luar di desa Tri Rukun, kami konfirmasi kembali kepada informan penelitian ibu Nenglis Suriana sebagai staf Pemerintah Desa Tri Rukun mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

"Di desa Tri Rukun generasi mudah dipersatukan lewat Karang Taruna dalam membentuk solidaritas antarsesama etnis. *Support* pemerintah desa pada Karang Taruna berupa anggaran kegiatan dapat menghilangkan perilaku menyimpang generasi mudah untuk melakukan kegiatan negatif yang akan mengganggu stabilitas desa Tri Rukun. Melalui Karang Taruna generasi mudah dapat dipersatukan pada kegiatan olahraga dan kesenian yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh generasi mudah yang tergabung dalam Karang Taruna. Dengan

adanya Karang Taruna Ancaman gangguan yang datang dari luar tidak akan memengaruhi generasi mudah di desa kami" (Wawancara tanggal 27 Juni 2020).

Berdasarkan jawaban informan penelitian di atas memperkuat bahwa di desa Tri Rukun generasi mudah tidak akan terpengaruh gangguan keamanan dari luar karena mereka sudah bisa membedakan mana issu yang benar dan mana isu yang menyesatkan untuk memecah belah hubungan antaretnis di desa Tri Rukun yang sudah terjalin selama ini.

Pernyataan ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh bapak kepala desa Tri Rukun bapak I Wayan Candra tentang sikap-sikap negatif yang akan memecah belah hubungan antarras, agama, etnis, budaya di wilayahnya sebagai berikut.

"Pemerintah desa Tri Rukun dalam hal mencegah sikap yang akan memecah belah warganya, kebijakan yang kami tempuh adalah selalu mengundang masyarakat melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Boalemo di kantor desa melakukan sosialisasi tentang apa artinya hidup berdampingan antaretnis dalam membangun desa Tri Rukun secara bersama sehingga kepala desa dengan tegas menyatakan bahwa sikap egosentrisme, etnonasionalisme, sikap primordialisme dan etnosentrisme, tidak pernah ada pada sikap warga desanya yang dilakukan pada setiap bulan dan didukung oleh tiga pilar kepala desa, Babinsa dan tokoh-tokoh masyarakat ketika ada potensi gesekan antarsuku ketiga pilar ini bekerja dalam menghilangkan sikap-sikap negatif seperti etno nasionalisme, egosentrisme dan sikap primordialisme dapat kami cegah sehingga bila ada gangguan keamanan dari luar desa kami warga masyarakat dapat mencegahnya" (Wawancara tanggal 10 Juli 2020).

Berdasarkan pernyataan kepala desa Tri Rukun pemerintah desa pun ikut terlibat di dalam memelihara kerukunan beragama dan keharmonisan antaretnis di desa Tri Rukun. Melalui kegiatan FKUB yang rutin diselenggarakan pemerintah desa Tri Rukun di kantor desa dengan warganya khususnya kalangan generasi mudah dapat membantu dalam mempererat hubungan persaudaraan warga masyarakat desa Tri Rukun dan memperkuat pertahanan warganya dari gangguan keamaman dari pihak luar yang akan mengganggu hubungan harmonis di antara etnis di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari kabupaten Bolemo.

Untuk menelusuri apakah ada gerakan gangguan keamanan dari pihak luar di desa Tri Rukun dan bagaimana upaya pemerintah desa dan pemerintah kecamatan mengantisipasi gerakan gangguan keamanan dari luar. Peneliti menemui informan penelitian yang berasal dari staf kecamatan Wonosari.

Di antara informan yang ditemui adalah ibu Ni Wayan Putri Kepala seksi Trantib kecamatan Wonosari, ketika dikonfirmasi kondisi tentang gangguan keamanan yang datang dari fihak luar memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Warga masyarakat Kecamatan Wonosari yang di tempati oleh warga Transmigrasi di 14 desa yang ada semuanya tidak bermasalah hubungan antara etnis lokal dan warga transmigrasi sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antaretnis sebagaimana yang terjadi di daerah Kabupaten Poso dan Provinsi Maluku. Salah satu contohnya adalah desa Tri Rukun yang di tempati oleh etnis mayoritas Bali dan etnis lokal Gorontalo serta etnis Minahasa kehidupan mereka sampai dengan saat ini sangat damai sesuai dengan nama desanya Tri Rukun artinya tiga etnis

yang hidup bersama etnis Bali mayoritas, etnis lokal Gorontalo dan etnis Minahasa semuanya dalam kondisi stabilitas desanya sangat aman. Yang dimaksudkan warga masyarakat termasuk kalangan generasi mudahnya yang masih darah mudah yang berpotensi melakukan perilaku menyimpang. Mereka ini yang perlu mendapat perhatian bagaimana menjaga hubungan antaretnis dari gangguan keamanan dari pihak luar" (Wawancara tanggal 10 Juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak pemerintah kecamatan telah berusaha melakukan upaya preventif dalam mencegah ancaman gangguan yang datang dari luar warga kecamatan Wonosari baik secara langsung maupun dengan cara melalui media sosial yang bertujuan dalam memecah belah hubungan antaretnis sebagai warga transmigrasi di kecamatan Wonosari khususnya di desa Tri Rukun.

Dengan demikian, dapat dievaluasi tentang kondisi ketahanan wilayah pada dimensi kemananan nasional di desa Tri Rukun setelah menghadirkan semua indikator keamanan yang menunjukkan bahwa desa Tri Rukun sangat tangguh dalam menjaga stabilitas keamanan desanya dan ini berimplikasi terhadap ketahanan wilayah Kecamatan Wonosari dan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Boalemo.

Implikasinya bagi ketahanan wilayah kabupaten Boalemo adalah kecamatan Wonosari dinilai sangat tangguh dalam mewujudkan cita-cita *The Founding Fathers* mendirikan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme sehingga prestasi yang dicapai pemerintah desa Tri Rukun dalam meningkatkan stabilitas Wilayah harus diperhatikan oleh pemerintah kecamatan Wonosari dan pemerintah daerah kabupaten Boalemo

yang berhasil menerapkan model negara multikulturalisme yang berimplikasi terhadap ketahanan wilayah di kabupaten Boalemo. Mengapa saya katakan demikian bila dilihat dari dimensi ekonomi desa Tri Rukun menyumbang pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp25.000.000,00 per tahun belum dari hasil pertanian, peternakan dan perkebunan, perniagaan. Semua ini sebagai akibat dari pemerintah desa Tri Rukun sukses dalam menjalankan model negara multikuturalisme sehingga berimplikasi kepada pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Boalemo.

Dengan kontribusi yang besar yang disumbangkan oleh warga transmigrasi di kecamatan Wonosari, khususnya desa Tri Rukun membuka pemahaman kepada warga masyarakat Kecamatan Wonosari dan warga masyarakat Kabupaten Boalemo, betapa besar kontribusi warga transmigrasi melalui sektor Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di kecamatan Wonosari yang akan digunakan dalam membangun daerah kabupaten Boalemo.

Berdasarkan hasil riset ini akan dapat membantu warga masyarakat Boalemo untuk lebih serius dalam menjalankan model negara multikulturalisme di daerahnya lebih khusus kepada desa Tri Rukun dan desa-desa lainnya yang di tempati oleh warga transmigrasi di Kecamatan Wonosari. Inilah objek yang ingin diketahui dari judul penelitian tentang Membangun hubungan harmonis antaretnis lokal Gorontalo dengan Etnis Bali dan implikasi terhadap Ketahanan Wilayah.

BAB IX

REALITAS NEGARA *NATION STATE* MELALUI MODEL NEGARA MULTIKULTURALISME ANTARA ETNIS LOKAL GORONTALO DAN ETNIS TIONGHOA DI PROVINSI GORONTALO

Membangun negara multikultural sangat diharapkan oleh semua negara, di Indonesia salah satu daerah yang tidak pernah terjadi konflik horizontal dan konflik vertikal adalah adalah daerah kita tercinta Provinsi Gorontalo. Di mana didaerah ini tidak hanya penduduk lokal yang tinggal di daerah ini, namun penduduknya berasal dari berbagai etnik bahkan bangsa. Di mana penduduk Gorontalo ada yang berasal dari bangsa Chines dan bangsa Arab dan berbagai etnik yang ada. Bila kita melihat dan mengevaluasi kehidupan antara etnis di daerah Gorontalo cocok dijadikan sebagai pilot projek negara multikulturalisme. Kenyataan ini dapat kita lihat melalui hasil survei yang dilaksanakan di daerah Kota Gorontalo mengenai kondisi keberadaan etnis Cina dari bangsa Cina yang telah lama mendiami daerah Gorontalo.

Dalam mengkaji interaksi sosial etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo, terlebih dahulu kita melihat dari sisi mana hubungan kedua etnis tersebut terjalin. Bila melihat pertanyaan di atas, maka peneliti mengamati dari indikator interaksi di mana indikator interaksi yang menjadi penanda terjalinnya hubungan antaretnis Tionghoa dengan etnis

lokal di daerah kota Gorontalo dapat dilihat dari indikator di bawah ini.

A. Kerja Sama

Persepsi Etnis Tionghoa terhadap Etnis Lokal

Masyarakat kota Gorontalo ketika ditanyai beberapa hal di antaranya bagaimana hubungan kerja sama antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo jawabannya memberikan gambaran positip. Hal ini ditunjukkan melalui penuturan salah seorang warga kota Gorontalo dari etnis Tionghoa Cii Yeli Mamangkey ketika ditemui memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Hubungan kerja sama saat ini baik-baik saja, karena terbukti dengan karyawan saya berasal dari etnis lokal. Berbeda dengan etnis yang berada di daerah Makasar, mereka mempunyai batasan-batasan untuk bekerja sama dengan etnis yang lain" (Wawancara tanggal 20 Juni 2017).

Bila dilihat dari jawaban responsden di atas hubungan kerja sama yang terbangun saat ini dapat dilihat melalui hubungan kerja pada usaha. Di mana banyak karyawan etnis Tionghoa berasal dari etnis lokal. Hubungan ini sangat positip artinya dengan adanya etnis Tionghoa dalam bidang usahanya membuka peluang kerja bagi etnis lokal untuk mendapatkan pekerjaan guna untuk menghidupi keluarganya.

Senada dengan jawaban responsden di atas Ko Andre Hamdani ketika ditemui di tempat usahanya memberikan memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Hubungan kerja sama yang terjalin dengan baik, karena jika kita mencari karyawan hanya sesama etnis maka kita akan mengalami kesulitan. Jadi, dengan adanya kerja sama antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa maka akan terjalin sebuah kerja sama yang baik" (Wawancara tanggal 20 Juni 2017).

Demikian halnya dengan responsden Ci Monika Kambey ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapan yang tidak jauh berbeda dengan responsden sebelumnya. Di mana responsden memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Hubungan kerja sama saat ini baik-baik saja, karena jika kita tidak bekerja sama dengan etnis lokal maka kemungkinan besar akan terjadi konflik. Contohnya jika kita tidak menghargai apa yang menjadi tradisi masyarakat lokal, maka hal inilah yang akan menjadi konflik di antara kedua etnis" (Wawancara tanggal 30 Mei 2014).

Jawaban responsden di atas menunjukkan betapa tingginya kesadaran berbangsa. Sikap seperti ini harus dapat ditularkan pada sesama etnis lain. Karena kalau kesadaran seperti ini yang terbangun, maka hubungan interaksi antara kedua etnis akan terbangun dan terpelihara. Artinya konflik antaretnis tidak akan terjadi.

Tanggapan yang sama pun diberikan oleh Cii Delsy ketika dihubungi di tempat usahanya (toko) memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Ya, karena kami etnis Tionghoa dalam melakukan kerja sama dengan etnis lokal, kami tidak membatasi diri" (Wawancara tanggal 20 Juni 2017).

Demikian halnya jawaban responsden Ko an ketika dihubungi memberikan jawaban yang sama sebagai berikut.

> "Ya, karena buktinya kita sebagai etnis Tionghoa membuka usaha di Gorontalo dapat diterima dengan baik" (Wawancara tanggal 30 Juni 2017).

Untuk menelusuri lebih dalam hubungan kerja sama dengan etnis Tionghoa, maka pertanyaan selanjutnya adalah: "Apakah etnis Tionghoa tidak membatasi diri dalam pergaulan

selama ini." Pertanyaan tersebut mendapat respons dari beberapa responsden di antaranya sebagai berikut.

Menurut bapak Eman yang beralamat di jalan Imam Bonjol kota Gorontalo, ketika dihubungi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk membatasi diri sih pasti ada, contohnya tidak mungkin dalam pergaulan dengan masyarakat lokal tidak mungkin masyarakat Tionghoa mengikuti tradisi masyarakat lokal" (Wawancara tanggal 20 Juni 2017).

Jawaban responsden di atas, menunjukkan sikap dari etnis Tionghoa masih sedikit memberikan batasan pada hal-hal yang dianggap spesifik. Misalnya tradisi dari masyarakat lokal harus mereka menghormatinya.

Selanjutnya, menurut Ibu Ani etnis Tionghoa selama ini masih berjalan normal hal ini ditunjukan dengan respons beliau terhadap pertanyaan sebagai berikut.

> "Mereka tidak membatasi diri dalam pergaulan, hanya saja dalam hal tradisi pasti mereka harus membatasi diri. Seperti itu" (Wawancara tanggal 20 Juni 2017).

Untuk menggali lebih dalam lagi hubungan kerja sama antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa, maka pertanyaan yang dimintakan tanggapan pada responsden adalah: "Bentuk-bentuk kerja sama yang terbangun selama ini seprti apa bentuknya." Pertanyaan tersebut mendapat tangapan dari responsden sebagai berikut.

Menurut Bapak Darwindo ketika dimintakan tanggapannya memberikan pernyataan sebagai berikut.

> "Melalui kebutuhan untuk usaha perdagangan, misalnya saya membeli barang dari etnis Tionghoa, lalu saya jual kembali. Inilah hubungan kerja sama yang saya lakukan dengan mereka" (Wawancara tanggal 22 Juni 2017).

Pernyataan di atas hampir semua responsden dalam penelitian memberikan tanggapan yang sama hubungan kerja sama terbangun melalui hubungan kerja, hubungan dagang. Dengan demikian, bila dilihat dari apa yang menjadi jawaban di atas hubungan kerja sama dengan etnis lokal dngan etnis Tionghoa masih pada tahapan yang positip artinya masih sangat terbangun hubungan kerja sama tersebut.

B. Kompetisi

Bila interaksi sosial dilihat dari variabel dan indikator lain dari bentuk interaksi sosial, maka akan menghasilkan jawaban yang berbeda dalam penelitian. Untuk menggali bagaimanakah interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo kita akan telusuri dari berbagai pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Beberapa hal yang dikembangkan dalam pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: "Apakah selama ini antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa terjadi persaingan atau kompotisi." Maka dari pertanyaan ini kita akan lihat dari apa yang menjadi jawaban responsden.

Menurut Ko liong ketika diwawancarai di tempat usahanya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Sebagai pedagang yang mendisribusikan barang kepada konsumen, saya tidak pernah merasakan adanya persaingan antar dunia bisnis dari penduduk lokal" (Wawancara tanggal 22 Juni 2017).

Demikian halnya dengan pernyataan dari responsden Ko Ance ketika dihubungi di tempat usahanya (di toko) memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Persaingan itu perlu, apa lagi dalam usaha, hanya saja saya melakukan persaingan yang positip dalam usaha saya ini" (Wawancara tanggal 22 Juni 2017).

Namun, berbeda dengan responsden Cii lili memberikan respons sebagai berikut.

> "Selama saya menginjakan kaki di daerah Gorontalo ini, saya belum pernah merasakan adanya persaingan karena kebanyakan dari pedagang kecil dari penduduk asli Gorontalo membeli barang di toko saya" (wawancara tanggal 22 Juni 2017).

Dengan melihat jawaban responsden di atas, menunjukkan bahwa saat ini hubungan antara etnis Tionghoa dan etnis lokal sangat positip sekalipun saat ini mereka telah maju dalam berusaha di daerah Gorontalo. Artinya mereka dapat diterima keberadaannya di daerah Gorontalo.

Ketika ditanyakan kepada responsden "bagaimana sikap anda apa bila ada yang tidak senang dengan keberhasilan anda dalam berusaha di daerah Gorontalo". Pertanyaan ini mendapat tanggapan dari responsden sebagai berikut.

Menurut Cii Anggrid Margareth ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Memang ada, tetapi saya ambil sisi positipnya saja. Karena untuk menyikapi perasaan yang tidak diinginkan dari penduduk asli maka saya menjual makanan khas daerah Gorontalo Binde biluhuta dengan tujuan supaya dalam berdagang pun di daerah Gorontalo akan diterima dengan baik" (Wawancara tanggal 22 Juni 2017).

Kehidupan berdampingan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terkadang dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada etnis lain yang menyelenggarakan kegiatan membutuhkan dukungan bersama. Karena sudah menjadi kodrat hidup bersama adalah sikap tolong menolong.

Oleh karena itu, instrumen pertanyaan dalam penelitian dipertanyakan tentang "Pernakah Anda memberikan bantuan pada masyarakat lokal bagaimana berusaha yang baik supaya sukses sama dengan kehidupan Anda?" Pertanyaan ini mendapat tanggapan dari responsden.

Menurut Ko Oka ketika dihubungi dikediamannya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Saya belum memberikan bantuan dalam hal membagi pengalaman berusaha bagaimana trik-trik berusaha yang baik. Tetapi niat itu ada untuk saling membagi pengetahuan dalam berusaha khususnya bagi etnis lokal" (Wawancara tanggal 25 Juni 2017).

Dalam kaitan bantuan sosial etnis Tionghoa memberikan bantuan kepada etnis lokal. Hal ini ketika dikonfirmasi kepada responsden Cii Beti memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Tentu pernah contohnya memberikan bantuan pada anak-anak yatim mereka itu yang lebih membutuhkan karena kita manusia diwajibkan saling membantu satu dengan yang lainnya. Memberikan bantuan ke Masjid" (Wawancara tanggal 25 Juni 2017).

Persepsi Etnis Lokal terhadap Etnis Tionghoa

Untuk lebih mendapatkan data akurat tentang hubungan interaksi antara etnis Tionghoa dengan etnis lokal, sudah sewajarnya hasil penelitian pun melibatkan responsden dari etnis lokal dalam penelitian ini. Dengan menghadirkan responsden etnis lokal akan didapatkan data yang seimbang tentang hubungan interaksi sosial kedua etnis.

Dalam pengembangan hasil penelitian pertanyaan yang diberikan pada responsden adalah, "Bagaimana tanggapan anda menyikapi hubungan dengan etnis Tionghoa selama ini?" Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan yang bervariasi dari responsden di antaranya sebagai berikut.

Menurut bapak Nabil ketika dihubungi di tempat kediamannya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Selama ini hubungan dengan etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo sangat baik. Hubungan yang terbangun saat ini tidak mengalami masalah karena kami mengedepankan toleransi di antara kami" (Wawancara tanggal 25 Juni 2017).

Senada dengan responsden di atas menurut Ibu Fatma ketika dimintakan tanggapannya sebagai berikut.

> "Untuk saya pribadi pasti saya membatasi hubungan-hubungan tertentu misalnya saya sementara berbicara dengan etnis Tionghoa pada saat itu juga tiba mereka beribadah maka dari itu saya harus membatasi diri artinya saling menghargai, tetapi untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama pasti kami melakukanya" (Wawancara tanggal 25 Juni 2017).

Selanjutnya pertanyaan yang diajukan pada responsden sebagai pengembangan dari indikator penelitian adalah: "Apakah selama ini etnis Tionghoa dapat bekerja sama dengan baik dengan penduduk asli Gorontalo." Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan dari responsden di antaranya sebagai berikut.

Menurut Bapak Kahar ketika dihubungi mem-berikan tanggapan atas pertanyaan tersebut sebagai berikut.

> "Iya, kami saling bekerja sama. Contohnya dalam hal perdagangan. Dalam hal perdagangan ini yang pastinya ada saling melengkapi yaitu ada pembeli dan penjual. Karena kebanyakan saya mengambil barang dari etnis Tionghoa" (Wawancara tanggal 25 Juni 2017).

Demikian halnya dengan responsden bapak Kahar ketika ditanyakan tanggapannya memberikan jawaban yang sama sebagai berikut.

> "Tentu kami saling bekerja sama karena kami masyarakat lokal mengambil barang dari mereka. Jadi kerja sama kami itu sangat kuat. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa yang menguasai perdagangan di Kota Gorontalo ini adalah mereka yang berasal dari etnis Tionghoa. Jadi kebanyakan kita sebagai pedagang sangat membutuhkan barang-barang dari mereka" (Wawancara tanggal 1 Juli 2017).

Dengan jawaban responsden di atas, menunjukkan hubungan kerja sama antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa saat ini sangat baik. Oleh karena itu, hubungan antaretnis Tionghoa dengan etnis lokal harus dipupuk keharmonisannya. Karena kalau hal ini selalu terbangun akan menciptakan suasana kondusif di daerah. Secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada stabilitas nasional.

Selanjutnya pertanyaan berikutnya dalam penelitian adalah: "Apakah anda merasa bahagia melihat etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo selalu memulai usaha dengan usahanya yang besar." Pertanyaan ini diajukan dalam rangka menggali lebih dalam seberapa besar hubungan interaksi sosial di antara kedua etnis.

Pertanyaan di atas direspons oleh beberapa responsden di antaranya Ibu Lisa memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Menurut saya bahagia, jika kita tidak bahagia berarti ada perasaan iri dengan etnis Tionghoa. Kenapa kita harus mempunyai perasaan tidak senang sementara mereka tidak merasa irihati dengan kehidupan kita" (Wawancara tanggal 1 Juli 2017).

Senada dengan jawaban responsden di atas, menurut Bapak Riko ketika dihubungi memberikan tanggapannya sebagai berikut.

> "Mungkin saya merasa senang karena itu kesuksesan dari usaha mereka. Jadi, untuk apa kita tidak menyukai kesuksesan mereka. Jika harus iri, tapi pada tataran yang wajar-wajar saja, seperti kita mengambil sisi positipnya bagaimana kita harus sukses seperti mereka" (Wawancara tanggal 1 Juli 2017).

Ungkapan jawaban dua responsden di atas menunjukkan sikap dewasa dari etnis lokal khususnya di bidang usaha. Karena sesungguhnya keberhasilan etnis Tionghoa karena upaya kerja keras dari mereka dan saling membantu antarsesama etnis. Dengan demikian kita sebagai etnis lokal harus berusaha juga seperti mereka, artinya mempelajari strategi dalam pengembangan usaha mereka. Sikap seperti ini harus ditanamkan supaya hubungan antar kedua etnis tidak terganggu.

Bila dilihat dari keberhasilan etnis Tionghoa di Kota Gorontalo yang sangat sukses, memang memberikan kontribusi bagi daerah, tetapi bagaimana dengan sikap masyarakat etnis lokal apakah hal ini menjadi perhatian mereka.

Untuk menggali hal itu, responsden harus ditanyakan tentang sebagai berikut: "Apakah Anda sebagai penduduk asli merasa terganggu dengan kehadiran etnis Tionghoa di daerah Anda." Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan yang bervariasi dari responsden penelitian di antaranya sebagai berikut.

Menurut bapak Suleman ketika dihubungi di rumahnya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Saya sebagai masyarakat lokal di daerah kota Gorontalo sama sekali tidak merasa terganggu dengan kehadiran etnis Tionghoa karena selagi mereka tidak mengganggu kita" (Wawancara tanggal 1 Juli 2017).

Namun, berbeda dengan responsden bapak Zulfikar memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk saya pribadi sebagai pedagan di sini merasa terganggu. Karena kebanyakan orang-orang di daerah Kota Gorontalo lebih banyak memilih untuk membeli kepada mereka etnis Tionghoa sebagai pedagang yang terhitung sukses. Oleh karena itu, saya merasa terganggu dengan kehadiran mereka di daerah ini" (Wawancara tanggal 1 Juli 2017).

Ungkapan jawaban responsden di atas, menunjukkan sesuatu yang harus menjadi perhatian kita semua khususnya pemerintah daerah Kota Gorontalo. Di mana masih ada sebagian masyarakat kita yang merasa tidak senang dengan kehadiran etnis Tionghoa di daerah ini sehingga dengan sikap, seperti ini sudah saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius kepada masyarakatnya tentang betapa pentingnya kita hidup berdampingan. Apapun alasannya warga masya-rakat Gorontalo harus terbebas apa yang namanya konflik antaretnis, suku dan agama.

C. Akulturasi

Interaksi sosial tidak hanya dilihat dari hubungan kerja sama, hubungan kompetisi tetapi harus dilihat juga dari indikator akulturasi. Akulturasi sangat menentukan kelangsungan interaksi sosial di daerah. Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang sudah didapatkan melalui indikator yang sudah ditanyakan kepada responsden penelitian di mana masih ada masyarakat yang menolak kehadiran dari etnis lain khususnya etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo. Maka faktor penyebabnya karena etnis Tionghoa tidak melakukan akulturasi di masyarakat. Dengan tidak ada pembauran di masyarakat lokal atau masih memiliki tradisi masing-masing

yang melekat dari etnis tertentu. Maka inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat menolak akan kehadiran etnis lain di daerah kota Gorontalo.

Untuk menggali hal tersebut marilah kita telusuri masyarakat khususnya yang menjadi responsden dalam penelitian ini guna mendapatkan sejauhmanakah interaksi sosial yang terbangun antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo.

Dengan demikian maka penelitian ini dilanjutkan dengan pengembangan indikator akulturasi melalui pertanyaan di antaranya sebagai berikut: "Apakah anda selama ini mengetahui tradisi dari penduduk asli di daerah Kota Gorontalo."

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan responsden yang mewakili etnis Tionghoa.

1. Persepsi Etnis Tionghoa terhadap akulturasi

Dalam penelitian ini sangat diperlukan data yang akurat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, ketika pertanyaan tersebut ditanyakan kepada responsden yang siap memberikan tanggapannya memberikan jawaban yang bervariasi di antara responsden tersebut sebagai berikut.

Menurut Ibu Cii Susan ketika dihubungi di tempatnya di toko meubel, memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk tradisi secara *personality* saya sama sekali belum mengetahui sehingga perlu belajar memahami bagaimana tradisi daerah Gorontalo sesungguhnya. Misalnya, tradisi perkawinan, pemakaman, tradisi tombilatohe dan yang paling penting pemahaman apa yang menjadi pantangan kita di daerah supaya kita tidak melanggarnya" (Wawancara tanggal 1 Juli 2017).

Bila melihat jawaban responsden di atas, menunjukkan proses akulturasi belum optimal dilakukan oleh etnis keturunan Tionghoa di daerah Kota Gorontalo. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan warga masyarakat dari etnis Tionghoa. Karena pemahaman tradisi daerah di mana etnis

Tionghoa tinggal harus diketahui dan dipahami. Salah satu unsur perekat interaksi sosial di antara kedua etnis yang berbeda adalah salaing memahami tradisi masing-masing etnis. Mengapa ini menjadi sebuah keharusan karena sering terjadi konflik antaretnis karena disebabkan oleh etnis pendatang tidak mengetahui dan memahami etnis lokal sehingga akibatnya terjadi gesekan tradisi antaretnis.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah etnis Tionghoa menegatahui dan memahami tradisi dari etnis lokal marilah kita simak tanggapan dari responsden di bawah ini.

Menurut Ko Kim Liyanto ketika dihubungi di tempat usahanya di lokasi pertokoan memberikan tanggapan atas pertanyaan sebagai berikut.

> "Dari segi tradisi saya belum banyak mengetahui tradisi asli Gorontalo, mungkin yang saya ketahui itu hanya saja tradisi mereka seperti mereka salat 5 waktu, itu saya mengetahui jam mereka untuk salat" (Wawancara tanggal 1 Juli 2017).

Senada dengan jawaban responsden di atas menurut Cii Olha ketika dihubungi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk tradisi budaya di daerah kota Gorontalo itu saya belum mengetahu, tapi di sini saya akan menyalurkan aspirasi saya terutama dari segi kebersihan, kebanyakan masyarakat kota Gorontalo tidak menyadari kebersihan itu sendiri. Kita harus mencontohi daerah-daerah lain, seperti negeri Singapura meskipun daerah mereka kescil tetapi dari tradisi kebersihan mereka itu sangat terjaga (Wawancara tanggal 3 Juli 2017).

Untuk lebih mendalami seberapa besar proses akulturasi etnis Tionghoa dengan etnis lokal, maka instrument pertanyaan diarahkan pada: "Apakah anda mengikuti tradisi masyarakat lokal dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat lokal." Pertanyaan tersebut ketika

dimintakan tanggapannya dari responsden mendapat respons yang bervariasi.

Menurut Cii Susan ketika dihubungi memberikan argumentasinya sebagai berikut.

> "Untuk tradisi saya belum begitu tau, tetapi kan daerah Gorontalo banyak melaksanakan acara-acara tetapi mereka tidak pernah mengundang saya jadi saya tidak mungkin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut" (Wawancara tanggal 3 Juli 2017).

Demikian halnya dengan responsden Cii Olha ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapannya sebagai berikut.

> "Untuk partisipasi dari segi tradisi mungkin belum terlalu karena saya tidak tau banyak tradisi yang ada di daerah kota Gorontalo. Hanya saja partisipasi saya, mungkin dalam hal bantuan ataupun sumbangan untuk masjid-masjid, hanya seperti itu" (Wawancara tanggal 3 Juli 2017).

Senada dengan jawaban responsden di atas, menurut Cii Desy ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk tradisi saya sebagai masyarakat asli Tionghoa tidak mengetahui tradisi masyarakat lokal, hanya saja mungkin tradisi masyaraakat lokal yang paling banyak saya ketahui adalah masyarakat Tionghoa yang asli Gorontalo, tetapi untuk masyarakat loka saya tidak mengetahuinya sehingga saya tidak berpartisipasi. Namun, kalau kegiatan misalnya pertandingan yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal saya berpartisipasi" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Pernyataan responsden penelitian di atas menunjukkan proses akulturasi antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa khususnya pada penegatahuan dan pemahaman tradisi yang merupakan bagian dari indikator akulturasi dalam rangka

menciptakan interaksi sosial yang positip masih belum optimal terjadi di daerah kota Gorontalo. Dengan jawaban responsden dari kalangan etnis Tionghoa merupakan jawaban sementara kepada pemangku kepentingan di daerah ini, khususnya dinas terkait yang diberi tanggung jawab memperkenalkan tradisi masing-masing daerah untuk bekerja keras memperkenalkan tradisi etnis lokal. Mengapa demikian? Karena kegagalan melakukan proses akulturasi mengakibatkan kegagalan dalam proses interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo.

Pertanyaan di atas belum cukup menggali hubungan interaksi sosial khususnya indikator akulturasi. Untuk lebih menelusuri seberapa besar hubungan interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis lokal, maka pertanyaan yang dikembangkan dari indikator tersebut adalah: "Apakah dalam pergaulan dengan masyarakat lokal anda merasa punya posisi yang sama dengan etnis lokal dalam arti anda menghargai etnis lokal dengan tidak membeda-bedakan (diskriminatif) pada etnis lokal." Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan dan respons yang berbeda dari responsden penelitian di antaranya.

Menurut Ko Will ketika dihubungi di tempat usahanya toko Sinar Mulia memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk membeda-bedakan sih pasti tidak, karena kita sesama manusia pasti harus tolong-menolong. Jadi, untuk membeda-bedakan pasti tidak ada. Jika kita membeda-bedakan, pastinya akan terjadi yang namanya perselisihan" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Senada dengan jawaban responsden di atas, menurut Ko Andi pemilik toko perlengkapan keramik ketika dihubungi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk saya pribadi saya tidak pernah membeda-bedakan antara sesama etnis maupun etnis-etnis yang lain. Tergantung pada masing-masing pribadi apakah mereka senang bersosialisasi dengan etnis lokal atau tidak, tetapi untuk saya pribadi saya tidak pernah membeda-bedakan antara sesame etnis dan etnis yang lain" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Demikian juga dengan pernyataan responsden Ko Rayen yang memberikan tanggapan yang sama atas pertanyaan di atas. Di mana menurut beliau sebagi berikut:

> "Untuk saya tidak pernah membatasi diri dengan etnis yang lain. Justru saya suka bekerja sama dengan etnis lokal karena menurut saya mereka semua bersikap baik kepada saya, jadi tidak mungkin dong saya membeda-bedakan dengan etnis lain" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Namun, berbeda dengan pernyataan dari responsden di atas menanggapi pertanyaan tentang interaksi sosial yang berhubungan dengan persoalan pribadi, menurut Ko Liong sebagai berikut.

> "Kalau untuk saya pribadi, jika anjak saya mengalami hal demikian, maka saya tidak mungkin mengijinkan anak saya untuk melakukan hubungan asmara tersebut apakah harus berlanjut kehubungan pernikahan. Saya pasti tidak mungkin mengizinkan" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Pernyataan di atas berbeda juga dengan responsden di bawah ini Menurut Cii Susan bila hal ini terjadi pada pribadinya sebagai berikut.

> "Untuk saya pribadi saya *fine-fine* saja, itu tergantung masing-masing individu. Jika mereka saling mencintai kenapa tidak, Saya sendiri tidak pernah melarang apabila ada keluarga saya yang berhubungan dengan masyarakat lokal. Karena jika kita tidak mengikuti keinginan mereka yang saya takutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kawin lari, bunuh diri dan masih banyak lagi. Jadi intinya saya tidak pernah membatasi terutama dalam hubungan seperti itu" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Pernyataan selanjutnya yang masih ada hubungannya dengan jawaban responsden di atas, menurut Cii Ingrita ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Saya tidak pernah membatasi hal-hal seperti itu, karena buktinya banyak saudara-saudara saya menikah dengan etnis lain. Itupun bukan hanya satu etnis. Saudara-saudara saya itu ada yang menikah dengan etnis lokal bahkan dengan warga Negara lain karena kebahagiaan itu masing-masing individu yang menentukan. Jadi, mengapa kita harus menghalangi kebahagian orang lain?" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Menyimak hasil wawancara dengan responsden di atas mengenai hubungan interaksi sosial antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa, menunjukkan bahwa interaksi sosial antara kedua etnis sudah baik, namun ada hal yang harus dibenahi dan diantisipasi agar supaya konflik antaretnis di daerah kota Gorontalo tidak akan terjadi.

Demikian halnya ungkapan dari responsden Ko Andi ketika ditanyakan pertanyaan yang sama memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Untuk saya pribadi tidak pernah membeda-bedakan antara sesama etnis maupun etnis-etnis yang lain dan semua tergantung pada masing-masing pribadi apakah mereka senang bersosialisasi dengan etnis lokal atau tidak, tetapi untuk saya pribadi saya tidak pernah membeda-bedakan antara sesama etnis dan etnis yang lain" (Wawancara tanggal 5 Juli 2017).

Senada dengan jawaban responsden di atas dikemukakan oleh responsden Ko Rayen ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan komentar tentang pertanyaan tersebut sebagai berikut.

"Untuk saya tidak pernah membatasi diri dengan etnis yang lain. Justru saya suka bekerja sama dengan etnis lokal karena menurut saya mereka semua bersikap baik kepada saya, jadi tidak mungkin dong saya membeda-bedakan dengan etnis yang lain" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Memang kalau disimak pertentangan itu tidak sesuatu yang mengkhawatirkan, namun persoalan sekecil apapun harus disikapi dengan serius oleh masyarakat dan pemerintah dalam membangun hubungan antaretnis di daerah ini. Oleh karena itu, proses akulturasi benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh kedua etnis ketika menjalin hubungan antaretnis di daerah. Akulturasi merupakan keharusan bagi kita membangun hubungan harmonis di antara kedua etnis tersebut.

Untuk mendalami hubungan interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa, penelitian ini tidak hanya mempertanyakan hal-hal di atas, tetapi harus perlu mendalami yang sifatnya sekecil apa pun yang ber-hubungan dengan interaksi sosial. Oleh karena itu, per-tanyaan penelitian dikembangkan lagi dengan menggali: "Apabila ada kegiatan di daerah Anda yang berhubungan dengan tradisi lokal, bagaimana sikap Anda terhadap tradisi lokal tersebut?" Pertanyaan ini mendapat tang-gapan dari responsden di antaranya sebagai berikut.

Menurut Ko Oni ketika dihungi di tempat usahanya toko meubel, memberikan tanggapan sebagai berikut.

"Yang pastinya saya sangat menghargai, karena kita sebagai makhluk yang mempunyai akal dan pikiran sepatutnya kita menghormati dan menghargai apa yang menjadi tradisi masing-masing" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Demikian halnya dengan responsden KoJefri ketika dihubungi dengan pertanyaan yang sama memberikan tanggapan yang sama, pernyataan beliau adalah sebagai berikut.

"Saya sebagai etnis Tionghoa sangat menghargai apa-apa yang menjadi tradisi lokal, karena saya sebagai masyarakat Tionghoa yang mempunyai tradisi berbeda dengan masyarakat lokal. Mereka juga sangat menghargai apa yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa. Jadi, saya sangat menghargai tradisi masyarakat lokal tersebut" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Pendapat responsden di atas, menunjukkan sikap yang positip dalam membangun hubungan interaksi sosial antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo.

Sikap-sikap yang telah terbangun khususnya yang sifatnya positip selama ini, harus dipelihara dan ditularkan kepada semua kelompok etnis. Mengapa demikian karena semakin banyak yang memiliki sikap seperti responsden di atas, maka akan membantu stabiltas daerah dalam hal pembinaan antaretnis di daerah Gorontalo lebih khusus di daerah kota Gorontalo.

2. Persepsi Etnis Lokal terhadap akulturasi

Dalam kaitan dengan proses akulturasi antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa dapat dilihat dari pandangan masing-masing etnis. Mengapa hal ini dilakukan agar supaya data yang didapatkan berimbang bagi sebuah hasil penelitian. Penelitian tanpa didukung oleh persepsi kedua responsden baik itu responsden dari etnis Tionghoa maupun etnis lokal harus dimintakan tanggapannya mengenai seberapa besar proses akulturasi selama ini telah terbangun di antara kedua etnis tersebut.

Untuk mengetahui perimbangan data hasil penelitian tersebut marilah kita menelaah apa yang terjadi dengan etnis Tionghoa di kota Gorontalo melalui pertanyaan sebagai berikut: "Apakah selama ini Anda melihat etnis Tionghoa di daerah Anda telah berbaur dengan kehidupan masyarakat lokal?"

Pertanyaan ini mendapat tanggapan yang beragam dari responsden di antaranya sebagai berikut.

Menurut Bapak Dais Ibrahim ketika dimintakan tanggapannya memberikan pernyataan sebagai berikut.

> "Menurut saya iya, dengan adanya perdagangan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di daerah Gorontalo ini. Disitu kita sebagai etnis lokal sedikit demi sedikit tealah berbaur dengan etnis Tionghoa tersebut. Karena kita telah melakukan hubungan kerja sama antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa melalui usaha perdagangan tersebut" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Ungkapan yang sama pun dari bapak Rahmat Pakue yang mengementari tentang kebenaran terjalinnya hubungan antaretnis. Di mana menurutnya sebagai berikut.

> "Iya melihat kenyataan sekarang ini, lebih banyak pedagang etnis Tionghoa dibanding dengan etnis sendiri. Dengan itu etnis Tionghoa pun melakukan hubungan dengan etnis lokal di daerah ini" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Senada dengan jawaban responsden di atas, menurut Bapak Abdul Jamal Isa ketika dihubungi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Iya sekarang ini banyak etnis Tionghoa yang berdomisili di daerah Gorontalo, jelas kita sebagai etnis lokal dapat saling berinteraksi dengan mereka, seperti dengan adanya tradisi yang mereka lakukan di daerah kota Gorontalo" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Menyimak apa yang menjadi jawaban responsden di atas menunjukkan etnis Tionghoa saat ini telah melakukan interaksi dengan etnis lokal. Semoga hubungan antara kedua etnis tersebut dipelihara dan dijaga kekompakan dalam melakukan hubungan di masyarakat.

Jawaban di atas belum dapat mewakili dari parameter interaksi sosial. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah: "Dalam kegiatan yang bersifat tradisi daerah Gorontalo, apakah Anda melihat etnis Tionghoa bersifat tertutup dengan tradisi masyarakat lokal? Artinya, etnis Tionghoa tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan." Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan di antaranya sebagai berikut.

Menurut Bapak Anton Pakaya yang beralamat di jalan Prangkonero, ketika dihubungi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Kalau itu saya tidak tahu, tetapi mungkin mereka tetap melakukan partisipasi terhadap tradisi lokal itu sendiri. Contoh kecilnya memberi sumbangan terhadap panti asuhan" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Namun, ada pernyataan yang berbeda dengan responsden di atas, menurut Bapak Risno Mohamad memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Selama ini saya belum melihat hal seperti itu, yang saya tau etnis Tionghoa itu sedikit tertutup dengan etnis lokal (kikir)" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Pernyataan responsden di atas menunjukkan sifat partisipasi secara langsung masyarakat lokal tidak banyak yang mengetahuinya. Namun, kalau dilihat dari kontribusi secara resmi di daerah, etnis Tionghoa memberikan kontribusinya melalui pajak atau sumbangan pribadi yang tidak diumumkan kemasyarakat.

Bila dikaitkan dengan pertanyaan lain mengenai interaksi sosial tentang: "Apa yang menghambat Anda berinteraksi dengan etnis Tionghoa selama ini?" Pertanyaan ini mendapat tanggapan sebagai berikut.

Menurut bapak Rustam Harun ketika dihubungi di jalan Kalimantan memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Hambatan itu mungkin bahasa Tionghoa itu sendiri, kalau yang lain tidak ada. Tetapi banyak di antara mereka yang bertahun-tahun sudah bertempat tinggal di daerah Gorontalo menguasai bahasa daerah Gorontalo jadi kami tidak begitu banyak hambatan dalam berinteraksi" (Wawancara tanggal 10 Juli 2017).

Senada dengan ungkapan responsden di atas pernyataan yang sama pun disampaikan oleh responsden Ibu Riska Pomalango ketika dihubungi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Tidak ada, mereka di sini kan membangun usaha perdagangan di daerah kita dan kita sebagai etnis lokal menerima kedatangan etnis Tionghoa dengan baik dan melakukan interaksi dengan baik pula" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Demikian halnya dengan responsden ibu Neti Ponto ketika dihubungi di jalan Sudirman memberikan tanggapan yang sama sebagai berikut.

> "Tidak ada selama ini hubungan interaksi dengan etnis Tionghoa baik-baik saja, tetapi ada juga dari mereka yang kurang berinteraksi dengan etnis lokal" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Dengan pernyataan responsden di atas menunjukkan hubungan interaksi sosial antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa sangat baik, semoga hubungan yang terbangun selama ini dapat dipertahankan demi terbangunnya hubungan harmonis antar kedua etnis tersebut.

Namun, untuk memperdalam sejauhmana hubungan interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa, pertanyaan pun ditujukan kepada etnis lokal eksistensi tradisi etnis Tionghoa. Pertanyaan yang ditanyakan adalah, "Apakah Anda menerima juga tradisi Etnis Tionghoa di daerah Anda?"

Pertanyaan ini mendapat tanggapan bervariasi di antaranya sebagai berikut.

Menurut Nangsi Bangi ketika dihubungi di jalan Sudirman memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Iya, menerima, karena kita sebagai masyarakat asli Gorontalo harus saling menghargai sesama manusia dan juga menerima tradisi yang datang dari etnis-etnis lain" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Pernyataan yang sama pun disampaikan oleh responsden bapak Ariyanto Paramata ketika dihubungi memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Iya, menerima jika tidak pasti akan terjadi kerusuhan antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa" (Wawancara tanggaal 27 Juli 2017).

Ungkapan jawaban yang diberikan responsden di atas, menunjukkan penerimaan etnis lokal pun kepada etnis Tionghoa sangat baik. Hal ini harus dijaga hubungan yang baik selama ini. Karena kalau tidak akan mengalami masalah. Penerimaan etnis lain di tengah-tengah kehidupan masyarakat Gorontalo merupakan bagian dari kewajiban masyarakat khususnya masyarakat asli Gorontalo untuk dapat berbaur dengan siapa pun sekali pun dari etnis Tionghoa.

D. Pertentangan

Interaksi sosial tidak hanya dilihat dari beberapa indikator di atas, namun juga dapat dilihat melalui hubungan pertentangan. Bila dilihat dari indikator tersebut membangun keharmonisan tidak hanya sifatnya positip, namun juga akan menemukan di masyarakat potensi pertentangan. Akan tetapi, dalam teori interaksi sosial pertentangan bukan dikatakan sebagai masalah yang harus dihindari, tetapi harus dihadapi.

Mengapa demikian? Karena pertentangan bagian dari interaksi sosial. Artinya, tidak semua masyarakat memiliki kehendak yang sama dan pilihan yang sama serta sikap yang sama dalam memandang suatu peristiwa atau objek yang dihadapi. Itulah yang dikatakan dalam teori sosial bahwa konflik (pertentangan) dalam suatu masyarakat merupakan solusi dalam menyelesaikan masalah. Misalnya pertentangan masyarakat etnis lokal di Maluku, Poso semua berakhir dengan solusi perdamaian, yang awalnya banyak menghadapi problema pertentangan antara masyarakat di daerah tersebut.

Demikian juga dengan masyarakat di daerah kota Gorontalo yang memiliki penduduk yang hetorogen atau multikultural sehingga untuk menjadikan masyarakat Gorontalo dalam satu sikap tidak semudah membalikan telapak tangan karena berbagai keinginan dari berbagai etnis. Oleh karena itu, pertentangan dalam masyarakat di daerah memang selalu ada. Tetapi strategi dalam menyelesaikan pertentangan itu diperlukan kehati-hatian dari pemerintah dalam menangani pertentangan antara etnis tersebut. Akan tetapi, yakinlah perbedaan itu adalah indah, artinya pemerintah harus lebih bijak menyikapi hal tersebut sehingga penanganan hubungan antara etnis di daerah kota Gorontalo tidak mengalami kegagalan.

Untuk menelusuri fakta yang sebenarnya marilah kita lihat di lapangan apakah potensi pertentangan itu ada di masyarakat Gorontalo khususnya dalam kaitan dengan objek penelitian interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo.

Bila menyimak dari beberapa responsden di bawah ini ketika diberikan pertanyaan sehubungan dengan indikator interaksi sosial melalui parameter pertentangan tentang pertanyaan sebagai berikut: 'Bagaimanakah tanggapan Anda selama ini? Apakah masyarakat etnis Tionghoa dalam hubungan pergaulan sampai dengan hubungan perkawinan? Apakah

Anda tidak mengalami kesulitan dalam menjalaninya?" Pertanyaan ini mendapat tanggapan yang bervariasi sebagai berikut.

Menurut ibu Lili Kadir ketika dihubungi memberikan tangapan tentang pengalaman selama ini sebagai berikut.

> "Dulu saya pernah menjalani hubungan khusus dengan etnis Tionghoa Namanya Ling, ada kasus etnis yang saya tidak suka sifatnya, memandang rendah etnis kita" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Memang pertanyaan di atas belum dapat mewakili masyarakat Tionghoa, karena hanya sedikit yang mengetahui permasalahan yang ditanyakan di atas. Namun kalau dilihat di daerah ini hanya sedikit golongan etnis Tionghoa yang melakukan pernikahan dengan etnis lokal. Hal ini memberikan gambaran bahwa memang pernikahan antaretnis masih merupakan pertentangan di kalangan etnis Tionghoa. Disebabkan karena beberapa hal di antaranya sistem pewarisan tradisi, pewarisan harta dan tradisi yang masih dipegang oleh etnis Tionghoa. Semua ini masih sifatnya terselubung tidak muncul dipermukaan sehingga untuk menggali data seperti itu akan mengalami kesulitan.

Untuk mendalami pertanyaan yang merupakan bagian dari indikator pertentangan dalam hubungannya dengan interaksi sosial perlu ditanyakan pertanyaan pribadi ketika ada etnis lokal yang telah menikah dengan etnis Tionghoa sehingga pertanyaannya adalah: "Bagaimanakah selama ini hubungan antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa? Apakah tidak ada pertentangan dari segi tradisi masing-masing?" Pertanyaan tersebut mendapat tanggapan dari responsden di antaranya sebagai berikut.

Menurut Ko Lay ketika dihubungi tempat usahanya (toko) memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Tidak ada pertentangan sama sekali, malah kami membantu dalam hal sumbangan dan malah kami di undang apabila kalau ada etnis lokal yang melaksanakan acara dengan tradisi masing-masing" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Demikian halnya dengan responsden Cii Inggrit ketika dihubungi di tempatnya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Tidak, karena mereka juga mengundang kami dalam acara tradisi seperti ini tetapi kami juga kan tidak mungkin menghadiri acara seperti itu karena mengingat kami punya kesibukan dalam hal perdagangan sekarang ini" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Senada dengan pernyataan responsden di atas, menurut Cii Susan ketika dihubungi memberikan komentar tentang pertanyaan sebagai berikut:

> "Tidak karena kami kan berusaha untuk saling menghargai satu sama lain, mereka juga sangat menghargai tradisi yang kami lakukan begitu juga dengan tradisi etnis lokal kami hargai tradisi mereka" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Melihat apa yang menjadi tanggapan responsden di atas menunjukkan kedua etnis tersebut telah memahami arti pentingnya hidup berdampingan satu sama lain, sekalipun ada pertentangan dalam hal-hal tertentu. Jawaban responsden di atas menunjukkan hubungan interaksi sosial antara etnis Tionghoa selama ini masih dalam tahap baik-baik sehingga kondisi ini harus dipelihara dan dipertahankan kelangsungannya.

Untuk lebih memahami indikator pertentangan yang merupakan bagian dari interaksi sosial di atas, maka dikembangkan pertanyaan lanjutan dalam menggali sejauh mana kondisi di lapangan. Pertanyaanya adalah sebagai berikut:

"Apakah selama ini Anda dalam berusaha tidak mendapat pertentangan atau penolakan dari etnis Lokal?" Pertanyaan ini mendapat tanggapan dari beberapa responsden dari etnis Tionghoa di antaranya sebagai berikut.

Menurut Ci Yelly Mamengkey ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Tidak ada pertentangan kalau ada pertentangan tidak mungkin kami membangun usaha di sini, malah sebagian pembeli juga banyak etnis lokal yang membeli usaha saya di sini" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Sehubungan dengan pernyataan di atas responsden berikutnya memberikan tanggapan yang sama pada pertanyaan di atas, menurut Cii Yandika ketika dimintakan tanggapannya memberikan komentar sebagai berikut:

> "Tidak ada penolakan selama ini karena yang penting satu sama lain saling menghargai. Kalau kami tidak menghargai ataupun berusaha tidak sesuai prosedur yang ada kami jelas mendapatkan pertentangan" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Senada dengan jawaban dua responsden di atas, menurut Cii Jean memberikan tanggapan sebagai berikut:

> "Tidak ada karena mengingat komunikasi kami dengan etnis lokal baik, malahan saya dengan karyawan ada humor-humor yang selalu kami lakukan untuk mengakrabkan hubungan kami" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Jawaban responsden di atas menunjukkan hubungan yang terbangun saat ini sudah sangat baik sehingga etnis Tionghoa ketika membuka usaha di daerah Gorontalo mendapat penghargaan dari etnis lokal. Semua ini karena sikap yang baik dari etnis Tionghoa kepada etnis lokal selama ini. Hubungan ini bukan hanya terbangun begitu saja, artinya kalau kita tidak

memahami arti pentingnya hidup berdampingan dengan baik, maka hubungan interaksi sosial pun akan mengalami masalah.

Untuk mendalami hubungan interaksi sosial antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa, maka indikator pertentangan perlu diperluas pertanyaannya. Tujuannya adalah untuk mengali informasi seberapa jauh interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah Kota Gorontalo. Pengembangan pertanyaannya adalah: "Menurut Anda, bagaimana Anda terterima di masyarakat lokal sehingga Anda tidak mendapatkan penolakan (pertentangan) kehadiran Anda di tengah-tengah masyarakat lokal?" Pertanyaan ini ketika dimintakan tanggapan dari responsden penelitian memberikan tanggapan di antaranya sebagai berikut.

Menurut Cii Nina ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapan sebagai berikut.

> "Kami melakukan pendekatan dengan cara menghargai satu sama lain, dan kami membuka usaha dengan mempekerjakan etnis lokal. Mungkin melalui cara ini kami dapat terterima di tengah-tengah masyarakat etnis lokal di daerah ini" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Demikian halnya dengan penuturan dari responsden di bawah ini ketika dimintakan tanggapan dengan pertanyaan yang sama memberikan tanggapan yang tidak jauh berbeda dengan responsden di atas.

Menurut Cii Yan cara mereka supaya dapat terterima di masyarakat etnis lokal adalah sebagai berikut.

> "Yang kami lakukan beradaptasi dengan baik dengan etnis lokal mengingat kami sebagai pendatang di sini, apabila perlakuan kami tidak baik dengan mereka maka etnis lokal akan menolak kehadiran kami di daerah ini dan sudah tentu usaha kami pun akan mengalami masalah" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Senada dengan jawaban responsden di atas, menurut Ko Jon ketika dihubungi di tempat usahanya memberikan tanggapan atas pertanyaan sebagai berikut.

> "Kami membuka usaha dan mereka merasa terbantu dengan usaha yang kami dirikan dan kami juga berperilaku yang baik kepada sesama masyarakat lokal apabila ada karyawan kami yang jujur dan baik, kami berusaha memberikan modal kepada mereka dan juga hari-hari besar kami memberikan ampau kepada mereka" (Wawancara tanggal 27 Juli 2017).

Ungkapan dari ketiga responsden di atas menunjukkan betapa tingginya kesadaran etnis Tionghoa khususnya menyangkut masalah-masalah yang mungkin akan mengakibatkan kegagalan interaksi sosial. Pertentangan itu ada karena disebabkan ketidak mampuan kita dalam menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Kesadaran yang telah terbangun di atas menunjukkan bahwa etnis Tionghoa menyadari akan hal yang dapat merusak interaksi sosial antar kedua etnis. Oleh karena kondisi seperti ini harus dipelihara dan dibina oleh setiap masyarakat yang ada di daerah Kota Gorontalo.

Persepsi Etnis Lokal terhadap Etnis Tionghoa

Dalam memperoleh data akurat dalam penelitian ini, tidak fair kalau hanya mengandalkan informasi yang disampaikan dari salah satu pihak pada penelitian ini. Untuk itu mendapatkan data yang akurat penelitian ini pun menghadirkan tanggapan etnis lokal terhadap etnis Tionghoa di daerah Gorontalo.

Menelusuri apa sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat lokal dengan keberadaan etnis Tionghoa di daerah Gorontalo, sebaiknya instrumen yang kita pakai adalah pertanyaan yang berhubungan dengan sikap. Hal ini dapat kita

lihat melalui pertanyaan sebagai berikut: "Apakah Anda merasa tersaingi dengan kehadiran etnis Tionghoa di daerah Anda?" Pertanyaan ini mendapat tanggapan yang bervariasi dari responsden di antaranya sebagai berikut.

Menurut Yeyen etnis lokal ketika dimintakan tanggapannya atas pertanyaan memberikan jawaban sebagai berikut.

> "Ya merasa tersaingi, karena melihat dari usahanya yang cukup maju dan mereka sebagian besar menguasai perdagangan di daerah Gorontalo, jadi intinya saya merasa tersaingi dan merasa cemburu kepada etnis Tionghoa" (Wawancara tanggal 28 Juli 2017).

Demikian halnya dengan pernyataan responsden Safrin Daud ketika dimintakan tanggapannya atas pertanyaan di atas, menurutnya sebagai berikut.

> "Ya merasa tersaingi karena melihat dari usahanya yang cukup maju dan mereka sebagian besar menguasai perdagangan di daerah Gorontalo. Jadi intinya, saya merasa tersaingi dan merasa cemburu kepada etnis Tionghoa" (Wawancara tanggal 28 Juli 2017).

Berbeda dengan pernyataan responsden di bawah ini yang memberikan tanggapan atas pertanyaan di atas. Menurut Bapak Marwan eksistensi etnis Tionghoa di daerah Gorontalo sebagai berikut.

> "Tidak, karena kedatangan mereka di sini juga sangat membantu etnis lokal yang dijadikan karyawan oleh mereka dan dari kontribusi pajak kedaerah dapat menambah pendapatan daerah Gorontalo" (Wawancara tanggal 28 Juli 2017).

Dengan melihat jawaban responsden di atas, terjadi perbedaan dalam menyikapi kehadiran etnis Tionghoa dalam bidang usaha. Mengapa terjadi pemahaman berbeda, karena disebabkan ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang

kontribusi yang diberikan oleh etnis Tionghoa, melalui bidang usaha perdagangan yang ada di daerah Gorontalo. Bagi mereka yang telah memahami tidak mungkin akan menolak kehadiran etnis Tionghoa, dan bagi mereka yang masih sensetif dengan kehadiran etnis Tionghoa membutuhkan treatment pemerintah daerah untuk memberikan informasi tentang kontribusi etnis Tionghoa kepada daerah. Dengan informasi yang diterima di masyarakat perbedaan pendapat tersebut akan menemui persamaan dalam menyikapi kehadiran etnis Tionghoa di daerah Gorontalo khususnya dikota Gorontalo.

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kaitannya dengan objek penelitian tentang Interaksi Sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Masih ada sebagian masyarakat etnis Tionghoa yang belum melakukan proses akulturasi dengan etnis lokal.
2. Masih ditemukan masyarakat etnis lokal yang tidak senang dengan kehadiran dari etnis Tionghoa, disebabkan karena keberhasilan usaha yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Kota Gorontalo.

Berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan kepada pemerintah daerah menyikapi potensi-potensi yang dapat mengganggu hubungan harmonis antara etnis lokal dan etnis Tionghoa. Artinya kalau potensi di atas tidak dicarikan solusi akan berakibat timbulnya konflik antaretnis di daerah kota Gorontalo.

Analisis realitas *nation state* dalam kaitan dengan interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo, bila dikaitkan dengan teori yang ada dalam interaksi sosial, di mana interaksi sosial menghendaki adanya keharmonisan, namun interaksi sosial tidak lepas dari Indikator interaksi sosial di antaranya adalah kerja sama, kompotisi, akulturasi dan pertentangan. Bila dilihat dari aspek kerja sama

interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis lokal sangat positip hal ini ditunjukan oleh jawaban responsden dalam penelitian di mana kerja sama antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo sangat positip.

Demikian halnya dengan indikator kompitisi, di mana dari hasil penelitian menunjukkan adanya kompetisi antaretnis tidak dapat dihindari. Namun, karena masyarakat Gorontalo memahami bahwa persaingan antaretnis tidak perlu dibesar-besarkan karena etnis apa pun yang ada di daerah Gorontalo merupakan masyarakat Gorontalo yang diberi tanggung jawab bersama untuk membangun daerahnya.

Bila melihat kondisi daerah Gorontalo sebagai masyarakat majemuk dalam arti masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan Agama sudah saatnya memahami apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita tentang kearifan lokal. Di mana masyarakat Gorontalo dikenal dengan adat bersendikan *syaraa*, dan *syaraa* bersendikan *kitabullah*. Dengan kesadaran seperti ini ketika terjadi perbedaan paham pada masyarakat di daerah kota Gorontalo, tetap terjalin tidak dapat dipengaruhi oleh apapun yang menghendaki masyarakat di daerah kota Gorontalo terjadi konflik sebagaimana yang terjadi di daerah lain seperti Poso dan daerah Maluku.

Kompetisi yang muncul di dalam hasil penelitian di atas terungkap ada pada bidang usaha perdagangan, namun kedua etnis tersebut tetap menjalin hubungan harmonis tidak terpengaruh karena berpegang pada kearifan lokal tersebut. Di samping itu masyarakat daerah Gorontalo sampai dengan saat ini terlihat rukun sekalipun ada persaingan di dalamnya karena memang tradisi yang terbangun sejak lama rakyat daerah Gorontalo sangat menjunjung tinggi penghargaan pada yang namanya tamu atau pendatang di daerah. Sebagai tuan rumah diajarkan dalam agama yang dianut oleh penduduk asli Gorontalo muliakan tamunya, barang siapa yang memuliakan

tamu maka balasannya adalah syurga. Dengan prinsip hidup seperti inilah maka memunculkan sikap toleransi antaretnis di daerah kota Gorontalo. Hal ini ditunjukan oleh hasil penelitian di mana ada kompetisi tetapi sekalipun kompetisi itu ada masyarakat di daerah Kota Gorontalo tidak akan terjadi konflik yang sama dengan daerah lain sebagaimana yang disebutkan di atas. Inilah bentuk keunikan masyarakat daerah Kota Gorontalo yang sampai dengan saat ini masih terpelihara dan terjaga.

Bila dikaitkan dengan teori demokrasi, maka masyarakat di daerah kota Gorontalo sangat demokratis. Hal ini ditunjukan oleh sikap masyarakat Gorontalo yang terbuka menerima kehadiran dari berbagai etnis. Demikian juga dengan pemerintahan yang ada di daerah kota Gorontalo. Di mana pemerintah daerah Kota Gorontalo memperlakukan etnis diluar Gorontalo sama dengan etnis Gorontalo. Dengan prinsip demokrasi inilah yang sedikit membantu masyarakat daerah Gorontalo sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antaretnis.

Apa yang terjadi selama ini hubungan antaretnis di daerah Gorontalo dapat memengaruhi stabilitas daerah di mana salah satu potensi konflik adalah kegagalan daerah dalam mengelolah konflik antaretnis di daerah. Dengan jawaban hasil penelitian menunjukkan daerah Gorontalo sangat positip hubungan antaretnis yang saat ini telah terbangun.

Hal ini bila dikaitkan dengan perspektif ketahanan nasional sangat berpengaruh di mana apabila interaksi sosial di suatu daerah kuat, maka dampaknya pun pada kondisi ketahanan nasional suatu Negara pun akan stabil. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan dasar dalam membentuk suatu kondisi ketahanan suatu Negara.

Dalam arti membangun ketahanan nasional suatu Negara pemerintah harus memperbaiki interaksi sosial di masing-masing wilayah. Pembentukan interaksi sosial dalam suatu

Negara yang kondisi negaranya heterogen (*multicultural*) membutuhkan waktu yang cukup lama dan kerja yang serius dari pemerintah.

Harapan membangun ketahanan nasional yang stabil merupakan impian dari semua negara yang ada di dunia ini, karena kestabilan suatu negara akan menentukan keberlangsungan suatu Negara itu. Dalam arti negara yang tidak mampu mewujudkan ketahanan nasionalnya akan menjurus kepada situasi pembubaran negara sebagaimana yang terjadi pada Negara Yugoslavia dan Negara Uni Soviet.

Dengan demikian, interaksi sosial dalam perspektif ketahanan nasional menjadi penting ditelaah semua pihak baik itu penyelenggara Negara maupun kalangan akademisi. Bagi saya sebagai pemerhati sosial menjadi sangat penting ketika kita melihat di berbagai daerah di Indonesia banyak terjadi konflik. Ini membuktikan ada kegagalan pemerintah dalam mengelola Negara dengan melakukan pendekatan ketahanan nasional. Ketahanan nasional mengatakan apabila hubungan interaksi sosial baik, maka baiklah kehidupan masyarakat itu, apabila interaksi sosial antara pemerintah dengan rakyatnya tidak baik, maka yang akan terjadi adalah konflik.

Dengan demikian, interaksi sosial merupakan salah satu yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam menata Negara, apalagi negara multikultural atau heteroginitas seperti Negara Indonesia. Bagi Negara yang gagal membina interaksi sosial akan tererumus pada Negara gagal *(Failed State)*. Keinginan masyarakat di Indonesia tidak berharap terjadinya hal itu. Oleh karena itu, pemerintah harus punya kemampuan managerial dalam mengelola Negara multikulturalisme seperti Negara Republik Indonesia.

Konsep ketahanan nasional dalam perspektif interaksi sosial dapat dilihat dari hubungan masyarakat dari aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan Negara. Di mana apabila interaksi masyarakat dalam beridiologi di masyarakat, berbangsa dan bernegara baik. Maka dari segi stabilitas idiologi sebagai dasar mengukur ketahanan nasional di bidang idiologi pun menjadi baik.

Demikian halnya dengan interaksi sosial di bidang politik, apabila masyarakat di suatu daerah memberikan kesempatan yang sama kepada etnis di setiap daerah, maka stabilitas politik yang menjadi standar penilaian ketahanan nasional di bidang politik pun dianggap berhasil artinya pencitraan suatu daerah atau Negara akan dinilai berhasil. Jadi, ukurannya kestabilan politik adalah semua warga Negara dengan tidak melihat etnik tertentu diikutkan dalam semua ipen politik di daerah/negara. Artinya, pemerintah jangan membatasi hak-hak politik bagi warga Negara di daerahnya.

Selanjutnya, interaksi sosial di bidang ekonomi di mana masyarakat dalam suatu Negara atau daerah harus diperlakukan sama oleh pemerintah dalam berusaha. Jangan sampai ada warga Negara diperlakukan tidak adil hanya karena berbeda etnis dengan yang memerintah. Oleh karena itu, memahami interaksi sosial di bidang ekonomi sebenarnya makna yang dapat dipahami dalam konsep ini adalah perlakukan yang adil dalam melakukan usaha. Mengapa ini dijadikan dasar dalam menilai kestabilan suatu Negara karena ekonomi menjadi potensi utama konflik di suatu Negara.

Demikian halnya dengan pemahaman interaksi sosial di bidang sosial budaya dimaknai sebagai hubungan antara individu dengan individu, hubungan antara kelompok masyarakat dengan masyarakat yang ada di tempat tinggalnya demikian halnya dengan interaksi budaya. Di mana interaksi budaya sangat penting di antara warga negara karena terkadang

terjadi konflik budaya di antara etnis tertentu misalnya pada acara budaya pemakaman, pernikahan. Artinya, kalau masing-masing etnis yang berbeda tidak saling memahami dan saling mempertahaankan ego kedaerahannya akan menimbulkan konflik di antara kedua warga yang berbeda etnis tersebut. Oleh karena pemahaman interaksi budaya harus dimengerti sebagai upaya mencari persamaan bukan perbedaan di antara budaya tersebut. Memang budaya di setiap daerah berbeda satu sama lain, namun persamaannya adalah pada tujuan pelaksanaan budaya tersebut.

Terakhir, interaksi sosial di bidang keamanan dan pertahanan negara. Penilaian interaksi tersebut dapat dilihat melalui kemampuan masyarakat di suatu daerah dalam menjaga ketentraman di daerahnya khususnya disatu daerah yang memiliki variasi penduduk yang berbeda etnis. Hubungan yang terbangun antara etnis dapat memengaruhi stabilitas nasional suatu negara. Karena apabila di suatu daerah terjadi konflik maka dapat dikatakan keamanan nasional terganggu. Namun, kaitan-nya interaksi sosial di bidang pertahanan dapat dipahami sebagai kemampuan warga negara dan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Di mana interaksi sosial di bidang pertahanan jangan dipahami sebagai perang dari negara lain. Akan tetapi, masalah pertahanan dapat dilihat dari semangat nasionalisme artinya apabila ada warga negara dari etnis tertentu hanya merasa bagian dari etnisnya dan menganggap etnis lain bukan bagian dari kehidupannya, gejala seperti ini adalah merupakan ancaman pertahanan negara. Dengan demikian, interaksi pertahanan negara harus dapat dilihat seberapa besar kecintaan warga negara terhadap negaranya.

Berangkat dari perspektif ketahanan nasional di atas, bila dikaitkan dengan interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo sangat positif di mana kondisi idiologi masyarakat lokal dengan etnis Tionghoa di

daerah kota Gorontalo tidak mengalami masalah. Hal ini ditunjukan dalam hasil penelitian. Di mana ideologi dari kedua etnis bisa menemukan persamaan dalam kaitanya mereka melakukan interaksi. Artinya, sampai dengan saat ini masyarakat lokal meninkmati tradisi dari etnis Tionghoa demikian halnya etnis Tionghoa yang menghargai seluruh tradisi dari etnis lokal.

Di bidang politik etnis Tionghoa yang ada di Kota Gorontalo diberikan hak yang sama dalam kerelibatan untuk melakukan pilihan, baik pemilihan Presiden, kepala daerah, maupun anggota legislative di daerah. Semua berjalan lancar tanpa ada konflik di antara etnis tersebut.

Demikian halnya dengan masalah ekonomi, di mana masyarakat etnis Tionghoa diberikan peluang yang sama dengan etnis lokal dalam berusaha di daerah Gorontalo. Dan bagi masyarakat lokal pun menghargai dan mendunkung semuaa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh etnis Tionhoa di daerah Gorontalo.

Di bidang sosial, masyarakat telah mengalami proses akulturasi dengan masyarakt etnis lokal, saklipun ada hal-hal yang belum optimal dilaksanakan oleh etnis Tionghoa, namun semua dapat diatasi melalui hubungan kerja sama di bidang usaha, partisipasi dalam kegiatan tradisi masing-masing daerah. Dan yang paling terpenting adalah perlahan-lahan prose perkawinan antaretnis telah terjadi di daerah Gorontalo. Hal ini menunjukkan proses akulturasi sudah semakin baik.

Di bidang pertahanan kedua etnis telah berpartisipasi untuk menjaga stabilitas daerah. Di mana etnis Tionghoa telah berkontribusi memberikan peningkatan pada pendapatan asli daerah melalui kewajiban pajak kedaerah, demikian halnya dengan etnis lokal yang menjaga stabilitas dengan memberikan penghargaan pada etnis Tionghoa di daerah Gorontalo.

Demikian halnya dengan bidang keamanan, kefua etnis telaah memberian kontribusi yang positif dalam menjaga hubungan antar kedua etnis. Hal ini ditun jukan oleh hasil penelitian bahwa daerah Gorontalo konflik antara etnis tidak terjadi. Mengapa itu terjadi karena terbbangunnya interaksi sosial yang baik aantara kedua etnis di daerah kota Gorontalo.

Demikianlah hubungan antara interaksi sosial dengan perspektif ketahanan nasional. Ketahanan nasional terwujud apabila ketahanan daerah tercipta, dan ketahanan daerah terwujud apabila masyarakat melakukan hubungan interaksi sosial dengan baik. Artinya, memahami tentang pentingnya interaksi dalam kehidupan berdampingan antaretnis di daerah Gorontalo. Kegagalan membina hubungan harmonis disebabkan oleh karena kegagalan membangun interaksi sosial yang baik. Semua ini akan terwujd apabila terjadi sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat bahu membahu membudayakan hubungan harmonis antara sesama warga masyarakat dengan menghilangkan perbedaan disegala bidang.

Bila melihat dari hasil survei yang dilaksanakan di daerah Kota Gorontalo mengenai kriteria negara multikulturalisme, ternyata di daerah Provinsi Gorontalo memenuhi syarat sebagai negara multikulturalisme. Hal ini didapat melalui hasil survei yang ditemukan pada kondisi masyarakat etnik Tionghoa dan etnis lokal tidak mengalami konflik secara horizontal. Sekalipun ada beberapa gesekan sosial antara etnis lokal dan etnis Cina tetapi tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Semua ini didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat Gorontalo dan pemerintah daerah dalam membangun negara multikulturalisme.

BAB X

ANALISIS *NATION STATE* MELALUI MODEL MULTIKULTURALISME DALAM MERAJUK KEHARMONISAN HUBUNGAN ANTARA ETNIS LOKAL GORONTALO DENGAN ETNIS BALI DAN ETNIS TIONGHOA DI PROVINSI GORONTALO

Dalam mengkaji analisis nation state melalui model negara multikulturalisme di Provinsi Gorontalo dengan melihat kehidupan antara etnis lokal dan etnis Bali serta etnis Tionghoa berasal dari bangsa Cina sebagai warga negara Indonesia di dua daerah yakni Kabupaten Boalemo dengan lokasi penelitian di Desa Tri Rukun yang penduduknya mayoritas berasal dari etnik Bali dengan keyakinan agamanya Hindu dan Kota Gorontalo dengan penduduknya dari bangsa Tionghoa akan melihat bagaimana hubungan yang terjadi antara etnis lokal. Untuk menganalisis kehidupan interaksi sosial sebagai basis dari indikator negara multikulturalisme dapat kita lihat melalui pembahasan di bawah ini sebagai berikut.

A. Kondisi Hubungan Antaretnis Lokal Gorontalo dengan Etnis Bali

1. Hubungan Interaksi antara Masyarakat Etnis Bali dan Etnis Gorontalo di Desa Tri Rukun

Dalam hidup bermasyarakat, kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Salah satu interaksi sederhana yang sering sekali terjadi antara

anggota masyarakat adalah berpapasan ketika sedang berjalan di trotoar atau jalan. Ketika dua orang akan saling berpapasan, mereka sekilas akan saling memandang dari kejauhan. Namun, kemudian mereka saling berpaling dan menghindari kontak mata ketika saling melewati.

Soerjono Soekanto (1990: 67) menyatakan bahwa walaupun orang-orang yang bertemu di jalan tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi. Karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun syaraf orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau Keringat, minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semuanya itu menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan (Saptono dan Bambang, 2006: 67).

Para ahli jiwa sosial dalam meninjau individu dalam hubungannya dengan dunia sekitar, terutama ditekankan pada sikap terhadap perkembangan: misalnya bagaimana pengaru dunia sekitar terhadap perkembangn individu, pengaruh itu bersifat mutlak atau tidak. Maka timbullah anggapa bahwa manusia itu dalam hidupnya dan perkembangan pribadinya sema-mata ditentukan oleh dunia luar, dan bagi golongan ini pengaruh-pengaruh dari dalam (faktor keturunan) dianggapnya tidak ada. Misalnya, manusia yang bersifat sombong, egoistik, dan sebagainya itu semua adalah karena pengaruh sekitar. Aliran ini disebut Empirisme, dipelopori oleh john lock dengan teorinya tabula rasa (Abu Ahmadi, 2007: 50).

Proses terjadinya interaksi sosial yang dijelaskan Saptono dan Bambang (2006: 68) dalam bukunya "*Sosiologi*" bahwa Interaksi sosial terjadi karena adanya dua pihak yang saling kontak dan melakukan komunikasi. Secara harfiah, kontak berarti "bersama-sama menyentuh". Dalam sosiologi, istilah kontak di artikan sebagai "hubungan dengan orang lain".

Hubungan dengan orang lain dapat dilakukan dengan cara tatap muka (langsug), maupun melalui sarana penghubung atau perantara (tidak langsung). Oleh karena itu, kontak sosial juga dapat bersifat langsung (lewat tatap muka), maupun tak langsung dengan menggunakan alat penghubung/alat komunikasi.

Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Interaksi yang dilakukan secara berulang akan meng-hasilkan proses sosial. Proses sosial adalah perilaku berulang yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (interaksi sosial). Horton (1983: 74) menyebutkan 5 (lima) kemungkinan proses sosial, yaitu sebagai berikut.

a. Kerja Sama

   Kerja sama adalah usaha bersama antarmanusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan perkataan lain, Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial individu-individu atau kelompok-kelompok berusaha saling menolong untuk mencapai tujuan bersama atau mengoordinasikan kegiatan mereka guna mencapai tujuan bersama.

b. Persaingan atau Kompetisi

   Persaingan adalah usaha untuk melakuka sesuatu secara lebih baik dibanding orang atau kelompok lain dalam mencapai tujuan.

c. Konflik

   Konflik adalah proses di mana orang atau kelompok berusaha memperoleh sesuatu (imbalan tertentu) dengan cara melemahkan atau menghilangkan persaingan atau kompetitor lain, bukan hanya mencoba tampil lebih baik seperti dalam kompetisi.

d. Akomodasi

Akomodasi adalah proses mencapai persetujuan sementara di antara pihak-pihak yang sedang atau mempunyai potensi untuk berkonflik.

e. Asimilasi

Asimilasi adalah proses peleburan beberapa kebudayaan menjadi satu, hingga akar konflik yang bersumber pada perbedaan kebudayaan terapus.

Interaksi antara masyarakat etnis Bali dan Gorontalo yang berada di Desa Tri Rukun terjadi dalam 3 bentuk interaksi, yaitu sebagai berikut.

a. Interaksi dalam Bentuk Kerja Sama Antaretnis di Desa Tri Rukun

Dalam bentuk Kerja sama dibuktikan dengan dilaknakan kegiatan gotong royong, dan selain Kerja sama juga terjadi dalam bidang kebudayaan yaitu pada pembuatan sampai pawai *Ogoh-ogoh* ketika Nyepi, dan juga Kerja sama pembuatan *alikusu* ketika menyambut hari raya Idhul Fitri.

b. Interaksi dalam Bentuk Persaingan Positif antara Masyarakat Etnis yang Berada di Desa Tri Rukun

Interaksi dalam bentuk persaingan positif yaitu di Buktkan dengan adanya persaingan dalam perdagangan atau perekonomian.

c. Interaksi dalam Bentuk Konflik antara Masyarakat Etnis yang Berada di Desa Tri Rukun

Interaksi dalam bentuk konflik dibuktikan dengan adanya konflik antarsuku yang terjadi di Desa Tri Rukun, yaitu konflik pemuda dan konflik pihak keluarga antaragama yang disebabkan pernikahan pindah agama.

d. Interaksi dalam Bentuk Asimilasi Masyarakat Etnis yang Berada di Desa Tri Rukun

Interaksi dalam bentuk asimilasi dibuktikana dengan adanya pembauran antara suku dalam melaksanakan setiap kegaiatan yang menyangkut kebudayaan oleh setiap suku tersebut yaitu suku Bali dan Gorontalo. Selain interaksi dalam bentuk asimilasi, yaitu ditunjukkan dengan penolakan sebagian umat muslim dan hindu mengenai pernikahan yang mengharuskan terjadinya pindah agama.

Interaksi masyarakat Desa Tri Rukun dibuktikan dengan adanya berberapa bentuk interaksi yang terjadi antarsuku yang berada di Desa Tri Rukun, yaitu interkasi dalam bentuk kerja sama, interkasi dalam bentuk persaingan positif, interaksi dalam bentuk konflik antarsuku dan agama, interkasi dalam bentuk asimilasi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Masyarakat Etnis Gorontalo dalam Membagun Kerukunan dengan Etnis Bali di Desa Tri Rukun

Dalam daerah yang penduduknya heterogen, pasti terdapat berbagi macam hambatan serta tentang yang dihadapi seluruh masyarakat yang berada di dalam daerah tersebut. Salah satu hambatan yang terjadi di daerah yang penduduknya heterogen ialah hambatan karena perbedaan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Di antaranya adalah perbedaan dalam aspek kebudayaan, perbedaan dalam aspek, sosial, perbedaan dalam aspek ekonomi serta perbedaan etnis, suku dan ras. Semua perbedaan itu akan menjadi faktor penghambat masyarakat untuk melakukan interaksi dan pembauran. Namun, apabila perbedaan ini dikelola atau ditangani dengan penuh bijaksana maka akan tercipta masyarakat yang humanis.

Kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan dan saling menjaga satu sama lain. Maka dari itu setiap tanggal 3 Januari dinyatakan sebagai hari kerukunan nasional. Kata kerukunan berasal dari bahasa arab *Ruknun* (Rukun) kata jamaknya adalah *Arkan* yang berarti asas, dasar atau pondasi (arti generiknya).

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke ikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal Balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling memercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Teori Kerukunan sosial memandang keselarasan/ harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antarelemen masyarakat dan kulturnya. Setidaknya ada lima teori dasar berkaitan dengan Kerukunan (Turner, 1991: 234, dalam jurnal Muhammad Rais, 2012), yaitu sebagai berikut.

a. Teori Nilai

   Kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling menaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang di yakini dan di jalankan dalam masyarakat.

b. Teori Struktural

   Kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang menginteg-

rasikan masyarakat. Dengan kata lain Kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan.

c. Teori Idealis

Kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan.

d. Teori Resiprositas

Kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap.

e. Teori Interaksi

Kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antarkelompk, etnis, agama dll., dalam masyarakat yang saling menguntungkan, memberikan manfaat bagi masing-masing.

Teori di atas sesuai dengan kondisi masyarakat antaretnis Desa Tri Rukun. dalam teori nilai di Desa Tri Rukun yaitu dibuktikan dengan ketaatan masyarakat Bali dan Gorontalo dalam menjalankan kebudayaannya masing-masing. Pada teori struktural dibuktikan dengan adanya campur tangan pemerintah Desa dalam memanguk Kerja sama antara etnis Bali dan Gorontalo di Desa Tri Rukun, baik berupa motivasi dan nasihat-nasihat. Pada teori Idealis dibuktikan dengan adanya tujuan memdirikan Desa Tri Rukun yang awalnya masih bergabung dengan Desa Bongo Dua, kemudian teori resiprositas dan teori interaksi terbuktu dengan terjalinya kehidupan sosial yang humanis dan adanya interkaksi positif antara masyarakat etis Bali dan Gorontalo.

Selain dari teori di atas. Ada juga dua teori membentuk Kerukunan multietnis dan multikultural, yaitu teori *melting pot* dan *salad bowl.* Teori *melting pot* pada awalnya diwacanakan oleh J. Hektor seorang imigran dari normandia. Dalam teorinya dia menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu

budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui, bahwa monokultur mereka itu lebih di warnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestan* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal dari inggris yang Protestan (Dede Rosyada, 2014: 2).

Ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk maka teori melting pot kemudian mulai dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam Keragaman, teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi seBaliknya kultur-kultur lain di luar *White Angso Saxon Protentant* (WASP) diakomodasi dengan baik dan masing-masing memberi-kan kontribusi untuk membangun budaya Amerika, sebagai sebuah budaya nasional. Pada akhiranya, interaksi kultural antarberbagai etnik tetap masing-masing memer-lukan ruang gerak yang leluasa sehingga di kembangkan teori cultural pluralism, yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat, yang di dalamnya mereka mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa, (Dede Rosyada, 2014: 2).

Kerukunan antarmasyarakat etnis di Desa Tri Rukun terjadi sesuai dengan teori Kerukunan *salad bowl.* Karena proses akulturasi kebudayaan tidak pernah menghilangkan budaya lama masing-masing etnis, akan tetapi setiap etnis di Desa Tri Rukun di berikan ruang yang leluasa dalam mengembangkan kebudayaannya guna memberikan kotribusi di berbagai sektor,

terutama sektor kebudayaan itu sendiri, yaitu sebagai budaya Nasional.

3. Upaya Pemerintah Desa Tri Rukun dalam Membangun Kerukunan

Dalam pengertian sehari-hari kata Rukun dan Kerukununan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata Kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kerukunan ialah hidup damai dan tentram saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

Dalam mengupayakan kerukunan di Desa Tri Rukun merupakan kewajiban semua pihak yang berada di Desa Tri Rukun. Termasuk di dalamnya adalah peran dari masyarakat Tri Rukun itu sendiri. Akan tetapi untuk memperkuat Kerukunan di tengah-tengah masyarakat, sangat di butuhkan campur tangan dari pemerintah Desa untuk memperkokoh Kerukunan tersebut. Hal ini seperti yang di ungkapkan dalam teori Struktural bahwa Kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang

menginteg-rasikan masyarakat. Dengan kata lain, kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan. Teori di atas menyatakan, bahwa dalam membagun Kerukunan di suatu wilayah sangat di butuhkan intervensi pemerintah. Dalam hasil penelitian, upaya yang dilakukan pemerintah Desa Tri Rukun dalam membangun Kerukunan antara etnis Bali dan Gorontalo yang berada di Desa Tri Rukun, yaitu dengan cara memberikan motivasi serta arahan maupun pesan-pesan kepada masyarakat Desa Tri Rukun tentang pentingnya sikap saling menghormati dan saling memahani antara masyarakat etnis yang berada di Desa Tri Rukun. Selain dari hal tersebut pemerintah Desa Tri Rukun selalu mengajak masyarakat yang berada di Desa Tri Rukun untuk saling gotong royong dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap etnis yang berada di Desa Tri Rukun.

Selain dari pemerintah Desa. Di sisi lain para tokoh masyarakat dan tokoh agama ikut terlibat dalam menjaga kerukunan di Desa Tri Rukun, seperti pada agama Hindu yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh agama Hindu, bahwa pada agama hindu ada aturan khusus mengenai kerukunan yang berada di Desa Tri Rukun, jika terjadi permasalahan antara masyarakat hindu dengan muslim maka pihak dari agama hindu yang terlibat dalam permasalahan itu akan dikenakan sanksi dari Tokoh Agama Hindu. Kemudian dari pihak muslim jika terjadi permasalahan maka sebelum permasalah menjadi besar dan sampai pada pihak kepolisian maka tokoh masyarakat dari muslim akan segera malakukan atau mencari jalan alternatif untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.

Kerukunan masyarakat etnis yang berada di Desa Tri Rukun selama ini telah terbentuk secara alami. Artinya, masyarakat Desa Tri Rukun telah memahami keadaan mereka yang hidup beranekaragam dalam suatu wilayah sehingga dalam hal ini upaya merintah Desa Tri Rukun dalam mengupayakan kerukunan yaitu dengan cara melakukan

pembinaan kepada masyarakat secara intensif. Walaupun Kerukunan di Desa Tri Rukun telah terbentuk, pemerintah Desa Tri Rukun masih memiliki tantang maupun hambatan dalam menjaga Kerukunan tersebut, yaitu salaha satu adalah media sosial yang serba elektronik. Karena melalui media tersebut termasuk Facebook dll., bisa menyebabkan terjadinya potensi konflik, yaitu dengan postingan yang menyangkut diskriminasi ras, etnisitas maupun agama.

4. Ketahanan Wilayah Desa Tri Rukun

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47, atau lihat soemarsono dkk, 2001: 106).

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memerhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional (Soemarsono dkk., 2001: 106).

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa & negara. pada hakikatnya tannas adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya

menuju kejayaan bangsa & negara. untuk tetap memungkinkan berjalannya bangsa yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatans, tantangans, ancamans dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, perlu dipupuk terus.

Ketahanan wilayah merupakan bagian dari ketahanan nasional. Artinya, jika lemah ketahanan wilayah setiap daerah maka lemah pula ketahanan nasional suatu negara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan Indonesia sehingga dalam membangun ketahanan wilayah maka terlebih dahulu yang harus dibangun adalah ketahanan wilayah.

Ketahanan wilayah Desa Tri Rukun di tinjau dari enam pespektif yaitu perspektif ideologi, perpektif politik, perspektif ekonomi, perpektif sosial budaya, perspektif pertahanan dan keamanan wilayah. Ketahanan wilayah Desa Tri Rukun dalam perspektif ideologi menunjukkan bahwa perbedaan ideologi masyarakat yang berada di Desa Tri Rukun tidak pernah mejadi penghalang terjalinnya kerja sama antara masyarakat etnis, perbedaan ideologi tersebut pernah menjadikan Desa Tri Rukun pernah menyebabkan konflik antaragama. Namun, dengan perbedaan Ideologi itu juga memungkinan terjadinya proses akuturasi anara masyarakat Desa Tri Rukun.

Ketahanan wilayah Desa Tri Rukun dalam perspektif Politik menggambarkan kondisi masyarakat yang bisa saling menerima perbedaan antara masyarakat di Desa Tri Rukun. hal ini dibuktikan dengan tetap terjalinnya hubungan Kerja sama antara masyarakat etnis yang berada di Desa Tri Rukun. Selain hal tersebut perbedaan pandangan politik masyarakat yang

berada di Desa Tri Rukun tidak pernah menimbulkan persaingan maupun konflik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali pemilihan legislatif maupun kepala Desa yang selalu berjalan dengan aman. Dari hasil penelitian di Desa Tri Rukun bahwa Pemilihan Kepala Desa Tri Rukun dilaksanakan secara demokrasi, namun dalam hal tersebut tidak pernah terjadi politik etnis, tetapi masyarakat memilih sesuai kehendaknya sendiri tidak ada intervensi golongan etnis tertentu.

Dalam perspektif ekonomi, perbedaan etnisitas antara masyarakat etnis Bali dan Gorontalo di Desa Tri Rukun bukanlah penghalang terjalinnya Kerja sama masyarakat dalam bidang perekonomian. Hal ini dibuktikana dengan dibentuknya kelompok usaha bersama yang anggotanya adalah pembauran antara masyarakat etnis Bali dan Gorontalo. Dalam hal perdagangan, selama ini tidak pernah terjadi monopoli perdagangan hanya pada satu etnis, akan tetapi perdagangan antara masyarakat Desa Tri Rukun terjadi secara natural tidak ada intervensi dari kelompok-kelomok etnis sehingga di Tri Rukun selama tidak pernah terjadi persaingan negatif dalam perekonomian apalagi per-saingan hingga memicu terjadinya konflik, hal tersebut tidak perna terjadi di Desa Tri Rukun.

Dalam sosial budaya, perbedaan budaya masyarakat Etnis Bali dan Gorontalo yang berada di Desa Tri Rukun bukanlah penghambat terjalinya kerja sama antara kedua etnis tersebut. Antaretnis Bali dan Gorontalo di Desa Tri Rukun selama ini tidak pernah terjadi segala bentuk persaingan maupun konflik dalam bidang kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sikap saling membantu sesama etnis jika kelompok Bali memperingati hari-hari besar maka masyarakat Gorontalo akan membantu berupa menyediakan bahan-bahan yang digunakan dalam perayaan hari besar tersebut, dan begitupun sebaliknya sehingga perbedaan kebudayaan masyarakat Desa Tri Rukun

selama ini tidak pernah menyebabkan diskriminasi kebudayaan maupun sosial.

Ketahanan wilayah Tri Rukun dalam perspektif pertahanan dan keamanan wilayah Desa Tri Rukun dari ancaman maupun gangguan pihak luar terjalin dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama antara etnis Bali dan Gorontalo dalam memertahankan dan menjaga keamanan wilayah Desa Tri Rukun. dalam memertahankan dan menjaga keamanan wilayah Desa Tri Rukun dari gangguan maupun ancama pihak luar selama ini tidak pernah menyababkan persaingan antara kedua etnis tersebut, yaitu etnis Bali dan Gorontalo. Namun, dalam menjaga keamanan wilayah justru memperkuat Kerukunan antarkedua etnis tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya ronda malam yang setiap petugasnya diambil dari berbagi macam etnis yang berada di Desa Tri Rukun.

B. Interaksi Sosial antara Etnis Tionghoa dan Etnis Lokal di Daerah Kota Gorontalo

Untuk etnis Cina di daerah Kota Gorontalo kehidupan keselarasan sosial sebagai modal dalam membangun negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme dapat dilihat melalui hasil analisis lapangan Dalam kaitan dengan interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo, bila dikaitkan dengan teori yang ada dalam interaksi sosial, di mana interaksi sosial menghendaki adanya keharmonisan, namun interaksi sosial tidak lepas dari Indikator interaksi sosial di antaranya adalah kerja sama, kompotisi, akulturasi dan pertentangan. Bila dilihat dari aspek kerja sama interaksi sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis lokal sangat positip hal ini ditunjukan oleh jawaban responsden

dalam penelitian di mana kerja sama antaretnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo sangat positip.

Demikian halnya dengan indikator kompitisi, di mana dari hasil penelitian menunjukkan adanya kompetisi antaretnis tidak dapat dihindari. Namun, karena masyarakat Gorontalo memahami bahwa persaingan antaretnis tidak perlu dibesar-besarkan karena etnis apapun yang ada di daerah Gorontalo merupakan masyarakat Gorontalo yang diberi tanggung jawab bersama untuk membangun daerahnya.

Bila melihat kondisi daerah Gorontalo sebagai masyarakat majemuk dalam arti masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan Agama sudah saatnya memahami apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita tentang kearifan lokal. Di mana masyarakat Gorontalo dikenal dengan adat bersendikan syaraa, dan syaraa bersendikan kitabullah. Dengan kesadaran seperti ini ketika terjadi perbedaan paham pada masyarakat di daerah kota Gorontalo, tetap terjalin tidak dapat dipengaruhi oleh apapun yang menghendaki masyarakat di daerah kota Gorontalo terjadi konflik sebagaimana yang terjadi di daerah lain seperti Poso dan daerah Maluku.

Kompetisi yang muncul di dalam hasil penelitian di atas terungkap ada pada bidang usaha perdagangan, namun kedua etnis tersebut tetap menjalin hubungan harmonis tidak terpengaruh karena berpegang pada kearifan lokal tersebut. Di samping itu masyarakat daerah Gorontalo sampai dengan saat ini terlihat rukun sekalipun ada persaingan di dalamnya karena memang tradisi yang terbangun sejak lama rakyat daerah Gorontalo sangat menjunjung tinggi penghargaan pada yang namanya tamu atau pendatang di daerah. Sebagai tuan rumah diajarkan dalam agama yang dianut oleh penduduk asli Gorontalo muliakan tamunya, barang siapa yang memuliakan tamu maka balasannya adalah syurga. Dengan prinsip hidup seperti inilah maka memunculkan sikap toleransi antaretnis di

daerah kota Gorontalo. Hal ini ditunjukan oleh hasil penelitian di mana ada kompetisi tetapi sekalipun kompetisi itu ada masyarakat di daerah Kota Gorontalo tidak akan terjadi konflik yang sama dengan daerah lain sebagaimana yang disebutkan di atas. Inilah bentuk keunikan masyarakat daerah Kota Gorontalo yang sampai dengan saat ini masih terpelihara dan terjaga.

Bila dikaitkan dengan teori demokrasi, maka masyarakat di daerah kota Gorontalo sangat demokratis. Hal ini ditunjukan oleh sikap masyarakat Gorontalo yang terbuka menerima kehadiran dari berbagai etnis. Demikian juga dengan pemerintahan yang ada di daerah kota Gorontalo. Di mana pemerintah daerah Kota Gorontalo memperlakukan etnis diluar Gorontalo sama dengan etnis Gorontalo. Dengan prinsip demokrasi inilah yang sedikit membantu masyarakat daerah Gorontalo sampai dengan saat ini tidak terjadi konflik antaretnis.

Apa yang terjadi selama ini hubungan antaretnis di daerah Gorontalo dapat memengaruhi stabilitas daerah di mana salah satu potensi konflik adalah kegagalan daerah dalam mengelolah konflik antaretnis di daerah. Dengan jawaban hasil penelitian menunjukkan daerah Gorontalo sangat positip hubungan antaretnis yang saat ini telah terbangun.

Hal ini bila dikaitkan dengan perspektif ketahanan nasional sangat berpengaruh di mana apabila interaksi sosial di suatu daerah kuat, maka dampaknya pun pada kondisi ketahanan nasional suatu negara pun akan stabil. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan dasar dalam membentuk suatu kondisi ketahanan suatu Negara.

Dalam arti membangun ketahanan nasional suatu Negara pemerintah harus memperbaiki interaksi sosial di masing-masing wilayah. Dan pembentukan interaksi sosial dalam suatu negara yang kondisi negaranya heterogen (*multicultural*)

membutuhkan waktu yang cukup lama dan kerja yang serius dari pemerintah.

Harapan membangun ketahanan nasional yang stabil merupakan impian dari semua negara yang ada di dunia ini, karena kestabilan suatu negara akan menentukan keberlangsungan suatu negara itu. Dalam arti negara yang tidak mampu mewujudkan ketahanan nasionalnya akan menjurus kepada situasi pembubaran negara sebagaimana yang terjadi pada Negara Yugoslavia dan Negara Uni Soviet.

Dengan demikian, interaksi sosial dalam perspektif ketahanan nasional menjadi penting ditelaah semua pihak baik itu penyelenggara negara maupun kalangan akademisi. Bagi saya sebagai pemerhati sosial menjadi sangat penting ketika kita melihat di berbagai daerah di Indonesia banyak terjadi konflik. Ini membuktikan ada kegagalan pemerintah dalam mengelola Negara dengan melakukan pendekatan ketahanan nasional. Ketahanan nasional mengatakan apabila hubungan interaksi sosial baik, maka baiklah kehidupan masyarakat itu, apabila interaksi sosial antara pemerintah dengan rakyatnya tidak baik, maka yang akan terjadi adalah konflik.

Dengan demikian, interaksi sosial merupakan salah satu yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah dalam menata negara, apalagi negara multikultural atau heteroginitas, seperti Negara Indonesia. Bagi negara yang gagal membina interaksi sosial akan tererumus pada negara gagal *(Failed State)*. Keinginan masyarakat di Indonesia tidak berharap terjadinya hal itu. Oleh karena itu, pemerintah harus punya kemampuan managerial dalam mengelola negara multikulturalisme, seperti Negara Republik Indonesia.

Konsep ketahanan nasional dalam perspektif interaksi sosial dapat dilihat dari hubungan masyarakat dari aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan negara. Di mana apabila interaksi masyarakat dalam

beridiologi di masyarakat, berbangsa dan bernegara baik. Maka dari segi stabilitas idiologi sebagai dasar mengukur ketahanan nasional di bidang idiologi pun menjadi baik.

Demikian halnya dengan interaksi sosial di bidang politik, apabila masyarakat di suatu daerah memberikan kesempatan yang sama kepada etnis di setiap daerah, maka stabilitas politik yang menjadi standar penilaian ketahanan nasional di bidang politik pun dianggap berhasil artinya pencitraan suatu daerah atau negara akan dinilai berhasil. Jadi ukurannya kestabilan politik adalah semua warga Negara dengan tidak melihat etnik tertentu diikutkan dalam semua ipen politik di daerah/negara. Artinya, pemerintah jangan membatasi hak-hak politik bagi warga negara di daerahnya.

Selanjutnya, interaksi sosial di bidang ekonomi di mana masyarakat dalam suatu negara atau daerah harus diperlakukan sama oleh pemerintah dalam berusaha. Jangan sampai ada warga negara diperlakukan tidak adil hanya karena berbeda etnis dengan yang memerintah. Oleh karena itu, memahami interaksi sosial di bidang ekonomi sebenarnya makna yang dapat dipahami dalam konsep ini adalah perlakukan yang adil dalam melakukan usaha. Mengapa ini dijadikan dasar dalam menilai kestabilan suatu negara karena ekonomi menjadi potensi utama konflik di suatu negara.

Demikian halnya dengan pemahaman interaksi sosial di bidang sosial budaya dimaknai sebagai hubungan antara individu dengan individu, hubungan antara kelompok masyarakat dengan masyarakat yang ada di tempat tinggalnya demikian halnya dengan interaksi budaya. Di mana interaksi budaya sangat penting di antara warga negara karena terkadang terjadi konflik budaya di antara etnis tertentu misalnya pada acara budaya pemakaman, pernikahan. Artinya, kalau masing-masing etnis yang berbeda tidak saling memahami dan saling mempertahaankan ego kedaerahannya akan menimbulkan

konflik di antara kedua warga yang berbeda etnis tersebut. Oleh karena pemahaman interaksi budaya harus dimengerti sebagai upaya mencari persamaan bukan perbedaan di antara budaya tersebut. Memang budaya di setiap daerah berbeda satu sama lain, namun persamaan-nya adalah pada tujuan pelaksanaan budaya tersebut.

Terakhir, interaksi sosial di bidang keamanan dan pertahanan negara. Penilaian interaksi tersebut dapat dilihat melalui kemampuan masyarakat di suatu daerah dalam menjaga ketentraman di daerahnya khususnya disatu daerah yang memiliki variasi penduduk yang berbeda etnis. Hubungan yang terbangun antara etnis dapat memengaruhi stabilitas nasional suatu negara. Karena apabila di suatu daerah terjadi konflik maka dapat dikatakan keamanan nasional terganggu. Namun, kaitannya interaksi sosial di bidang pertahanan dapat dipahami sebagai kemampuan warga negara dan pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara. Di mana interaksi sosial di bidang pertahanan jangan dipahami sebagai perang dari negara lain. Akan tetapi, masalah pertahanan dapat dilihat dari semangat nasionalisme, artinya apabila ada warga negara dari etnis tertentu hanya merasa bagian dari etnisnya dan menganggap etnis lain bukan bagian dari kehidupannya, gejala seperti ini adalah merupakan ancaman pertahanan negara. Dengan demikian, interaksi pertahanan degara harus dapat dilihat seberapa besar kecintaan warga negara terhadap negaranya.

Berangkat dari perspektif ketahanan nasional di atas, bila dikaitkan dengan interaksi sosial antara etnis lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo sangat positif di mana kondisi idiologi masyarakat lokal dengan etnis Tionghoa di daerah kota Gorontalo tidak mengalami masalah. Hal ini ditunjukan dalam hasil penelitian. Di mana idiplogi dari kedua etnis bisa menemukan persamaan dalam kaitanya mereka melakukan interaksi. Artinya sampai dengan saat ini

masyarakat lokal meninkmati tradisi dari etnis Tionghoa demikian halnya etnis Tionghoa yang menghargai seluruh tradisi dari etnis lokal.

Di bidang politik etnis Tionghoa yang ada di Kota Gorontalo diberikan hak yang sama dalam kerelibatan untuk melakukan pilihan, baik pemilihan Presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif di daerah. Semua berjalan lancar tanpa ada konflik di antara etnis tersebut.

Demikian halnya dengan masalah ekonomi, di mana masyarakat etnis Tionghoa diberikan peluang yang sama dengan etnis lokal dalam berusaha di daerah Gorontalo. Dan bagi masyarakat lokal pun menghargai dan mendunkung semuaa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di daerah Gorontalo.

Di bidang sosial, masyarakat telah mengalami proses akulturasi dengan masyarakt etnis lokal, sekalipun ada hal-hal yang belum optimal dilaksanakan oleh etnis Tionghoa, namun semua dapat diatasi melalui hubungan kerja sama di bidang usaha, partisipasi dalam kegiatan tradisi masing-masing daerah. Dan yang paling terpenting adalah perlahan-lahan prose perkawinan antaretnis telah terjadi di daerah Gorontalo. Hal ini menunjukkan proses akulturasi sudah semakin baik.

Di bidang pertahanan kedua etnis telah berpartisipasi untuk menjaga stabilitas daerah. Di mana etnis Tionghoa telah berkontribusi memberikan peningkatan pada pendapatan asli daerah melalui kewajiban pajak kedaerah, demikian halnya dengan etnis lokal yang menjaga stabilitas dengan memberikan penghargaan pada etnis Tionghoa di daerah Gorontalo.

Demikian halnya dengan bidang keamanan, kefua etnis telaah memberian kontribusi yang positif dalam menjaga hubungan antar kedua etnis. Hal ini ditun jukan oleh hasil penelitian bahwa daerah Gorontalo konflik antara etnis tidak

terjadi. Mengapa itu terjadi karena terbbangunnya interaksi sosial yang baik aantara kedua etnis di daerah kota Gorontalo.

Demikianlah hubungan antara interaksi sosial dengan perspektif ketahanan nasional. Ketahanan nasional terwujud apabila ketahanan daerah tercipta, dan ketahanan daerah terwujud apabila masyarakat melakukan hubungan interaksi sosial dengan baik. Artinya memahami tentang pentingnya interaksi dalam kehidupan berdampingan antaretnis di daerah Gorontalo. Kegagalan membina hubungan harmonis disebabkan oleh karena kegagalan membangun interaksi sosial yang baik. Semua ini akan terwujd apabila terjadi sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membudayakan hubungan harmonis antara sesama warga masyarakat dengan menghilangkan perbedaan di segala bidang.

Dengan melihat interaksi sosial antara etnis Bali di Desa Tri Rukun kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Etnis Cina di Kota Gorontalo di atas dapat disimpulkan kedua etnis pendatang di daerah Provinsi Gorontalo dapat membangun *nation state* dengan model negara multikulturalisme, mengapa demikian karena kedua etnis ini tidak mengalami pengusiran oleh etnis lokal suku Gorontalo. Ini membuktikan masyarakat Gorontalo sangat menghormati kearifan lokalnya dengan falsafah daerahnya *"Adat bersendikan Syaraa dan Syaraa bersendikan Kitabullah"*. Artinya, etnis Gorontalo sangat menghargai pendatang yang datang di daerah ini karena masyarakat Gorontalo sangat menjujung tinggi nilai-nilai keagamaan khususnya Agama Islam yang menjadi keyakinan hampir 90% penduduknya beragama Islam.

Berangkat dari hasil penelitian di atas kedua etnis tersebut dapat melaksanakan interaksi sosial dengan baik di daerah ini, dengan modal sosial yang dilaksanakan dengan landasan bernegara Falsafah Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945

inilah, semua etnis dapat hidup berdampingan di daerah Provinsi Gorontalo.

Namun, semua yang terjadi di daerah Provinsi Gorontalo tidak serta merta hanya berasal dari kesadaran masyarakat Gorontalo. Kondisi yang tercipta hubungan harmonis antara kedua etnis, yakni etnis Bali dan etnis Cina tidak terlepas pula dari intervensi pemerintah daerah Gorontalo yang tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah Gorontalo agar tetap menghormati prinsip Bhihneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi menjun-jung nilai-nilai Pancasila dan intervensi pemerintah daerah Gorontalo, membangun negara multikuralisme tidak akan berjalan dengan baik sehingga dengan capaian ini masyarakat di daerah Gorontalo harus menjaga hubungan harmonis yang telah terbangun selama ini, supaya daerah kita tercinta Provinsi Gorontalo akan dapat dijadikan sebagai Pilot Projek dari *nattion state* dengan model negara multikulturalisme di Indonesia. Semoga harapan besar ini dapat kita pertahankan sampai di akhir zaman.

BAB XI

REKOMONDASI HASIL RISET DALAM MEMBANGUN *NATION STATE* DENGAN MODEL NEGARA MULTIKULTRALISME DI DAERAH PROVINSI GORONTALO

Negara multikuralisme sangat dicita-citakan oleh semua pihak di negeri yang kita cintai sebagaimana amanah dari *The Founding Fathers* yang bercita-cita membangun *nation state,* berangkat dari ide besar Soekarno inilah yang harus kita laksanakan dan lestarikan saat ini. Generasi mudah yang saat ini menikmati negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 secara *De fakto* dan secara *De jure* pada tanggal 18 Agustus 1945 dibangun atas komitmen negara multikulturalisme sehingga itu sudah menjadi kewajiban besar kepada kita generasi saat ini untuk membantu dan melestarikan amanah besar ini.

Sebenarnya generasi mudah saat ini tidak lagi diperhadapkan oleh inferealisme Barat secara fisik sebagaimana apa yang dialami generasi angkatan sebelumnya. Misalnya generasi angkatan sebelum pra kemerdekaan di era penjajahan Belanda dan Jepang, bahkan di era pemerintahan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapaihit pun bangsa Indonesia berusaha untuk membangun negara multikulturalisme. Namun, cita-cita tersebut gagal dibangun oleh generasi sebelumnya, karena fakta sejarah menunjukkan di era negara Indonesia I negara kerajaan kita gagal membangun negara multikulturalisme, kegagalan ini kita lihat keberhasilan penjajah

Belanda menggunakan strategi penguasaan negara melalui propoganda *devide et infera* strategi memecah belah kerajaan. Istilah itu dapat disamakan dengan istilah politik mutilasi bangsa dan akhirnya dua kerajaan besar itu sebagai awal cita-cita membangun negara multikulturalisme mengalami kegagalan. Di mana-mana kerajaan nusantara selalu diwarnai konflik dan akhirnya pemerintah kolonial Belanda bisa menguasai Indonesia dan bertahan tiga setengah abad atau 350 tahun berada menjajah Indonesia. Akibat penjajahan pemerintah kolonial bangsa Indonesia mengalami keterpurukan baik di bidang Sosial, Politik, ekonomi.

Penderitaan bangsa Indonesia tidak hanya berhenti sampai disitu, ketika Pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Republik ini dilanjutkan kembali oleh pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang masuk di Indonesia ketika Jepang berhasil mengalahkan pertempuran dengan tentara Sekutu. Penjajahan Jepang terhadap bangsa kita hanya berlaku singkat tetapi sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia, bila dilihat dari limit waktunya Jepang hanya dua tahun menduduki bangsa kita. Namun penderitaan rakyat lebih berat di mana penjajah Jepang memberlakukan kerja paksa (kerja rodi) bagi rakyat Indonesia untuk kepentingan penjajah Jepang.

Semua fakta sejarah yang terjadi di era pra kemerdekaan memberikan pelajaran kepada kita betapa mudahnya kita diadu domba dan dibujuk oleh penjajah yang ingin menguasai negara kita. Mudahnya penjajah memasuki negara kita menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menghargai pendatang. Namun, karakter sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia dimanfaatkan oleh negara penjajah untuk menguasai wilayah Indonesia.

Kearifan lokal yang sudah ada inilah menjadi modal dasar kita untuk membangun Indonesia tiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan Negara *Nation State*

dengan model negara multikuturalisme. Artinya kita sudah punya modal dasar untuk menjadi landasan membangun negara multikulturalisme. Berangkat dari pengalaman masa lalu seharusnya saat ini konflik antaretnis, konflik agama, konflik ras, konflik adat tidak terjadi. Bila ini terjadi lagi ini merupakan lanjutan dari imperealisme modern terhadap negara kita. Dan saya yakin dan percaya pemerintah Belanda dan Pemerintah Jepang atau negara asing lain yang ingin menguasai kekayaan Indonesia merasa *happy* bila bangsa kita yang telah resmi mendirikan negara pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Dapat saya katakan dari konflik ini ada yang menikmati fenomena tersebut. Yang paling berbahaya bila yang menikmati itu adalah sama-sama warga negara Indonesia dari oknum negara atau kelompok-kelompok yang menghendaki bangsa Indonesia mengalami disintegrasi hanya untuk kepentingan politik kekuasaan. Bila ini terjadi pada saat ini oknum pemerintah atau kelompok-kelompok yang menghendaki disintegrasi bangsa Indonesia, berarti sama dengan tabiat negara imperealisme sama halnya dengan slogan jeruk makan jeruk atau memakan bangkai saudaranya sendiri. Karakter Imperealisme oknum aparat Pemerintah atau kelompok-kelompok organisasi yang menghendaki disintegrasi bangsa demi untuk mencapai tujuan politik kekuasaan kita tidak menghendakinya. Akan tetapi, fakta menunjukkan hampir semua konflik yang terjadi di berbagai daerah ada dalangnya dan dalangnya ditengarai warga negara Indonesia yang kecewa akan kekuasaan. Mengapa saya katakan demikian setelah Orde Baru lengser, hampir semua daerah terjadi konflik. Baik itu konflik SARA maupun konflik ketidakadilan pemerintah pusat dalam mengelola hubungan antara pusat dan daerah.

Sebagai solusi dalam menyelesaikan kegagalan dalam membangun negara multikulturalisme sebagaimana yang kita alami sebelum kemerdekaan atau di era Orde lama, di era Orde Baru dan di era Reformasi adalah melaksanakan kembali konsep *Nation State* dengan model negara multikulturalisme, dan hal ini dapat kita lihat melalui hasil riset yang kita temukan di lokasi penelitian. Sekalipun ini baru berskala lokal, tetapi bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membangun daerah yang terdiri dari berbagai etnis. Saya melihat semua daerah dihuni oleh hampir semua etnik yang ada di Indonesia.

Untuk melihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah marilah kita menyimak dan menganalisis rekomondasi yang dihasilkan setelah hasil riset yang di dapatkan di dua daerah Provinsi Gorontalo.

1. Hubungan keharmonisan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali dalam mewujudkan negara multikulturalisme yang sudah pada posisi sangat tangguh dapat dipertahankan oleh warga masyarakat desa Tri Rukun dan pemerintah desa, serta harus menjadi perhatian pemerintah daerah kabupaten Boalemo bekerja sama dengan pemerintah kecamatan selalu mengawasi potensi yang akan menimbulkan gesekan sosial yang akan memengaruhi ketahanan wilayah di daerah kabupaten Boalemo melalui bentuk penerapan prinsip model negara multikul-turalisme.
2. Faktor-faktor penghambat dalam membangun keharmonisan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali demi mewujudkan negara multikulturalisme selalu diantisipasi pemerintah desa agar supaya cita-cita mewujudkan negara multikulturalisme dapat selalu dipertahankan oleh pemerintah Desa Tri Rukun.

3. Upaya dalam membangun keharmonisan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali demi mewujudkan negara multikulturalisme selalu dilaksanakan pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi melalui FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan melalui organisasi Karang Taruna, serta melalui kegiatan organisasi keagamaan bagi umat Hindu dilakukan melalui organisasi *Para Sade* dalam mengimplimentasikan prinsip-prinsip negara multikulturalisme dalam segala aktivitas sosial masyarakat Desa Tri Rukun selalu diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Keberhasilan dalam membangun negara multikulturalisme di desa Tri Rukun melalui bentuk kegiatan sosialisasi lewat FKUB, organisasi Karang Taruna dan organisasi keagamaan dijadikan program permanen dalam mewujudkan negara multikulturalisme di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
4. Implikasi dari cita-cita membangun keharmonisan antaretnis lokal Gorontalo dengan etnis Bali demi mewujudkan negara multikulturalisme terhadap ketahanan wilayah pada posisi sangat tangguh untuk dapat dijaga dan dipertahankan stabilitas keamanannya, agar supaya roda perekonomian di Desa Tri Rukun berjalan dengan baik.
5. Prinsip-prinsip negara multikulturalisme sikap egalitarian, sikap toleransi, sikap kerja sama, sikap otonom dan sikap akomodatif dapat dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan semua program pemerintahan di desa Tri Rukun. Supaya pemerintah desa Tri Rukun tidak akan mengalami turbolensi dalam menciptakan stabilitas desa yang akan berpengaruh kepada ketahanan wilayah. Bila mengabaikan prinsip-prinsip negara multikulturalisme

sudah dipastikan akan terjadi turbolensi dan akan menggangu ketahanan wilayah desa Tri Rukun.

6. Pemerintah daerah kebupaten Boalemo diharapkan untuk komitmen dalam menjalankan model negara multikulturalisme, mulai ketingkat pemerintahan Kecamatan sampai ketingkat pemerintahan desa sehingga dapat berimplikasi terhadap ketahanan desa di seluruh desa dilingkungan pemerintahan kabupaten Boalemo, yang natinya akan menjadi penentu bagi ketahanan wilayah pemerintah daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
7. Masih ada sebagian masyarakat etnis Tionghoa yang belum melakukan proses akulturasi dengan etnis lokal diharapkan etnis Tionghoa harus menunjukkan sikap akulturasi.
8. Masih ditemukan masyarakat etnis lokal yang tidak senang dengan kehadiran dari etnis Tionghoa, disebabkan karena keberhasilan usaha yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Kota Gorontalo. Harapannya masyarakat lokal harus lebih menerima dan belajar dari cara etnis Tionghoa dalam mengembangkan usaha agar supaya provinsi Gorontalo pertumbuhan ekonominya akan mengalami peningkatan.
9. Data hasil penelitian tentang interaksi sosial etnis Tionghoa dengan etnis lokal di daerah kota Gorontalo yang saat ini pada posisi yang sangat stabil diharapkan kondisi tersebut dapat dipelihara dan dipertahankan melalui upaya pemerintah daerah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi betapa pentingnya hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Demikian halnya pemerintah daerah kota Gorontalo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini tidak hanya bersikap parsial, namun dengan prinsip egaliter (egalitarian) memperlakukan semua warga masyarakat dengan adil tanpa

melihat dari mana asal warga masyarakatnya. Dengan sikap tersebut pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas daerah dan akan berimplikasi pada stabilitas nasional yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil rekomondasi terhadap hasil riset di dua daerah yang ada di Provinsi Gorontalo di kabupaten Boalemo di desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari dan di Kota Gorontalo tentang membangun negara multikulturalisme akan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan pemerintah dalam mencarikan solusi bangsa menghadapi gejala disintegrasi bangsa, seperti konflik etnis, konflik ras, konflik agama, konflik adat istiadat dan konflik antara pusat dan daerah. Semua ini terjadi karena pemerintah pusat masih mencari pola yang tepat dalam mengelola negara dengan kondisi heterogen, di mana negara kita terdiri dari berbagai etnis, berbagai ras, berbagai agama dan adat Istiadat bahkan rakyat Indonesia terdiri dari multibangsa seperti yang ada di negara Amerika Serikat. Warga negaranya ada juga dari bangsa *Chines,* bangsa Arab dan bahkan bangsa Eropa yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Di negara Amerika serikat dengan kondisi multibangsa mengambil pilihan bentuk negara Republik dengan sistem pemerintahan federalisme dan strategi membangun negaranya dengan model negara multikulturalisme sehingga negara tersebut dikenal dengan negara demokrasi.

Model membangun negara Amerika Serikat dalam memertahankan kedaulatannya sangat baik untuk dijadikan sebagai refrensi dalam membangun negara multikulturalisme. Namun, bagi pemerintah Indonesia punya karakter berbeda dengan kultur rakyat Amerika Serikat yang memiliki ideologi leberal, rakyat atau bangsa Indonesia berbeda dengan rakyat Amerika dari segi tradisi. Dapat dikatakan tradisi Barat dan Timur tidak dapat disamakan dalam membangun negara

multikulturalisme. Apalagi rakyat Indonesia yang sangat relegius sehingga *The Founding Fathers* kita memilih dasar negara sebagai hasil konsensus bersama adalah Pancasila. Makna yang didapat dari pilihan konsensus tersebut adalah karena negara kita menghargai setiap warga negaranya men-jalankan agama dan keyakinannya, negara menghormati hak asasi manusia setiap warga negaranya. Negara ingin mewujudkan negara multikulturalisme dengan dasar persatuan dan kesatuan warganya, negara melaksanakan musyawarah bersama dalam menentukan keputusan politik negara dan negara harus memberikan keadilan bagi kesejahteraan warga negaranya. Inilah pola yang digunakan negara kita dalam mewujudkan konsep bernegara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme sehingga dapat disimpulkan pemerintah Indonesia sebenarnya punya pola yang lebih sempurna dengan negara liberal seperti negara Amerika Serikat.

Belajar dari permasalahan dan hasil kajian di atas, sudah saatnya rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan negara multikulturalisme mengembangkan pola-pola kearifan lokal yang ada di negara kita sebagaimana yang ada pada nilai-nilai dasar negara Pancasila dan UUD NRI 1945, semboyan Bhineka Tunggal Ika, negara Kesatuan (NKRI) yang berbentuk Republik dan sistem pemerintahan Presidensial, hubungan pusat dan daerah dikelola secara desentralisasi sebagai dasar berpijak dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme persi bangsa dan negara Indonesia sendiri.

Bisa kita menggunakan refrensi lain dari model negara Amerika Serikat misalnya politik demokrasi pemilihan presiden secara langsung, tetapi sifatnya hanya melengkapi model membangun negara multikulturalisme yang sudah ada di masyarakat kita berasal dari ide para *The Founding Fathers* (Pemikiran Soekarno, Mr. Mohamad Yamin, Supomo, anggota

BPUPKI dan anggota PPKI) tetapi yang harus kita prioritaskan adalah kearifan lokal yang ada di setiap etnis yang ada di negara kita. Semua sifat kearifan lokal tersebut telah tertuang pada dasar negara kita Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia serta dioperasionalkan dalam konstitusi UUD NRI 1945.

Demikianlah pola dan model yang dapat kita jadikan dasar dalam membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme di Indonesia bersumber dari hasil riset di Provinsi Gorontalo maupun telaah-telaah dari berbagai konsep dan pengalaman bangsa Indonesia dalam mewujudkan *Nation State* dengan model negara multikulturalisme dalam buku ini.

Semoga kajian ilmiah ini dapat menjadi refrensi kita dalam menjaga keutuhan wilayah khususnya daerah Provinsi Gorontalo yang sampai dengan saat ini masih terjaga dalam memertahankan negara multikulturalisme. Hal ini dapat dilihat dari hasil riset yang menunjukkan daerah Provinsi Gorontalo tidak terjadi konflik horizontal maupun vertikal seperti konflik antara etnis, konflik antara ras, konflik antaragama, dan konflik antarbudaya dalam mengelola daerahnya di dalam mewujudkan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme.

Daftar Pustaka

"Konsepsional". *Jurnal Sosio Didaktika* (download.portalgaruda.org> article.).

Ahmadi, Abu. (2007). *Psikologi Sosial.* Jakarta: Rineka Cipta.

Antropologi Sosial Budaya. (t.t). (repository.usu.ac.id>bitstream> handle).

Darojah, Nurutami. "Bertoleransi" https//nurutamidarijah. wordpress.com/sesi-2/bab-2-bertoleransi-dalam.

Durri, Andriani, dkk. (2013). *Metode Penelitian.* Banten: Universitas Terbuka.

Gaus, Gerald F., dan Kukathas, Chandran. (2013). *Handbook Teori Politik*. Bandung.

Gerungan. (2004). *Psikologi Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

Harahap, Ahmad Rivai. (2006). "Multikulturalisme salam Bidang Sosial". *Jurnal*.

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-kerukunan.html.

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-kerukunan.html.

http://www.scribd.com/doc/34826071/46/B-jenis-hubungan-sosial.

https//brainly.co.id tugas.

https//brainly.co.id).

https//dosen sosiologi.com.

https://karyatulisilmiah.com/relasi-sosial/

Ivan, A. Hadar. (2000). "Etnisitas dan Negara Bangsa". *Kompas*.

Jurnal Sosio *Didaktika*. (Journal.uinjkt.ac.id>article>download) diakses Sabtu 26 mei 2018 pukul 22:13

Koentjaranigrat. (1982). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Kusrahmadi, Sigit Dwi. (t.t). "Ketahanan Nasional". *Jurnal*.

Labodu, Ramlah A. (2015). "Perkawinan Antaretnik". *Skripsi*. Gorontalo: UNG FIS.

Lukum, Roni. (2010). *Pendapat Masyarakat terhadap Pembagunan Manusia di Kabupaten Bone Bolango dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah*. Gorontalo: UNG.

Payung Bangun. (1998). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI.

Rais, Muhammad. (2012). *Indeks Kerukunan Antarumat Beragama di Kalimantan*.

Rosyada, Dede. (2014). *Pendidikan Multikultural di Indonesia: Sebuah Pandangan*.
Sabtono, Petrus Haryo. (t.t). *Persepsi Bali dalam Kolonialisme*. Denpasar.
Saebein, Beni Aahmad. (2015). *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Bandung: Pusataka Setia.
Sapeni, Nur Anissa. (2015). "Solidaritas Sosial Antaretnis". *Skripsi*. Universitas Nusa Media.
Saptono, dan Sutang S. Bambang. (2006). *Sosiologi untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Phibeta Aneka Gama.
Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Sukardi, Tanto. (2014). "Mencari Format Baru Pendidikan Multikultural di Indonesia Timur". *Jurnal Analisis*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
Sunoyo, Ariyuno. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Antropologi Press.

Biografi Penulis

Roni Lukum, S.Pd., M.Sc., menyelesaikan pendidikan S-1 di STKIP Gorontalo Prodi PPKn, kemudian penulis melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada, Ketahanan Nasional.

Penulis pernah menulis buku *Membangun Multikulturalisme di Daerah Kabupaten Pohuwato di Desa Banuroja Kecamatan Randangan* pada tahun 2015 dan buku *Radikalisme di Kalangan Generasi Muda di Provinsi Gorontalo* pada tahun 2019.

Di samping itu, penulis melakukan beberapa penelitian, yaitu masih dalam kajian multikulturalisme tentang interaksi sosial antaretnis Arab dengan etnis lokal Gorontalo di Kota Gorontalo pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 kembali menulis hasil riset tentang membangun hubungan harmonis antar etnis Lokal Gorontalo dengan etnis China di Kota Gorontalo.